



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2021**



PROVINSI ACEH

**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan, serta sinergitas dengan capaian program pembangunan Kabupaten Nagan Raya, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1444);
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
12. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) RPJMK Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Nagan Raya;
BAB III	:	Gambaran Keuangan Kabupaten Nagan Raya;
BAB IV	:	Permasalahan dan Isu Strategis;
BAB V	:	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
BAB VI	:	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
BAB VII	:	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya;
BAB VIII	:	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
BAB IX	:	Penutup.

(2) Ketentuan dalam Lampiran Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 1 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
 Pada tanggal 9 April 2021 M
26 Sya'ban 1442 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
 Pada tanggal 12 April 2021 M
29 Sya'ban 1442 H

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN NAGAN RAYA,**

ARDIMARTHA

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR : 1
 NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (1/52/2021);

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005- 2025 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kabupaten Nagan Raya. Selain visi dan misi, RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. RPJMD selanjutnya digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;
2. Ditetapkannya Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang juga mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan;
3. Adanya penambahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yaitu Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Tahun 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya, sehingga terjadi perubahan program-program pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru; dan
4. telah terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 perlu diubah dengan Qanun dan selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dijabarkan lebih lanjut dalam RKPK sebagai dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun 2021-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR:

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i-1
DAFTAR TABEL	i-5
DAFTAR GAMBAR	i-16
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-4
1.3. Hubungan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .	I-8
1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMK Kabupaten Nagan Raya Dengan RPJMN dan RPJM Aceh	I-9
1.3.2. Hubungan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Dengan RPJPK, RKPK, Renstra-PK Dan Renja-PK	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Penulisan	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Aspek Geografi dan DemografiII-1	
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi.....	II-2
2.1.1.3. Topografi	II-2
2.1.1.4. Geologi	II-3
2.1.1.5. Hidrologi	II-3
2.1.1.6. Klimatologi	II-5
2.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-6
2.1.2. Demografi	II-8
2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana	II-11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-13
2.2.1.2. Pendapatan per Kapita.....	II-17
2.2.1.3. Angka Inflasi	II-18
2.2.1.4. Kemiskinan	II-19
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-22
2.2.2.1. Angka Melek Huruf	II-22
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	II-24
2.2.3. Fokus Seni Budaya Dan Olah Raga.....	II-26
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-26
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan.....	II-26
2.3.1.1. Pelaksanaan Syariat Islam dan	

Pendidikan Islami	II-26
2.3.1.2. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Perwalian (Ziwaf dan Perwalian) Dan Harta Agama Lainnya.....	II-29
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib	II-29
2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar.....	II-29
2.3.2.1.1. Pendidikan.....	II-29
2.3.2.1.2. Kesehatan	II-43
2.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-67
2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	II-73
2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-75
2.3.2.1.6. Sosial	II-76
2.3.2.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar	II-78
2.3.2.2.1. Ketenagakerjaan	II-77
2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-79
2.3.2.2.3. Pangan.....	II-86
2.3.2.2.4. Pertanahan	II-86
2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup	II-88
2.3.2.2.6. Perhubungan	II-88
2.3.2.2.7. Komunikasi dan Informatika.....	II-90
2.3.2.2.8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-91
2.3.2.2.9. Penanaman Modal.....	II-95
2.3.2.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga	II-97
2.3.2.2.11. Kebudayaan	II-99
2.3.2.2.12. Perpustakaan	II-100
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-101
2.3.3.1. Pariwisata	II-101
2.3.3.2. Pertanian	II-103
2.3.3.3. Perkebunan.....	II-107
2.3.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II-112
2.3.3.5. Perdagangan.....	II-113
2.3.3.6. Perindustrian.....	II-114
2.3.3.7. Transmigrasi	II-115
2.3.3.8. Kelautan dan Perikanan	II-117
2.3.4. Penunjang Urusan	II-125
2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan	II-126
2.3.4.2. Keuangan.....	II-126
2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-127
2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan.....	II-128

2.3.4.5. Pengawasan.....	II-128
2.3.4.6. Sekretariat Dewan	II-129
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-129
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-129
2.4.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita	II-129
2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita.....	II-130
2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur	II-131
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-133
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-142
BAB III GAMBARAN KEUANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA	III-1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBK	III-4
3.1.1.1. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya	III-11
3.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-15
3.1.1.1.2. Dana Perimbangan	III-21
3.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang Sah.....	III-24
3.1.1.2. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya	III-25
3.1.1.2.1. Belanja Tidak Langsung	III-26
3.1.1.2.2. Belanja Langsung	III-30
3.1.1.3. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya	III-31
3.1.2. Neraca Kabupaten Nagan Raya	III-33
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-45
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-48
3.2.2. Analisis Pembiayaan.....	III-53
3.3. Kerangka Pendanaan	III-58
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-58
3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan.....	III-58
3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah.....	III-60
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.....	IV-1
4.1.1. Permasalahan Pembangunan.....	IV-2
4.1.1.1. Penerapan dan Pengamalan Syariat Islam	IV-2
4.1.1.2. Reformasi Birokrasi, Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat dan Pemerintahan Desa	IV-3
4.1.1.3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Kearifan Lokal, Industri dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	IV-3

4.1.1.4. Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga.....	IV-4
4.1.1.5. Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-4
4.1.1.6. Kesehatan	IV-5
4.1.1.7. Pembangunan Infrastruktur, Pemukiman, Tata Ruang, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Transmigrasi	IV-6
4.2. Isu-Isu Strategis.....	IV-7
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
5.1. Visi Dan Misi	V-1
5.1.1. Visi	V-1
5.1.2. Misi.....	V-3
5.2. Tujuan Dan Sasaran	V-7
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1
9.1 Pedoman Transisi.....	IX-2
9.2 Kaidah Pelaksanaan	IX-3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1: Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya	II-4
Tabel 2.2: Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya	II-5
Tabel 2.3: Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban Tahun 2019	II-5
Tabel 2.4: Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya.....	II-7
Tabel 2.5: Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2014-2019	II-8
Tabel 2.6: Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kecamatan Tahun 2014-2019.....	II-9
Tabel 2.7: Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya.....	II-10
Tabel 2.8: Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya	II-17
Tabel 2.9: Jumlah penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dari Tahun 2012-2016	II-27
Tabel 2.10: Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya Dari Tahun 2012-2016.....	II-28
Tabel 2.11: Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah Kabupaten Raya Tahun 2012-2020	II-30
Tabel 2.12: Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-31
Tabel 2.13: Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2014-2019 (persen)	II-32
Tabel 2.14: Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2014-2019.....	II-36
Tabel 2.15: Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 (%).....	II-39
Tabel 2.16: Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 (unit)	II-40

Tabel 2.17:	Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019 (orang)	II-40
Tabel 2.18:	Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019.....	II-41
Tabel 2.19:	Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2019	II-42
Tabel 2.20:	Perkembangan Rasio Guru-Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2019.....	II-42
Tabel 2.21:	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019	II-43
Tabel 2.22:	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2014 – 2019.....	II-45
Tabel 2.23:	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2012-2020	II-46
Tabel 2.24:	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2014 – 2019.....	II-47
Tabel 2.25:	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2020.....	II-48
Tabel 2.26:	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020.....	II-49
Tabel 2.27:	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-50
Tabel 2.28:	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-52
Tabel 2.29:	Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-53
Tabel 2.30:	Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-54
Tabel 2.31:	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 - 2019.....	II-55
Tabel 2.32:	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-56

Tabel 2.33: Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-56
Tabel 2.34: Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-57
Tabel 2.35: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-58
Tabel 2.36: Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk) Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-59
Tabel 2.37: Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Tahun 2012 – 2019.....	II-59
Tabel 2.38: Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-60
Tabel 2.39: Penderita Tuberkulosis Paru BTA Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019	II-61
Tabel 2.40: Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019	II-62
Tabel 2.41: Angka Kejadian Malaria Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-63
Tabel 2.42: Cakupan Kunjungan Bayi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-62
Tabel 2.43: Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020	II-65
Tabel 2.44: Data Kasus Covid-19 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	II-67
Tabel 2.45: Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 (Km)	II-68
Tabel 2.46: Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (m) Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019.....	II-68
Tabel 2.47: Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2019.....	II-69
Tabel 2.48: Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan	

	Sanitasi Layak Kabupaten Nagan Raya (persen) Tahun 2013-2019.....	II-70
Tabel 2.49:	Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020	II-70
Tabel 2.50:	Rasio Jaringan Irigasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 - 2019	II-72
Tabel 2.51:	Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 - 2019	II-72
Tabel 2.52:	Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016.....	II-73
Tabel 2.53:	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-74
Tabel 2.54:	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014.....	II-74
Tabel 2.55:	Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	II-75
Tabel 2.56:	Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2020	II-76
Tabel 2.57:	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020.....	II-77
Tabel 2.58:	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015- 2020.....	II-81
Tabel 2.59:	Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPRK Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2020.....	II-81
Tabel 2.60:	Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020.....	II-82
Tabel 2.61:	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013- 2019	II-83
Tabel 2.62:	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	II-85
Tabel 2.63:	Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2019	II-86

Tabel 2.64:	Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-86
Tabel 2.65:	Timbulan sampah yang ditangani Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2019	II-88
Tabel 2.66:	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-89
Tabel 2.67:	Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2020.....	II-90
Tabel 2.68:	Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2016 (Unit).....	II-91
Tabel 2.69:	Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2017 (Unit).....	II-92
Tabel 2.70:	Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2018 (Unit).....	II-92
Tabel 2.71:	Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2019 (Unit).....	II-93
Tabel 2.72:	Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020	II-94
Tabel 2.73:	Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2020	II-95
Tabel 2.74:	Pertumbuhan Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2013-2020.....	II-96
Tabel 2.75:	Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2013-2020.....	II-97
Tabel 2.76:	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016.....	II-98
Tabel 2.77:	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-99
Tabel 2.78:	Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 (Unit).....	II-101
Tabel 2.79:	Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020.....	II-101
Tabel 2.80:	Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten	

Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-103
Tabel 2.81: Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2019 (Persen)	II-104
Tabel 2.82: Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-105
Tabel 2.83: Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020.....	II-106
Tabel 2.84: Perkembangan Populasi Ternak Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 (Ekor)	II-106
Tabel 2.85: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012 – 2019	II-108
Tabel 2.86: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019	II-109
Tabel 2.87: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kakao di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020	II-110
Tabel 2.88: Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012 – 2020	II-111
Tabel 2.89: Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020	II-112
Tabel 2.90: Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2020.....	II-116
Tabel 2.91: Jumlah Transmigrasi Lokal Tahun 2012-2016	II-116
Tabel 2.92: Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut Di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2019.....	II-117
Tabel 2.93: Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019	II-118
Tabel 2.94: Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020	II-118
Tabel 2.95: Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten	

Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-119
Tabel 2.96: Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019.....	II-120
Tabel 2.97: Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020.....	II-121
Tabel 2.98: Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2020.....	II-122
Tabel 2.99: Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya, 2020	II-123
Tabel 2.100: Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-124
Tabel 2.101: Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019	II-125
Tabel 2.102: Jumlah Bongkar Muat Barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2012-2020.....	II-132
Tabel 2.103: Jumlah Penumpang Melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien Tahun 2017-2019.....	II-133
Tabel 2.104: Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-133
Tabel 2.105: Rincian Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020	II-134
Tabel 2.106: Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya.....	II-140
Tabel 2.107: Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019 (%).....	II-144

Tabel 3.1:	Laju Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya	III-8
Tabel 3.2:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019..	III-13
Tabel 3.3:	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019.....	III-15
Tabel 3.4:	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2019	III-17
Tabel 3.5:	Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah.....	III-17
Tabel 3.6:	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015-2019	III-19
Tabel 3.7:	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015-2019	III-20
Tabel 3.8:	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun 2015-2019	III-21
Tabel 3.9:	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2015-2019.....	III-22
Tabel 3.10:	Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2019	III-23
Tabel 3.11:	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015-2019.....	III-24
Tabel 3.12:	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2015-2019	III-25
Tabel 3.13:	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015-2019	III-26
Tabel 3.14:	Anggaran dan Realisasi OTSUS Tahun 2015-2019.....	III-27
Tabel 3.15:	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2015-2019.....	III-28
Tabel 3.16:	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019	III-29
Tabel 3.17:	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015-2019	III-30

Tabel 3.18: Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019.....	III-31
Tabel 3.19: Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2019	III-32
Tabel 3.20: Anggaran dan Realisasi Total Belanja Langsung Tahun 2015-2019.....	III-35
Tabel 3.21: Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019	III-37
Tabel 3.22: Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015-2019.....	III-37
Tabel 3.23: Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019	III-38
Tabel 3.24: Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019.....	III-40
Tabel 3.25: Realisasi Aset Tahun 2015-2019	III-44
Tabel 3.26: Realisasi dan Pertumbuhan Aset Tahun 2015-2019.....	III-45
Tabel 3.27: Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019	III-47
Tabel 3.28: Analisis Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Tahun 2015-2019	III-54
Tabel 3.29: Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2019.....	III-55
Tabel 3.30: Analisis Realisasi Proporsi Dana Pendidikan Tahun 2015-2019	III-56
Tabel 3.31: Analisis Realisasi Proporsi Dana Kesehatan Tahun 2015-2019	III-57
Tabel 3.32: Proporsi Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2015-2019	III-57
Tabel 3.33: Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019	III-60
Tabel 3.34: Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019	III-64

Tabel 3.35: Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	III-71
Tabel 3.36: Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	III-78
Tabel 3.37: Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022	III-74
Tabel 3.38: Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022.....	III-79
Tabel 3.39: Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022.....	III-80
Tabel 3.40: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.....	III-81
Tabel 3.41: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022 ...	III-82
Tabel 3.42: Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022	III-84
Tabel 5.1: Perumusan Penjelasan Visi	V-2
Tabel 5.2: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.....	V-8
Tabel 6.1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategis Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022.....	VI-2
Tabel 6.2: Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022	VI-6
Tabel 6.3: Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022	VI-12
Tabel 6.4 Pogram Prioritas Kabupaten Nagan Raya Yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2020 Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006	VI-13
Tabel 6.5 Pogram Prioritas Kabupaten Nagan Raya Yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2022 Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019	VI-40

Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020.....	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022.....	VII-3
Tabel 7.3	Pogram Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2020 Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006	VII-4
Tabel 7.4	Pogram Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2022 Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019	VII-25
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Kinerja Indikator Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.....	VII-3

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1: Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya	II-1
Gambar 2.2: Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya	II-6
Gambar 2.3: Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya	II-11
Gambar 2.4: Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya.....	II-13
Gambar 2.5: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah) 2014-2019	II-14
Gambar 2.6: PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya (Triliun Rupiah), 2012- 2020*	II-15
Gambar 2.7: Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen), 2019.....	II-16
Gambar 2.8: PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), Tahun 2012-2019	II-18
Gambar 2.9: Angka Inflasi Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah), 2012 – 2019.....	II-19
Gambar 2.10: Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013 – 2019.....	II-20
Gambar 2.11: Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013 – 2019.....	II-20
Gambar 2.12: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-21
Gambar 2.13: Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019.....	II-22
Gambar 2.14: Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012–2019	II-23
Gambar 2.15: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012 - 2019 (%)	II-25
Gambar 2.16: Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012 - 2016 (%).....	II-38

Gambar 2.17:	Perkembangan TPAK dan TPT Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 (persen).....	II-78
Gambar 2.18:	Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.....	II-79
Gambar 2.19:	Grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 – 2018	II-80
Gambar 2.20:	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2012 – 2016.....	II-84
Gambar 2.21:	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2015 - 2019	II-113
Gambar 2.22:	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan (persen), 2015 - 2019.....	II-114
Gambar 2.23:	Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016	II-120
Gambar 2.24:	Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016 (ton).....	II-121
Gambar 2.25:	Nilai Komponen Konsumsi Rumah tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah).....	II-130
Gambar 2.26:	Komposisi Konsumsi Makanan, Non Makanan, dan Pengeluaran Per kapita per bulan Tahun 2015-2019 (%)	II-131

Gambar 3.1:	Realisasi APBK Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah).....	III-12
Gambar 3.2:	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah).....	III-14
Gambar 3.3:	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (dalam Persentase).....	III-16
Gambar 3.4:	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2019...	III-18
Gambar 3.5:	Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2019.....	III-23
Gambar 3.6:	Realisasi Aset Tahun 2015-2019	III-44
Gambar 3.7:	Proporsi realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)	III-55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 dengan memperhatikan RPJM Aceh 2017-2022 dan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 serta mempedomani RPJMN 2020-2024.

RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 merupakan perumusan visi dan misi pembangunan yang menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat Kabupaten Nagan Raya atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Kabupaten Nagan Raya. RPJM Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 selanjutnya diacu oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Nagan Raya sesuai tugas Pokok dan Fungsinya yang dituangkan dalam dokumen RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah.

Dokumen RPJM diharapkan secara umum mampu menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya. Dokumen RPJM selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 3 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karenanya RPJM Kabupaten Nagan Raya dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Nagan Raya yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nagan Raya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 disusun dengan mengacu antara lain pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan episentrum Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan kontraksi di berbagai aspek. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman yang sangat membahayakan, bukan hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga di bidang perekonomian, membuat situasi ekonomi semakin memburuk dan mengganggu stabilitas sistem keuangan yang memberikan pengaruh serta berdampak besar terhadap perlambatan pertumbuhan perekonomian, kinerja keuangan dan kinerja Pemerintah, termasuk Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, dapat dilaporkan jumlah kasus Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 154 kasus (17 orang meninggal, 136 sembuh dan 1 orang masih dalam pengawasan). Oleh karena itu, sebagai respon atas pandemi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengisnisi perubahan kebijakan jangka menengah dalam rangka upaya pemulihan dan pemantapan pembangunan pasca pandemi menuju kehidupan baru (new normal).

Perubahan RPJMK ini juga dilatarbelakangi oleh perubahan struktur dan kontraksi APBK, perlambatan ekonomi dan penurunan Pendapatan Asli Kabupaten, Penyesuaian Belanja Kabupaten, serta upaya adaptasi dengan kondisi pandemi sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi RPJM Tahun 2017-2022. Selain itu, dengan terbitnya RPJMN 2020-2024 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka perlu dilakukan *updating* mulai dari struktur program hingga tataran kegiatan.

Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya ini dilakukan menindaklanjuti Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar, yaitu bencana, krisis ekonomi, atau perubahan kebijakan nasional.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022, diantaranya adalah :

1. Perubahan secara umum yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran tahun 2020 untuk pemenuhan kebutuhan penanganan covid-19 meliputi kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan operasional gugus tugas;
2. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 dengan Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;
3. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang juga mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan.
4. Penambahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yaitu Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
5. Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022, ditemukan hal berikut ini;

- a. Bahwa Realisasi keuangan daerah Kabupaten Nagan Raya 2018-2019 yang memberikan gambaran kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2018–2019, masih terjadinya ketimpangan realisasi dengan target yang direncanakan, realisasi lebih rendah atau tidak tercapai serta perlu upaya kembali untuk mencapai.
- b. Status hasil pencapaian indikator misi, tujuan dan sasaran pada misi 1 sampai misi 7, menunjukkan ada indikator yang terealisasi dengan baik, namun banyak juga indikator yang masih harus diupayakan pencapaiannya yang belum sesuai dengan target, juga masih ada yang kurang tersedianya data
- c. Status capaian kinerja program menunjukkan hasil positif, atau dengan kata lain diprediksikan target program pada Aspek Kesejahteraan, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing daerah, beberapa indikator sudah tercapai dengan bagus, namun beberapa indikator realisasinya banyak yang jauh dari capaian target
- d. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya ada yang sudah tercapai target, ada yang belum tercapai sesuai dengan target, dan ada juga yang tidak tersedia data pendukung.

Hasil evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 tersebut merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut ;

- a. Penyesuaian dan pemutakhiran data dan informasi, baik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun SKPK dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- b. Data dan informasi yang disajikan perlu penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan terbaru ;
- c. Penyesuaian terhadap proyeksi keuangan dan target indikator kinerja pembangunan baik Indikator Kinerja Daerah maupun Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan ril keuangan daerah

Berdasarkan beberapa hal yang tersebut diatas, maka menjadi pertimbangan untuk penyusunan perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Sedangkan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana tertuang pada pasal 41 sampai pasal 70 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, berlaku mutatis dan mutandis terhadap penyusunan perubahan RPJMD. Sehingga proses penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ini berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, disusun melalui enam tahapan, yaitu:

- a. Persiapan penyusunan RPJMD;
- b. Penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. Penyusunan rancangan RPJMD;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
- e. Perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
- f. Penetapan RPJMD.

Berbagai poin-poin sebagaimana uraian di atas, mendasari penyusunan dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 yang dianggap penting untuk segera ditindaklanjuti diantaranya, menjadi pedoman/acuan Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Perangkat Daerah menjabarkan rencana teknis operasional setiap urusan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022, selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan dan disusun setiap tahun. Dokumen RKPK memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPK, setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah inilah yang menjadi acuan teknis pelaksanaan program/kegiatan tahunan Perangkat Daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 / PMK.07 / 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
30. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
31. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;

33. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 28);
35. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1);
37. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
39. Surat Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya Nomor 050/248/Kpts/2020 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

1.3. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Untuk itu RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

1.3.1. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA DENGAN RPJMN DAN RPJM ACEH

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Provinsi Aceh. Penyusunan Perubahan RPJMK Nagan Raya 2017-2022 berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 dengan memperhatikan RPJM Aceh 2017-2022 dan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 serta mempedomani RPJMN 2020-2024. Dokumen Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 juga mengacu terhadap dokumen KLHS yang menunjukkan capaian Sustainable Development Goals di Kabupaten Nagan Raya.

Penyusunan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 harus memperhatikan RPJMN dan RPJM Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dalam Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pembangunan Kabupaten Nagan Raya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah nasional Tahun 2020-2024 pada pasal 2 ayat 3 huruf b mengamanatkan bahwa RPJM Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat

dalam RPJM Nasional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 342 ayat 1 huruf c Permendagri 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan mendasar. Kemudian pada ayat 3 dijelaskan yang dimaksud perubahan mendasar adalah mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Perpres 18 tahun 2020 merupakan bentuk nyata perubahan kebijakan nasional yang menggantikan Perpres 2 tahun 2015 tentang RPJM Nasional tahun 2015-2019.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus mendukung agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dan Prioritas Aceh dalam Perencanaan Tahunan (RKP).

1.3.2. HUBUNGAN PERUBAHAN RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA DENGAN RPJPK, RKPK, RENSTRA-PK DAN RENJA-PK

Penyusunan Perubahan RPJMK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020 berpedoman pada Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Penyusunan Perubahan RPJMK Tahun 2017-2022 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap III dan IV RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025.

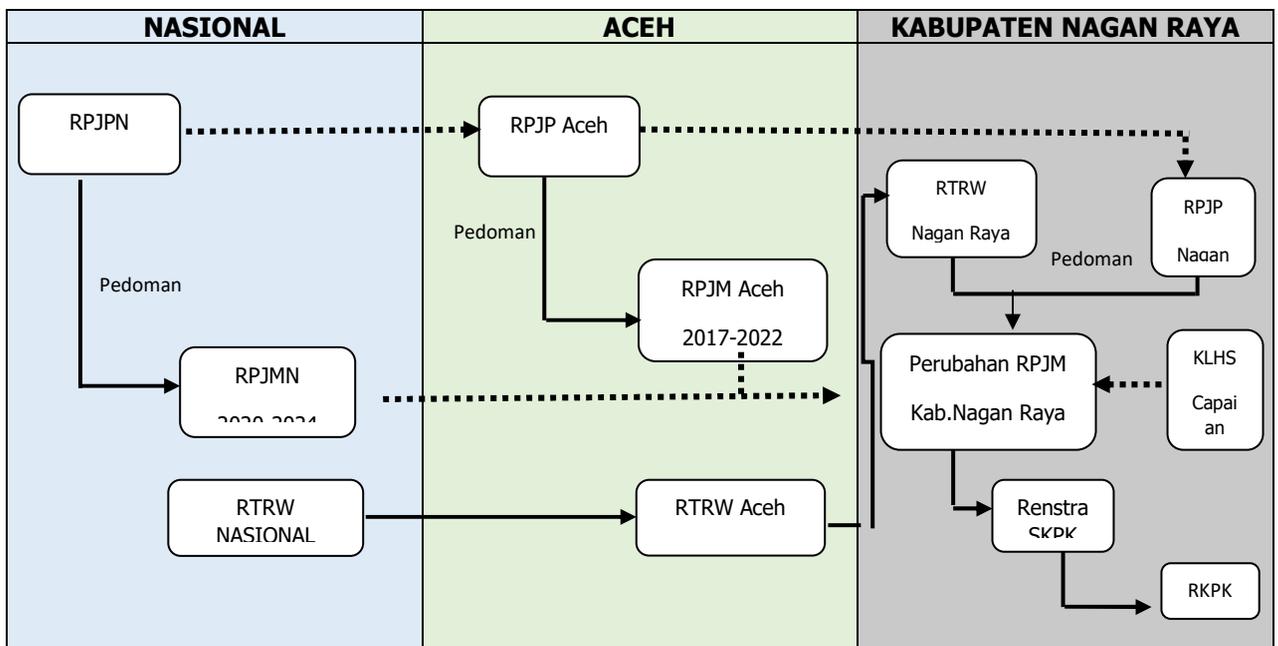
Perubahan RPJMK menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK). Perubahan Renstra SKPK merupakan rencana kerja 5 (lima) tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan SKPK untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMK serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang menjadi kewenangan Kabupaten khususnya Nagan Raya.

Selanjutnya, Perubahan RPJMK sebagai dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya sebagai perencanaan tahunan

Kabupaten. RPKK menjadi acuan bagi setiap SKPK dalam menyusun Renja. Penjabaran Rencana tahunan SKPK termuat dalam Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Alur hubungan RPJMK dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.1
Hubungan Perubahan RPJMK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Data diolah sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya harus selaras dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas RPJM Nasional dan RPJM Aceh sebagaimana dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1.1
Keterkaitan RPMJ Kabupaten Nagan Raya dengan RPJM Nasional dan RPJM Aceh

No	Isi RPJM	RPJM Nasional Tahun 2020-2024	RPJM Aceh	RPJM Kabupaten Nagan Raya
1	Visi	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”,	Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

				yang Berlandaskan Syariat Islam
2	Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani. 2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain. 3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki. 4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional. 5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan Terintegrasi 6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan. 7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan 8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, perdagangan, industri dan industri kreatif yang kompetitif. 9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan. 10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah (<u>Nagan Meu Agama</u>) 2. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan (<u>Nagan Meu Saneut</u>) 3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah (<u>Nagan Seujahtera</u>) 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga (<u>Nagan Carong</u>) 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (<u>Nagan Beu Jroh</u>) 6. Meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat (<u>Nagan Sihat</u>) 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerasteristik wilayah (<u>Nagan Seu Meugot</u>)

			lingkungan yang berkelanjutan.	
5	Agenda Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu Pendidikan dan Dinul Islam 2. Akses dan Kualitas Kesehatan 3. Infrastruktur Terintegrasi 4. Ketahanan dan Kemandirian Pangan 5. Nilai Tambah Sektor Strategis 6. Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja 7. Investasi dan Kemandirian Energi 8. Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan dan Kebencanaan 9. Perdamaian dan Reformasi Birokrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Keislaman dan Kuitas Sumber Daya Manusia 2. Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan dan Kesehatan 3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan ekonomi 4. Pengembangan Infrastuktur sesuai dengan karakteristik wilayah 5. Pemanfaatan luang investasi dan pemanfaatan daerah 6. Pelestarian Lingkungan dan kebencanaan 7. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Sosial

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat dilihat dari visi, misi dan prioritas pembangunan, adanya saling keterhubungan antara RPJM Kabupaten Nagan Raya dengan RPJM Aceh dan RPJM Nasional.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 pada dasarnya dimaksudkan untuk memfokuskan pembangunan yang ingin dicapai hingga akhir periode RPJMK. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pada setiap tahun anggaran sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Selain itu maksud dilakukan Perubahan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 adalah menjabarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dengan menyesuaikan kondisi terkini dan perkembangan serta kebijakan nasional.

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RPJMK 2017-2022, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku terutama terkait dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, perubahan Perangkat Daerah, serta penyesuaian target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Dengan demikian, semua dokumen operasional dalam perencanaan hingga akhir periode RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya harus mengacu pada Perubahan RPJMK ini.

Tujuan dari disusunnya dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 ini antara lain:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022.
2. Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan rencana strategis hingga tahun 2022, termasuk dalam perubahan program-program prioritas;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya hingga tahun 2022;

4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya hingga tahun 2022;
5. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
6. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam mengimplementasikan kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan menuju masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian penulisan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022 dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan perubahan kebijakan RPJMK ini, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya ke dalam tujuan dan sasaran, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menjelaskan strategi dan arah kebijakan yang akan diselenggarakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pengembangan kawasan strategis.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kebijakan pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam RKPK tahun berkenaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Nagan Raya yang terletak di wilayah pantai Barat-Selatan Provinsi Aceh memiliki luas wilayah sebesar 3.544,91 Km² (354.491,05 Ha), atau sekitar 6,25% dari luas wilayah Provinsi Aceh. Dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035

Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 10 Kecamatan, 222 Desa/Gampong dan 30 Kemukiman meliputi Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur.

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43' 50" – 04° 37' 55" Lintang Utara (LU) dan 96° 11' 23" – 96° 47' 58" Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak geografis dan potensinya, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang strategis dengan mencermati hal-hal sebagai berikut :

- a) Wilayah Kabupaten Nagan Raya berada di pantai Barat yang dilalui oleh jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antar Provinsi.
- b) Wilayah Kabupaten Nagan Raya dilalui juga oleh jalan arteri primer sebagai penghubung antara pantai Barat dengan pantai Timur Provinsi Aceh melalui lintas Tengah Aceh.
- c) Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya Electric Power (NREP) di Kecamatan Kuala Pesisir yang merupakan salah satu pemasok listrik jalur transmisi Sumatera.

2.1.1.3 Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas ±1.525,20 Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3. Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas ±10.196,40 Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

4. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas \pm 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas \pm 4.275,55 Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
6. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas \pm 2.180,20 Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

2.1.1.4 Geologi

Jenis Tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari tanah Alluvial, Podsolik coklat, Grumosol, Regosol, Podsolik merah kuning, Andosol, Litosol, Mediteran, Organosol, dan Podsolik. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian, dan tanaman perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah mempunyai sifat yang mudah tererosi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.

2.1.1.5 Hidrologi

Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seunagan, Trang, Tripa dan Seumayam. Selain itu terdapat dua DAS yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu DAS Tadu dan Seuneuam.

Kabupaten Nagan Raya dialiri beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng Beutong, Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Tadu, dan Krueng Seumayam. Sebagai daerah hulu, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan sering terjadinya banjir pada musim penghujan terutama di daerah hilir. Kondisi ini (banjir) diperparah oleh karakteristik wilayah di mana perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian (kontur) relatif curam, sehingga curah hujan yang terjadinya di daerah hulu (daerah atas) akan sangat cepat mengalir ke daerah hilir (bawah).

Danau yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau, sebagai berikut:

- Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
- Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
- Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
- Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha.

Pengelolaan Air Tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan air tanah di Kabupaten Nagan Raya seluas 205.343,46 ha. Rincian CAT terlihat pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1
Cekungan Air Tanah di Kabupaten Nagan Raya**

NO	CAT		KABUPATEN	KECAMATAN	LUAS (ha)
1	Meulaboh		Nagan Raya	Darul Makmur	73.547,25
				Kuala	12.089,35
				Kuala Pesisir	6.109,97
				Tadu Raya	34.420,65
				Beutong	24.041,59
				Seunagan	5.673,31
				Suka Makmue	5.156,31
				Seunagan Timur	23.281,39
				Tripa Makmur	18.486,39
2	Telege		Nagan Raya	Beutong Ateuh Banggalang	2.537,25

Potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa titik lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Titik Lokasi Sumber Air Baku					
		Sungai	Rawa	Danau	Air Terjun	Mata Air	Embung
1	Darul Makmur	10	-	-	1	2	-
2	Kuala	2	-	-	-	1	-
3	Kuala Pesisir	4	2	-	-	-	1
4	Tadu Raya	8	-	1	-	-	-
5	Beutong	9	-	-	1	-	-
6	Seunagan	3	-	-	-	1	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2	-	-	-	2	-
9	Tripa Makmur	4	-	-	-	-	-
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	-	-	1	1	-

Sumber: RISPAM Kabupaten Nagan Raya 2019

2.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 25,9° C sampai 27,6° C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 90 %. Curah hujan yang terjadi selama Tahun 2019 sebesar 3.201 mm dengan rata-rata hujan sebesar 266,75 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 731 mm dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Mei yaitu 73 mm. Kondisi suhu udara, curah hujan dan kelembaban disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Kondisi Suhu Udara, Curah Hujan Dan Kelembaban Tahun 2019

Bulan	Curah hujan (mm)	jumlah hari hujan (hari)	Temperatur Rerata (OC)	Kelembaban rerata (%)
Januari	208.5	99	26.9	89
Februari	105.5	7	27.3	88
Maret	154	11	27.6	87
April	371.5	16	27.4	89
Mai	73	14	27.2	88
Juni	229.5	14	26.9	86
Juli	177	5	26.6	84
Agustus	265	11	26.6	87
September	203	14	26.6	87
Oktober	731	27	25.9	84
Nopember	339	23	26.4	90
Desember	344	24	26.4	90

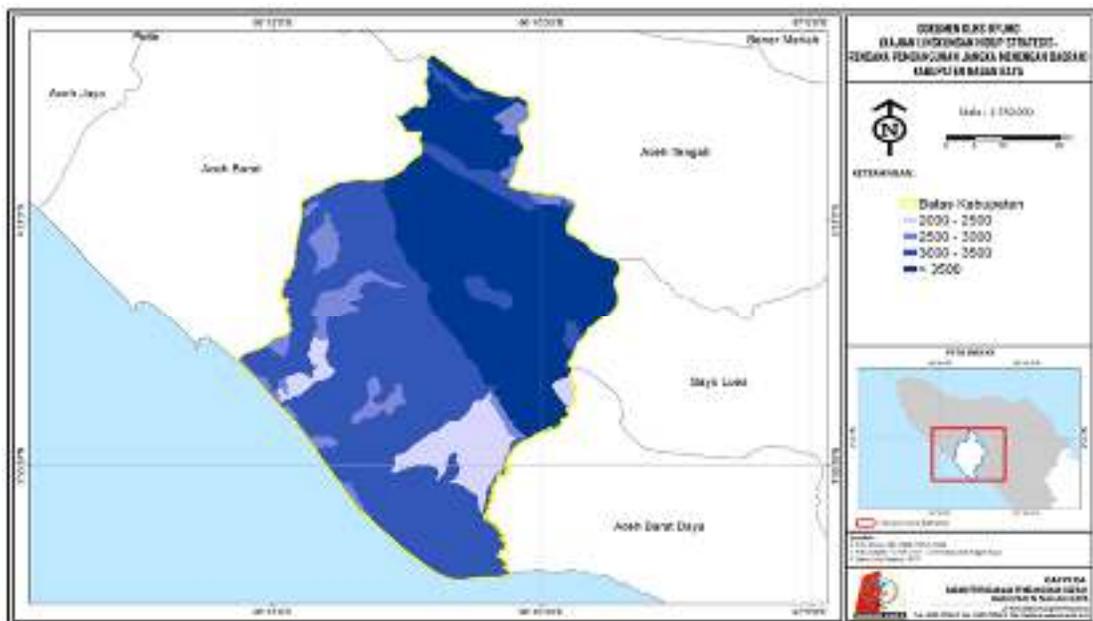
Sumber: Nagan Raya dalam Angka Tahun 2020

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan dan penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya yang telah diklasifikasikan peruntukkannya sesuai perundang-undangan dan kebutuhan daerah. Kawasan lindung terdiri atas hutan lindung dan kawasan lindung gambut seluas 129.103,91 Ha, sedangkan selebihnya dari total luas daerah tersebut merupakan kawasan budidaya. Secara umum pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya digunakan untuk keperluan areal permukiman, perkebunan, persawah, ladang tegalan, areal budi daya perikanan darat, semak belukar dan hutan.

Alokasi ruang terbesar berupa hutan lindung yaitu mencapai luas 129.103,91 Ha atau 36,41 persen dan lahan perkebunan baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar (Swasta Nasional) seluas 54.662,31 Ha atau 15,42 persen. Sedangkan seluas 170.723,78 Ha atau 48,16 persen digunakan untuk keperluan lain sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan kebutuhan penggunaan lahan oleh masyarakat setempat. Berikut di bawah ini gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya yang ditampilkan dalam bentuk Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.2
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, 2015 – 2035

Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Kabupaten Nagan Raya terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah pedalaman. Wilayah pantai di dominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2035, terdiri dari bandara seluas 103,25 Ha (0,03%), danau seluas 115,56 Ha (0,03%), hutan seluas 168.541,49 Ha (47,54%), industri seluas 82,35 Ha (0,02%), perkebunan seluas 43.859,81 Ha (12,37%), perkebunan masyarakat seluas 1.308,45 Ha (0,37%), permukiman seluas 6.894,40 Ha (1,94 %), pertanian lahan kering seluas 104.083,66 Ha (29,36%), rawa-rawa seluas 13.176,77 Ha (3,72%), sawah seluas 8.869,84 Ha (2,50%), sungai seluas 2.640,06 Ha (0,74%) dan tanah terbuka seluas 4.815,49 Ha (1,36%) sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya

No	Nama Satuan Lahan Kabupaten Nagan Raya	Kecamatan										Total Jumlah	
		Meulaboh	Pante Pahlawan	Pulau Mekaraya	Sampung	Sampung Utara	Seunyan	Seunyan Tengah	Sungai Bontoban	Tada Naya	Tada Nibanta	Ulu Kumbang	Ha
1	Bandara	-	103,25	-	-	-	-	-	-	-	-	103,25	0,03
2	Danau	-	-	-	-	115,56	115,56	-	-	-	-	115,56	0,03
3	Hutan	201,0	360,45	-	-	402,16	402,16	362,38	100,00	800,00	31,00	1.669,15	4,95
4	Kebun	-	82,35	-	-	-	-	-	-	-	-	82,35	0,02
5	Perkebunan	1.308,45	2.000,00	800,00	200,00	200,00	200,00	-	800,00	2.000,00	200,00	6.508,45	12,37
6	Perkebunan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1.308,45	-	-	-	1.308,45	0,37
7	Permukiman	6.894,40	2.000,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	200,00	6.894,40	1,94
8	Pertanian Lahan Kering	4.815,49	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00	7.000,00	20.000,00	47.815,49	29,36
9	Rawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640,06	2.640,06	0,74
10	Sungai	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.176,77	3,72
11	Sawah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.869,84	2,50
12	Tanah Terbuka	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.815,49	1,36
	Jumlah	8.305,75	7.500,25	5.100,00	5.600,00	21.600,00	10.700,00	48.000,00	20.000,00	14.000,00	10.700,00	154.400,45	100

Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035

2.1.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2019 sebanyak 167.294 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 84.577 jiwa laki-laki (50,43%) dan 82.717 jiwa perempuan (49,57%). Sementara itu angka sex ratio sebesar 102%, ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 98 penduduk perempuan.

Dilihat dari distribusinya, jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Darul Makmur sebesar 46.776 Jiwa atau 28% dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebesar 2.026 Jiwa atau 1,2% dari total penduduk Kabupaten Nagan Raya. Jika dilihat dari perkembangannya, jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,05%.

**Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Menurut Kecamatan Tahun 2014-2019**

Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kecamatan Darul Makmur	45,409	43,311	44,161	45,107	45,990	46,776
Kecamatan Tripa Makmur	9,190	8,763	8,902	9,130	9,309	9,468
Kecamatan Kuala	21,559	20,593	20,970	21,416	21,835	22,208
Kecamatan Kuala Pesisir	16,406	15,670	15,958	16,299	16,618	16,902
Kecamatan Tadu Raya	13,005	12,430	12,669	12,920	13,172	13,398
Kecamatan Beutong	14,585	13,916	14,210	14,482	14,765	15,017
Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	1,964	1,863	1,899	1,953	1,992	2,026
Kecamatan Seunagan	16,836	16,089	16,481	16,708	17,034	17,326
Kecamatan Suka Makmue	9,334	8,914	9,108	9,267	9,448	9,609
Kecamatan Seunagan Timur	14,160	13,521	13,865	14,047	14,320	14,564
Total	162,448	155,070	158,223	161,329	164,483	167,294

Sumber: Nagan Raya Dalam Angka, 2020

Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2019 mencapai 47 Jiwa/Km². Meningkat dari tahun 2016 sebesar 45 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kuala Pesisir mencapai 221 jiwa/km, sedangkan pada Tahun 2016 Kecamatan paling padat penduduknya adalah kecamatan Seunagan mencapai 289 jiwa/Km².

Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km².

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Menurut Kecamatan Tahun 2014-2019

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kecamatan Darul Makmur	102	42	43	44	45	46
Kecamatan Tripa Makmur	97	46	47	48	49	50
Kecamatan Kuala	100	170	174	177	181	184
Kecamatan Kuala Pesisir	101	205	209	214	218	221
Kecamatan Tadu Raya	104	36	36	37	38	39
Kecamatan Beutong	98	14	14	14	15	15
Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	103	5	5	5	5	5
Kecamatan Seunagan	96	284	289	295	300	205
Kecamatan Suka Makmue	98	173	176	180	183	186
Kecamatan Seunagan Timur	93	54	55	56	57	58
Kabupaten Nagan Raya	99	44	45	46	46	47

Sumber: Web BPS Kabupaten Nagan Raya 2020

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya ditetapkan berdasarkan nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Berikut Kawasan strategis Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035.

Tabel 2.7
Kawasan Strategis Kabupaten Nagan Raya

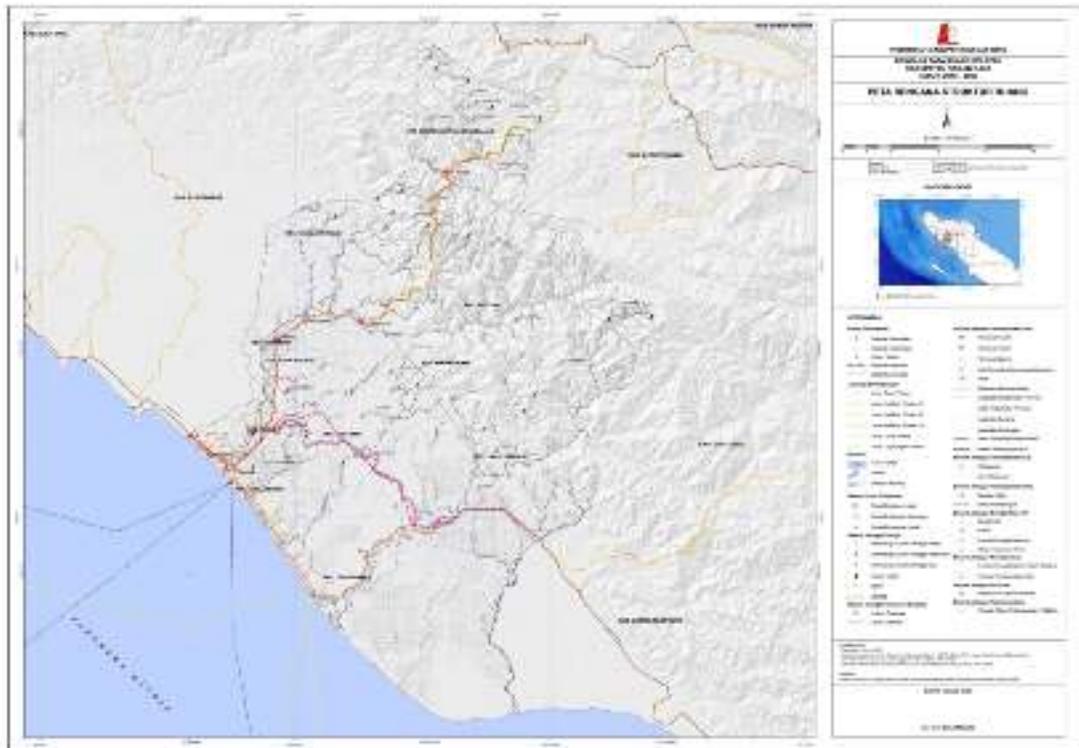
NO	SUDUT KEPENTINGAN	KAWASAN STRATEGIS	KECAMATAN	GAMPONG	
1	Ekonomi	Kawasan Agropolitan	Kuala	Cot Kumbang	
			Kuala Pesisir	Kuala Trang	
			Suka Makmue	Cot Peuradi	
			Tadu Raya	Sarah Mantok	
			Tripa Makmur	Mon Dua	
			Darul Makmur	Simpang Deli Kilang	
2	Ekonomi	Kawasan Minapolitan	Kuala Pesisir	Padang Rubek	
			Beutong	Blang Leumak	
				Pante Ara	
			Tadu raya	Sarah Mantok	
			Tripa Makmur	Mon Dua	
3	Ekonomi	Kawasan Cepat Tumbuh	Kuala Pesisir		
4	Ekonomi	Kawasan Koridor Perdagangan dan Jasa	Kuala	Ujung Fatihah	
				Blang Teungoh	
				Simpang Peut	
5	Ekonomi	Kawasan Percepatan Daerah Tertinggal	Beutong Ateuh Banggalang	4 (Empat) Gampong	
6	Ekonomi	Kawasan Pariwisata			
			Kawasan Danau Laut Tadu	Tadu Raya	6 (Enam) Gampong
			Kawasan Krueng Isep	Beutong	Pante Ara
			Kawasan Bantaran Irigasi Jeuram	Beutong	Keude Seumot
			Kawasan Air Terjun Krueng Itam	Tadu Raya	Krueng Itam
7	Sumber Daya Alam/ Teknologi Tinggi	Kawasan PLTU Kawasan Industri Skala Besar Kawasan Industri Skala Menengah	Kuala Pesisir	Suak Puntong	
			Kuala Pesisir		
			Tadu Raya	Cot Rambong	
				Kuala Tadu	
8	Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Rawan Bencana Tsunami	Kuala Pesisir	10 (sepuluh) Gampong	
			Tadu Raya	3 (tiga) gampong	
			Tripa Makmur	5 (lima) gampong	

Sumber: RTRW Kab. Nagan Raya Tahun 2015-2035

Selanjutnya, pengembangan wilayah disusun berdasarkan rencana struktur ruang wilayah yaitu rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan. Kabupaten Nagan Raya memiliki satu Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan satu Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan beberapa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) serta beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara, PKLp adalah pusat pelayanan kawasan yang akan dipromosikan menjadi PKL. PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kawasan dan PPL kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan dalam skala lingkungan.

Gambar 2.3
Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 – 2035

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Pada umumnya kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis sangat mempengaruhi tingkat kerawanan bencana di suatu daerah. Bencana alam yang terjadi meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia, konflik dengan alam).

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;
2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi

masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai.

Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya



Sumber: RTRW Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 - 2035

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

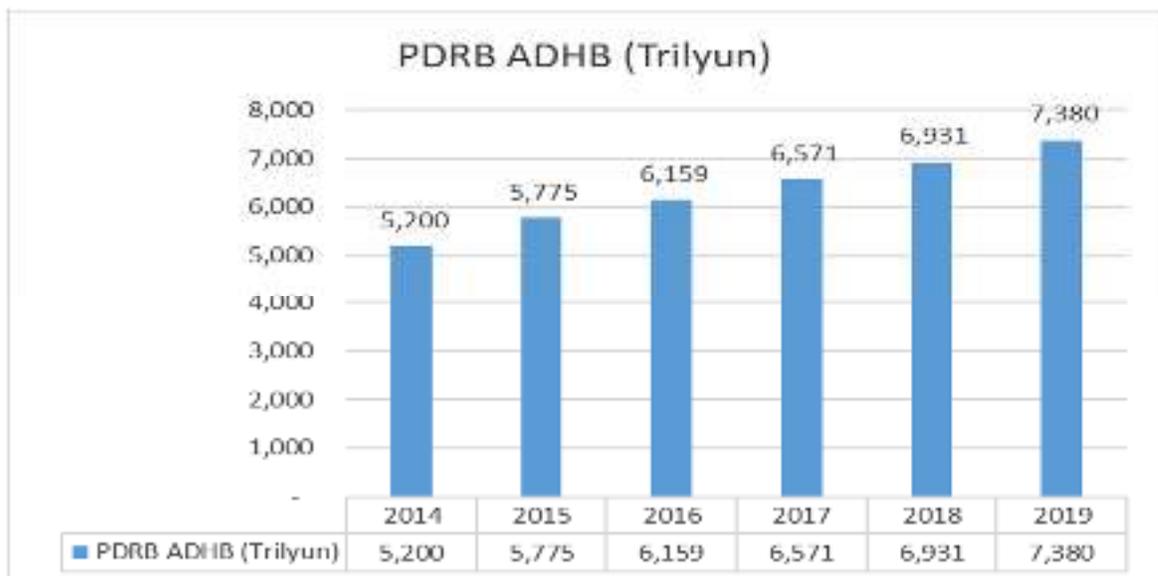
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Perekonomian suatu daerah secara menyeluruh dapat digambarkan dengan nilai PDRB. Meningkatnya nilai PDRB menunjukkan adanya peningkatan perekonomian suatu daerah, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam triliun rupiah yang merupakan nilai total dari 17 (tujuh belas) sektor lapangan usaha di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan adanya peningkatan PDRB tahun 2014-2019. Ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian Kabupaten Nagan Raya pada 2014 sampai 2019. Tahun 2014, nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya sebesar 5,200 triliun rupiah dan terus meningkat menjadi menjadi 7.38 triliun pada tahun 2019. Rata-rata kenaikan tiap tahun sebanyak 7,27 persen dalam lima tahun terakhir. Tahun 2015 nilai PDRB mengalami peningkatan sebanyak 11.06 persen dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.5
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya
(Triliun Rupiah) 2014-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Nagan Raya Tahun 2020

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk melihat nilai PDRB yang tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (perkembangan riil) maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2012-2019 seperti pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tahun 2012, nilai PDRB atas dasar harga konstan adalah 4,96 triliun rupiah dan terus naik menjadi 6,47 triliun rupiah pada tahun 2019. Kenaikan ini

menunjukkan selama tahun 2012-2019 terjadi peningkatan produktivitas (output) ekonomi secara menyeluru dari keseluruhan sektor lapangan usaha di kabupaten Nagan Raya.

Secara rata-rata, PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan sebanyak 3,89 persen per tahun pada periode 2012-2019. Kenaikan PDRB ADHB lebih besar dibandingkan kenaikan PDRB ADHK selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga lebih dominan dibandingkan dengan kenaikan produksi di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.6
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Nagan Raya
(Triliun Rupiah), 2012- 2019



Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari besarnya peranan atau kontribusi masing-masing kategori atau lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB suatu daerah. Struktur ekonomi disebut berubah jika terjadi perubahan kategori atau lapangan usaha yang dominan dalam pembentukan PDRB digantikan dengan kategori lainnya pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Sampai pada Tahun 2019 struktur ekonomi masyarakat Nagan Raya masih didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terlihat dari yang paling besarnya kontribusi kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Kategori ini masih menjadi

andalan bagi masyarakat Nagan Raya yang ditunjukkan dengan kontribusinya yang tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 kategori ini memiliki peranan sebesar 38,15 persen. Kemudian kontribusi PDRB berasal perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan reparasi sepeda motor 11,49 persen, jasa konstruksi 11 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 8 persen. Sektor administrasi pemerintah, pertanahan dan jaminan pemerintah wajib sosial sebesar 7 persen. Industri pengolahan dan transportasi dan pergudangan sebesar 4 persen. Sedangkan sepuluh sektor lainnya berkontribusi di bawah 2 persen.

Gambar 2.7
Struktur PDRB Kabupaten Nagan Raya (persen), 2019



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Berdasarkan tabel di bawah ini data distribusi PDRB persektor lapangan usaha dari Tahun 2015-2019 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi terhadap PDRB rerata sebesar 45 persen. Sektor pertambangan berkontribusi selama lima tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 14,77 persen menjadi 7.92 persen, meskipun demikian sektor pertambangan dan penggalian masih menempati urutan ketiga yang berkontribusi terhadap PDRB selama lima tahun terakhir. Urutan kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor rerata sebesar 11 persen. Kemudian lapangan usaha konstruksi berkontribusi untuk PDRB sebesar 9.7 persen. Lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5.3 persen. Industri

pengolahan dan transportasi dan pergudangan berkontribusi masing-masing sebesar 3 persen. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan real estate berkontribusi masing masing sebesar 2 persen. Kemudian Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Pendidikan berkontribusi masing masing 1 persen. Terakhir lapangan usaha bidang Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan jasa lainnya berkontribusi masing-masing sebesar 0.5-0.08 persen.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Nagan Raya

Lapangan Usaha	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.62	45.63	45.89	45.82	45.57
B. Pertambangan dan Penggalan	14.77	9.85	8.29	8.18	7.92
C. Industri Pengolahan	3.09	3.58	3.97	3.87	3.73
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
F. Konstruksi	8.96	9.43	9.68	9.86	10.60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.31	11.73	11.76	11.75	11.49
H. Transportasi dan Pergudangan	3.96	3.80	3.77	3.69	3.61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.32	0.36	0.40	0.42	0.43
J. Informasi dan Komunikasi	2.29	2.26	2.20	2.15	2.13
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.25	1.34	1.53	1.52	1.52
L. Real Estat	2.31	2.42	2.49	2.54	2.53
M,N. Jasa Perusahaan	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.96	5.24	5.49	5.61	5.62
P. Jasa Pendidikan	1.61	1.71	1.81	1.86	2.04
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.73	1.80	1.83	1.84	1.92
R,S,T,U. Jasa lainnya	0.50	0.51	0.53	0.53	0.53
PDRB Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

2.2.1.2 Pendapatan per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam delapan tahun terakhir sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Nagan Raya atas dasar harga berlaku pada 2012-2019 dengan rata rata kenaikan sebesar 4,23 persen

per tahun. Pada tahun 2012 PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya mencapai 33,87 juta rupiah. Taun 2019 menjadi 44,12 juta rupiah.

Pertumbuhan PDRB per kapita tertinggi terjapada tahun 2019 mencapai 44.12 juta rupiah. Artinya, setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya rata-rata dapat memberikan PDRB atau nilai tambah sebesar 44.12 juta rupiah selama tahun 2019.

Gambar 2.8
PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah),
Tahun 2012-2019

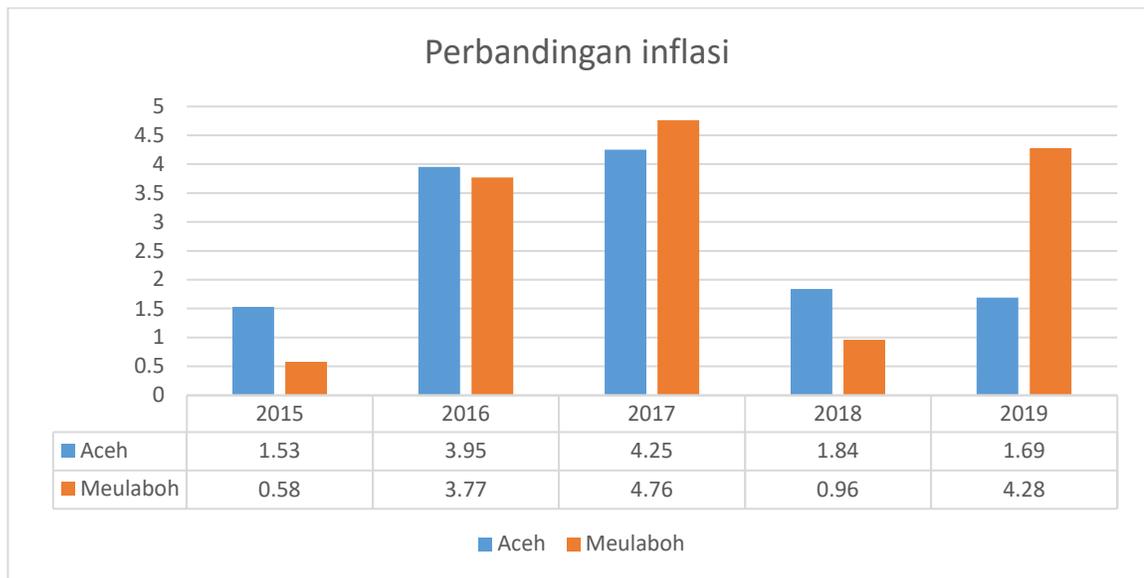


Sumber : Buku PDRB Kab. Nagan Raya Tahun 2020

2.2.1.3 Angka Inflasi

Tingkat inflasi sangat berhubungan erat dengan konsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi konsumsi rumah tangga Kabupaten Nagan Raya relatif rendah. Berdasarkan angka inflasi yang dihitung oleh Aceh Barat tingkat inflasi masih berada di bawah lima persen, di mana Kabupaten Nagan Raya untuk angka inflasi mengacu kepada angka inflasi yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Aceh Barat. Di Aceh hanya 3 kota yang menghitung angka inflasi yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh.

Gambar 2.9
Angka Inflasi Kabupaten Nagan Raya
(juta rupiah), 2012-2019



Sumber: BPS Aceh Barat, 2020

Angka inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2017 melampaui angka Provinsi Aceh yaitu 4.76 persen. Kemudian pada Tahun 2019 sebesar 4,28 persen berada jauh di atas angka inflasi Provinsi Aceh yaitu 1.69 persen. Hal ini disebabkan 7 kelompok komoditas yang didata, terdapat satu kelompok yaitu bahan makanan mengalami inflasi. Dan sumbangan bahan makanan terhadap inflasi cukup besar seperti komoditas ikan tongkol, dencis, cabe merah, kacang panjang, kakap merah penyumbang inflasi, sehingga angka inflasinya menjadi lebih tinggi.

2.2.1.4 Kemiskinan

Selama tujuh tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Tahun 2013, penduduk miskin berkisar sebesar 21.75 persen atau berjumlah 32.700 jiwa. Angka tersebut terus menurun menjadi 20.94 persen atau berjumlah 31.900 jiwa pada tahun 2014, tahun 2015 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.320 jiwa atau sebesar 20,2 persen, tahun 2016 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.310 jiwa atau sebesar persen 19.16 persen, tahun 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 31.060 jiwa atau sebesar 19.25 persen, pada tahun 2018 jumlah penduduk

miskin berjumlah 31.059 jiwa atau sebesar 18.97 persen dan terus menurun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 sebanyak 29.930 jiwa atau sebesar 17.79 persen.

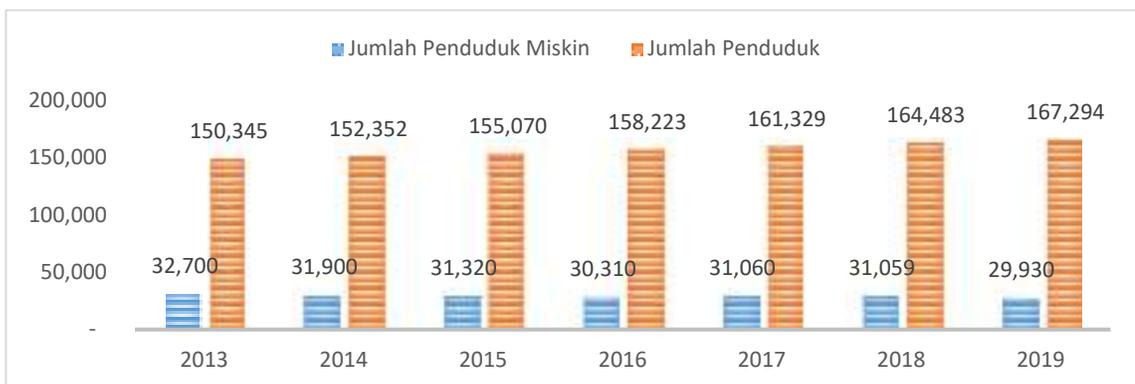
Gambar 2.10
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013-2019



Sumber: BPS Nagan Raya tahun 2020

Tahun 2017 angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya 19,25 persen dan turun menjadi 17,97 persen pada Tahun 2019 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 29.930 jiwa. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan namun angka kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya masih berada di atas rata rata Provinsi dan Nasional.

Gambar 2.11
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2013-2019



Sumber : BPS Nagan Raya Tahun 2020

Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin yang ada di satu kabupaten/kota. Berdasarkan gambar di atas jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Nagan Raya terus berkurang. Dari tahun 2013 jumlah penduduk miskin sebesar 32.700 jiwa menjadi 29.930 jiwa pada tahun 2019.

Gambar 2.12
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012–2019



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2020

Berdasarkan perkembangannya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012 sampai dengan 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang di dapat mencapai 2,53. Pada tahun berikutnya (2019) meningkat naik menjadi 3,01. Untuk lebih jelas perhatikan gambar 2.13 di atas.

Gambar 2.13
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012–2019



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya dapat diturunkan secara efektif. Gambar 2.12 menunjukkan efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 sampai dengan 2017 mengalami penurunan yang konsisten dari 1,17 menjadi 0,58 persen, tetapi kembali naik menjadi 0,83 pada tahun 2019 dikarenakan adanya peningkatan jumlah penduduk. Secara umum, hal ini berarti program dan kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya cukup efektif menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dari tahun ke tahun.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut. Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu

daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/ sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun.

Angka Melek Huruf pada Tahun 2012 berkisar sebesar 93,57 persen, artinya terdapat 6,43 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam lima tahun terakhir terus terjadi peningkatan, tahun 2015 sebesar 96,35 persen, pada tahun 2016 sebesar 93,41 persen, tahun 2017 sebesar 93,41 persen. Pada Tahun 2018 angka melek huruf meningkat dari 93.41 persen menjadi 96.26 persen pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 98 persen.

Upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong akses pendidikan bagi semua penduduk, termasuk Paket A, B, dan C, disamping juga pendidikan gratis berimplikasi positif terhadap peningkatan angka melek huruf. Sampai tahun 2016 terdapat 6,59 persen penduduk yang belum melek huruf.

Gambar 2.14
Perkembangan Angka Melek Huruf
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012–2019



Sumber Data : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Pada Tahun 2018 angka melek huruf meningkat dari 93.41 persen menjadi 96.26 persen pada tahun 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 98 persen.

2.2.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

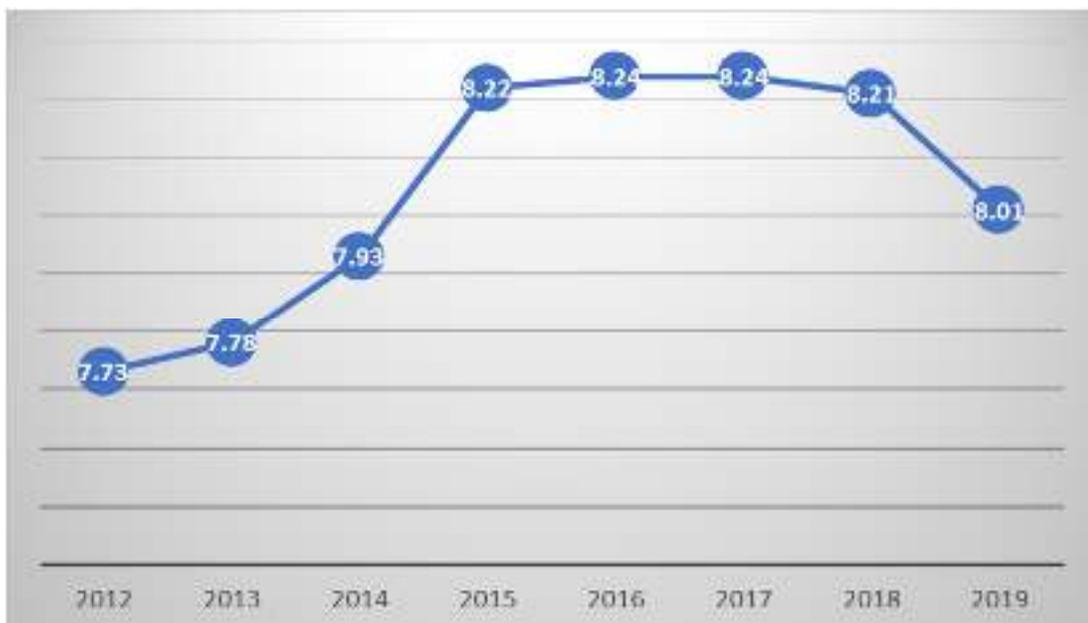
Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator lainnya dalam bidang pendidikan. Kedua indikator tersebut termasuk juga dalam komponen pembentuk IPM, sebagai variabel baru menggantikan variabel angka melek huruf dalam perhitungan IPM, untuk dimensi pengetahuan (pendidikan). Mengutip BPS, angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

Angka Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling -EYS*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berbagai upaya pembangunan pendidikan yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mampu meningkatkan angka harapan lama sekolah, kendati belum mencapai angka ideal. Tahun 2012, angka harapan lama sekolah masyarakat Nagan Raya sebesar 13,27 tahun, jauh lebih tinggi dari Nasional yang sebesar 11,68 tahun (BPS, 2016). Kemudian, angka harapan lama sekolah tersebut meningkat menjadi 13,34 tahun (tahun 2013), sebesar 13.42 tahun (tahun 2014), dan sebesar 14.04 tahun (tahun 2015). Dan sebesar 14.09 (tahun 2016). Adapun angka harapan lama sekolah Nasional sebesar 12,10 tahun (2013), sebesar 12,39 tahun (tahun 2014), sebesar 12.55 tahun (2015), dan sebesar 12.72 tahun (2016). Kurun waktu 2012-2016, capaian angka harapan lama sekolah Kabupaten Nagan Raya cenderung lebih baik dari Nasional.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya keras meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa. Program penyetaraan pendidikan melalui Paket A, B, dan C dipandang juga bermanfaat dalam memperbaiki kualitas SDM dan tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Sepanjang tahun 2012-2016, Pemerintah Nagan Raya dinilai cukup berhasil meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, meskipun belum mencapai target pemerintah. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah yang telah dijalani penduduk tidak lebih dari 7.78 Tahun, atau tamat SD, dan pernah mengecap dibangku kelas 1 (satu) SMP. Lalu, angka tersebut meningkat secara signifikan menjadi 7.93 tahun (tahun 2014) 8.22 tahun (tahun 2015), dan hingga 8.24 tahun (tahun 2016). Sementara rata-rata lama sekolah yang dijalani penduduk secara Nasional, yakni 7,95 tahun (tahun 2016). Pada Tahun 2018-2019 rata-rata lama sekolah menurun dari 8.24 pada tahun 2017 menjadi 8.21 pada tahun 2018 dan menurun kembali menjadi 8.01 pada tahun 2019.

Gambar 2.15
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019 (%)



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Posisi geografis yang strategis dan ditunjang oleh beragamnya etnis masyarakat di Provinsi Aceh menggambarkan peninggalan keragaman budaya dan seni dengan nilai sejarah yang tinggi, begitu juga dengan Kabupaten Nagan Raya yang memiliki keragaman budaya dan seni yang diwariskan oleh leluhur. Adapun beberapa keragaman budaya dan seni tersebut perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya sebagai bentuk identitas dari suatu daerah.

Adapun keragaman budaya dan seni yang ada di Kabupaten Nagan Raya dapat terlihat dari beberapa kebiasaan masyarakat terutama dalam perayaan pesta perkawinan, sunat rasul, keragaman makanan khas, dan tradisi lainnya yang terus dijaga dan dilestarikan. Selain itu terdapat juga beberapa situs sejarah budaya antara lain, 8 (delapan) makam, 1 (satu) rumah tradisional, 1 (satu) benteng dan 3 (tiga) tempat bersejarah.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

2.3.1.1. Pelaksanaan Syariat Islam dan Pendidikan Islami

Syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), berdasarkan Al-Qur`an dan Hadist dengan tujuan terciptanya kemaslahatan dan kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Syariat Islam harus dipahami sebagai suatu rahmat sehingga dalam pelaksanaannya akan timbul suatu kesadaran untuk melaksanakannya secara ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Dalam pelaksanaan Syariat Islam, lembaga pendidikan memiliki fungsi penting dalam membentuk karakter dan kepribadian Islam, oleh karena itu lembaga pendidikan Islam perlu diberdayakan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga menghasilkan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk menjalankan segala kewajiban sebagai umat Islam. Di Kabupaten Nagan Raya memiliki 230 unit sarana dan prasarana keagamaan untuk mendukung pendidikan Islami.

Pendidikan Islami adalah proses pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai islami yang bertujuan untuk memadukan dan menyempurnakan iman dan amal saleh untuk tercapainya kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Pendidikan islami di Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal. Beberapa lembaga pendidikan islami yang merupakan lembaga formal seperti Madrasah-madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama dan sekolah islam terpadu yang dikelola oleh pihak swasta.

Berkaitan dengan lembaga pendidikan formal terdapat 14 (empat belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan 5 (lima) Madrasah Ibtidaiyah Swasta, 2 (dua) Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 8 (delapan) Madrasah Tsanawiyah Swasta, 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri dan 2 (dua) Madrasah Aliyah Swasta. Selanjutnya juga terdapat 2 (dua) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Swasta dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT).

Selain itu terdapat sejumlah lembaga pendidikan non formal seperti pesantren, dayah, Madrasah Ulumul Quran (MUQ), Taman Pendidikan AlQuran (TPA) dan Majelis taklim yang dikelola oleh ulama-ulama terkemuka di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, hasil yang diperoleh dari lembaga pendidikan yaitu lahirnya penghafal Alquran dan peningkatan angka melek Al quran. Selain itu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dayah juga dilaksanakan standarisasi dayah. Berkaitan dengan penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Jumlah penghafal Al-Qur`an (Hafiz 30 Juz), Angka Melek Al-Qur`an dan Standarisasi Dayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

NO	INDIKATOR	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penghafal Al-Qur`an	1 Orang	1 Orang	2 Orang	2 Orang	4 Orang	23 orang	23 orang	40 orang
2	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia 6-21 tahun	65%	66%	69%	75%	80%	82%	83%	85%
3	Angka melek Al-Qur`an penduduk usia > 21 tahun	68%	70%	71%	75%	77%	79%	80%	82%
4	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah	5%	6%	6%	8%	10%	10%	10%	11%

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, 2020

Selain lembaga pendidikan yang berfungsi untuk memberikan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai syariat islam, ulama memiliki peranan yang sangat penting, selain menjadi panutan umat, ulama juga menjadi motor penggerak pelaksanaan Syari`at Islam. Disamping itu ulama juga menjadi pembimbing bagi umat dalam rangka menerangkan maksud dan tujuan isi yang terkandung dalam Al-Qur`an dan Hadist dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penegakan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya, banyak pihak terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satpol PP dan Wilayatul Hisbah termasuk unsur TNI dan POLRI, yang menjadi faktor pendukung perkembangan pelaksanaan dan pengawasan Syariat Islam. Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2012 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Pendukung Pelaksanaan dan Pengawasan Syariat Islam
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Uraian Kegiatan	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Keagamaan	315 Unit	325 Unit	370 Unit	410 Unit	445 Unit	454 Unit	454 Unit	454 Unit	458 Unit
2	Pembinaan Dakwah Agama bagi Masyarakat	100 Orang	120 Orang	140 Orang	160 Orang	200 Orang	204 Orang	207 Orang	212 Orang	217 Orang
3	Rata-rata jamaah mesjid per waktu shalat	20 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang	31 Orang	32 Orang	32 Orang	33 Orang	35 Orang
4	Jumlah Mesjid yang melaksanakan sholat 5 (lima) waktu secara rutin	25 Mesjid	32 Mesjid	36 Mesjid	40 Mesjid	47 Mesjid	48 Mesjid	49 Mesjid	50 Mesjid	50 Mesjid
5	Pembinaan Dinul Islam	210 Orang	240 Orang	250 Orang	258 Orang	262 Orang	267 Orang	271 Orang	278 Orang	280 Orang
6	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	30%	35%	40%	42%	50%	51%	40%	40%	40%
7	Jumlah Kader Ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	123 Orang	132 Orang	144 Orang	150 Orang	155 Orang	158 Orang	160 Orang	164 Orang	200 Orang

Sumber: Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya 2020

Berdasarkan data tabel 2.10 dapat kita lihat bahwa jumlah Sarana-prasarana ibadah sebanyak 230 unit, jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat jamaah di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 50 mesjid, namun rata-rata jamaah sangat rendah yaitu hanya berkisar rata-rata 20 sampai 30 orang. Hal ini

menunjukkan bahwa pemberdayaan lembaga pendidikan belum optimal membentuk karakter dan kepribadian Islami, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana ibadah dan dikalangan masyarakat belum optimal direalisasikan kewajiban pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat. Umat Islam tentu bukan hanya dituntut untuk melaksanakan Fardhu Ai'n yang menjadi kewajiban individu tetapi ada fardhu kifayah yang harus dilaksanakan secara kolektif dan bersama. Salah satu fardhu kifayah adalah melaksanakan pengurusan jenazah atau proses Tajhid Mayat yaitu memandikan, mengkafankan, shalat dan menguburkan serta talqin. Di Kabupaten Nagan Raya ditemukan masih kurang masyarakat dalam memahami tata cara tajhid Mayat sebagai bagian dari pelaksanaan fardhu kifayah.

2.3.1.2. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Perwalian (Ziwaf Dan Perwalian) Dan Harta Agama Lainnya.

Salah satu bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan umat adalah dengan telah ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal , dimana Baitul Mal diberi kewenangan untuk mengelola zakat, infaq, shadaqah, wakaf, perwalian (Ziswaf dan Perwalian) dan harta agama lainnya.

Realisasi dari penerimaan Zakat/infaq/sadaqah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Realisasi Penerimaan Zakat/Infaq/Sadaqah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2013-2018

NO	TAHUN	REALISASI PENERIMAAN ZIS
1.	2013	Rp. 3.265.000.000,-
2.	2014	Rp. 4.022.850.000,-
3.	2015	Rp. 6.012.800.000,-
4.	2016	Rp. 7.809.500.000,-
5.	2017	Rp. 8.980.000.000,-
6.	2018	Rp. 6.150.000.000,-

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat perkembangan realisasi penerimaan ZIS di Kabupaten Nagan Raya bersifat fluktuatif, pada tahun 2013 realisasi terus meningkat sejumlah Rp. 8.980.000.000,- dibandingkan pada tahun 2013 yang hanya berjumlah Rp. 3.265.000.000,-. Sementara pada tahun 2018 menurun menjadi Rp. 6.150.000.000,- Hal ini disebabkan karena perubahan status kewenangan pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten, sekarang telah berubah pengelolaan menjadi kewenangan pemerintah provinsi (sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas berubah status dari yang dulunya Aparatur Sipil Negeri Kabupaten, sekarang menjadi Aparatur Sipil Negeri Provinsi. Dan dengan adanya perubahan status ini berpengaruh terhadap penerimaan ZIS di Kabupaten Nagan Raya.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.2.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum layanan TK/RA bagi penduduk usia 4-6 Tahun masih belum merata sampai ke seluruh pelosok desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya. Jumlah lembaga TK/ RA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 adalah

sebanyak 35 unit dengan jumlah siswa 1.577 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 38 unit pada Tahun 2016 dengan jumlah siswa 2.209 orang, kemudian pada Tahun 2020 meningkat lagi menjadi 50 unit dengan jumlah siswa 2,482 orang.

Berdasarkan data tahun 2012, persentase penduduk usia 4-6 tahun yang telah memasuki TK/RA sebesar 18,71 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.430) orang. Sedangkan pada tahun 2020 partisipasi penduduk usia 4-6 tahun mengalami peningkatan yaitu menjadi 28,94 persen dari total penduduk usia 4-6 tahun (8.575) orang. selanjutnya rasio pendidikan anak usia dini di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 secara rinci disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Rasio Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2020

NO	JENIS	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	TK/RA	35	35	35	37	38	50	50	50	50
2	Siswa	1,577	1,344	1,671	1,857	2,209	2,287	2,506	2,582	2,482
3	Penduduk Usia 4-6 Tahun	8,430	8,560	9,347	9,552	9,407	9,595	9,787	9,983	8,575
4	Rasio (%)	2.22	2.6	2.09	1.99	1.72	4.20	3.91	3.87	3.45
5	Rasio Ketersediaan sekolah per 10.000 penduduk	0,42	0,41	0,37	0,39	0,40	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya 2020

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur.

Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2014-2019 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI						
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	17.538	17.621	17.679	18.140	18.139	13.908
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	17.640	17.606	16.921	17.252	17.396	17.988
1.3.	APK SD/MI (Persen)	101.54	100.09	104.48	105.15	104.27	104.7
2	SMP/MTs						
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	9.124	8.631	7.440	7.003	7.195	5.882
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.873	8.000	6.896	6.670	6.970	7.615
2.3.	APK SMP/MTs (Persen)	115.89	107.89	107.89	104.99	104.17	104.9
3	SMA/MA/SMK						
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	8.430	7.805	6.214	6.291	6.385	4.430
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.060	8.638	6.800	6.810	6.878	6.386
3.3.	APK SMA/MA/SMK (Persen)	93.05	90.36	91.38	92.38	92.83	92.92

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya – Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Data 2019 dari APKAPM.kemendikbud.2020

Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Capaian APK pada tingkat pendidikan SD/MI terus mengalami penurunan. Tahun 2012, APK tingkat SD/MI sebesar 105,16 persen, tahun 2013 sebesar 109,92 persen. Selanjutnya, APK tingkat SD/MI tersebut turun menjadi 105,64 persen tahun 2014, 2015 sebesar 110,00 dan tahun 2016, APK tingkat SD hanya tercapai sebesar 109,91 persen.

Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, capaian APK pada tahun 2012, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 99,17 persen dan menurun menjadi 100,38 persen tahun 2013, 2014 sebesar 105,85 persen, tahun 2015 sebesar 103,00 dan kemudian APK tingkat SMP/MTs tersebut naik menjadi 107,35 persen tahun 2016.

Capaian APK yang paling rendah terjadi pada tingkat pendidikan SMA/MA. Kurun waktu 2012-2016, Pada tahun 2012, APK tingkat SMA/MA sebesar 85,59 persen, Tahun 2013 sebesar 83,35 persen, 2014 sebesar 93,55 persen, tahun 2015 sebesar 89,00 persen dan pada tahun 2016 sebesar 85,48 persen.

Berdasarkan analisis perkembangan antara waktu dan posisi relatif dari perkembangan Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA maka dapat dilihat perkembangan capaian indikator tahun 2014-2019 seperti tercantum pada tabel diatas.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Capaian APK pada tingkat pendidikan SD/MI setiap tahunnya bervariasi. Tahun 2014, APK tingkat SD/MI sebesar 101,54 persen, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 100,09 persen. Selanjutnya, APK tingkat SD/MI tersebut mengalami peningkatan menjadi 104,48 persen tahun 2016, dan kembali meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 105,15 persen. Pada Tahun 2019 APK tingkat SD/ MI kembali menurun menjadi sebesar 104,7 persen.

Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs capaian APK setiap tahunnya juga bervariasi. Tahun 2014, APK tingkat SMP/MTs sebesar 115,89 persen, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 107,89 persen. Selanjutnya, APK tingkat

SMP/MTs tersebut tidak mengalami perubahan tahun 2016, dan kembali menurun pada Tahun 2017 menjadi sebesar 104,99 persen. Pada Tahun 2019 APK tingkat SMP/MTs mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 104,9 persen.

Capaian APK yang paling rendah terjadi pada tingkat pendidikan SMA/MA dengan tingkat yang bervariasi. Tahun 2014, APK tingkat SMA/ MA sebesar 93,05 persen, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 90,36 persen. Selanjutnya, APK tingkat SMA/ MA tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi 91,38 persen tahun 2016, dan terus meningkat pada Tahun 2017 menjadi sebesar 92,38 persen. Pada Tahun 2018 APK tingkat SMA/ MA terjadi sedikit peningkatan menjadi sebesar 95,45 persen.

Berdasarkan analisis intervensi prioritas wilayah Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), APK pada tingkat pendidikan SD/MI berada pada kisaran angka pada 100,09 persen sampai dengan 105,15 persen pada kurun waktu 2014 – 2019, hal ini mengindikasikan APK tingkat pendidikan SD/MI sudah baik tetapi perlu perhatian untuk bisa lebih baik.

APK pada tingkat pendidikan SMP/MTs dalam kurun waktu 2014 -2019 berada pada kisaran angka 104,17 persen sampai dengan 104,9 persen, angka ini mengindikasikan APK untuk tingkat pendidikan SMP/MTs perlu pendapat perhatian untuk bisa lebih baik.

APK pada tingkat pendidikan SMA/MA dalam kurun waktu 2014 – 2019 berada pada kisaran angka 90,36 persen sampai dengan 95.45 persen. Angka ini mengindikasikan 6 persen sampai dengan 10 persen anak pada tingkat pendidikan SMA/MA tidak bersekolah di Kabupaten Nagan Raya, hal ini terjadi karena anak pada tingkat pendidikan SMA/MA di Kabupaten Nagan Raya banyak yang bersekolah diluar Kabupaten Nagan Raya.

Indikator pendidikan lainnya yaitu angka pendidikan murni (APM). APM merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang

pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator pendidikan lainnya yaitu Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Pendidikan Murni merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Berbeda dengan APK, APM menggunakan batasan kelompok umur. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM menandakan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 98,68 persen tahun 2016, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 88,28 persen, APM SMP/MTs tahun 2016 sebesar 88,79 persen jauh lebih tinggi dari tahun 2012 sebesar 69,59 persen, sedangkan untuk APM SMA/MA pada tahun 2016 sebesar 72,04 persen lebih besar dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 61,27 persen. Untuk lebih jelas perkembangan angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI						
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (Sesuai usia sekolah)	17.538	17.621	17.679	18.140	18.139	13.908
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	17.640	17.606	16.921	17.252	17.396	17.988
1.3	APM SD/MI (Persen)	93.41	93.16	93.9	93.5	93.07	95.45
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (Sesuai usia sekolah)	9.124	8.631	7.440	7.003	7.195	5.882
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.873	8.000	6.896	6.670	6.970	7.615
2.3	APM SMP/MTs (Persen)	82.55	82.8	79.03	78.56	72.87	77.24
3	SMA/MA/SMK						
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK (Sesuai usia sekolah)	8.430	7.805	6.214	6.291	6.385	4.430
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.060	8.638	6.800	6.810	6.878	6.386
3.3	APM SMA/MA/SMK (Persen)	64.11	69.82	67.35	67.24		69.37

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya – Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya (Data 2019 dari APKAPM.kemendikbud.2020)

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama enam tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kondisi yang stabil. Tercatat APM pada tingkat SD/MI berkisar pada angka 93 persen sampai dengan 95 persen pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, berarti 7 persen sampai dengan 5 persen penduduk pada usia tingkat pendidikan SD/MI yang tidak bersekolah.

Kondisi APM yang memprihatinkan terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, Capaian APM SMP/MTs hanya sebesar 72,89 persen dan APM SMA/MA sebesar 77,24 persen tahun 2019. Angka APM tersebut belum mencapai angka ideal atau belum mencapai target pemerintah. Adapun tahun 2014, APM SMP/MTs sebesar 82,55 persen dan APM SMA/MA sebesar

64,11 persen. Salah satu penyebab rendahnya APM karena banyak anak pada usia tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA yang bersekolah di luar Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan analisis intervensi prioritas wilayah Indikator Angka Partisipasi Murni (APM), maka yang masih bermasalah dan berada pada kuadran merah adalah SMP/MTs dan SMA/MA, sedangkan prioritas kedua adalah APM SD/MI yang berada pada Kuadran kuning. Oleh karena itu untuk indikator APM perlu dicarikan solusi untuk peningkatan pencapaiannya.

Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama enam tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kondisi yang stabil. Tercatat APM pada tingkat SD/MI berkisar pada angka 93 persen sampai dengan 95 persen pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, berarti 7 persen sampai dengan 5 persen penduduk pada usia tingkat pendidikan SD/MI yang tidak bersekolah.

Kondisi APM yang memprihatinkan terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, Capaian APM SMP/MTs hanya sebesar 72,89 persen dan APM SMA/MA sebesar 77,24 persen tahun 2019. Angka APM tersebut belum mencapai angka ideal atau belum mencapai target pemerintah. Adapun tahun 2014, APM SMP/MTs sebesar 82,55 persen dan APM SMA/MA sebesar 64,11 persen. Salah satu penyebab rendahnya APM karena banyak anak pada usia tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA yang bersekolah di luar Kabupaten Nagan Raya

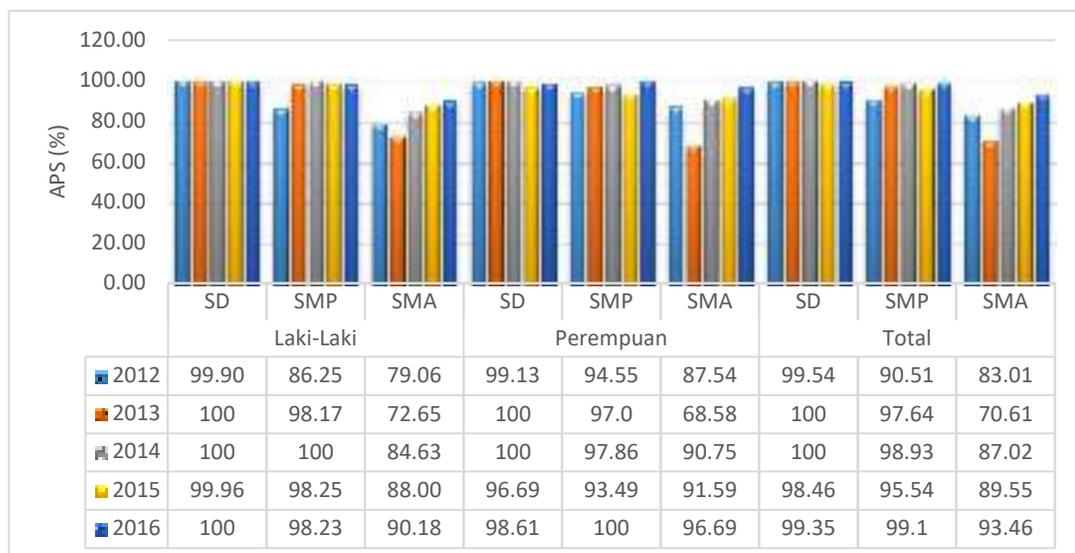
Berdasarkan analisis intervensi prioritas wilayah Indikator Angka Partisipasi Murni (APM), maka yang masih bermasalah dan berada pada kuadran merah adalah SMP/MTs dan SMA/MA, sedangkan prioritas kedua adalah APM SD/MI yang berada pada Kuadran kuning. Oleh karena itu untuk indikator APM perlu dicarikan solusi untuk peningkatan pencapaiannya.

D. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan APS di Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa APS anak usia 7-12 tahun sangat menggembirakan. Pada tahun 2012, APS anak usia 7-12 tahun mencapai 99,54 persen, menjadi

99,35 persen tahun 2016. Menurut jenis kelamin, terlihat juga bahwa capaian APS usia 7-12 tahun laki-laki 100 persen dan perempuan 98,61 persen tahun 2016. Sebelumnya (tahun 2012), APS laki-laki sebesar 99,90 persen, sedikit lebih tinggi dari APS perempuan sebesar 99,13 persen. Hal tersebut mencerminkan layanan pendidikan tingkat SD telah menjangkau peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan) di Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 2.16
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2016 (%)



Sumber : BPS, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Disisi lain, APS pada anak usia 13-15 tahun menuju kearah perbaikan, dari 90,51 persen meningkat menjadi 99,1 persen tahun 2016. Sebelumnya (tahun 2013) capaian APS anak usia tersebut turun sangat drastis dan terendah selama lima tahun terakhir. Demikian juga halnya APS anak usia 16-18 tahun, tercatat sebesar 83,01 persen tahun 2012 meningkat menjadi 93,46 persen tahun 2016. Selama tahun 2012-2016, capaian APS anak usia 16-18 tahun yang terendah (turun sangat drastis) terjadi pada tahun 2013, yaitu sebesar 70,61 persen. Hal tersebut dipicu dari rendahnya capaian APS perempuan yang hanya berkisar 68,58 persen, jauh lebih rendah dari capaian APS laki-laki sebesar 72,65 persen.

Semakin tinggi usia peserta didik, capaian APS semakin rendah. Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Selain itu,

terbatasnya prasarana pendidikan SMA/SMK/MA di setiap kecamatan serta penghasilan masyarakat yang masih rendah, turut juga mempengaruhi belum tercapainya target APS. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi (keluarga miskin) merasa kesulitan menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan menengah. Kondisi tersebut mempengaruhi dalam pencapaian APS tingkat SMA, meskipun adanya kecenderungan kesadaran masyarakat untuk mengecap pendidikan SMA, terutama bagi kaum perempuan. APS penduduk perempuan lebih baik daripada laki-laki pada tingkat SMA (kondisi tahun 2016). Selanjutnya APS menurut jenjang pendidikan di kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2017-2020 lebih besar APS laki-laki dibandingkan perempuan, Tahun 2017 APS laki-laki sebesar 12,820 dan APS perempuan sebesar 12,353, tahun 2018 APS laki-laki sebesar 12,650 dan APS perempuan sebesar 12,093, tahun 2019 APS laki-laki sebesar 12,530 dan APS perempuan sebesar 11,786 dan untuk tahun 2020 APS laki-laki sebesar 12,446 dan APS perempuan sebesar 11,772

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2017-2020 (%)

NO	JENIS	Tahun							
		2017		2018		2019		2020	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	SD	7,740	7,096	7,744	7,052	7,675	7,052	7,554	7,029
2	SMP	2,979	2,728	2,974	2,652	2,975	2,622	3,078	2,709
3	SMA	2,101	2,529	1,932	2,389	1,880	2,112	1,814	2,034
		12,820	12,353	12,650	12,093	12,530	11,786	12,446	11,772

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

E. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara bertahap. Perkembangan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Perkembangan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 (unit)

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan Umum									
1	TK	33	33	36	36	55	38	38	39
2	Sekolah Dasar (SD)	135	134	135	135	135	135	135	136
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	36	36	37	36	39	39	39	39
Pendidikan Agama									
1	RA	6	6	8	8	9	11	11	11
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	19	19	19	19	18	20	20	20
3	Madrasah Stanawiyah (MTs)	9	10	10	10	11	12	12	12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

Perkembangan peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan fluktuatif (periode 2012-2019). Gambaran lebih lanjut, perkembangan peserta didik menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.17
Perkembangan Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019 (orang)

NO	Jumlah Peserta Didik	TAHUN							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD	15,710	15,750	15,627	14,907	14,737	14,836	14,796	14,727
2	SMP	7,016	6,987	7,033	6,537	6,215	5,707	5,626	5,597
	Jumlah	22,726	22,737	22,660	21,444	20,952	20,543	20,422	20,324

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2020

Jumlah peserta didik per ruang kelas umumnya jauh lebih rendah daripada standar nasional yang ditemui pada semua jenjang pendidikan. Di tingkat SD, jumlah peserta didik per ruang kelas berkisar 16,5 orang per ruang kelas (kondisi tahun 2019). Angka ini lebih rendah dari batas atas sebanyak 28 murid per ruang kelas yang ditetapkan dalam standar nasional atau

berdasarkan standar pelayanan minimal (SPM). Angka tersebut juga jauh lebih rendah dari tahun 2012 yang sebanyak 17 orang per ruang kelas, dan 16 orang per ruang kelas pada tahun 2019.

Daya tampung ruang kelas dibawah SPM pendidikan, disatu sisi berdampak positif bagi peserta didik dalam memperoleh pembelajaran. Pembelajaran bagi seorang peserta didik lebih mudah terawasi oleh guru yang berdampak pada kenyamanan peserta didik mengikuti pelajaran di kelas. Kendati demikian, kondisi tersebut juga dianggap tidak efisien.

Namun berdasarkan kondisi di lapangan, masih terdapat kesenjangan antar wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya mengenai rasio peserta didik-ruang kelas. Masih banyak sekolah yang memerlukan ruang kelas baru. Karena jumlah peserta didiknya banyak.

Tabel 2.18
Perkembangan Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

NO	Rasio Peserta Didik-Ruang Kelas	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sekolah Dasar	17	17	18	19	11	17	17	16
2	Sekolah Menengah Pertama	25	25	28	29	22	22	23	23

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Guru berperan penting dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan peserta didik. Selama delapan tahun terakhir (2012-2019), Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan penambahan guru guna memenuhi kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan. Pada tingkat pendidikan SD, guru yang mengabdikan sebanyak 711 orang untuk guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 258 orang guru dengan kualifikasi guru DIV/S1. Tahun 2019, jumlah guru SD sebanyak yang kualifikasi D1/D2/D3 sebanyak 135 orang berkurang dari tahun 2012 dan 1.248 orang guru dengan kualifikasi guru DIV/S1 orang meningkat dari tahun 2012.

Guru SMP yang mengajar pada tahun 2012 sebanyak 147 orang untuk guru dengan kualifikasi D1/D2/D3 dan 257 orang guru dengan kualifikasi guru

DIV/S1. Tahun 2019, jumlah guru SMP sebanyak yang kualifikasi D1/D2/D3 sebanyak 62 orang berkurang dari tahun 2012 dan 551 orang guru dengan kualifikasi guru DIV/S1 orang meningkat dari tahun 2012. Gambaran lebih lanjut perkembangan Guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel. 2.19
Kualifikasi Guru Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2019

No	Guru	TAHUN/KUALIFIKASI							
		2016		2017		2018		2019	
		D1/D2/D3	DIV/SI	D1/D2/D3	DIV/SI	D1/D2/D3	DIV/SI	D1/D2/D3	DIV/SI
1	SD	711	258	137	1,292	136	1,286	135	1,248
2	SMP	147	257	66	561	64	541	62	551
1	Jumlah	858	515	203	1,853	200	1,827	197	1,799

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Perkembangan rasio guru terhadap peserta didik/murid pada semua jenjang pendidikan cenderung fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Untuk tingkat SD, rasio guru terhadap peserta didik tingkat sekolah dasar 82.10 (kondisi tahun 2017). Kemudian pada tahun 2019 rasio guru terhadap murid sebesar 82.59.

Pada tingkat pendidikan SMP kondisi rasio guru peserta didik pada tahun 2019 memperlihatkan kenaikan, dibandingkan tahun 2017. Tahun 2017, rasio guru terhadap peserta didik sebesar 82,64. Adapun tahun 2019, rasio guru peserta didik per guru meliputi SMP sebesar 84.30.

Tabel 2.20
Perkembangan Rasio Guru-Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio Index	82.10	80.96	82.59
2	Rasio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio Index	82.64	84.30	84.30

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

2.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Pada tahun 2014 di Kabupaten Nagan Raya Jumlah Kematian Bayi (AKB) sebesar 33 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 3.060. Terjadi penurunan pada tahun 2019 Untuk jumlah kematian bayi menjadi 22 bayi dengan jumlah kelahiran hidup sebesar 3.021. Walaupun terjadi kenaikan jumlah kematian bayi pada tahun 2018 kemudian kembali terjadi penurunan jumlah kematian bayi pada tahun 2019. Dari data tersebut maka diperoleh Angka kematian bayi pada tahun 2014 sebesar 10.78 menurun hingga 7,28 pada tahun 2019. Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian bayi di Kabupaten Nagan Raya terjadi karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.21
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019**

NO	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	33	27	17	33	39	22
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3.060	3.065	3.011	2.926	3.008	3.021
3.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	10.78	8.81	5.65	11	11	7,28

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

B. Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah. Angka Kematian Balita merupakan mempresentasikan. peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara.

Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014 yaitu sebesar 45,75 per 1000 kelahiran hidup dengan jumlah Balita yang mengalami kematian sebanyak 140 balita. Pada Tahun 2019 AKABA Kabupaten Nagan Raya turun menjadi 60 balita per 1000 kelahiran hidup. Untuk mencapai target penurunan kematian balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama. Faktor penyebab terjadinya penurunan Angka kematian balita di Kabupaten Nagan Raya juga sama seperti faktor penyebab terjadinya penurunan kematian pada bayi yaitu karena adanya beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui dinas kesehatan diantaranya melakukan Audit Maternal perinatal yaitu upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat sampai fasilitas pelayanan kesehatan, Kendala yang timbul dalam upaya peningkatan mutu pelayanan akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dilakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kematian Balita(berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu	140	94	112	33	14	60
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3,060	3,066	3,011	2.926	3.516	11.521
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	45.75	30.67	37.20	12	25	5.21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

C. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (usia 0 - 28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi. Angka Kematian Neonatus (AKN) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 sebesar 3,57 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 12,66 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi lebih separuh (68 persen) terhadap jumlah kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu	10	24	50	35	43	23	31	30	27
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	2804	2726	3060	3065	3011	2947	3121	2256	2133
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	3,57	8,80	16,34	11,42	14,28	7,80	9,93	13,30	12,66

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya,2020

D. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

Kematian Ibu atau maternal death didefinisikan sebagai “kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan” (WHO, 2004). Konsep maternal death ini berbeda dengan konsep maternal mortality ratio, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan maternal mortality ratio/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012). Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus menurun. Pada Tahun 2014 jumlah kasus kematian ibu adalah 5 kasus sedangkan tahun 2019 jumlah kasus kematian ibu adalah 10 kasus. Total kasus kematian ibu tahun 2014-2019 di Kabupaten Nagan Raya yaitu 28 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang.

Upaya efektif dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kasus Kematian Ibu pada satu tahun tertentu	5	4	3	5	1	10
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3,060	3,066	3,011	2.926	3.516	3.021
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	163.39	130.46	99.63	170.88	28.33	331.01

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

E. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandu merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita untuk setiap 1.000 balita disuatu wilayah, pada umumnya posyandu ada disetiap desa dan bisa juga satu desa terdapat lebih dari satu posyandu hal ini dimungkinkan karena jumlah penduduknya yang banyak, luas desa yang terlalu lebar sehingga masyarakat sulit mendatangi posyanndu.

Penyediaan posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Rasio posyandu sebagaimana yang disajikan menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan posyandu sudah memadai, namun yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan posyandu semaksimal mungkin, Rasio posyandu di atas menggambarkan bahwa tingkat pemanfaatan posyandu oleh masyarakat belum maksimal, dimana masih tingginya Angka Kematian Balita, Hal ini berarti banyak posyandu yang belum difungsikan secara maksimal oleh masyarakat. Saat ini jumlah Posyandu di Nagan Raya sampai Tahun 2020 sebanyak 257 unit dengan jumlah Balita 3680 dengan rasio posyandu per satuan balita 69,84. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.25
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2020

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	256	256	256	261	266	257	257	257	257
2	Jumlah balita	10647	12969	12877	13468	13467	7455	5846	3680	3680
Rasio posyandu per satuan balita		24,04	19,74	19,88	19,38	19,75	34,47	43,96	69,84	69,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

F. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagan Raya saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, polindes dan puskesmas pembantu/pustu). Jumlah puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 sebanyak 14 unit yang tersebar diseluruh Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan. Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas. Kondisi tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Kapasitas layanan satu puskesmas di satu kecamatan dengan jumlah penduduk antara 30.000-50.000 jiwa. Puskesmas yang tersedia saat ini sudah sesuai kebutuhan sebanyak 14 unit untuk jumlah penduduk 167.294 jiwa pada tahun 2019. Sementara rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 adalah 0,08, rasio Poliklinik tahun 2020 adalah 0,05, dan rasio Puskesmas Pembantu (Pustu) 0,26. Meskipun ketersediaan sarana sudah memadai, namun tingkat pelayanan dan fasilitasnya perlu ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
2	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0	0	0	0	0	0.05	0.05	0.05	0.05
3	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.32	0.31	0.31	0.3	0.3	0.27	0.26	0.26	0.26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2020

G. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah sakit persatuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 167.294 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 1 unit yaitu Rumah sakit Umum pemerintah, sehingga rasio rumah sakit terhadap penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebesar 0,01 artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Nagan Raya sudah memenuhi dari sisi jumlah namun kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan.

H. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 yaitu 17 dokter spesialis yang bertugas di Rumah sakit Umum Nagan Raya untuk melayani 167.294 jiwa penduduk Kabupaten Nagan Raya atau dengan rasio 17/100.000 penduduk. Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 20/100.000 penduduk (1:5.000 penduduk) yang artinya 1 orang dokter spesialis melayani 5.000 penduduk, sedangkan kebutuhan dokter spesialis yang ideal adalah sebanyak 31 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter spesialis sebanyak 14 dokter. Jumlah seluruh dokter umum di Kabupaten Nagan Raya adalah 59 orang atau dengan rasio 59/100.000 penduduk.

Hal ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 40/100.000 penduduk (1:2.500 penduduk), para dokter umum ini tersebar di seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Nagan Raya.

Total jumlah Dokter gigi adalah 10 orang atau 10/100.000 penduduk, Hal ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan yaitu 11/100.000 penduduk (1:9.000 penduduk), sedangkan kebutuhan dokter gigi yang ideal adalah sebanyak 17 dokter, hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih kekurangan dokter umum sebanyak 7 dokter. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.27
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2020**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter Spesialis	4	7	8	7	5	8	12	15	17
2	Jumlah Dokter Umum	44	53	47	62	37	53	47	52	59
3	Jumlah Dokter Spesialis Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Dokter Gigi	7	4	5	5	3	5	5	9	10
5	Jumlah Penduduk	142,861	149,596	149,596	155,070	155,070	161,328	164,483	167,294	167,294
	Rasio Dokter Spesialis per satuan penduduk	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	5	7	9	10
	Rasio Dokter Umum per satuan penduduk	0.31	0.35	0.31	0.4	0.24	33	29	31	35
	Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan penduduk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rasio Dokter Gigi per satuan penduduk	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	3	3	4	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2020

I. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2020, jumlah tenaga kesehatan sekitar 736. Secara umum, rasio tenaga kesehatan per penduduk untuk semua jenis tenaga kesehatan masih rendah, kecuali untuk tenaga perawat dan bidan yang sudah mencukupi (standar nasional untuk perawat dan bidang masing-masing 170 dan 100 tenaga per 100.000 penduduk). Rasio tenaga medis tahun 2012 sebesar 4,13 persen menu menjadi 0.51 persen pada tahun 2020.

Jumlah bidan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2020 tercatat sebanyak 406 orang, dengan rasio bidan terhadap penduduk sebesar 242 bidan per 100.000 penduduk. Jika kita melihat rasio tenaga bidan tersebut melebihi

target nasional dan standar WHO sebesar 100 per 100.000 penduduk. Jumlah perawat pada tahun 2020 tercatat sebanyak 172 orang, dengan rasio sebesar 102 per 100.000 penduduk. Rasio tenaga keperawatan tersebut masih kurang dari target nasional dan standar WHO sebesar 117.5 per 100.000 penduduk.

Tenaga kefarmasian di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 adalah 22 orang dengan rasio sebesar 12 per 100.000 penduduk, jika kita melihat rasio tenaga kefarmasian tersebut melebihi target nasional dan standar WHO sebesar 10 per 100.000 penduduk.

Tenaga nutrisisionis atau gizi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 adalah 17 orang dengan rasio sebesar 10 per 100.000 penduduk. Tenaga nutrisisionis masih di bawah target nasional dan standar WHO sebesar 22 per 100.000 penduduk.

Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat pada tahun 2020 adalah 34 orang atau dengan rasio 20 per 100.000 penduduk. Tenaga Kesehatan Masyarakat ini tersebar di seluruh Puskesmas, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Tenaga Sanitarian berjumlah 11 orang atau dengan rasio 6 per 100.000 penduduk. Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat belum mencapai target dan rasio Tenaga Sanitarian masih belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 40/100.000 penduduk.

Jumlah seluruh Tenaga keterampilan fisik tahun 2020 adalah 9 orang, keterampilan fisik tersebut seluruhnya adalah tenaga fisioterapi. Jika dilihat dari rasio 5 per 100.000 penduduk sedangkan tenaga teknis medis di fasilitas kesehatan orang, terdiri dari radiografer 3, radioterapis 11, analisa kesehatan 9, dan rekam medik 0, jika dilihat dari rasio kebutuhan, maka diperoleh 23/100.000 penduduk. Rasio Tenaga Medis persatuan penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2020 disajikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.28
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perawat	215	307	310	328	160	165	169	163	172
2	Jumlah Bidan	288	404	404	435	213	298	309	372	406
3	Jumlah Perawat Gigi	0	26	12	12	23	9	9	14	14
4	Jumlah Teknis Kefarmasian	15	20	23	25	18	22	22	22	22
5	Jumlah Apoteker	6	6	6	6	7	3	2	8	9
6	Jumlah Kesehatan Masyarakat	37	53	49	76	38	39	37	34	34
7	Jumlah Kesehatan Lingkungan	13	13	9	16	13	5	9	10	11
8	Jumlah Nutrisionis	16	13	22	18	20	24	24	17	17
9	Jumlah Dietisien	0	6	3	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Fisioterapis	0	8	10	11	4	12	12	9	9
11	Jumlah Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Akupuntur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Radiografer	0	2	7	7	3	3	3	3	3
15	Jumlah Radioterapis	0	0	9	9	0	11	11	11	11
16	Jumlah Elektromedis	0	7	6	6	5	6	6	6	6
17	Jumlah Teknisi Gigi	0	7	8	8	0	18	18	13	13
18	Jumlah Analis Kesehatan	0	6	7	7	4	5	7	9	9
19	Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	0	4	4	4	5	0	0	0	0
20	Jumlah Penduduk	142,861	149,596	149,596	155,070	155,070	161,328	164,483	167,294	167,294
21	Rasio Perawat per satuan penduduk	1.5	2.05	2.07	2.12	1.03	102	102	97	102
22	Rasio Bidan per satuan penduduk	2.02	2.7	2.7	2.81	1.37	184	188	222	242
23	Rasio Perawat Gigi per satuan penduduk	-	0.17	0.08	0.08	0.15	6	5	8	8
24	Rasio Teknis Kefarmasian per satuan penduduk	0.1	0.13	0.15	0.16	0.12	14	13	13	12
25	Rasio Apoteker per satuan penduduk	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	2	1	5	5
26	Rasio Kesehatan Masyarakat per satuan penduduk	0.26	0.35	0.33	0.49	0.25	24	22	20	20
27	Rasio Kesehatan Lingkungan per satuan penduduk	0.09	0.09	0.06	0.1	0.08	3	5	6	6
28	Rasio Nutrisionis per satuan penduduk	0.11	0.09	0.15	0.12	0.13	14	14	10	10
29	Rasio Fisioterapis per satuan penduduk	-	0.05	0.07	0.07	0.03	7	7	5	5
30	Rasio Radiografer per satuan penduduk	-	0.01	0.05	0.05	0.02	2	2	2	2
31	Rasio Elektromedis per satuan penduduk	-	0.05	0.04	0.04	0.03	4	4	3	3
32	Rasio Analisis Kesehatan per satuan penduduk	-	0.04	0.05	0.05	0.03	3	4	4	4
33	Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan per satuan penduduk	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0	0	0	0
34	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	4.15	5.9	5.94	6.24	3.31	0.4	0.38	0.45	0.51

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2020

J. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah angka jumlah komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah ibu yang mengalami komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dikali seratus persen.

Cakupan komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012 yang tertangani sebesar 15,17 persen, Tahun 2013 meningkat menjadi 45,08 persen, Tahun 2014 sampai tahun 2016 meningkat menjadi 52,23 persen, tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 100 persen, artinya komplikasi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya sudah sangat baik. Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.29
Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2019**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	105	330	469	293	352	355	325	561
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	692	732	725	674	674	788	325	561
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		15.17	45.08	64.69	43.47	52.23	45.05	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

K. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis secara umum berfluktuasi, tahun 2012 sebesar 84,67 persen turun menjadi 77,51 persen tahun 2013, tahun 2014 meningkat lagi menjadi 85,50 persen dan tahun 2015 menjadi 94,75 persen sedangkan tahun 2016 turun menjadi 93,07 persen. Pada tahun 2017, tahun 2018 dan 2019 menjadi 84,97 persen. Cakupan persalinan yang tinggi terjadi di Puskesmas Ujong Fatimah dan Simpang Jaya,

sementara itu yang terendah berada di Puskesmas Beutong Ateuh. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.30
Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2019

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2,794	2,709	2,955	3,047	2,993	3,528	3,063	2,977
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	3,300	3,495	3,456	3,216	3,216	3,890	3,516	3,511
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	84.67	77.51	85.50	94.75	93.07	90.69	87.12	84.79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya 2020

L. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI).

Desa *Universal Child Immunization* (UCI) adalah desa yang memiliki jumlah bayi lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Pencapaian desa UCI di Kabupaten Nagan Raya selama 2012-2019 menunjukkan angka peningkatan, tahun 2012 desa UCI di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 48,65 persen terus sampai 84,68 persen tahun 2015. Kemudian terjadi penurunan pada Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 menjadi 41 persen. Pencapaian ini mendekati target yang ingin dicapai yaitu 85 persen. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut pemerintah meningkatkan sosialisasi imunisasi kepada masyarakat secara lebih intensif.

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Data Cakupan desa/kelurahan universal child Immunization (UCI) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Desa / Kelurahan UCI	108	156	181	188	177	136	113	91
2	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	222	222	222	222	222	222	222	222
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		48.65	70.27	81.53	84.68	77.29	61.3	59.9	41

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

M. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan.

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas, hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak seusianya. Rata berat badannya hanya sekitar 60-80 persen dari badan ideal. Kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya pada lima tahun terakhir mengalami penurunan tahun 2012 terdapat 32 kasus gizi buruk dan yang tertangani 100 persen, tahun 2013 terdapat 17 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2014 terdapat 11 kasus dan tertangani 100 persen, tahun 2015 terdapat 12 kasus dan tertangani 100 persen sedangkan pada tahun 2016 terdapat 9 kasus dan yang tertangani 100 persen.

Sampai dengan Tahun 2019 cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas mencapai 100 persen dengan kasus meningkat mencapai 18 kasus. Upaya pemerintah kedepan untuk meningkatkan persentase penanganan kasus balita gizi buruk akan dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas sosialisasi perbaikan gizi keluarga kepada seluruh masyarakat. Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2019 di sajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan
Menurut Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	32	17	11	12	9	4	16	18
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	32	17	11	12	9	4	16	18
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

N. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang di Imunisasi Campak.

Cakupan imunisasi campak di Kabupaten Nagan Raya sangat fluktuatif. Pada Tahun 2012 yaitu 71,35 persen, mengalami penurunan sampai 69,58 persen pada tahun 2015, kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2016 menjadi 91.57 persen. Pada tahun 2017 menurun menjadi 73.5 persen, meningkat lagi pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 menurun kembali menjadi 74.4 persen.

Tabel 2.33
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun	2,346	2,655	2,371	2,129	2,804	2,383	2,604	2,481
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	3,288	3,226	3,226	3,060	3,062	3,240	3,242	3,334
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang di Imunisasi Campak		71.35	82.3	73.5	69.58	91.57	73.5	80.3	74.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

O. Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Cakupan penanganan balita pneumonia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 sangat rendah dan fluktuatif, dimana pada tahun 2012 yaitu 30,30

persen, tahun 2013 yaitu 26,09 persen, tahun 2014 yaitu 27,27persen, tahun 2015 yaitu 39,24 persen, dan pada tahun 2016 yaitu 18,75 persen. Pada Tahun 2017 cakupan balita pneumonia yang ditangani meningkat menjadi 49,24 persen, kemudian cakupan menurun menjadi 34,18 persen pada tahun 2019. Dalam hal ini, petugas kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada balita pneumonia, agar terhindar dari komplikasi dan kematian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	30	24	24	31	18	354	267	255
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	99	92	88	79	96	719	733	746
Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani		30.30	26.09	27.27	39.24	18.75	49.24	36.43	34.18

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

P. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA+.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ adalah Angka yang menyatakan jumlah penderita TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja kesehatan selama setahun dibandingkan dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA + dalam kurun waktu yang sama dikali dengan seratus persen, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ dari tahun 2012 sampai tahun 2016 mulai meningkat, tahun 2012 sebesar 25,33 persen dan tahun 2016 sebesar 49,00 persen sampai pada tahun 2019 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) meningkat menjadi 100 persen yang ditangani, artinya kesadaran masyarakat untuk mengobati dirinya sudah mulai tumbuh dan sudah mau berobat, namun perlu diwaspadai kebiasaan masyarakat hidup tidak sehat perlu dicegah ditingkatkan perilaku hidup sehat

kepada masyarakat sejak dini. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA+ di Kabupaten Nagan Raya disajikan pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.35
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC
BTA(+) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	58	76	75	113	123	176	230	284
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	229	229	234	243	251	220	256	284
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (+)		25.33	33.19	32.05	46.50	49.00	80.00	89.84	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

Q. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Kasus Tuberkulosis (TB) Paru pada tahun 2012 terdapat 70 kasus baru dan lama atau 49,00 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 159 kasus baru dan lama atau 102,53 per 100.000 penduduk hasil pemeriksaan BTA+. Pada Tahun 2019 terdapat 170 kasus per 100.000 penduduk. Dari data tersebut dapat dilihat terjadinya peningkatan kasus TBC baru dan lama, hal ini sangat baik karena dilakukannya deteksi dini penyakit TBC yang bertujuan untuk penemuan dini dan mencegah terjadinya TBC kronis serta kegiatan tersebut harus tetap ditingkatkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.36
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Banyaknya Kasus Penderita TBC (baru dan lama)	70	76	92	142	159	176	230	284
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	152,130	158,956	162,448	163,070	165,233	161,329	164,483	167,294
	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	49	50.8	61.5	91.57	102.53	109	140	170

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

R. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)

Jumlah kasus TB yang meninggal dunia dari tahun 2012 sampai dengan 2016 memiliki nilai fluktuatif, dimana pada tahun 2012 terdapat 2 kasus yang meninggal atau 1,40 per 100.000 penduduk, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 4 kasus yang meninggal atau 2,57 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017 kasus kematian akibat TB menurun menjadi 1,2 per 100.000 penduduk.

Kemudian Tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat menjadi 4,7 kasus per 100.000 penduduk. Walaupun masih rendah, namun terdapat kasus TB yang meninggal menjadi perhatian pemerintah dalam penatalaksanaan penemuan kasus dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Paisein TB yang meninggal	2	2	3	6	4	2	5	8
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	152,130	158,956	162,448	163,070	165,233	161,329	164,483	167,294
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1.400	1.337	2.005	3.869	2.579	1.240	3.040	4.782

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

S. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

Jumlah kasus TB yang mendapat pengobatan dalam program DOTS mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dimana pada tahun 2012 terdapat 58 kasus dari 229 perkiraan kasus (25,33 persen) dan pada tahun 2016 terdapat 159 kasus dari 251 perkiraan kasus (63 persen). Pada tahun 2019 terdapat 284 kasus dari 284 kasus (100 persen). Dari data tersebut terdapat kesadaran penderita TB untuk mendapatkan pengobatan yang tepat dengan menggunakan program DOTS sehingga tingkat kesembuhan penderita TB meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.38
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasien Tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	58	76	75	113	159	176	230	284
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	229	229	234	243	251	220	256	284
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		25.33	33.19	32.05	46.50	63.35	80.00	89.84	100.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

T. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Jumlah kasus Tuberkulosis (TB) Paru yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 terdapat 58 kasus dan yang sembuh sebanyak 45 kasus (77,59%), sedangkan pada tahun 2016 terdapat 123 kasus dan yang sembuh sebanyak 84 kasus (68,29%). Tahun 2019 terdapat 256 kasus dan yang sembuh 284 kasus (90,14 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan penderita TB dalam pelaksanaan pengobatan dalam program DOTS dan diharapkan peran serta pegutas kesehatan untuk menjemput bola serta peran dari lintas sector dalam mendukung program DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Penderita Tuberkulosis Paru BTA di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012 – 2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pasien Tuberkulosis Paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun	45	51	28	60	84	167	197	256
2	Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati diwilayah dan pada kurun waktu yang sama	58	76	75	113	123	176	230	284
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		77.59	67.11	37.33	53.1	68.29	94.89	85.65	90.14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

U. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui nyamuk Aides Aegypti, yang ditandai dengan demam disertai perdarahan bawah kulit, selaput hidung, dan lambung. Jumlah kasus DBD mengalami fluktuatif, pada tahun 2012 terdapat 47 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, pada tahun 2014 terdapat 15 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP, sedangkan pada tahun 2019 terdapat 36 kasus dan semua kasus ditangani sesuai SOP. Tindakan penanganan yang telah dilakukan diantaranya perawatan penderita oleh tenaga kesehatan serta tindakan pemberantasan nyamuk penyebab DBD melalui foging dan abatesasi, guna pemutusan mata rantai nyamuk penyebab DBD, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	47	16	15	10	19	21	32	36
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	47	16	15	10	19	21	32	36
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2020

V. Angka Kejadian Malaria

Malaria merupakan penyakit menular endemis dan merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, demikian juga di Indonesia. Penderita Malaria tahun 2012 adalah 60 kasus atau 41,99 per 100.000 penduduk dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dengan 2 kasus atau 2,57 per 100.000 penduduk. Dari seluruh kasus malaria yang ada, telah dilakukan tindakan penanganan sesuai SOP secara keseluruhan oleh tenaga kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41
Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012 – 2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	60	0	6	17	4	1	3	2
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	152,130	158,956	162,448	163,070	165,233	161.329	164.489	167.294
Angka Kejadian Malaria		≥1	≤1	≥1	≥1	≥1	≤1	≥1	≥1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, 2020

W. Cakupan Pelayanan dan Kunjungan Bayi

Cakupan pelayanan kesehatan bayi adalah jumlah kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan disarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun kunjungan rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan mendapat pelayanan dari petugas kesehatan.

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari sampai dengan 3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan penyuluhan perawatan kesehatan. Penyuluhan perawatan kesehatan bayi meliputi: 1) konseling ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan; 2) perawatan dan tanda bahaya bayi sakit (sesuai MTBS); dan 3) pemantauan pertumbuhan dan pemberian vitamin A kapsul biru pada usia 6-11 bulan. Cakupan pelayanan kesehatan bayi dan jumlah kunjungan bayi di sarana pelayanan kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.42
Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012 – 2019**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	2,358	2,655	2,547	2,546	2,561	2,825	3,490	3,390
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	3,142	3,143	3,226	3,060	3,024	2,947	3,121	2,256
Cakupan kunjungan bayi		75.05	84.47	78.95	83.2	84.69	76	89	90

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

x. Stunting

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak Balita (Bawah 5 Tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua

tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktivitas seseorang di masa depan.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lainnya. Situasi ini jika tidak diatasi dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Indonesia baik yang menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan. Penanganan stunting perlu koordinasi antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat Umum, dan lainnya. Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu upaya percepatan penurunan prevalensi stunting adalah Kemendagri telah menetapkan beberapa lokus stunting. Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Risksdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitive.

Salah satu lokus stunting untuk lingkup Kabupaten/ Kota adalah kabupaten Nagan Raya Kenapa ditetapkannya lokus stunting untuk kabupaten Nagan Raya karena masih tingginya angka stunting di Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya untuk pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya tahun 2020, berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 050/212/Kpts/2020 Tentang Penetapan Lokasi Fokus Intervensi, Pelaksana, Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020. Bupati Nagan Raya telah menetapkan beberapa lokus pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Nagan Raya yang memenuhi standar indikator World Health Organization (WHO) yaitu dengan prevalensi stunting diatas 20 % dan lokasi dengan permasalahan yang tinggi terhadap sanitasi dan air bersih yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya. Berikut adalah daftar lokus intervensi kegiatan

pengecegan dan penanganan stunting terintegrasi di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

Tabel 2.43
Daftar Lokus Intervensi Kegiatan Pencegahan Dan Penanganan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Prevelensi Stunting	Persentase OD/BABS
1	Tripa Makmur	Lueng Keubeu Jagat	Babah Lueng	47,6	97,79
2	Darul Makmur	Suka Mulia	Panton Bayu	67,5	84,66
3	Tripa Makmur	Lueng Keubeu Jagat	Pasi Kebeu Dom	63,1	96,81
4	Darul Makmur	Suka Mulia	Ujong Tanjong	49,1	85,51
5	Tripa Makmur	Lueng Keubeu Jagat	Kabu	45,3	88,43
6	Tripa Makmur	Lueng Keubeu Jagat	Drien Tujoh	44,6	93,92
7	Seunagan	Jeuram	Krueng Ceko	42,4	79,12
8	Darul Makmur	Suka Mulya	Kuala Semayam	42,3	32,59
9	Tadu Raya	Simpang Jaya	Pasi Luah	41,7	57,47
10	Seunagan	Jeuram	Bantan	41,2	45,16

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, 2020

Y. Corona Virus Disease -19 (COVID-19)

Infeksi Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, China. Lokasi kemunculannya pertama kali ini, membuat covid-19 juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Gejala covid-19 bervariasi, mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala covid-19 yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi covid-19 adalah:

- Demam tinggi disertai menggigil
- Batuk kering
- Pilek

- Hidung berair dan bersin-bersin
- Nyeri tenggorokan
- Sesak napas

Gejala covid-19 tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gejala infeksi virus ini dapat muncul mulai dua hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut.

Selain China, Covid-19 yang disebut WHO sebagai pandemi menyebar secara cepat ke berbagai negara lain, termasuk Jepang, Thailand, Jepang, Korea Selatan, bahkan hingga ke Indonesia. Sampai dengan tanggal 2 desember 2020 di Indonesia tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 543.975 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 454.879 orang, yang meninggal dunia sebanyak 17.081 orang dan yang masih menjalani perawatan sebanyak 72.015 orang. Untuk Aceh tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 8.310 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 6.631 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 329 orang, sisanya masih dalam perawatan. Kabupaten Nagan Raya pertama sekali terjadi lonjakan kasus pada bulan Agustus Tahun 2020 dengan jumlah 17 kasus dan meninggal 4 Kasus, meningkat menjadi 68 kasus pada bulan September dengan jumlah yang meninggal 7 kasus, kemudian pada bulan Oktober menurun menjadi 40 kasus, yang meninggal 5 kasus. Sampai Kabupaten Nagan Raya tercatat yang terkonfirmasi positif covid-19 sebanyak 157 orang dengan angka kesembuhan sebanyak 136 orang, dan yang meninggal dunia sebanyak 17 orang, dan 1 orang masih dalam perawatan atau orang dalam pengawasan. Untuk Kabupaten Nagan Raya data covid 19 lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Data Kasus Covid-19 Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

NO	BULAN	KASUS COVID – 19		
		SEMBUH	ORANG DALAM PENGAWASAN	MENINGGAL
1	APRIL	-	-	-
2	MEI	-	-	-
3	JUNI	-	-	-
4	JULI	-	-	-
5	AGUSTUS	17	-	4
6	SEPTEMBER	68	-	7
7	OKTOBER	40	-	5
8	NOVEMBER	9	-	1
9	DESEMBER	2	1	
	TOTAL	136	1	17

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Nagan Raya, menjadikan kabupaten ini masuk dalam zona merah dan mempengaruhi banyak sektor bukan hanya kesehatan masyarakat, tapi juga pendidikan, perekonomian yang mempengaruhi stabilitas keuangan daerah/kabupaten baik pada sisi pendapatan maupun belanja kabupaten.

2.2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pekerjaan Umum

a. Jalan

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tahun 2019, kondisi baik jalan kabupaten 272,270 Km mengalami peningkatan sepanjang 100,470 km dari kondisi awal tahun 2012. Perkembangan Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan Tahun 2012-2019 ditunjukkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.45
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 (Km)

Kondisi jalan	Status Jalan							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Baik	171,80	177,00	188,20	224,99	243,54	92,212	118,906	272,270
Sedang	92,34	108,80	113,50	173,01	171,65	59,611	60,316	191,492
Rusak Ringan	128,60	119,60	108,70	186,14	180,55	53,459	52,443	189,171
Rusak Berat	28,00	15,34	10,34	340,28	328,68	719,139	692,756	271,4488
Jumlah	420,74	420,74	420,74	924,42	924,42	924,421	924,421	924,421

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2020

Selanjutnya Perkembangan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.46
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk (m)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

Kondisi jalan	Status Jalan							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan Baik (km)	171.800	176.970	188.200	224.990	243.540	92,212	118,906	272,270
Jumlah Penduduk (jiwa)	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223	161.329	164.483	167.294
Rasio Panjang Jalan	1,12	1,11	1,15	1,45	1,53	0,057	0,072	0,163

Sumber: Dinas PUPR Kab. Nagan Raya, 2020

Tabel di atas menggambarkan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tahun 2012-2019, menunjukkan bahwa selama periode tersebut mengalami Penurunan. Rasio panjang jalan Kabupaten Nagan Raya adalah sebesar 1,12 tahun 2012 menurun menjadi 0,163 pada tahun 2019. Hal ini berarti dalam 0,163 meter panjang jalan melayani 1 (satu) orang penduduk pada tahun 2019.

Untuk Kawasan Permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4 diantaranya meliputi kawasan Gampong Twi meulusong, Gampong Blang Teungku, Gampong Kila, Gampong Kandeh, Gampong Blang Lango, dan

Gampong Gunong Kong. Persentase perbandingan terhadap Jumlah seluruh kawasan permukiman penduduk dengan Rasio 6/222 atau sebesar 0,027.

b. Sanitasi

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak sampai dengan Tahun 2016 sebesar 47,12% yang terdiri dari akses sanitasi perkotaan 3,7% dan akses sanitasi perdesaan 43,42%. Pada tahun 2019 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat sebesar 67,64%.

Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.47
Akses Sanitasi Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2013-2019

URAIAN	TAHUN						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Rumah Tinggal dengan Akses Sanitasi Layak (%)	48,70	52,35	54,83	57,65	58,31	59,45	67,64
Akses Sanitasi Perkotaan (%)	45,65	59,15	75,45	76,15	77,65	78,15	78,15
Akses Sanitasi Perdesaan (%)	25,7	32,6	42,35	45,65	70,15	75,65	75,65

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020.

Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan dan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak dari Tahun 2013 – 2020 juga semakin meningkat, kecuali pada tahun 2017 terjadi sedikit penurunan dan kembali meningkat hingga tahun 2020. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya Sanitasi layak dan Air Minum layak. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan dan Proporsi Rumah Tangga

dengan Sanitasi Layak dari Tahun 2013 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2.48
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Kabupaten Nagan Raya (persen) Tahun 2013-2020

No	Kawasan Permukiman Kumuh	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Minum Layak (%)	47.65	49.85	48.35	52.16	53.76	52.00	67.64	67.64
2	Sanitasi Layak (%)	35.2	46.91	44.07	48.09	56.81	52.00	67.64	72.24

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

c. Irigasi

Pelayanan irigasi di wilayah Kabupaten Nagan Raya khususnya pada daerah irigasi, tahun 2020 terdiri dari 29 daerah irigasi yang melayani hampir seluruh Kabupaten Nagan Raya menjadi kewenangan daerah. Daerah irigasi yang tersebar di sepuluh kecamatan dengan luas 4.837 Ha pada tahun 2020 mengalir areal persawahan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya. Sedangkan pada tahun 2016 luas daerah irigasi mencapai 4.847 Ha. Adapun Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Nagan Raya bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.49
Persentase Kondisi Irigasi menurut Daerah Irigasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

No	Nama Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi (%)		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	D.I Blang Puuk	Semi Tehnis	200			
2	D.I Blang Meurandeh	Semi Tehnis	80	55	19	12
3	D.I Bungong Talo	Tehnis	485	75	19	2
4	D.I Rambong	Semi Tehnis	330	72	18	3
5	D.I Pulo Raga	Semi Tehnis	300	70	18	5
6	D.I Blang Seunong	Semi Tehnis	141	65	20	5
7	D.I Blang Neuang	Semi Tehnis	85	72	18	3
8	D.I Pante Ara	Semi Tehnis	431	74	19	0
9	D.I Twi Pungoh	Semi Tehnis	100	70	18	5

10	D.I Karian	Sederhana	100	57	20	9
11	D.I Blang Aman Tadu	Sederhana	200	71	18	4
12	D.I Gunong Nagan	Sederhana	102	65	16	12
13	D.I Kila	Sederhana	100	60	21	4
14	D.I Blang Teungku	Sederhana	75	70	18	5
15	D.I Twi Meuleusong	Sederhana	200	73	18	2
16	D.I Gunong Lango	Sederhana	175	59	21	5
17	D.I Twi Kameng	Sederhana	65			
18	D.I Alue Buloh	Sederhana	150	60	21	4
19	D.I Alue Paku	Sederhana	65			
20	D.I Krueng Mangkom	Sederhana	120	62	22	0
21	D.I Seumambek	Sederhana	200	56	20	10
22	D.I Gunong Reubo	Sederhana	198	68	17	8
23	D.I Padang Rubek	Sederhana	65	55	19	12
24	D.I Alue Seupeng	Sederhana	350			
25	D.I Gunong Kupok	Sederhana	100	60	21	4
26	D.I Cot Mee	Sederhana	150			
27	D.I Krueng Alem	Sederhana	200	55	19	12
28	D.I Alue Rambot	Sederhana	170	49	12	34
29	D.I Tripa Makmur	Sederhana	-			

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2020

Jaringan Irigasi merupakan saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya sebagai satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam dua kategori yaitu saluran irigasi primer dan saluran irigasi sekunder. Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian.

Berdasarkan data dari tahun 2014–2019 total panjang jaringan irigasi mengalami kenaikan. Panjang jaringan irigasi dari tahun 2014 sebesar 92.026 meter mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 69.076 meter, sedangkan luas lahan budidaya pada tahun 2014 seluas 33.242,38 Ha mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi seluas 1.489,86 Ha sehingga rasio panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2014 adalah 2,76 meningkat menjadi 46,36 persen pada tahun 2019. Adapun rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.50
Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2019

No	Jaringan Irigasi	Status Jalan					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Panjang Jaringan Irigas	92.026	93.188	91.878	58,438.63	64,931.82	69,076.40
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	33.242,38	25.969,4	34.527,1	1,247.31	1,370.67	1,489.86
3	Rasio Jaringan Irigasi (1:2)	2,76	3,58	2,66	46.85	47.37	46.36

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya 2020

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan sarana bagi umat beragama untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan Agama dan kepercayaan masing-masing. Di Kabupaten Nagan Raya secara resmi sebagian besar sarana tempat ibadah hanya dimiliki oleh umat Islam, berupa Mesjid, Mushalla. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah dibagi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2012 rasio tempat ibadah sebesar 3,3 persen dan pada tahun 2019 sebesar 3,1 persen.

Tabel 2.51
Rasio Tempat Ibadah Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan
Raya Tahun 2012-2019

Uraian	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Tempat Ibadah	497	497	497	497	497	497	497	497
Jumlah Penduduk	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223	152.130	158.958	162.682
Total Rasio	3,3	3,1	3,1	3,2	3,1	3,3	3,1	3,1

Sumber: Nagan Raya dalam Angka Tahun 2020

2. Penataan Ruang

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau di kabupaten Nagan Raya merupakan Ruang Terbuka Hijau Eksisting yakni seluas 261,40 Ha atau (7,80 % dari luas kawasan perkotaan). Ruang Terbuka Hijau akhir tahun perencanaan yakni 743.97 Ha (30 % dari luas kawasan perkotaan), meliputi:

- a. Kecamatan Suka Makmue,
- b. Kecamatan Kuala,
- c. Kecamatan Kuala Pesisir
- d. Kecamatan Darul Makmur
- e. Kecamatan Seunagan
- f. Kecamatan Beutong
- g. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang
- h. Kecamatan Tadu Raya

**Tabel 2.52
Rasio Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016**

No	Uraian	2016
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	261.40
2	Luas Kawasan Budidaya	1407
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	18.57%

Sumber: Olahan Data Primer, 2017

2.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah yang layak harus dimaknai dari beberapa segi, diantaranya: segi sosiologis, filosofis, kesehatan, legalitas maupun dari sisi fisik, apalagi dari sisi energi yaitu hemat energi. Paling tidak rumah dan permukiman yang layak memenuhi syarat minimal bagi kebutuhan manusia untuk hidup secara manusiawi. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak

huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2012 sampai 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.53 dibawah ini.

Tabel 2.53
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

Uraian	Tahun							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Rumah layak Huni	-	50	172	220	165	607	-	709
Jumlah Penduduk	152.130	158.958	162.682	155.070	158.223	158.223	161.329	164.483
Rasio Rumah Layak Huni	-	0,031	0,106	0,142	0,104	0,38	-	0,431

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2020

2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Areal kawasan kumuh sesuai dengan SK kumuh pada Tahun 2014 terdiri atas beberapa kawasan permukiman yaitu Keude Seumot, Jeuram, Simpang Peut dan Alue Bilie. Ada penambahan kawasan permukiman ditahun 2019 sebanyak 17 (tujuh belas) kawasan. Adapun nama kawasan dan persentasenya bisa dilihat pada Tabel 2.54 dibawah ini.

Tabel 2.54
Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan (Ha)	Luas Wilayah (Km)	Persentase
Keude Seumot	14,76	386,05	0,39
Jeuram	37,84	112,5	0,34
Simpang Peut	29,96	130,63	0,23
Alue Bilie	25,77	1863,12	0,019

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2015

Tabel 2.55
Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan (Ha)	Luas Wilayah (Km)	Persentase
Alue Bilie	13,31	432	3%
Gunong Cut	4,09	608	1%
Lamie	3,69	780	0,5%
Suka Raja	2,48	301	0,8%
PuloTeungoh	5,47	193	2,8%
Serba Guna	6,5	353	1,8%
Serba Jadi	3,17	538	0,6%
Blang Baro	5,18	551	0,9%
Pulo Ie	6,5	398	1,6%
Lueng Baro	13,31	384	3,5%
Simpang Peut	10,43	387	2,7%
Blang Muko	4,63	378	1,2%
Langkak	4,89	136	3,6%
Kuala Trang	2,65	847	0,3%
Kubang Gajah	2,19	277	0,8%
Jeuram	7,46	5	149,2%
Lhok Seumot	4,2	12.065	0,03%
Keude Seumot	4,47	42	10,6%
Blang Seumot	1,71	145	1,2%
Babah Krueng	2,69	118	2,3%
Kuta Teungoh	7,03	6.954	0,1%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagan Raya, 2020

2.3.2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis.

Dilihat dari segi jumlah personil Linmas pada tahun 2012 berjumlah 852 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 1286 orang. Rasio jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) juga belum bisa

memenuhi target dan cenderung berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak anggota Linmas yang masuk usia tua dan meninggal dunia serta tidak ada regenerasi sebab kurang diminati dari kaum muda gampong karena minimnya perhatian pemerintah.

Tabel 2.56
Jumlah Linmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 – 2020

No	Tahun	Jumlah Linmas (Orang)
1	2012	852
2	2013	862
3	2014	862
4	2015	1.004
5	2016	924
6	2017	824
7	2018	1286
8	2019	1286
9	2020	1286

Sumber: Satpol PP WH dan Linmas Kab. Nagan Raya Tahun 2020

2.3.2.1.6. Sosial

A. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Sosial berupaya keras dalam melakukan pembinaan terhadap Penyandang Masalah Sosial (PMKS) guna mengurangi jumlah penurunan kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial, diantaranya seperti kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Adapun jumlah bantuan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) berdasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Dengan Kecatatan	149	42	43	44	49
2	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	2.095	706	708	710	750
3	Anak Terlantar	24	1	2	7	7
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	1	-	5	11	16
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.904	-	768	768	768
6	Korban Tindak Kekerasan	1	-	-	1	2
7	Lanjut Usia Terlantar	2.367	352	354	363	365
8	Penyandang Disabilitas	795	-	-	298	-
9	Tuna Susila	51	-	-	1	-
10	Pengemis	2	-	-	-	-
11	Gelandangan	1	-	-	-	-
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan	23	-	-	-	-
13	Korban Penyalahgunaan Napza	17	-	-	-	-
14	Fakir Miskin	9.387	-	-	6692	-
15	Rumah Tidak Layak Huni	1.415	-	-	223	-
16	Keluarga Rentan	1.693	-	-	943	-
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	25	-	-	13	-
18	Korban Bencana Alam	159	-	-	81	-
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	21	-	-	-	-
20	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	1	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab. Nagan Raya, 2020

Secara umum penduduk Kabupaten Nagan Raya tidak memiliki asuransi kesehatan dan asuransi jiwa sebagai perlindungan dan jaminan bagi keluarganya setelah meninggal dengan program asuransi bagi masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, fakir miskin dan keluarga rentan di Kabupaten Nagan Raya, menjadi perhatian Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan perlindungan sosial melalui santuan kematian. Dengan kebijakan program asuransi kematian bagi masyarakat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhannya.

2.3.2.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Kurun waktu 2012-2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2012 angka TPAK mencapai 59.41 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 61,36 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya juga berfluktuatif selama 2012-2019. Kendati demikian, adanya kemajuan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya selama dua tahun terakhir (2015-2019). Tahun 2012, angka TPT mencapai 7,63 persen. Angka TPT tersebut menurun berkisar 50 persen pada periode 2013-2019. Sampai tahun 2019, tercatat TPT di Kabupaten Nagan Raya sebesar 5.35 persen.

Gambar 2.17
Perkembangan TPAK dan TPT
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019 (persen)



Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat

pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2017, tingkat partisipasi Angkatan kerja sangat menonjol, yaitu mencapai 26,75 persen.

Berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 42,26 persen. Kemudian sektor industry pengolahan penduduk yang bekerja sebesar 37,71 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen.

Gambar 2.18
Komposisi Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Lapangan Usaha Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019



Sumber: Nagan Raya Dalam Angka Tahun 2020

2.3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

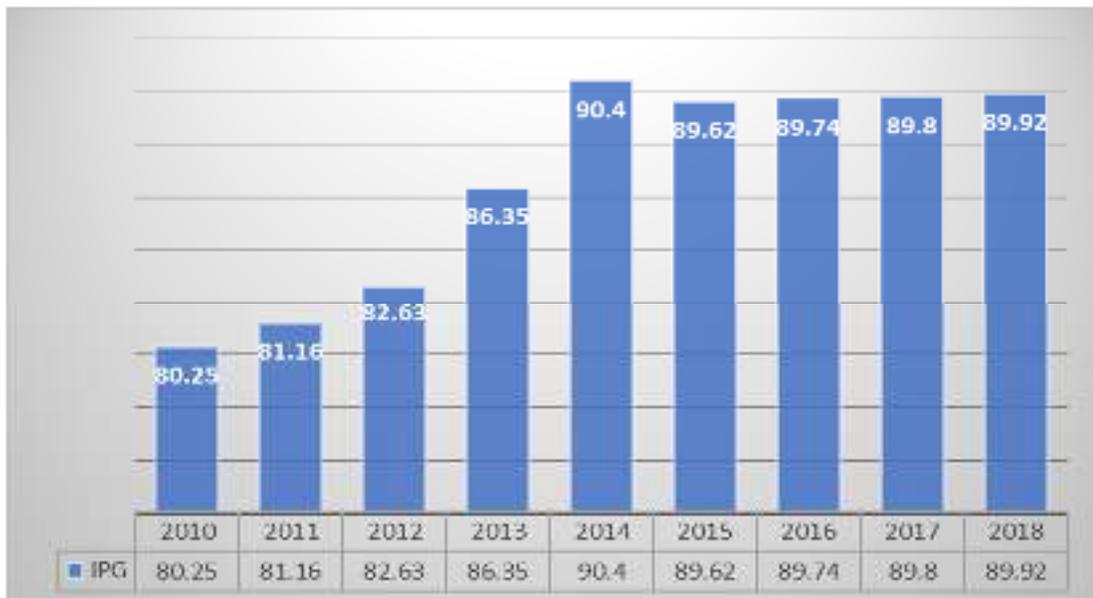
Indeks ini merupakan pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Adapun IPG Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2010 berkisar sebesar 80,25 persen, Tahun 2018 sebesar 89,92 persen. Ada kenaikan persentase sebesar 8 persen selama delapan tahun terakhir.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2012 lebih baik dari kurun waktu lima tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan

perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender.

Faktor-faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk laki-laki antara lain APS SD sederajat dan rasio jenis kelamin saat lahir, sedangkan faktor yang mempengaruhi IPG pada penduduk perempuan yaitu APS SMA sederajat, dan rasio jenis kelamin sejak lahir. Selanjutnya, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan APS SD penduduk laki-laki dan APS SMA bagi penduduk perempuan. Kesenjangan Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2010 sebesar 82,25 persen meningkat tajam hingga pada tahun 2014 sebesar 90,40 persen dan mengalami penurunan pada data terakhir tahun 2018 sebesar 89,92 persen.

Gambar 2.19
Grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2010 – 2018



Sumber : BPS Aceh, 2019

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Keterwakilan perempuan di dalam pemerintahan masih tergolong minim, dikarenakan beberapa faktor antara lain tingkat pendidikan maupun kemauan dalam berpartisipasi untuk mengatasi berbagai rintangan yang dihadapi di lembaga pemerintah dan faktor-faktor lainnya. Adapun keterlibatan perempuan

di lembaga pemerintahan Kabupaten Nagan Raya terlihat sebagaimana Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015- 2020

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di pemerintah	2,083	2,188	2,372	2,458	2,645	2,824
2	Jumlah Pekerja Perempuan	18,253	18,361	18,550	18,650	18,850	18,993
Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah		11.41	11.92	12.79	13.18	14.03	14.87

Sumber: BKPSDM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 (data diolah)

3. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK

Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dalam penyelenggaraan pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2020

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	3	4	4	4	3	3	4	4
2	Jumlah total kursi di anggota DPRK	25	25	25	25	25	25	25	25
Persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRK		12	16	16	16	12	12	16	16

Sumber: Bagian Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, 2020

4. Rasio KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Secara kuantitatif jumlah kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi di Kabupaten Nagan Raya, meskipun secara terjadi penurunan setiap tahun. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh, kasus kekerasan di Kabupaten Nagan Raya terhadap perempuan sebanyak 33 kasus, sementara kekerasan terhadap anak sebanyak 37 kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2020.

Tabel 2.60
Jumlah dan Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020

No	Sasaran Korban Kekerasan	Tahun			Jumlah	No
		2018	2019	2020		
1	Perempuan	16	14	3	33	KDRT, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Penelantaran, Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Trafficking, Eksploitasi Seksual, Lain-lain,
2	Anak	17	14	6	37	Kekerasan Psikis, Kekerasan Fisik, Pelecehan Seksual, Sexual (Incess), Sodomi, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi Ekonomi, Eksploitasi Seksual, KDRT, Pemerkosaan, ABH, Lain-Lain

Sumber : P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aceh Per Juni Tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, maka mendorong Kabupaten Nagan Raya untuk lebih perhatian pada anak dan merencanakan untuk Kabupaten Layak Anak.

Sementara kejadian KDRT di Kabupaten Nagan Raya yang dilaporkan dan tercatat pada tahun 2013 sebanyak 9 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,024 persen, pada tahun 2014 tercatat 16 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,041 persen dan pada tahun 2015 dan 2016 tercatat 37 kasus dengan rasio

KDRT adalah 0,092 persen. Tahun 2017 tercatat 5 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,012 persen kasus. Tahun 2018 tercatat 2 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,005 persen dan pada tahun 2019 tercatat 3 kasus dengan rasio KDRT adalah 0,007 persen yang terjadi telah berhasil diselesaikan.

Tabel 2.61
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013- 2019

NO	URAIAN	TAHUN						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah KDRT	9	16	37	37	5	2	3
2	Jumlah Rumah Tangga	38202	38598	39614	40419	41214	42019	42737
Rasio KDRT		0,024	0,041	0,093	0,092	0,012	0,005	0,007

Sumber: DPMGP4 dan BPS Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

5. Rasio Angka Partisipasi Murni Perempuan terhadap laki-laki berdasarkan jenjang pendidikan

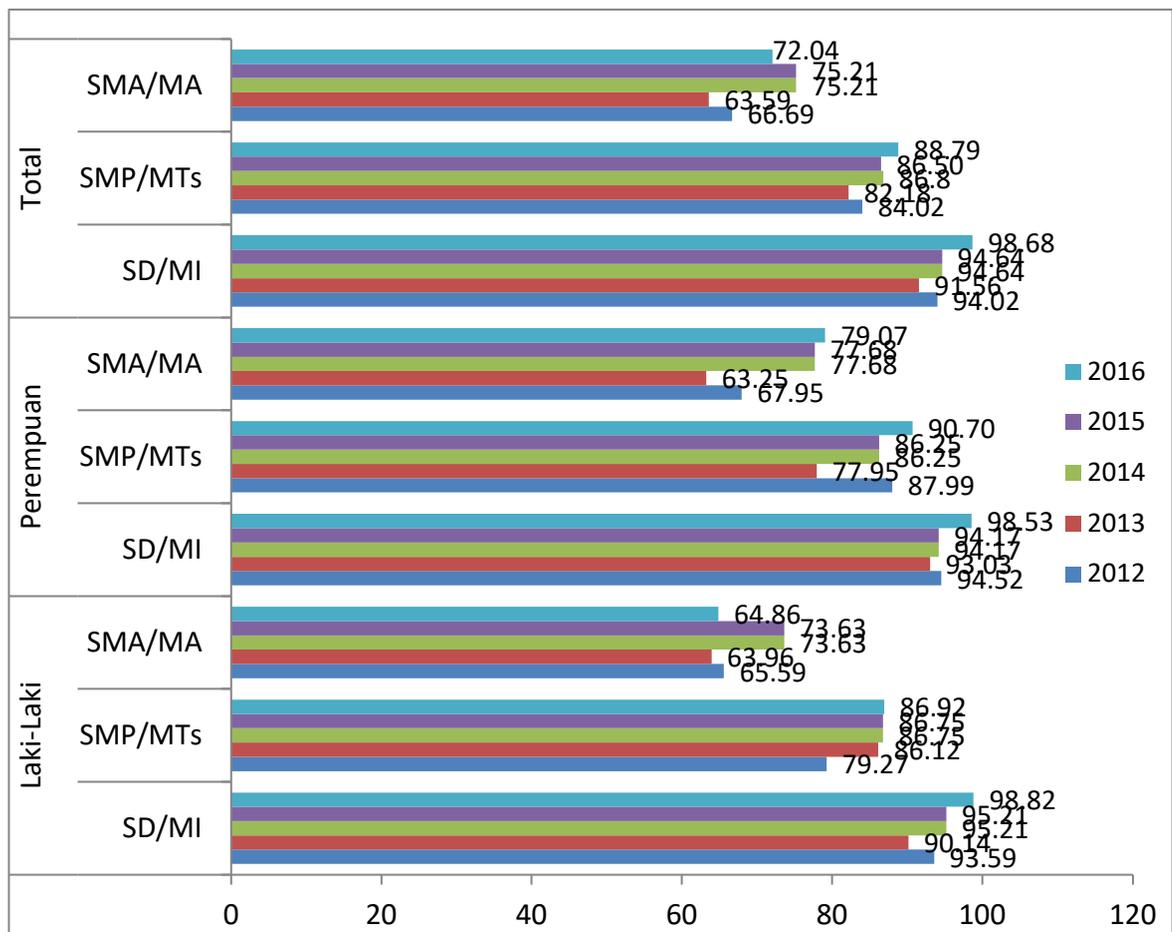
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM memperlihatkan kemajuan yang menggembirakan. Tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 98,82 persen tahun 2016, jauh lebih tinggi dari tahun 2012 yang sebesar 94,02 persen.

Kondisi APM yang memprihatinkan terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA, meskipun adanya perbaikan selama lima tahun terakhir. Capaian APM SMP/MTs hanya sebesar 86,92 persen dan APM SMA/MA sebesar 64,86 persen tahun 2016. Angka APM tersebut belum mencapai angka ideal atau belum mencapai target pemerintah. Adapun tahun 2012, APM SMP/MTs sebesar 84,02 persen dan APM SMA/MA sebesar 66,69 persen.

Tidak adanya disparitas yang mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian APM. Data tahun 2016, memperlihatkan bahwa APM

perempuan cenderung lebih baik dari APM laki-laki pada pendidikan SMA/MA, kendati belum mencapai APM ideal. Tercatat APM perempuan pada pendidikan SMA/MA sebesar 79,07 persen dan APM laki-laki sebesar 64,86 persen. Sementara pada tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APM laki-laki lebih rendah dengan pencapaian APM perempuan. Upaya perbaikan dan peningkatan APM pada tingkat pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA dilakukan melalui peningkatan pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin serta memastikan peserta didik di setiap kecamatan (termasuk desa) mengecap pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA.

Gambar 2.20
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Aceh, 2017

Selanjutnya Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017-2020 juga bervariasi antar jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, capaian APM tahun 2017 sebesar 22.675 persen, tahun 2018 sebesar 22.463,

tahun 2019 sebesar 18.245 dan tahun 2020 sebesar 18.148. Pada tingkat SMP/Mts, capaian APM tahun 2017 sebesar 8.116 persen, tahun 2018 sebesar 9.279, tahun 2019 sebesar 6.921 dan tahun 2020 sebesar 7.109. Selanjutnya pada tingkat SMA/MA, capaian APM tahun 2017 sebesar 7.121 persen, tahun 2018 sebesar 4.235, tahun 2019 sebesar 14.375 dan tahun 2020 sebesar 4.232. Lebih rinci perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenjang pendidikan dan jenis Kelami tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.62
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

NO	URAIAN	JENIS								TOTAL
		LAKI-LAKI				PEREMPUAN				
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
1	SMA/MA	3.269	2.997	2.043	1.976	3.852	1.238	2.332	2.256	4.232
2	SMP/Mts	4.297	5.318	3.561	3.661	3.819	3.961	3.360	3.448	7.109
3	SD/MI	11.827	11.757	9.444	9.351	10.848	10.706	8.801	8.797	18.148

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, 2020

Selanjutnya perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh dan Nasional pada tahun 2019 adalah Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 tercatat 95,45 persen. Angka ini lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan APM Aceh yaitu 95,39 % dan berada di atas rerata APM nasional yaitu 92,88 persen.

Sementara itu, Kabupaten Nagan Raya tingkat APM SMP/ MTs yaitu 77.24 masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional yaitu 79.02 persen dan 77.45 persen. Demikian juga dengan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMA/MA, Kabupaten Nagan Raya masih berada lebih unggul yaitu 69,37 persen di dibandingkan dengan APM Aceh yaitu 69,27. Sedangkan APM SMA/MA Kabupaten Nagan Raya berada di bawah APM Nasional yaitu 70,90.

Tabel 2.63
Angka Partisipasi Murni (APM) Kab. Nagan Raya Dibandingkan dengan Provinsi Aceh Tahun 2019

APM berdasarkan Jenjang Pendidikan	Kabupaten Nagan Raya	Aceh	Nasional
APM SD/MI	95,45	95,39	92,88
APM SMP/MTs	77,24	79,02	77,45
APM SMA/MA	69,37	69,27	70,90

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2020

2.3.2.2.3. Pangan

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Pada tahun 2012-2019 terjadi surplus beras dan pangan setara beras di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini menunjukkan produksi beras untuk mencukupi kebutuhan beras penduduk masih terjadi surplus yang dapat dikonsumsi penduduk di luar Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.64
Produksi Beras Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

No	Jenis/Macam	2012	2013	2014	2015	2015	2017	2018	2019
1	Produksi Beras (kg)	63,380,200	128,256,700	99,748,285	109,586,100	110,598,150	109,892,900	111,537,205	32,501,300
2	Kebutuhan Beras (kg)	18,255,600	19,031,520	19,493,760	18,608,400	18,986,760	19,493,760	19,493,760	20,120,640
3	Surplus Beras (kg)	45,124,600	109,225,180	80,254,525	90,977,700	91,611,390	90,339,140	92,043,445	12,829,490

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2020

2.3.2.2.4. Pertanian

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. pemerintah akan memberikan status legal bagi tanah-tanah yang sudah diduduki oleh masyarakat, termasuk yang berasal dari pelepasan kawasan hutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Redistribusi dan legalisasi aset/tanah bagi masyarakat miskin/ekonomi

lemah merupakan salah satu program prioritas daerah dalam mendukung reformasi agraria.

Informasi yang terkait dengan lahan menjadi sangat penting dalam pengembangan lahan tersebut secara rapi, adil dan penggunaan yang tepat. Maka dibutuhkan Sistem Informasi Pertanahan yang efektif, efisien dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan reformasi agraria.

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Konflik atas tanah yang berkepanjangan, yang melibatkan komunitas, perusahaan perkebunan serta pertarungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sengketa, konflik dan perkara pertanahan sepertinya tidak pernah surut, bahkan cenderung terus meningkat baik intensitas maupun keragamannya, seiring dengan semakin sulitnya akses untuk memiliki tanah dan bertambahnya kesenjangan posisi tawar-menawar antara ketiga aktor pembangunan yakni pemerintah, swasta dan masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah.

Penanganan dan penyelesaian terhadap konflik pertanahan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang meliputi mekanisme pelayanan pengaduan dan informasi, pengkajian, penanganan, dan penyelesaian konflik pertanahan, serta bantuan hukum dan perlindungan hukum. Penanganan konflik pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. Penanganan konflik pertanahan dilaksanakan secara komprehensif melalui kajian akar permasalahan, pencegahan dampak konflik, dan penyelesaian konflik.

2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah tahunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 adalah 4,22 % meningkat 7,77% pada tahun 2019 selama 2016 sampai 2019 peningkatannya mencapai 3,55%. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada Tabel 2.65 dibawah ini.

Tabel 2.65
Timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2016-2019

Uraian	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Volume Timbulan Sampah yang ditangani (m ³)	16,3	25,86	28,8	29,95
Total Timbulan Sampah (m ³)	386,56	7,62	7,62	7,77
Timbulan sampah yang ditangani (%)	4,22%	385,45	385,45	385,45

Sumber: DLH Nagan Raya 2020

2.3.2.2.6. Perhubungan

Sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jalur angkutan perairan/laut perlu menjadi perhatian pemerintah, hal ini dikarenakan jalur pengangkutan yang tersedia terutama untuk pengangkutan barang hanya lewat darat sehingga untuk mendukung pengembangan Kabupaten Nagan Raya sebagai Kawasan Agro Industri maka pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan juga fasilitas lainnya yang dapat mendukung hadirnya transportasi laut terutama untuk pengangkutan barang.

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi

akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Selama tahun 2012-2019, rasio panjang jalan kabupaten terhadap kendaraan penumpang di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertambahan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang.

Tabel 2.66
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

Uraian	Tahun						
	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019
Jalan Kabupaten	420,74	420,83	420,84	924,43	924,421	924,421	924,421
Jumlah Kendaraan Penumpang	100	82	82	102	202	205	216
Rasio	4,2	5,13	5,13	9,06	4,58	4,51	4,28

Sumber: Olahan Data Primer

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan di Kabupaten Nagan Raya tercatat pada tahun 2012 adalah 4,2, pada tahun 2013 adalah 5,13, pada tahun 2014 adalah 5,13 dan pada tahun 2019 adalah 4,28..

1. Perhubungan Udara

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Adapun jumlah penumpang datang dan berangkat melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.67
Jumlah Penumpang Datang Dan Berangkat
di Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2020

Uraian	Tahun								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penumpang Datang	16.972	16.972	21.550	23.681	24.005	21.803	19.601	18.725	4.773
Penumpang Berangkat	14.592	14.592	22.437	25.599	25.249	21.768	18.288	18.500	4.297

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2012, masyarakat bepergian ke luar daerah melalui bandara Cut Nyak Dhien sebanyak 14.592 orang, naik hingga 25.249 orang pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2019 sebanyak 18.500 orang. Demikian pula masyarakat yang datang melalui bandara Cut Nyak Dhien pada tahun 2012 adalah 16.972 orang, naik hingga 24.005 orang pada tahun 2016 dan menurun pada tahun 2020 sebanyak 4.297 orang. Bandar Udara Cut Nyak Dhien menjadi bandara utama, setelah bandar udara T. Cut Ali di Kabupaten Aceh Selatan yang menjadi primadona masyarakat/pengusaha dalam bepergian untuk wilayah barat Provinsi Aceh.

2. Perhubungan Laut

Di samping transportasi darat, jalur transportasi laut juga sangat berperan dalam mendukung kelancaran perputaran orang, barang, dan jasa. Perannya juga begitu besar dalam percepatan ekonomi daerah di wilayah pesisir. Namun, aktivitas jasa transportasi laut di Nagan Raya belum ada. Kondisi ini berkait erat minimnya sarana dan prasarana pendukung.

2.3.2.2.7. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi

informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat. Layanan komunikasi berupa telepon seluler/handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.

2.3.2.2.8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi usaha kecil dan menengah (UKM) yang cukup menggembirakan. Data Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Nagan Raya tahun 2020, mencatat bahwa jumlah industri tradisional di Nagan Raya adalah sebanyak 3587 unit pada tahun 2019. Penyumbang terbanyak pada industri ini pada tahun 2019 adalah industri dari besi dan industri jasa, masing-masing sebanyak 967 unit. Jumlah industri barang lainnya berada pada posisi berikutnya, yaitu makanan dan tembakau dan industri dari bahan galian, masing-masing sebanyak 772 unit.

Sementara pada tahun 2018, mencatat bahwa jumlah industri tradisional di Nagan Raya adalah sebanyak 4756 unit. Penyumbang terbanyak pada industri ini adalah industri dari bahan galian sebanyak 1364 unit. Jumlah industri jasa berada pada posisi berikutnya industri makanan dan tembakau, yaitu sebanyak 1254 unit. industri kayu dan industri barang lainnya masing-masing sebanyak 557 unit.

Tabel 2.68
Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2016 (Unit)

Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau	Industri Kain dan Kulit	Industri Kayu	Industri dari Besi	Industri dari Bahan Galian	Industri dari kertas	Industri Barang Lainnya	Industri Jasa	Jumlah
Darul Makmur	96	102	53	14	1	7	24	32	329
Tripa Makmur	2	22	9	3	-	1	2	17	56
Kuala	107	57	18	22	496	16	11	25	752
Kuala Pesisir	88	58	19	13	1	1	24	70	292
Tadu Raya	32	15	11	2	1	2	19	47	129
Beutong	73	32	20	1	-	6	74	53	259
Beutong Ateuh Banggalang	3	2	4	-	-	-	5	29	43
Seunagan	228	102	28	11	-	13	199	68	650
Suka Makmue	107	53	10	1	4	5	34	25	239
Seunagan Timur	140	79	29	9	1	6	150	54	468
Jumlah	876	522	201	76	505	75	542	420	3.217

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kab. Nagan Raya, 2017

Tabel 2.69
Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2017 (Unit)

Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau	Industri Kain dan Kulit	Industri Kayu	Industri dari Besi	Industri dari Bahan Galian	Industri dari kertas	Industri Barang Lainnya	Industri Jasa	Jumlah
Darul Makmur	96	102	53	14	1	7	24	32	329
Tripa Makmur	2	22	9	3	-	1	2	17	56
Kuala	107	57	18	22	496	16	11	25	752
Kuala Pesisir	88	58	19	13	1	1	24	70	292
Tadu Raya	32	15	11	2	1	2	19	47	129
Beutong	73	32	20	1	-	6	74	53	259
Beutong Ateuh Banggalang	3	2	4	-	-	-	5	29	43
Seunagan	228	102	28	11	-	13	199	68	650
Suka Makmue	107	53	10	1	4	5	34	25	239
Seunagan Timur	140	79	29	9	1	6	150	54	468
Jumlah	876	522	201	76	505	75	542	420	3.217

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kabupaten Nagan Raya, 2017

Tabel 2.70
Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2018 (Unit)

Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau	Industri Kain dan Kulit	Industri Kayu	Industri dari Besi	Industri dari Bahan Galian	Industri dari kertas	Industri Barang Lainnya	Industri Jasa	Jumlah
Darul Makmur	113	109	57	4	1	0	27	217	528
Tripa Makmur	36	26	11	1	0	0	6	29	109
Kuala	173	81	22	17	513	0	34	150	990
Kuala Pesisir	117	62	34	3	1	0	27	126	370
Tadu Raya	47	41	15	2	0	0	2	41	148
Beutong	106	40	21	1	34	0	67	46	315
Beutong Ateuh Banggalang	13	4	2	0	0	0	6	5	30
Seunagan	278	188	28	7	4	0	29	184	718
Suka Makmue	148	71	10	1	4	0	18	82	334
Seunagan Timur	223	150	30	9	0	0	27	87	526
Jumlah	1254	772	230	45	557	0	243	967	4068

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kab. Nagan Raya, 2020

Tabel 2.71
Kondisi Industri Tradisional di Kabupaten Nagan Raya, 2019 (Unit)

Kecamatan	Industri Makanan dan Tembakau	Industri Kain dan Kulit	Industri Kayu	Industri dari Besi	Industri dari Bahan Galian	Industri dari kertas	Industri Barang Lainnya	Industri Jasa	Jumlah
Darul Makmur	125	109	57	4	1	0	35	217	548
Tripa Makmur	40	26	11	1	0	0	9	29	116
Kuala Pesisir	220	81	24	17	513	0	51	150	1056
Tadu Raya	127	62	34	3	1	0	35	126	388
Beutong	52	41	15	2	0	0	4	41	155
Beutong Ateuh Banggalang	115	40	21	1	34	0	72	46	329
Seunagan	13	4	2	0	0	0	7	5	31
Suka Makmue	299	188	31	7	4	0	42	184	755
Seunagan Timur	150	71	12	1	4	0	27	82	347
Jumlah	1364	772	237	45	557	0	314	967	4256

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Perkoperasian Kab. Nagan Raya, 2020

Industri yang berkembang di Kabupaten Nagan Raya pada umumnya masih skala kecil dan menengah. Distribusi aktivitas industri tersebut relatif merata di setiap kecamatan serta memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing wilayah. Sentral pengembangan industri makanan dan tembakau terdapat di Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur, dan Kuala Pesisir. Mayoritas industri kayu berada di Seunagan, Beutong Ateuh Banggalang, Seunagan Timur, dan Beutong. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terlihat pada beberapa indikator kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.72
Jumlah dan Status Koperasi
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

URAIAN	SATUAN	TAHUN								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Unit	202	201	201	201	190	194	170	141	150
Jumlah Koperasi Aktif	Unit	62	83	83	83	83	85	85	87	96
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Unit	140	113	113	113	113	109	85	54	54
Jumlah Koperasi yang dibangun	Unit	22	20	20	20	20	20	20	25	25
Jumlah Anggota Koperasi	Unit	6,282	6.330	6.330	6.370	6.400	9519	8964	5859	8494

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Pada tahun 2012, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 202 unit koperasi. Angka tersebut menurun menjadi 150 unit pada tahun 2020. Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan dengan lahirnya undang-undang desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuhkembangkan percepatan pembangunan desa/gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota dengan mengikuti segala transaksi sesuai dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah.

Badan Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran sebagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. LKM memiliki fungsi sebagai

lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

2.3.2.2.9. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2013 dan 2014 jumlah investor (PMDN) adalah 38 dan (PMA) 12 perusahaan, pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 13 perusahaan untuk PMDN dan 6 perusahaan untuk PMA, pada tahun 2016 jumlah investor adalah 6 perusahaan untuk PMDN dan 5 Perusahaan untuk PMA, , tahun 2017 jumlah investor PMDN adalah 11 perusahaan dan PMA 36 Perusahaan, tahun 2018 jumlah investor PMDN adalah 11 perusahaan dan PMA 38 Perusahaan, untuk tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah investor PMDN adalah 11 perusahaan dan untuk PMA adalah 36 Perusahaan. penurunan jumlah investor ini terjadi karena ada beberapa perusahaan yang tidak melapor sementara perusahaan tersebut masih aktif beroperasi.

Tabel 2.73
Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013-2020

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PMA	12	12	6	5	11	11	11	11
2	PMDN	38	38	13	6	36	38	36	36
3	Jumlah	50	50	19	11	47	49	49	47

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investasi di sektor Perkebunan merupakan investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diikuti investasi sektor kelistrikan seperti pembangunan PLTU di suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong, Beutong Ateuh Banggalang dan Kecamatan Darul Makmur. Dengan

nilai investasi mencapai Rp. 16.602.475.500,- atau 16,60 Milyar Rupiah pada tahun 2013 dan Rp. 21.550.941.000, atau 21,55 Milyar Rupiah pada Tahun 2014, mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi Rp. 177.149.935.170,- atau 177,15 Milyar rupiah, dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi Rp. 28,654,616,200.

Pada Tahun 2013 terdapat 38 perusahaan dalam negeri yang melakukan investasi di Kabupaten Nagan Raya dengan nilai investasi sebesar Rp.1.807.920.251.822,- atau 1,8 Milyar rupiah. Pada Tahun 2014 terdapat 38 perusahaan dalam negeri yang berinvestasi dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.251.350.778.455,- atau 2,25 Milyar rupiah. Dari Tahun 2013 sampai dengan 2015 penanaman modal dalam negeri terus mengalami peningkatan, pada tahun 2015 nilai investasi perusahaan dalam negeri di Kabupaten Nagan Raya mencapai Rp. 83.170.758.724,- atau 83,2 Milyar rupiah. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 77,943,047,896.

Pertumbuhan nilai investasi berskala nasional, yaitu investasi penanaman modal dalam negeri (PNDM) dan penanaman modal asing (PMA) dari tahun 2013 sampai dengan 2016 di kabupaten Nagan Raya fluktuatif, dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp. 106,597,664,096,-. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.74
Pertumbuhan Nilai Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2013-2020**

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi berskala Nasional (PMA+PMDN)	1.824.522.727.322	2.272.901.719.455	260.320.693.894	496.062.170.374	257.156.205.571	215.366.586.851	207.952.057.244	106.597.664.096
2	PMA	16.602.475.500	21.550.941.000	177.149.935.170	89.792.941.770	8.689.110.204	18.980.967.123	25.731.266.739	28.654.616.200
3	PMDN	1.807.920.251.822	2.251.350.778.455	83.170.758.724	406.269.228.604	248.467.093.367	196.385.619.728	182.220.790.505	77.943.047.896

Sumber : DPMPSTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Jumlah penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja PMA ditambah dengan jumlah tenaga kerja PMDN, jumlah penyerapan tenaga kerja di kabupaten Nagan Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2017 terus

mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah serapan tenaga kerja sebesar 2.262 orang, tahun 2014 sebesar 2.351 orang, tahun 2015 sebesar 2.721 orang, tahun 2016 sebesar 3.252 orang dan pada tahun 2017 sebesar 8.737 orang, pada tahun 2018 jumlah penyerapan tenaga kerja di kabupaten Nagan Raya sedikit mengalami penurunan menjadi 8.666, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 7.465 untuk tahun 2020 jumlah penyerapan tenaga kerja di kabupaten Nagan Raya kembali mengalami peningkatan menjadi 8.311.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 45,24 dan pada tahun 2016 menjadi 286,54. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.75
Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2013-2020**

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tenaga Kerja PMA	1957	1958	24	65	1.831	1.793	1.761	2.164
2.	Tenaga Kerja PMDN	305	393	2697	3087	6.905	6.873	5.704	6.147
3.	Jumlah Penyerapan tenaga kerja	2.262	2.351	2.721	3.152	8.737	8.666	7.465	8.311
4.	Jumlah PMA/PMDN	50	50	19	11	43	43	43	43
5.	Rasio daya serap tenaga kerja	45,24	47,02	143,21	286,54		-	-	-

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

2.3.2.2.10. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur, sejahtera dan berkualitas, maka sangat dibutuhkan generasi muda yang benar-benar tangguh, berbobot dan sehat. Di

bawah ini data tentang jumlah klub olahraga serta data lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tabel berikut ini

Tabel 2.76
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah lapangan /sarana olahraga	Unit	40	40	40	40	40
2	Jumlah Klub Olah raga	Klub	197	197	197	197	197
3	Jumlah cabang Olah raga	Buah	10	10	10	10	10
4	Jumlah Organisasi kepemudaan	Buah	7	7	7	7	7
5	Jumlah Pemuda	Orang	39,860	39,860	39,860	39,860	39,960

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah lapangan/sarana olahraga pada sampai dengan tahun 2016 berjumlah 40 unit. Jumlah klub olahraga yang menjadi wadah dalam pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nagan Raya sampai tahun 2017 adalah sebanyak 197 klub olah raga dengan jumlah cabang olah raga sebanyak 10 cabang.

Tabel 2.77
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Indikator	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan pembinaan olahraga	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	00.05	00.00	00.07	00.04	00.08	84.00.00	88.30.00	89.98	90.48.00
3	Cakupan pembinaan atlet muda	00.51	0,0431	00.48	00.51	00.29	30.45.00	32.90	45.80	50.38.00
4	Jumlah atlet berprestasi	0	0	0	6	3	2	17	19	22
5	Jumlah prestasi olahraga	3	0	5	3	5	5	17	22	8

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Nagan Raya sangat minim memperoleh prestasi di bidang olahraga, hal ini ditunjukkan dengan perolehan 5 prestasi pada tahun 2016, yaitu cabang olahraga silat, karate, taekwondo, bulu tangkis dan tenis meja. Minimnya jumlah prestasi olahraga ini juga sangat dipengaruhi dengan jumlah atlet yang berprestasi yang juga mengalami penurunan, pada tahun 2016 hanya ada 3 orang atlet yang berprestasi, yaitu atlet cabang olahraga silat, taekwondo dan bulutangkis. Hal ini juga disebabkan karena sedikit sekali pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap para atlet muda, hal ini ditunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016 pembinaan tersebut mengalami penurunan yaitu 0,29% pada tahun 2016. Selanjutnya untuk tahun 2017 Jumlah prestasi adalah 5 prestasi, meningkat pada tahun 2018 menjadi 17 prestasi, masih terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 22 prestasi. Dan ditahun 2020 Jumlah prestasi di bidang olah raga kembali menurun hingga mencapai 8 prestasi.

2.3.2.2.11. Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya.

Adapun benda situs dan kawasan cagar budaya yang yang dikelola secara terpadu juga tidak mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tahun 2012 s/d 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran. Untuk tahun 2017 s/d 2020 bahkan sudah tidak ada lagi cagar budaya yang dikelola secara terpadu . Untuk benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2017 dan 2018 berjumlah 3 dan bertambah menjadi 4 benda, situs dan kawasan benda, situs dan kawasan yang dilestarikan ditahun 2019. Padahal Kabupaten Nagan Raya memiliki 17 tempat bersejarah, 18 mesjid dan 45 makam.

Pengembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat.

Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian.

2.3.2.2.12. Perpustakaan

Jumlah perpustakaan Kabupaten di Nagan Raya dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 hanya satu, sedangkan perpustakaan gampong mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2012 jumlah perpustakaan gampong sebanyak 34 unit, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6 unit.

Tabel 2.78
Jumlah Pustaka Daerah Menurut Kecamatan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 (Unit)

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Seunagan	5	5	5	5	7	8	8	8	8
Beutong	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Seunagan Timur	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Suka Makmue	3	5	5	5	5	5	6	6	6
Kuala	5	6	6	6	6	6	8	9	10
Kuala Pesisir	4	5	5	5	6	6	7	7	7
Tadu Raya	3	4	4	4	4	4	4	4	5
Darul Makmur	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Tripa Makmur	2	3	3	3	3	3	3	3	5
BAB	1	2	3	2	2	2	2	2	2
Jumlah	34	41	42	41	44	45	49	50	57

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Nagan Raya Tahun 2020

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1. Pariwisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.79
Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis objek wisata	Jumlah Objek Wisata
1	Beutong	Wisata Alam Krueng Isep	5
		Panorama Gunung Singgah Mata	
		Bendungan Irigasi Jeuram	
		Masjid Dayah	
		Makam Teungku Di Seumot	
2	Kuala Pesisir	Wisata Pantai Indah Naga Permai	2
		Wisata Pantai Seunagan	
3	Tripa Makmur	Wisata Pantai Suak Dama	3
		Arung Jeuram Krueng Tripa	
		Situs Kerajaan Islam Ujong Raja	
4	Tadu Raya	Danau Laut Tadu	2

		Air Terjun Krueng Antoeng Alue Gani	
5	Seunagan Timur	Makam Habib Muda Seunagan	1
6	Kuala	Mesjid Jamik Syaikhunna Gudang Buloh	1
7	Suka Makmue	Taman Makam Pahlawan	1
8	Darul Makmur	Air Terjun Alue Waki	1
9	Beutong Ateuh Banggalang	Batee Meucureh Cut Nyak Dhien	1
10	Seunagan	Makam Indatu Kuta Aceh	1
Jumlah			18

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2020

Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Untuk objek wisata di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 di kecamatan beutong terdapat 5 objek wisata yaitu wisata alam krung isep, panorama gunung singgah mata, bendungan irigasi jeuram dan makam teungku di seumot, di kecamatan kuala pesisir terdapat 2 objek wisata yaitu wisata pantai indah naga permai dan wisata pantai Seunagan, di kecamatan Tripa Makmur terdapat 3 objek wisata yaitu wisata pantai suak dama, arung jeuram krueng tripa dan situs kerajaan islam ujong raja, di kecamatan Tadu Raya terdapat 2 objek wisata yaitu danau laut tadu dan air terjun krueng antoeng aluen gani, di kecamatan seunagan timur terdapat 1 objek wisata yaitu Makam habib muda seunagan, di kecamatan kuala terdapat 1 objek wisata yaitu mesjid jami' Syaikhunna gudang buloh, dikecamatan suka

makmue terdapat 1 objek wisata yaitu taman makam pahlawan, di kecamatan darul makmur terdapat 1 objek wisata yaitu air terjun alue waki, dikecamatan beutong ateuh banggalang terdapat 1 objek wisata yaitu batee meucureh cut nyak dhien dan di kecamatan seunagan terdapat 1 objek wisata yaitu makam indatu kuta aceh.

Jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel / wisma / losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 4 unit hotel/wisma/losmen yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata memadai. Jumlah sarana dan fasilitas pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Jenis Sarana	Satuan	Tahun								
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hotel/Wisma/Losmen	Unit	4	4	5	5	5	4	4	4	4
2	Rumah Makan / Restoran	Unit	25	25	25	26	27	16	16	16	16
3	Warung Kopi/Cafe	Unit	15	26	27	28	30	23	23	23	23

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Tahun 2020

2.3.3.2. Pertanian

Dalam kurun waktu tahun 2012-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 35-45 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 30-40 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam lima tahun terakhir. Sedangkan dalam kurun waktu tahun 2012-2020 sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga masih memberi kontribusi terbesar dan terus meningkat terhadap PDRB

atas dasar harga berlaku yang berada di sekitar angka 40-50 persen. Subsektor Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian juga masih merupakan subsektor yang paling dominan. Hal ini terlihat dari kontribusi yang mencapai 40-45 persen dari total PDRB atas dasar harga berlaku dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.81
Distribusi Persentase PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, 2012-2019 (Persen)

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.00	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,68	40,37	40,75	42,59	45,55	45,89	45,82	45,57
	1. Pertanian, Peternakan dan Jasa Pertanian	32,68	34,78	35,13	37,05	40,05	40,47	40,45	40,29
	2. Kehutanan dan Penebangan kayu	3,48	3,53	3,56	3,48	3,44	3,35	3,33	3,26
	3. Perikanan	1,99	2,05	2,05	2,05	2,07	2,06	2,04	2,02

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya 2020

Komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar. Tahun 2012, areal lahan yang ditanami padi sebanyak 17.348 ha. Luas lahan tanam padi tersebut meningkat drastis menjadi 25.969,4 .ha tahun 2015. Akhir tahun 2016, lahan sawah yang ditanami padi bertambah menjadi 34.527,1 ha. Tahun 2016, produksi padi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 170.15 ton, tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2019 pruduksi pada 130.582 ton dengan 73.0 ton/ha.

Tabel 2.82
Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi								
	Produksi (ton)	97,508	197,318	153,458	168,594	170,151	181.000	180.278	130.582
	Luas areal tanam(ha)	17,348	33,940	33,242	25,969	34,527	25.609	25.111	29.199
	Luas areal panen (ha)	17,348	33,504	31,403	25,969	26,177	24.981	24.866	17.888
	Produktivitas padi (ton/ha)	56.2	58.9	48.9	64.9	65	7.25	7.25	7.30
2	Jagung								
	Produksi(ton)	1023	1152	240	222.6	309	4.096	5.363	5.600
	Luas areal tanam (ha)	1205	128	245	284	730	540	755	745
	Luas areal panen (ha)	1176	128	240	212	281	512	650	640
	Produktivitas jagung(ton/ha)	20.6	20.9	33.5	35	64.5	8.00	8.25	8.75
3	Kedelai								
	Produksi (ton)	17340	10540	17000	13600	15400	950	1.119	782.9
	Luas areal tanam (ha)	860	577	85	57	637	530	637	450
	Luas areal panen (ha)	860	527	85	68	407	500	589	412
	Produktivitas kedelai(ton/ha)	13.1	13.2	12.3	17.6	23.1	1.90	1.90	1.90
4	Kacang Tanah								
	Produksi (ton)	4950	486	68400	460	567	680	756	1.500
	Luas areal tanam (ha)	1.22	1128	171	94	94	164	155.0	450.0
	Luas areal panen (ha)	1.22	1128	171	94	94	170.0	189.0	375.0
	Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)	118.6	18.4	19.3	20	34	4.00	4.00	4.00
5	Kacang Hijau								
	Produksi (ton)	219	37.0	15.45	63.0	49.4	37.5	37.5	30
	Luas areal tanam (ha)	150	26	21	41	42	30	30	32
	Luas areal panen (ha)	146	25	10	31	31	25	25	20
	Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)	0.95	0.71	0.71	12	15	1.5	1.5	1.5
6	Ubi Kayu								
	Produksi (ton)	1071	879	870	222	1241	3.186	2.403	2.547
	Luas areal tanam (ha)	385	332	305	69	152	366	276	309
	Luas areal panen (ha)	357	293	290	69	104	354	267	283
	Produktivitas ubi kayu (ton/ha)	20.6	20.9	33.5	35	64.5	9.00	9.00	9.00
7	Ubi Jalar								
	Produksi (ton)	680	126	250	170	1088	780	351	695.5
	Luas areal tanam (ha)	301	72	113	52	84	130	77	126
	Luas areal panen (ha)	272	65	100	68	83	120	54	107
	Produktivitas ubi jalar (ton/ha)	101	98.3	98.4	101	250	6.5	6.5	6.5

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2012-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.83
Pembinaan Kelompok Tani
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Uraian	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN)	180	497	505	786	959	290	516	406	446
2	Jumlah kelompok tani	705	740	1,292	1,107	1,107	1,107	1,230	1,235	1,481
3	Cakupan bina kelompok tani (%)	26	67	39	87	87	86.63	86.70	86.75	87.75

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang besar dalam peternakan, terutama ternak besar sapi dan kerbau. Potensinya juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan mengingat masih tersedianya bahan baku sebagai sumber pakan ternak. Selama tahun 2020, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya cenderung berluktuatif. Adapun kerbau sebanyak 8.505, kemudian sapi 11.183 ekor, kambing 7.054 ekor dan domba 1.213 ekor.

Tabel 2.84
Perkembangan Populasi Ternak
Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 (Ekor)

Kecamatan	Jenis Ternak (ekor)			
	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
Darul Makmur	2.530	213	1.116	223
Tripa Makmur	978	603	700	57
Kuala	1.356	1.110	1.035	83
Kuala Pesisir	2.723	562	698	130
Tadu Raya	2.231	319	503	219
Beutong	50	1.203	114	75
Beutong Ateuh Bangga	46	62	221	27
Seunagan	454	1.669	1.368	141
Suka Makmue	594	1.387	1.062	117
Seunagan Timur	221	1.377	237	141
Total	11.183	8.505	7.054	1.213

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Sentral pemeliharaan sapi terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Kecamatan Darul Makmur. Beberapa kecamatan lainnya yang merupakan juga sentral pemeliharaan sapi meliputi Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala. Untuk peternakan kerbau, sentral pemeliharaannya terdapat di Kecamatan Seunagan, disamping itu juga Kecamatan Suka Makmue, Seunagan Timur, kuala dan Beutong. Populasi ternak besar dan kecil menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di atas.

2.3.3.3. Perkebunan

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi areal yang luas untuk pengembangan perkebunan mencapai 77.164 Ha. Komoditas kelapa sawit merupakan andalan perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Kurun waktu delapan tahun terakhir (2012-2019), perkembangan luas areal dan produksi kelapa sawit terus meningkat signifikan. Tahun 2012, tercatat luas areal perkebunan kelapa sawit 39,322 ha, sementara tahun 2019 meningkat mencapai 51,321 ha.

Tabel 2.85
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas
Kelapa Sawit di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi Kelapa Sawit (ton)	Produktifitas Kelapa Sawit Kg/Ha /Thn
1	2012	39,322	144,280	3.67
2	2013	40,215	195,875	4.87
3	2014	40,556	195,827	4.83
4	2015	42,349	224,453	5.5
5	2016	49,400	316,164	6.4
6	2017	50,664	115,078	3.147
7	2018	51,566	108,354	2.976
8	2019	51,321	529,137.25	14.312

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2020

Luas tanam yang cenderung bertambah berimplikasi positif terhadap peningkatan produksi kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2019, tercatat produksi kelapa sawit di Nagan Raya sebanyak 529.137,25 ton, meningkat dari produksi tahun 2012 (sebanyak 144,280 ton).

Karet merupakan komoditas andalan ekspor dan terus dikembangkan petani di Nagan Raya. Luas areal yang ditanami petani memperlihatkan peningkatan. Tahun 2012, tercatat areal karet yang ditanami petani berjumlah 11,549 ha. Akhir tahun 2019, areal penanaman komoditas karet telah meningkat menjadi 14.052,86 ha, atau naik rata-rata hampir 21,67 persen setiap tahunnya. Meskipun areal penanaman karet meningkat, namun produksi karet masih terbatas. Tahun 2012, produksi karet di Nagan Raya telah mencapai 3.386 ton. Sementara tahun 2016 produksi karet meningkat menjadi 18.387,3 ton.

Tabel 2.86
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas
Karet di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Produksi Karet (Ton)	Produktifitas Karet Kg/Ha /Thn
1	2012	11,549	3,386	0.293
2	2013	11,827	3,356	0.284
3	2014	12,698	3,314	0.261
4	2015	14,010	5,073	0.362
5	2016	14,052	5,014	0.357
6	2017	13,553	5,314	0.392
7	2018	19,220	4,515	0.235
8	2019	8,834	4,078	0.462

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya 2020

Kakao sebagai komoditas ekspor juga ditanami petani Nagan Raya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2012-2020), areal perkebunan kakao atau bahan baku coklat di Kabupaten Nagan Raya menurun. Komoditas andalan ekspor tersebut ditanami petani seluas 2819.6 ha tahun 2020. Angka tersebut jauh lebih rendah dari tahun 2012 yang seluas 5.372 ha. Kondisi ini menandakan bahwa minat petani untuk membudidayakan coklat sebagai komoditas andalan daerah semakin menurun.

Sampai akhir tahun 2020, produksi kakao di Kabupaten Nagan Raya tercatat 576 ton. Pada tahun 2012 produksi kakao masih sebanyak 1.330 ton. Itu artinya produksi kakao menurun setiap tahunnya dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi karena setiap tahun luas areal penanaman kakao perkebunan rakyat mengalami penurunan.

Tabel 2.87
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas
Kakao di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Populasi Kakao (ton)	Produktivitas Kakao (%)
1	2012	5372	1330	0,25
2	2013	5405	1327	0,25
3	2014	5268	1245	0,24
4	2015	5277	1254	0,24
5	2016	5311	2821	0,53
6	2017	5312	1081	0,20
7	2018	4700	643	0,14
8	2019	2819,6	575	0,20
9	2020	2819,6	576	0,20

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2020

Komoditas kelapa dalam memperlihatkan penurunan luas tanam di Kabupaten Nagan Raya. Adanya kecenderungan petani untuk beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan peningkatan pendapatan, disamping juga didukung kebijakan dan regulasi dari pemerintah untuk pengembangan komoditas lain, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Penurunan luas tanam kelapa dalam juga berkait erat dengan kurangnya pemeliharaan tanaman. Pada tahun 2012, luas areal komoditas kelapa dalam mencapai 1.350 ha, jauh lebih rendah dari luas areal budidaya kakao. Tahun berikutnya, luas lahan budidaya kelapa dalam semakin meningkat menjadi 2.758,98 ha pada tahun 2020.

Sementara dilihat dari segi produktivitas kelapa dalam, setiap tahun semakin menurun. Akhir tahun 2020, tercatat produksi kelapa dalam 560.22 ton, jauh lebih rendah dari produksi tahun 2016 yang mencapai 1.375 ton. Gambaran perkembangan luas areal, produksi, dan produktivitas komoditas kelapa dalam sebagaimana tertera pada gambar berikut:

Tabel 2.88
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas
Kelapa Dalam di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2020

No	Tahun	Luas Areal (ha)	Populasi Kelapa Dalam (ton)	Produktifitas Kelapa Dalam (%)
1	2012	1.350	658	0,49
2	2013	1.351	658	0,49
3	2014	1.405	658	0,47
4	2015	1.450	0,00	0,00
5	2016	1.486	1375	0,93
6	2017	1.486,60	1050,64	0,71
7	2018	1.487,60	1108,15	0,74
8	2019	2.785,98	560,22	0,20
9	2020	2.785,98	560,22	0,20

Sumber: Dinas Perkebunan Kab. Nagan Raya, 2020

Pengembangan komoditi perkebunan di Nagan Raya terutama untuk perkebunan rakyat selama ini masih dihadapkan beberapa permasalahan substansial yang hampir sama dengan permasalahan di sektor pertanian pangan dan hortikultura, yaitu permasalahan ketersediaan bibit unggul dan penanganan pascapanen. Sebagian besar bibit unggul masih harus didatangkan dari daerah lain dan sulit diakses oleh petani, serta harga yang relatif mahal. Akibatnya petani cenderung menggunakan bibit yang bukan klon/varietas anjuran sehingga berimbas pada rendahnya produktivitas perkebunan rakyat terutama jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Permasalahan pasca panen terutama berkaitan dengan masih rendahnya harga komoditi di tingkat petani sehingga hasil kebun tidak dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya harga komoditi perkebunan ditingkat petani disebabkan terutama akibat rendahnya kualitas pengolahan hasil panen, lemahnya sistem kelembagaan petani, dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.

Kabupaten Nagan Raya belum mampu secara optimal mengelola potensi dan meningkatkan nilai tambah baik dari pertanian maupun dari perkebunan sebagai suatu produk unggulan daerah.

2.3.3.4. Energi dan Sumberdaya Mineral

1. Fasilitas Listrik

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Selama tahun 2012-2020, produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Produksi listrik tahun 2012 sebesar 400.627 Kwh. Produksi listrik tersebut meningkat menjadi 87.495.323 Kwh tahun 2020. Daya terpasang listrik sebesar 1.150 VA tahun 2012, sementara tahun 2020 daya terpasang sebesar 49.555.350 VA.

Tabel 2.89
Perkembangan Daya Terpasang, Produksi, dan Listrik Terjual
pada PT. PLN (Persero) Cabang Kabupaten Nagan Raya,
Tahun 2012-2020

Tahun	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (Kwh)	Listrik Terjual (Kwh)
2012	1.150,00	400.627,00	64.535.156,00
2013	1.287,00	576.216,00	68.960.058,00
2014	1.020,00	664.703,00	66.670.101,00
2015	368	440.423,00	58.471.798,00
2016	150	560.160,00	67.198.972,00
2017	38.646.700	80.655.023	69.646.160
2018	42.883.950	86.555.701	75.910.966
2019	47.168.200	93.401.590	83.516.568
2020	49.555.350	87.495.323	76.760.240

Sumber : PT. PLN Kab. Nagan Raya 2020

Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan

Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.3.3.5. Perdagangan

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Suka Makmue.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya yaitu selalu di atas 10 persen pada 2015-2019. Secara umum Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terus tumbuh lebih dari 3 persen walaupun berfluktuasi selama periode 2015-2019, Tahun 2015 katagori ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,02, tahun 2019 menjadi 3,85 %.

Gambar 2.21
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (persen), 2015-2019



Ket: * Dalam Proses

Sumber: BPS Nagan Raya, 2020

2.3.3.6. Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memiliki peranan penting dalam perrekonomian . Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Dilihat dari segi kontribusi atau peranannya terhadap PDRB Kabupaten Nagan Raya, sektor ini memiliki kontribusi di atas dua persen dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kontribusi ini relatif masih kecil dalam membentuk perekonomian yang kuat di Kabupaten Nagan Raya. Walaupun begitu, kontribusinya memiliki tren naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kategori ini memiliki kontribusi sebesar 3,09 persen dan naik menjadi 3,73. persen pada tahun 2019. Kenaikan kontribusi tersebut seiring dengan naiknya kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Sementara pertumbuhan industri pengolahan turun sebesar 6,96% pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan pertumbuhan ditahun 2015 sebesar 13,93 persen. Hal ini karena sektor ini didominasi peranannya oleh jenis industri makanan dan minuman yang mengolah hasil-hasil dari kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan seperti industri pengolahan padi, industri CPO (Crude Palm Oil) dan industri lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA).

Gambar 2.22
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan (persen), 2015-2019



Ket: * Dalam Proses

Sumber : BPS Nagan Raya, 2020

2.3.3.7. Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 16 lokasi transmigrasi dari tahun 2012-2016. Tahun 2012, penempatan jumlah KK pada 16 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 2.596 KK. Pada tahun 2016, jumlah KK bertambah menjadi sebanyak 3.045 KK, atau bertambah sebanyak 17,30 persen dari tahun 2012.

Tahun 2017-2020, terjadi pengurangan lokasi transmigrasi, yang semula 16 lokasi menjadi 10 lokasi. Hal ini dikarenakan 10 (sepuluh) lokasi transmigrasi tersebut sudah bergabung dengan desa defenitif di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Adapun 6 lokasi transmigrasi yaitu UPT.IV Seuneuam Gampong Sumber Bakti, UPT. Despot Alue Siron Gampong Alue Siron, UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk, UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep, UPT. Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie dan UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2020

No	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT.I. Krueng Tadu Gampong Simpang Jaya	150	150	150	133	133	-	-	-	-
2	UPT.II. Krueng Tadu Gampong Batu Raya	171	171	171	159	159	-	-	-	-
3	UPT.III. Krueng Tadu Gampong Sember Daya	211	211	211	210	210	-	-	-	-
4	UPT.IV. Krueng Tadu Gampong Bumi Sari	126	126	126	147	147	-	-	-	-
5	UPT.V. Lamie Gampong Krueng Itam	340	340	340	425	425	-	-	-	-
6	UPT.VI. Lamie Gampong Rantau Selamat	310	310	310	315	315	-	-	-	-
7	UPT.VII. Lamie Gampong Lamie Gagak	96	96	96	96	96	-	-	-	-
8	UPT.I. Seneuam Gampong Blang Luah	361	361	361	361	405	-	-	-	-
9	UPT.II. Seneuam Gampong Makarti Jaya	158	158	158	158	158	-	-	-	-
10	UPT.III. Seneuam Gampong Sumber Makmur	87	87	87	87	87	-	-	-	-
11	UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti	313	313	313	313	364	330	330	330	352
12	UPT.Despot Alue Siron Gampong Alue Siron	173	173	173	173	173	-	-	-	5
13	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	100	100	100	100	100	30	30	30	30
14	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	0	0	80	100	100	85	85	85	90
15	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	0	0	30	33	53	68	68	86	90
16	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	0	0	30	80	120	25	25	25	25
Jumlah		2596	2596	2736	2890	3045	538	538	556	592

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Adapun jumlah Transmigrasi lokal Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2012-2020 ada empat lokasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Jumlah Transmigrasi Lokal Tahun 2012-2020

No	Lokasi	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	100	100	100	100	100	30	30	30	30
2	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	0	0	80	100	100	85	85	85	90
3	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	0	0	30	33	53	68	68	86	90
4	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	0	0	30	80	120	25	25	25	25
Jumlah		100	100	240	313	373	208	208	226	235

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2020

2.3.3.8. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya yang tergarap saat ini masih relatif menggembirakan. Implikasinya, produksi perikanan laut berfluktuatif sepanjang delapan tahun terakhir. Tahun 2012, produksi perikanan laut 279.57 ton. Jumlah produksi perikanan laut tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.865.29 ton atau senilai Rp. 47.478.519.000,-. Produksi perikanan laut tersebut tertinggi selama delapan tahun terakhir.

Tabel 2.92
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2019

No	Tahun	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (ton)
1	2012	5.591.000.000	279,57
2	2013	2.600.000.000	173,36
3	2014	2.228.000.000	107
4	2015	19.913.000.000	1039,3
5	2016	14.837.000.000	1753,65
6	2017	32.329.836.072	1.796,10
7	2018	45.493.425.215	2.401,57
8	2019	47.478.519.000	2.865,29

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya 2020

Potensi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap beberapa tahun terakhir dari tahun 2012 s/d 2019 selalu meningkat pada tahun 2012 sebesar 854 ton menjadi 3.747 ton pada tahun 2019.

Untuk produksi perikanan budidaya dari tahun 2012 s/d 2019 mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 1.199 ton menjadi 1.056 ton pada tahun 2019.

Tabel 2.93
Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Produksi ikan (ton)	2.053,5	2.176,72	2.310,38	2.424,15	2.532,77	3.257,29	4.498,03	4.804,49
2	Budidaya	1.199,5	1.233,32	1.240,13	1.328,65	669,72	640,21	1.245,49	1.056,50
3	Perikanan tangkap	854	953,4	1.070,25	1.095,5	1.863,05	2.617,08	3.252,54	3.747,99
4	Target Daerah (ton)	2.200	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600	3.420,15	3.591,16
5	Capaian Produksi Ikan (%)	93,3	94,64	88,86	93,23	97,4	125,28	131,51	133,89

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2020

Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparatur dinas. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/ cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (*trip*) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk.

Tabel 2.94
Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

No	Jenis	Jumlah
1	Panjang garis pantai	74,4 Km
2	Luas laut	446,4 km ²
3	Luas perairan umum	814 km ²
4	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)	2 unit
5	Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI)	2 unit
6	Jumlah kapal motor	125 unit
7	Jumlah perahu motor	146 unit
8	Jumlah nelayan tetap	498 orang
9	Jumlah nelayan tidak tetap	2016 orang
10	Jumlah pemasar ikan	900 orang
11	Jumlah kelompok pengolahan ikan	46 orang
12	Jumlah kelompok masyarakat pengawas	-
13	Jumlah unit pengolahan	46 unit
14	Jumlah produksi ikan olahan	229,90` ton
15	Jumlah pabrik es	-
16	Jumlah pasar ikan / depo	7 unit

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2020

Jumlah rumah tangga perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2019, mencapai 895 rumah tangga. Peningkatan masyarakat dalam berusaha di bidang budidaya perikanan cukup tinggi. Tercatat dalam kurun waktu 2012-2019. Wilayah-wilayah dengan jumlah rumah tangga perikanan besar di Kecamatan seunagan Timur, Beutong dan Darul Makmur.

Tabel 2.95
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

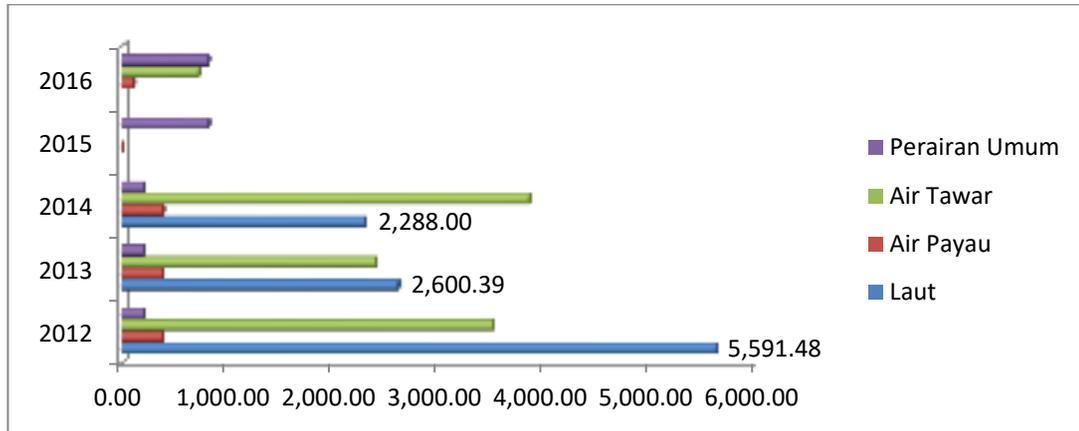
No	Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Darul Makmur	107	110	115	119	121	76	84	94
2	Tripa Makmur	31	31	31	35	35	38	41	41
3	Kuala	35	57	58	65	65	68	71	73
4	Kuala Pesisir	37	39	41	46	46	49	52	55
5	Tadu Raya	44	46	49	57	58	60	63	65
6	Beutong	135	138	141	150	152	155	157	161
7	Beutong Ateuh Banggalang	32	34	37	39	39	37	44	44
8	Seunagan	70	71	75	80	81	82	86	89
9	Suka Makmue	81	81	83	89	91	95	98	100
10	Seunagan Timur	145	147	151	159	163	167	171	173
	Jumlah	737	754	781	839	851	827	867	895

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2020

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk

menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.23
Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

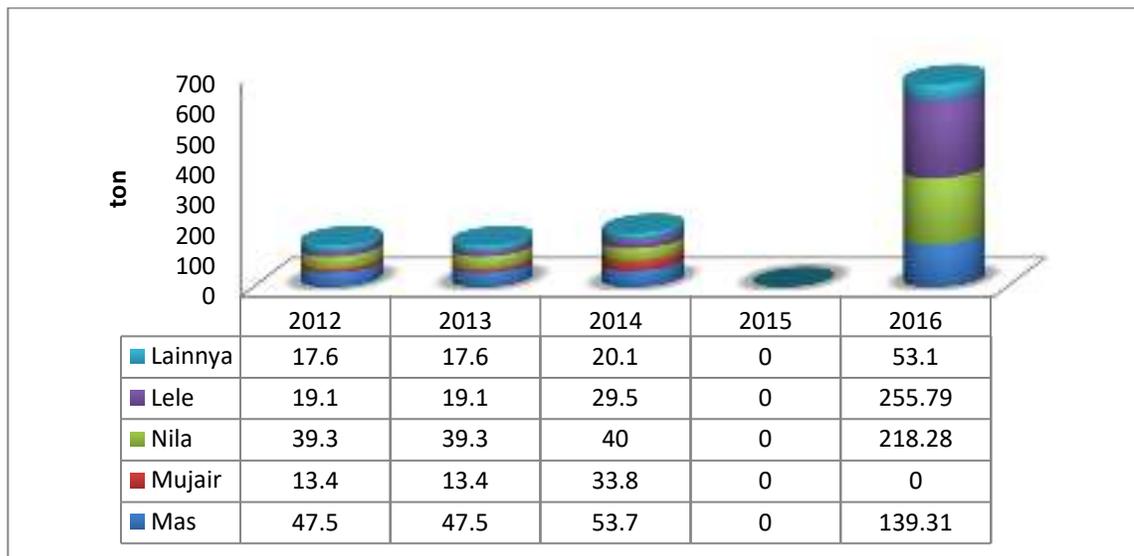
Tabel 2.96
Perkembangan Nilai Produksi Perikanan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2019

No	Perikanan Budidaya	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Perairan Umum	-	-	-
2	Air Tawar	14.724.830.000	33.592.311.000	30.177.500.000
3	Air Payau	-	-	-
4	Laut	-	-	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Budidaya ikan di kolam termasuk andalan di Kabupaten Nagan Raya. Namun, produksi budidaya ikan di kolam juga masih terbatas. Jenis ikan yang dibudidayakan, meliputi ikan mas, mujair, nila, lele, dan jenis ikan lainnya. Tahun 2019 jumlah produksi ikan budidaya kolam berjumlah 1.056,50. Berikut data Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan Kabupaten Nagan Raya, 2012 s/d 2019 (ton)

Gambar 2.24
Perkembangan Produksi Budidaya Kolam Menurut Jenis Ikan
Kabupaten Nagan Raya, 2012-2016 (ton)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2017

Tabel 2.97
Perkembangan Produksi (ton) Budidaya Kolam Menurut Jenis
Ikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2020

No	Jenis Ikan	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Lele	89,20	289,66	200,00
2	Mujair	61,07	-	-
3	Ikan Mas	88,85	13,91	268,50
4	Nila	389,00	941,92	588,00
5	Ikan Lainnya	12,09	-	-
	Jumlah Total	640,21	1.245,49	1.056,50

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2019, tercatat nelayan tetap di Kabupaten Nagan Raya mencapai 538 orang jumlah nelayan tersebut meningkat jika di banding tahun 2012, nelayan tetap di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 313 orang. Selain itu, Rt yang bermata pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam juga meningkat, dari 600 RT tahun 2012 menjadi 895 RT tahun 2019.

Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Selain itu, pelatihan teknis budidaya, pengolahan pasca panen, dan penyediaan fasilitas perikanan diupayakan terus meningkat sehingga berperan signifikan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat nelayan.

**Tabel 2.98
Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012- 2020**

Uraian	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
Nelayan Tetap	Orang	313	537	1.052	1.032	594	538	538	538
Nelayan Tidak Tetap	Orang	235	-	-	110	458	1.311	1.311	1.311
Jumlah Petambak	RT	78	-	-	69	181	183	185	185
Jumlah Petani Ikan Kolam	RT	600	-	-	592	663	827	867	895
Jumlah Petani Ikan Perairan Umum	RT	83	-	294	294	732	-	-	-
Kelompok Nelayan	Kelompok	28	-	-	37	49	22	28	36
Jumlah Nelayan yang dibina	Orang	78	-	-	7	7	20	28	36
Jumlah Petambak yang dibina	Orang	280	-	-	287	98	-	-	-
Jumlah petani ikan yang dibina	Orang	761	-	-	762	761	905	930	1.050
Jumlah kelompok Budidaya Ikan	Kelompok	51	-	-	98	367	67	75	86
Jumlah kelompok pengolahan Ikan	Kelompok	12	-	-	12	13	40	41	46
Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina	Kelompok	12	-	-	12	12	19	19	19

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya tahun 2020

Jumlah prasarana yang tersedia di sektor kelautan dan perikanan masih sangat minim bila dibandingkan dengan potensi perikanan Kabupaten Nagan Raya. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Nagan Raya ini belum didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Kedepan, perlu pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, seperti pelabuhan perikanan, pengembangan balai benih ikan, pengembangan sarana tangkap serta motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan.

Tabel 2.99
Kondisi PPI, TPI, dan Pasar
Kabupaten Nagan Raya, 2020

Kecamatan	Nama PPI	Nama TPI	Nama Pasar	Lokasi
Darul Makmur			Pasar Alue Bilie Pasar Bukan Pasar Seumayam	Desa Alue Bilie Desa Lamie Desa Serbajadi
Tripa Makmur		TPI Babah Lueng TPI Kuala Tripa		
Kuala			Pasar Simpang Peut	Desa Simpang Peut
Kuala Pesisir	PPI Kuala Tuha		Pasar Langkak Pasar Jembes	Desa Padang Rubek
Tadu Raya	PPI Kuala Tadu			
Beutong			Pasar Beutong	Ulee Jalan
Beutong Ateuh Banggalang				
Seunagan			Pasar Jeuram	Cot Meugat
Suka Makmue			Pasar Lueng Baro	Lueng Baro
Seunagan Timur			Pasar Uteun Pulo	Desa Uteun Pulo

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2020

Jumlah pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah telah diberikan dari tahun 2012 s/d 2019 dengan capaian yang selalu meningkat.

**Tabel 2.100
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019**

No	Uraian	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan	40	43	52	46	22	20	28	36
2	Jumlah kelompok nelayan	42	45	55	47	25	22	28	36
3	Cakupan pembinaan kelompok nelayan (%)	95,2	95,5	94,54	97,8	88	90,91	100	100

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2020

Jumlah produksi ikan tangkap tahun 2012-2019 masih didominasi dari hasil kelompok nelayan. Hal ini menunjukkan efektivitas kelompok nelayan dalam produksi ikan tangkap, karena adanya pengembangan kapasitas dan bantuan permodalan bagi kelompok nelayan.

Tabel 2.101
Cakupan Produksi Ikan Kelompok Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2019

No	Uraian	Tahun							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah produksi ikan (ton) hasil kelompok nelayan	487,07	599,94	793,53	718,53	584,41	2.194,52	2.764,66	3.184,79
2	Jumlah produksi ikan (ton)	854	953,4	1.070,2	1.095,5	1.863,0	2.617,08	3.252,54	3.747,99
3	Cakupan produksi perikanan kelompok nelayan (%)	57,03	62,92	74,14	65,59	31,36	83,85	85,00	84,97

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2020

2.3.4. Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Lingkup perencanaan pembangunan merupakan salah satu layanan urusan wajib yang paling penting dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA merupakan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Nagan Raya di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut; pelaksanaan tugas umum ketatausahaan badan, melakukan koordinasi pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian, infrastruktur, pemerintahan, sumber daya manusia, keistimewaan, sosial budaya dan penelitian, evaluasi pengembangan pembangunan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan dari tugas pokok dan fungsi yaitu: menyusun Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Kabupaten (RPJPK); menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK); melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Kabupaten; mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah.

Capaian indikator perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya sudah dalam tahapan penyempurnaan penyelesaian dokumen. Seperti halnya dokumen RPJPD dan dokumen RTRW yang sudah ditetapkan dengan Qanun, dan pada tahun 2019 telah dilakukan revisi dokumen RPJPD dan tahun 2020 sedang proses pembuatan Qanun. dan untuk dokumen tahunan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2012-2019 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008-2019, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Capaian indikator pengelolaan keuangan Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.4.3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan roda pemerintahan belum maksimal dikarenakan belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai guna pengembangan *e-government* (sistem elektronik pemerintahan). Dalam hal ini proses kebijakan *simpeg* (administrasi kepegawaian elektronik) masih dalam pengembangan sehingga pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal terlihat dari distribusi aparatur pemerintah khususnya guru, tenaga medis dan para medis serta penyuluh masih belum merata di semua wilayah, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masing-

masing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

2.3.4.5. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan memberikan informasi seperti persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik administrasi maupun keuangan.

2.3.4.6. Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRK Nagan Raya; Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya maupun RKPK Nagan Raya; dan Terintegrasi Program-Program DPRK Nagan Raya untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan Pembentukan Perda dan Anggaran Ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRK Nagan Raya.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

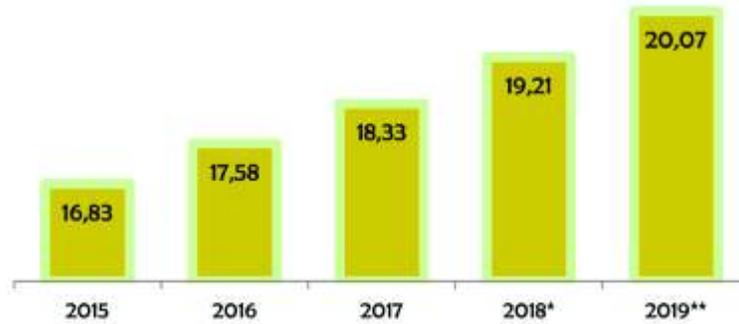
Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

2.4.1.1. Pengeluaran Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita digunakan untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah. Konsumsi rumah tangga perkapita dapat menjadi ukuran mengenai pendapatan penduduk. Semakin tinggi pengeluaran/konsumsi rumah tangga per kapita maka semakin tinggi pendapatan penduduk tersebut.

Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai 2019 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga per kapita tahun 2019 telah mencapai 20.07 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah.

Gambar 2.25
Nilai Komponen Konsumsi Rumah tangga Perkapita ADHB
(Juta Rupiah)

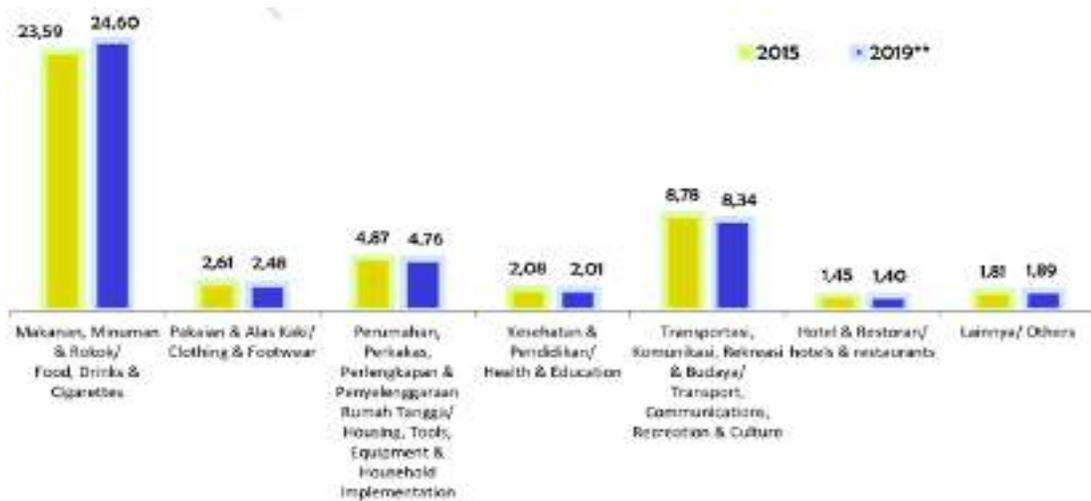


Sumber : Buku PDRB Kabupaten Nagan Raya Menurut Pengeluaran 2015-2019

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Perkapita

Dengan melihat pola konsumsi rumah tangga, dapat dilihat tingkat kualitas dan kemajuan suatu masyarakat. Dari 3,36 triliun nilai konsumsi rumah tangga pada tahun 2019, hampir separuhnya digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan. Sedangkan sisanya digunakan untuk konsumsi nonmakanan seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, hotel, restoran, dan lainnya. Subkomponen kesehatan dan pendidikan hanya berkontribusi sebesar 2,01 persen dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Nagan Raya belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas Sumber Daya Manusianya dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan saja

Gambar 2.26
Komposisi Konsumsi Makanan, Non Makanan,
dan Pengeluaran Per kapita per bulan Tahun 2015-2019 (%)



Sumber : Buku PDRB Kabupaten Nagan Raya Menurut Pengeluaran 2015-2019

2.4.2. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antardaerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari fasilitas perhubungan, pengairan/irigasi, air bersih serta energi dan telekomunikasi.

Aktivitas ekonomi yang kian berkembang membutuhkan jasa pelayanan transportasi udara yang efektif dan efisien. Kabupaten Nagan Raya telah memiliki Bandar Udara Cut Nyak Dhien yang terletak di Gampong Kubang Gajah, Kecamatan Kuala Pesisir. Bandar udara ini dapat disinggahi pesawat sejenis Fokker, dan diupayakan dalam jangka panjang mampu melayani pesawat berbadan besar sesuai kondisi landasan dan prasarana pendukungnya.

Di wilayah barat-selatan Aceh, Bandar Udara Cut Nyak Dhien tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Nagan Raya saja, namun juga masyarakat dari Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Aceh Barat. Jasa

pelayanan transportasi udara tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar daerah, atau sebaliknya.

Aktivitas bongkar dan muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien cenderung berfluktuatif. Tercatat muat di bagasi paling kurang 150.228 kg dan bongkar 133.949 pada tahun 2016. Terbanyak muat bagasi icapai bulan Juli (14.557 kg) dan bulan April (12.484 kg). Sedangkan terendah terjadi di bulan Desember (10.027 kg). Tahun 2012, barang yang di bongkar mencapai 7.255 kg. Sementara itu, barang yang di muat menurun mencapai 2.519 kg (tahun 2016), turun di banding tahun 2012. Paling banyak muatannya di bulan Maret dan April, masing-masing 763 kg dan 592 kg. Di bulan lainnya barang yang di muat masih di bawah dari bulan tersebut, atau sangat rendah terjadi di bulan Juli (3 kg). Untuk tahun 2018 sampai 2020 barang yang dibongkar muat bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.102
Jumlah bongkar muat barang di Bandar Udara Cut Nyak Dhien
Tahun 2012-2020

No	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016		2018		2019		2020	
		barang	bagasi	barang	bagasi	Barang	Bagasi										
1	Muat	136	111.813	1510	111.565	2533	104.038	4309	142.519	2519	150.228	3.493	118.209	11.651	68.850	10.052	16.440
2	Bongkar	7255	113.775	5608	118.284	3577	122.045	0	141.491	5797	133.949	1.767	94.496	2.967	50.870	574	9.519

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya, 2020

Data dari Bandar Udara Cut Nyak Dhien, tercatat frekuensi penerbangan yang datang di Bandar udara tersebut mencapai 16.972 trip dan berangkat 14.592 trip tahun 2012. Angka trip penerbangan tersebut meningkat pada tahun 2016. Aktivitas jasa penerbangan pada tahun 2016 tercatat frekuensi penerbangan yang datang mencapai 22.785 trip dan yang berangkat 23.784 trip.

Adapun untuk tahun 2012 sampai 2020 jumlah penumpang melalui Bandara bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.103
Jumlah Penumpang melalui Bandar Udara Cut Nyak Dhien
Tahun 2012-2020

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020
1	Penumpang Datang	16.972	16.959	20.078	22.631	22.785	19.601	18.725	4.733
2	Penumpang Berangkat	14.592	18.052	20.643	24.337	23.784	18.2388	18.500	4.297

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya, 2020

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.104
Data Tindak Pidana Umum Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2020

No	Uraian	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Tindak Pidana (CT)	160	212	213	352	347	355	258	175	108
2	Tindak Pidana Yang Tertangani (CC)	76	206	142	254	225	306	214	157	69
	TindakPidana Yang Tertangani (%)	47.50	97.16	66.66	72.15	64.84	86,19	82,94	89,71	63,89

Sumber : Polres Nagan Raya 2020

Tabel 2.105
Rincian Data Tindak Pidana Umum
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020

No	Jenis Tindak Pidana	2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		CT	CC																
1	THDP Tindakan Umum																		
2	Pembakaran					9		9	3	5	0	4		5	1	1			
3	Kebakaran	4	1	9	5														
4	MemberiSuap																		
5	Pemalsuan Uang																		
6	Pemalsuan Materai/Merk																		
7	Pemalsuan Dokumen					4	3											1	
8	Pemalsuan Surat	3	1	5	3			4	4	2		2	2	1	1				
9	Melanggar Kesopanan																		
10	Pemeriksaan	5	5	5	5	3	3	8	5	6	3	5	5	3	3	12	12	3	3
11	Perzinahan	3	3							1	0	1	1			1	1	1	1
12	Perjudian/Maisir	1	1							4	4	4	4			3	3	2	2
13	Penculikan											1							
14	Penghinaan							2	1	1	1	4	4			1			
15	Pembunuhan			2	1							1	1			2	2		
16	Pembakaran dan pembunuhan									1	0								

17	Aniaya Ringan	40	38	31	40	37	34	66	61	66	55	67	67			53	52		
18	Aniaya Berat																		
19	Penganiayaan anak dibawah umur									2	2	3	3			1	1	2	1
20	Pelecehan seksual terhadap anak									1	0	5	5	7	7				
21	Pencurian Biasa	37	27	49	47	59	53	69	63	83	67	132	129	7	1	27	26	13	8
22	Pencurian Pemberatan																		
23	Pencurian Ringan																		
24	Pencurian Dengan Kekerasan									4	2		1	1					
25	Perbuatan curang							1	0										
26	Pemerasan dan pengancaman	2	2	6	5			2	2	4	2	1	2						
27	Penggelapan	3	2	9	7	7	5	10	7	3			9	6				8	2
28	Penipuan (Curang)	7	4	12	8	14	4	20	17	23	13	9	5	4		9	7	5	3
29	Pengrusakan	13	11	28	26	13	16	15	9	20	15	10	8	6	3				
30	Memberi Suap																		
31	Penadah			3	2					1	1	3	3						
32	Pelanggaran Khup																		
33	Agraria/Tanah											6	1			4	1	3	
34	Penyelundupan																		
35	Korupsi					1	1	2	2	1	1								
36	Laka Kerja	1	1							1	0								
37	Obat Keras																		

38	Kesehatan	1	1																
39	Mengakibatkan Orang Mati																		
40	Mengakibatkan Orang Luka																		
41	Hak Cipta																		
42	Curi Dalam Keluarga																		
43	Menerima Suap																		
44	Senpi Handak																		
45	Perampasan Hak	1	1			3		3	3	11	7								
46	Curi Ranmor	18	3			16	4	39	6	30	7	26	8	25	4	7	7	5	1
47	Pengroyokan	1	1							1	1					4	4		
48	Pengancaman	3	3			3	3	16	11	17	12								
49	Pembuatan Cabul	2	2			6	6	10	7										
50	Perbuatan Tidak Menyenangkan	1	1			6	2	2	1	5	2								
51	Melarikan Wanita																		
51	Curi Kawat																		
53	Curi Listrik																		
54	Curi Hewan																		
55	KDRT	5	5			5	5	17	16	14	10								
56	Pemilu																		
57	BBM	2	1									6	6						
58	Pencemaran Nama Baik	1	1			3	2	15	64	2	2	1							

59	Khalwat/Mesum					1	1	2	2	6	4								
60	Poligami/poliandri	2	2			1	1	10	7	4	2	2	2	2	2	1	1	1	1
61	Penyerobotan Tanah	2	0			12	3	25	12	8	1	6	1	5	1				
62	Kekerasan Didepan Umum	1	0																
63	Kekerasan terhadap orang dan barang					1	1												
64	kekerasan terhadap anak							1	1	2	2			1	1				
65	Kekerasan seksual					1	1												
66	Pemukulan					1	1	1	1										
67	Penelantaran anak					2	2	1	1	5	4	3	3						
68	Penutupan akses jalan PT.SENAGAN ENERGI					3	1												
69	Penutupan akses jalan PT							1	1										
70																			
71	Pencemaran lingkungan hidup							1	1										
72	kelalaian petugas medis yang menyebabkan MD							1	1										
73	Penemuan mayat							4	2	1									
74	Mitan oplosan																		
75	Penutupan akses jalan									1									
76	Membawa lari anak dibawah umur					2	2	3	2	1	0								
77	Kejahatan Terhadap Jiwa Orang	1	0																
78	Kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang									1	0								

79	Penyalahgunaan bbm bersubsidi (migas)									3	3								
80	penjarahan dan perampasan									1	0								
81	Kelalaian									1	0								
82	Pengan caman dan perampasan alatkerja									1	0								
83	menyembunyikan TSK									1	0								
84	Menyediakan tempat fasilitas maisir (perjudian)									1	1								
85	Illegallogging									1	1			4	4	1	1	4	4
86	Lain-Lain Kejahatan Tidak Termasuk Diatas																		
Jumlah																			
Persentase Kasus Yang Ditangani																			

Sumber: Polres Nagan Raya 2020

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain:

- a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
- c. IUI (Izin Usaha Industri);
- d. TDI (Tanda Daftar Industri);
- e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan
- f. HO (Izin Gangguan).

Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagan Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Nagan raya Nomor 065/252/2015 tanggal 01 November 2015.

**Tabel 2.106
Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen),
dan Biaya Perizinan Kabupaten Nagan Raya**

No.	Jenis Perizinan	Jenis Data	Keterangan
1	SIUP	Waktu proses pelayanan (hari)	7
		Jumlah persyaratan (berkas)	1
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	TDP	Waktu proses pelayanan (hari)	2
		Jumlah persyaratan (berkas)	4
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
3.	IUI	Waktu proses pelayanan (hari)	3
		Jumlah persyaratan (berkas)	9
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
4.	TDI	Waktu proses pelayanan (hari)	12
		Jumlah persyaratan (berkas)	6
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
5.	IMB	Waktu proses pelayanan (hari)	14
		Jumlah persyaratan (berkas)	14
		Biaya mengurus persyaratan	225.000xkoefisien(sesuai Qanun)
6.	HO	Waktu proses pelayanan (hari)	7
		Jumlah persyaratan (berkas)	7
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya

Sumber data : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

Pajak daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi pajak hotel , pajak restoran (Rumah Makan dan Katering); pajak hiburan (Pagelaran Kesenian/Musik/Tari, Pameran, Balap Kendaraan Bermotor); pajak reklame (reklame papan, kain, melekat/stiker, baliho dan billboard); pajak penerangan jalan PLN; pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan.

Hasil Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum dan jasa usaha. Untuk retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum ;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;

Sedangkan untuk retribusi jasa usaha terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan;
- c. Retribusi penyediaan dan / atau peneyedotan Kakus;
- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Retribusi Tempat Penjualan Produksi Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (seperti Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Penerbitan sertifikat Kesempurnaan dan Kebangsaan (Pas Kecil).

Kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam upaya menarik minat penanam modal. Ini ditandai oleh keselarasan regulasi bidang penanaman modal, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sebaliknya, produk-produk hukum yang tumpang-tindih atau saling bertentangan akan membingungkan dan menyulitkan penanam modal dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Karena itu, pembenahan legislasi bidang penanaman modal perlu terus dilakukan.

Beberapa Perda yang mendukung iklim usaha adalah :

- Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Qanun Nomor 13 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Peternakan Rakyat dan Perusahaan peternakan;
- Qanun Nomor 17 Tahun 2007 Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

Beberapa faktor penyebab belum optimal investasi di Nagan Raya antara lain adalah:

- belum optimalnya promosi investasi;
- lemahnya dukungan regulasi investasi dan
- belum adanya insentif, kemudahan investasi dan jaminan keamanan bagi investor;
- Lahan Terbatas untuk sektor perkebunan.

Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan beberapa hal:

- peningkatan promosi investasi;
- menyediakan regulasi, insentif, kemudahan dan jaminan keamanan bagi investor.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang kreatif, terampil, disiplin, produktif, dan profesional serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan pembangunan.

Kualitas SDM juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat salah satunya dari tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi (S1 dan S2)

Penduduk berpendidikan Sarjana atau S1/S2/S3 2016 sebesar 4,92 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S1, 0,26 persen untuk penduduk dengan tingkat pendidikan S2.

b. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka Beban Tanggungan atau *Dependency Ratio* merupakan suatu ukuran untuk mengetahui produktivitas penduduk. Angka Beban Tanggungan merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang berumur tidak produktif (belum produktif/umur di bawah 15 tahun dan tidak produktif lagi/umur 65 tahun ke atas) dengan yang berumur produktif (umur 15–64 tahun). Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Adapun persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Tanggungan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 sebesar 50,96. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Nagan Raya yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung paling kurang 56 orang yang tidak produktif. Kondisi ini mengalami perubahan yang sangat drastis dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 69 penduduk tidak produktif. Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (<15 tahun) dan naiknya proporsi penduduk produktif, meskipun penduduk tua sedikit meningkat pada tahun 2016.

Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka beban tanggungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara

penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun) semakin berkurang dari 30 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) masih kurang dari 5 persen.

Tabel 2.107
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019 (%)

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 tahun +	Angka Ketergantungan
2012	30,10	63,62	6,28	57,19
2013	30,00	65,72	4,29	52,17
2014	29,95	65,61	4,44	52,42
2015	29,08	64,27	6,65	55,60
2016	29,31	66,24	4,42	50,96
2017	29,13	28,93	29,05	21,13
2018	66,34	66,44	67,30	43,29
2019	4,51	4,62	3,63	47,55

Sumber : BPS Kab. Nagan Raya Tahun 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Angka ketergantungan bisa didapat dari penjumlahan kelompok umur < 0-14 tahun + < 15-64 tahun / 65 tahun+, maka angka ketergantungan untuk tahun 2017 adalah 21,13 %, tahun 2018 adalah 43,29 % dan tahun 2019 adalah 47,55 %.

**BAB III
GAMBARAN KEUANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dan memperoleh suatu keyakinan dalam memproyeksikan anggaran selanjutnya dalam melakukan pendanaan terhadap rencana pembangunan daerah. Dengan melakukan analisis yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada awal penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya tahun Anggaran 2017-2022, dasar dalam melakukan proyeksi dalam penyusunan RPJM dimaksud menggunakan analisis tren yang didasarkan pada data historis 5 (lima) tahun terakhir dari 2012-2016 untuk memberikan gambaran kinerja realisasi APBK tahun selama tahun dimaksud yang dapat dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Hasil evaluasi terhadap realisasi APBK Nagan Raya dari Tahun 2017-2019 terhadap pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya TA. 2017-2022, yaitu dengan melihat realisasi anggaran yang menunjukkan beberapa target keuangan didalam pelaksanaan atau pengelolaannya yang tidak sesuai dengan rencana (tidak mencapai target ataupun sudah melampaui target) yang dituangkan pada saat penyusunan awal RPJM Kabupaten Nagan Raya. Hasil evaluasi dimaksud menjadi alasan urgensitas dilakukan perubahan RPJM Tahun 2017-2022 dengan pertimbangan PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJP daerah dan RPJM daerah, serta tata cara perubahan RPJP Daerah dan RPJM daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dalam memproyeksikan target pada sisa waktu pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022, terhadap penyusunan perubahan RPJM Tahun 2017-2022 ini menggunakan analisis tren yang didasarkan pada

data historis realisasi 5 (lima) tahun terakhir dari 2015-2019, ini perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kinerja yang lebih realistis terhadap realisasi APBK, yang dipergunakan sebagai dasar analisis, mencakup analisis kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) menjadi refleksi keputusan politik antara eksekutif dan legislatif yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan sudah selayaknya memberikan jaminan secara keseluruhan bagi peningkatan pelayanan serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Kondisi kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang efisien dan efektif. Sejauh manakah kesehatan keuangan suatu daerah, dapat kita telusuri dari kondisi anggarannya.

Kuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Kemampuan keuangan daerah akan memberikan daya dukung terhadap manajemen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, diantaranya dapat diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan seluruh daerah telah diberikan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, oleh karenanya maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan Kabupaten Nagan Raya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan pengelolaannya.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari kinerja pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya baik dari pelaksanaan non program maupun program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBK. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBK, setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; serta
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kinerja keuangan yang disajikan dalam Bab ini merupakan kinerja keuangan dari realisasi keuangan selama 5 (lima) Tahun terakhir Tahun 2015-2019 berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan Keuangan Kabupaten Nagan Raya yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya.

Secara umum kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dari perkembangan APBK dari tahun ke tahun. Analisis pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBK merupakan wujud dari kesepakatan bersama dari pihak eksekutif dengan legislatif dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaannya melalui pengelolaan keuangannya maka analisis pengelolaan keuangan dilakukan terhadap APBK dan Laporan Keuangan Kabupaten Nagan Raya pada umumnya. Sebelum melakukan analisis pengelolaan keuangan, terlebih dahulu kita harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Secara umum struktur APBK merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

A. Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah

ekuitas dana lancar, yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dikelompokkan atas beberapa komponen:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (non fisik/fisik).
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah, dana darurat, bantuan dana kontigensi, dana bagi hasil provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi.

B. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari beberapa komponen:

1. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dan belanja tidak terduga serta Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat.
2. Belanja Langsung (BL) yang didalamnya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

C. Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA).
2. Pengeluaran Pembiayaan yang didalamnya meliputi penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,90%. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.982.156.185.125,24 jumlah ini mengalami penurunan sebesar (Rp.156.399.923.825,44) atau turun (13,74%) dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar Rp.1.138.556.108.950,68 dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah kembali meningkat sebesar Rp.143.059.743.921,82 atau naik 14,57% dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.1.125.215.929.047,06. Penyebab turun atau naiknya pendapatan daerah pada tahun 2018 ini antara lain karena pada tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak menerima Pendapatan Dana Otonomi Khusus dari Pemerintah Provinsi Aceh.

Menurut kelompok Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya, rata-rata pertumbuhan positif terdapat pada kelompok yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 5,70%, Dana Perimbangan sebesar 2,14% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sebesar 12,34%.

Rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2015-2019 mencapai 2,33%, yang terdiri dari rata-rata

pertumbuhan dari Belanja Tidak Langsung (BTL) positif sebesar 11,25% sedangkan Belanja Langsung (BL) negatif sebesar (2,25%). Dengan kata lain, rata-rata pertumbuhan BTL meningkat (positif) sedangkan laju pertumbuhan BL menurun (negatif). Rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar (17,19%). Lebih jelas mengenai realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya periode tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	TAHUN					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	PENDAPATAN	1.028.697.943.281,39	1.149.198.637.448,16	1.138.556.108.950,68	982.156.185.125,24	1.125.215.929.047,06	2,90
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.938.395.926,48	104,202,917,806.77	74.051.054.126,89	97.118.515.691,03	87.625.375.251,38	5,70
1.1.1	Pajak Daerah	13.960.860.229,00	19.833.675.569,00	19.480.004.604,00	16.086.658.524,00	17.297.157.591,75	7,60
1.1.2	Retribusi daerah	3.278.899.609,00	2.779.862.954,58	1.801.485.225,00	1.170.887.425,00	2.113.863.563,00	(1,22)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.699.949.811,00	3.028.940.638,60	2.915.223.053,45	2.920.346.661,00	2.925.867.025,00	2,20
1.1.4	Zakat / Infaq / Sadaqah	12.856.335.883,60	7.091.141.673,50	7.531.501.799,70	6.558.229.851,00	7.116.331.094,69	(10,76)
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.142.350.393,88	71.469.296.971,09	42.322.839.444,74	70.382.393.230,03	58.172.155.976,94	14,94
1.2	DANA PERIMBANGAN	621.186.430.933,00	650.964.915.284,00	621.196.403.776,00	667.610.847.884,00	673.321.655.285,00	2,14
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	16.682.282.900,00	16.273.646.774,00	13.780.044.888,00	14.533.109.751,00	11.852.238.112,00	(7,69)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	8.841.515.033,00	3.087.452.861,00	5.028.594.087,00	5.206.846.471,00	5.094.615.270,00	(0,20)
1.2.1	Dana Alokasi Umum	503.087.763.000,00	515.602.317.000,00	506.544.842.000,00	501.612.944.200,00	514.300.667.890,00	0,57
1.2.1	Dana Alokasi Khusus	92.574.870.000,00	116.001.498.649,00	95.842.922.801,00	146.257.947.462,00	142.074.134.013,00	14,42

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | **BAB III**

1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	327.573.116.421,91	394.030.804.357,39	443.308.651.047,79	217.426.821.550,21	364.268.898.510,68	12,34
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	14.000.000.000,00	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	23.473.440.000,00	-
1.3.3	Bantuan Dana Kontigensi	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20.198.488.088,91	25.775.490.621,39	22.799.141.318,79	25.263.000.550,21	26.285.544.950,68	7,73
1.3.5	Dana Penyesuaian	141.529.354.000,00	214.154.353.000,00	237.040.752.800,00	192.163.821.000,00	185.426.767.000,00	9,89
1.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (Otsus)	165.845.274.333,00	140.100.960.736,00	183.468.756.928,00	0,00	129.083.146.560,00	-
2	BELANJA	1.050.360.419.082,00	1.143.289.834.222,89	1.142.011.208.104,00	987.053.457.994,62	1.126.913.767.809,17	2,33
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	383.150.360.902,00	533.227.707.295,00	560.152.609.853,00	552.953.483.231,62	564.336.407.266,48	11,25
2.1.1	Belanja Pegawai	303.255.573.847,00	332.562.859.330,00	325.037.166.110,00	332.897.992.235,62	324.602.861.947,48	1,83
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	12.265.500.000,00	20.982.719.200,00	11.989.798.161,00	2.502.800.000,00	3.266.000.000,00	(5,10)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.156.000.000,00	2.783.400.000,00	2.213.724.382,00	2.584.750.000,00	4.869.770.000,00	28,45
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	413.645.496,00	1.312.109.099,00	-

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | **BAB III**

2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	64.283.041.255,00	175.429.068.765,00	220.271.047.200,00	212.271.047.200,00	229.074.230.220,00	50,69
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	1.190.245.800,00	1.469.660.000,00	640.874.000,00	2.054.898.500,00	1.211.436.000,00	36,67
2.1.8	Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat	-	-	-	414.232.500,00	-	-
2.2	Belanja Langsung	667.210.058.180,00	610.062.126.927,89	581.858.598.251,00	434.099.974.763,00	562.577.360.542,69	(2,25)
2.2.1	Belanja Pegawai	64.863.291.334,00	71.656.661.191,00	54.768.365.290,00	71.279.511.662,00	85.183.725.378,00	9,14
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.199.078.577,00	205.605.281.993,00	190.409.660.272,00	176.198.493.112,00	183.951.071.757,64	(2,32)
2.2.3	Belanja Modal	399.147.688.269,00	332.800.183.743,89	336.680.572.689,00	186.621.969.989,00	293.442.563.407,05	(0,70)
	Surplus (Defisit)	(21.662.475.800,61)	5.908.803.225,27	(3.455.099.153,32)	(4.897.272.869,38)	(1.697.838.762,11)	(77,34)
3	PEMBIAYAAN						
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.930.882.559,85	9.268.406.759,24	15.242.479.093,09	11.789.852.612,51	7.009.830.528,52	(17,19)
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	30.929.882.559,85	9.268.406.759,24	15.177.209.984,51	11.787.379.939,77	6.892.579.743,13	(17,54)
3.1.2	Penyesuaian Saldo Awal	1.000.000,00	-	65.269.108,58	2.472.672,74	489.584,39	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-	-	116.761.201,00	-

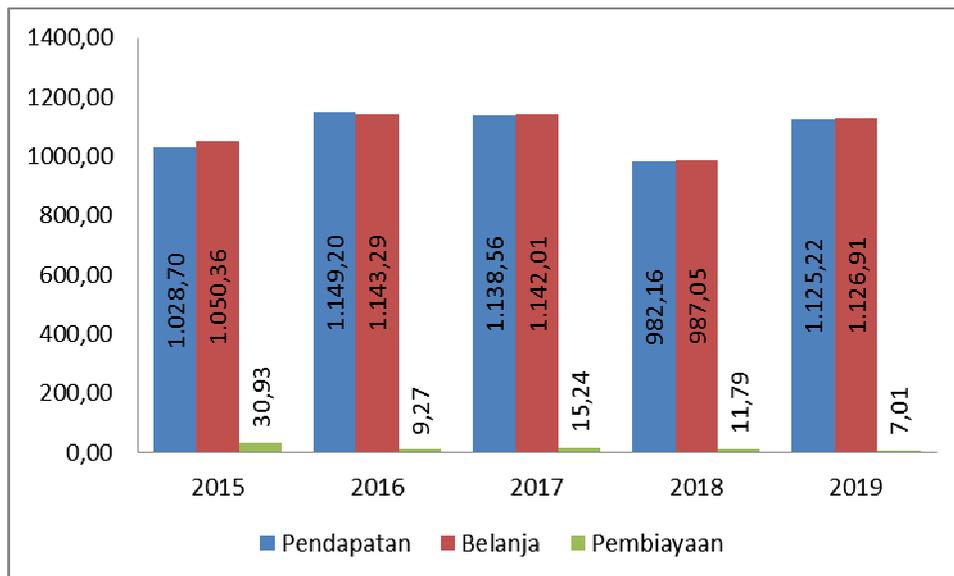
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dalam Gambar 3.1 dibawah ini menggambarkan tren realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan (naik), sebaliknya tren realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019, dimana realisasi belanja daerah lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah.

Sementara pada tahun 2016 terjadi surplus anggaran, hal ini disebabkan karena realisasi belanja daerah lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Gambar 3.1
Realisasi APBK Berdasarkan Komponen Tahun 2015-2019
(dalam Milyar Rupiah)



3.1.1.1 Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Rata-rata anggaran pendapatan daerah tahun 2015-2019 berjumlah sebesar Rp.1.247.848.093.115,93 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp.1.084.764.960.770,51 atau sebesar 86,93%. Pencapaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2019, berada dibawah 100 persen namun secara keseluruhan, anggaran maupun realisasi Pendapatan Daerah selama periode tahun 2015-2019 cenderung naik atau bertambah (Tabel 3.2).

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019

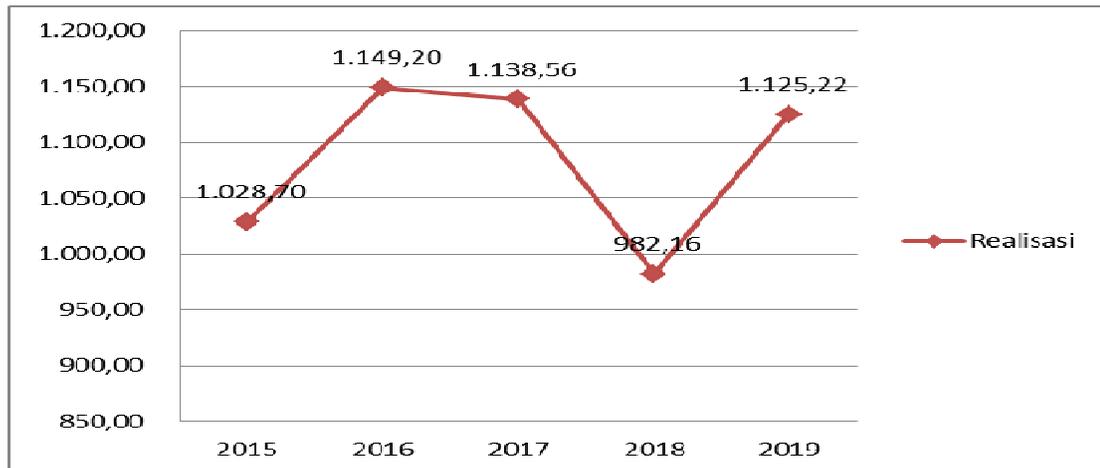
Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	1.180.853.555.516,15	1.028.697.943.281,39	87,11	15,59
2016	1.402.483.552.532,76	1.149.198.637.448,16	81,94	11,71
2017	1.226.663.945.370,49	1.138.556.108.950,68	89,89	(0,93)
2018	1.109.758.966.210,23	982.156.185.125,24	88,50	(13,74)
2019	1.279.480.445.950,00	1.125.215.929.047,06	87,94	14,57
Rata-rata	1.247.848.093.115,93	1.084.764.960.770,51	86,93	2,90

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Nagan Raya Tahun 2015-2019.

Dilihat dari realisasi Pendapat Daerah selama periode tahun 2015-2019 realisasi pendapatan berfluktuasi, capaian realisasi pendapatan tertinggi adalah pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.1.138.556.108.950,68 atau 89,89% kemudian terus mengalami penurunan realisasi, sampai tahun 2019 realisasi pendapatan terealisasi sebesar Rp.1.125.215.929.047,06 atau 87,94%. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi pendapatan dari tahun 2017 ke 2019 turun sebesar Rp.13.340.179.903,62 atau (1,17%).

Pada Tahun 2018 realisasi pendapatan sebesar Rp.982.156.185.125,24 jika dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp.1.138.556.108.950,68. Realisasi pendapatan Tahun 2018 menurun sebesar (Rp.156.399.923.825,44) atau (13,74%), hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah karena tidak diterima Bantuan Keuangan (Dana Otonomi Khusus) dari Provinsi Aceh. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan sebesar Rp.1.125.215.929.047,06 mengalami peningkatan sebesar Rp.143.059.743.921,82 atau 14,57% dari realisasi tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan secara keseluruhan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015-2019 sebesar 2,90%. (Gambar 3.2).

Gambar 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

Tabel 3.3 dibawah ini, secara umum menunjukkan bahwa proporsi realisasi PAD terhadap total pendapatan Daerah selama periode tahun 2015-2019 berfluktuasi cenderung meningkat/naik. Peningkatan realisasi PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, zakat/infaq/sadaqah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Selama periode tahun 2015-2019 terhadap total pendapatan daerah proporsi dana perimbangan berfluktusai dan cenderung mengalami peningkatan dan demikian juga tren proporsi Dana Penyesuaian dan OTSUS cenderung naik/bertambah, seiring dengan fluktuasi penerimaan DAU. Jika dilihat dari tren proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung meningkat.

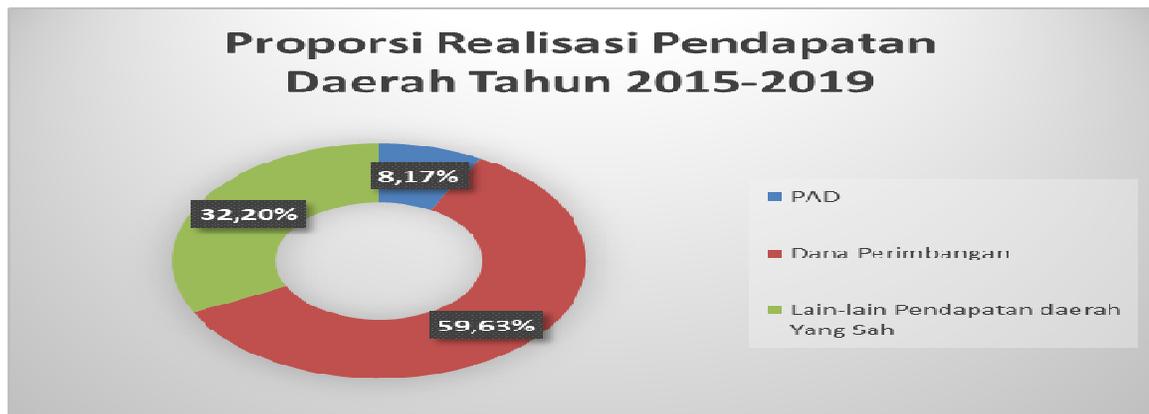
Tabel 3.3
Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan
Daerah Kabupaten Nagan Raya Terhadap Total Pendapatan Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019

Jenis Penerimaan	Proporsi Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)					Rata-Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pendapatan Asli Daerah	7,77	9,07	6,50	9,89	7,79	8,17
Dana Perimbangan	60,39	56,65	54,56	67,97	59,84	59,63
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	31,84	34,29	38,94	22,14	32,37	32,20
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dari Gambar 3.3 diketahui selama periode tahun 2015-2019 Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang terbesar terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya yaitu sebesar 59,63%, sebagaimana yang tercermin dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 32,20%. Sebaliknya kontribusi PAD dalam kurun waktu yang sama masih tergolong kecil hanya mencapai 8,17%. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih sangat tergantung pada penerimaan Dana Perimbangan dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kondisi ini tidak baik terhadap kemandirian Daerah. Terlebih lagi pendapatan dari Dana Perimbangan tersebut merupakan jenis pendapatan yang tidak terjamin kesinambungannya. Masih rendahnya kontribusi PAD ini mencerminkan belum optimalnya upaya perolehan pendapatan terhadap potensi sumber-sumber pendapatan yang ada. Selama ini sumber PAD masih didominasi oleh Lain-lain PAD Yang Sah. Oleh karena itu, kedepan diharapkan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya perlu segera dicari terobosan baru dengan menggali potensi sumber pendapatan lain yang lebih prospektif untuk meningkatkan PAD Kabupaten Nagan Raya.

Gambar 3.3.
Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (dalam Persentase)



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

3.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh berdasarkan Qanun (Peraturan Daerah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan Kabupaten Nagan Raya. Rata-rata anggaran PAD dari tahun 2015-2019 berjumlah sebesar Rp.128.272.135.195,65 dengan rata-rata realisasi mencapai Rp.88.587.251.760,51 atau setara dengan 69,06%. Rata-rata pencapaian realisasi PAD dan Tahun 2015-2019 berada dibawah jumlah yang telah ditetapkan (dibawah 100 persen). Secara Keseluruhan Realisasi PAD setiap tahunnya cenderung meningkat (Tabel 3.4).

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	91.392.717.037,00	79.938.395.926,48	87,47	22,65
2016	163.948.175.508,76	104.202.917.806,77	63,56	30,35
2017	116.121.893.442,49	74.051.054.126,89	63,77	(28,94)
2018	130.411.018.024,00	97.118.515.691,03	74,47	31,15
2019	139.486.871.966,00	87.625.375.251,38	62,82	(9,77)
Rata-rata	128.272.135.195,65	88.587.251.760,51	69,06	5,70

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.4 di atas dapat juga dilihat rasio efektifitas kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Perhitungan rasio efektifitas PAD dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas keuangan suatu daerah, menggambarkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

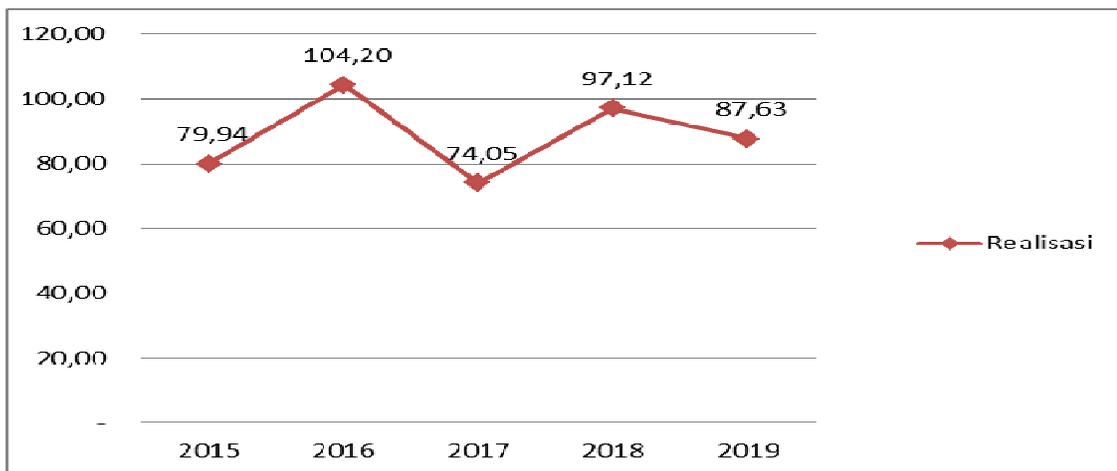
Tabel 3.5
Skala Interval Efektivitas Keuangan Daerah

Efektifitas Keuangan Daerah (%)	Kriteria
Lebih dari 100	Sangat efektif
90 – 100	Efektif
80 – 90	Cukup efektif
60 – 80	Kurang efektif
Kurang dari 60.00	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri, 1996.

Dari hasil perhitungan (Tabel 3.4) dan interpretasi skala internal efektifitas keuangan daerah (Tabel 3.5) di atas, secara keseluruhan rasio efektifitas pengelolaan keuangan daerah selama periode Tahun 2015-2019 mencapai 69,06% persen (dibawah 100 persen) yang berarti bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya berjalan kurang efektif. Selanjutnya bila dilihat dari segi pertumbuhan, rata-rata PAD selama periode tahun 2015-2019 tumbuh sebesar 5,70%. Pertumbuhan PAD tertinggi adalah pada tahun 2018 yang mencapai 31,15%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan realisasi dari komponen Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 66,30%, Retribusi Daerah sebesar (35,00%) dan Pajak Daerah mencapai (17,42%). Secara keseluruhan pertumbuhan realisasi PAD Tahun 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Lebih jelas disajikan dalam Gambar 3.4.

Gambar 3.4.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2015-2019



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

Realisasi Pajak Daerah selama periode tahun 2015-2019 tidak melebihi dari anggaran yang telah direncanakan, dimana dari rata-rata anggaran sebesar Rp.23.704.509.472,50 terealisasi sebesar Rp.17.331.671.303,55 atau setara 73,12%. Rata-rata pertumbuhan realisasi pajak daerah adalah sebesar 7,60%, dengan pertumbuhan tertinggi terdapat pada tahun 2015 yang mencapai 42,07%. Secara keseluruhan realisasi

pajak daerah tiap tahunnya cenderung naik/bertambah. Pajak daerah bersumber dari pendapatan pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian c, sarang burung walet dan BPHTB serta PBB perdesaan dan perkotaan. Lebih jelas mengenai realisasi Pajak daerah dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	16.642.502.000,00	13.960.860.229,00	83,89	26,78
2016	38.824.500.000,00	19.833.675.569,00	51,09	42,07
2017	22.546.369.793,49	19.480.004.604,00	86,40	(1,78)
2018	19.833.675.569,00	16.086.658.524,00	81,11	(17,42)
2019	20.675.500.000,00	17.297.157.591,75	83,66	7,52
Rata-rata	23.704.509.472,50	17.331.671.303,55	73,12	7,60

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 1 angka 64 dijelaskan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Rincian PAD yang bersumber dari Retribusi daerah mencakup retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Realisasi Retribusi Daerah tahun 2015-2019 sebagian besar tidak mencapai anggaran yang telah direncanakan. Dari rata-rata retribusi sebesar Rp.6.172.901.601,00 yang terealisasi hanya sebesar Rp.2.228.999.755,32 atau sebesar 36,11%.

**Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	7.844.996.700,00	3.278.899.609,00	41,80	(70,05)
2016	11.319.996.700,00	2.779.862.954,58	24,56	(15,22)
2017	7.304.996.700,00	1.801.485.225,00	24,66	(35,20)
2018	1.026.521.205,00	1.170.887.425,00	114,06	(35,00)
2019	3.367.996.700,00	2.113.863.563,00	62,76	80,54
Rata-rata	6.172.901.601,00	2.228.999.755,32	36,11	(1,22)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Kekayaan Yang Dipisahkan pada tahun 2015 dan 2016 realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 dan 2016 tersebut realisasi pendapatan yang melebihi target dipengaruhi oleh realisasi pendapatan hasil dari penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada PT. bank Aceh sebesar Rp.2.699.949.811,00 atau 135,00% dan tahun 2016 realisasi yang melebihi target sebesar Rp.3.028.940.638,60 atau 100,96%. Secara keseluruhan realisasinya dibawah anggaran yang telah direncanakan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.4.905.788.127,80 terealisasi sebesar Rp.2.898.065.437,69 atau setara dengan 59,07%, rata-rata pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 2,20%. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan
Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	2.000.000.000,00	2.699.949.811,00	135,00	49,75
2016	3.000.000.000,00	3.028.940.638,00	100,96	12,19
2017	5.500.000.000,00	2.915.223.053,45	53,00	(3,75)
2018	3.028.940.639,00	2.920.346.661,00	96,41	0,18
2019	11.000.000.000,00	2.925.867.025,00	26,60	0,19
Rata-rata	4.905.788.127,80	2.898.065.437,69	59,07	2,20

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari beberapa komponen yang meliputi: penambahan dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, hasil pemanfaatan kekayaan daerah, pendapatan BLUD (RSUD SIM) dan Pendapatan JKN Puskesmas. Berdasarkan Tabel 3.9 diketahui rata-rata realisasi PAD yang bersumber dari Lain-Lain PAD yang sah. Secara keseluruhan realisasinya dibawah anggaran yang telah direncanakan, dari rata-rata anggaran sebesar Rp.79.764.308.963,00 terealisasi sebesar Rp.57.897.807.203,32 atau setara dengan 72,59%, rata-rata pertumbuhan Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 14,94%. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.9.

**Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	57.444.456.353,00	47.142.350.393,88	82,07	23,60
2016	96.135.855.636,00	71.469.296.971,00	74,34	51,60
2017	64.402.026.949,00	42.322.839.444,74	65,72	(40,78)
2018	97.521.880.611,00	70.382.393.230,03	72,17	66,30
2019	83.317.325.266,00	58.172.155.976,94	69,82	(17,35)
Rata-rata	79.764.308.963,00	57.897.807.203,32	72,59	14,94

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

3.1.1.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang disebut juga dengan dana transfer/grants adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai kebutuhan daerah. Rata-rata realisasi Dana Perimbangan tahun 2015-2019 berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dari anggaran sebesar Rp.710.969.183.386,80 terealisasi sebesar Rp.646.856.050.632,40 atau setara dengan 90,98%. Lebih jelas disajikan dalam Tabel 3.10.

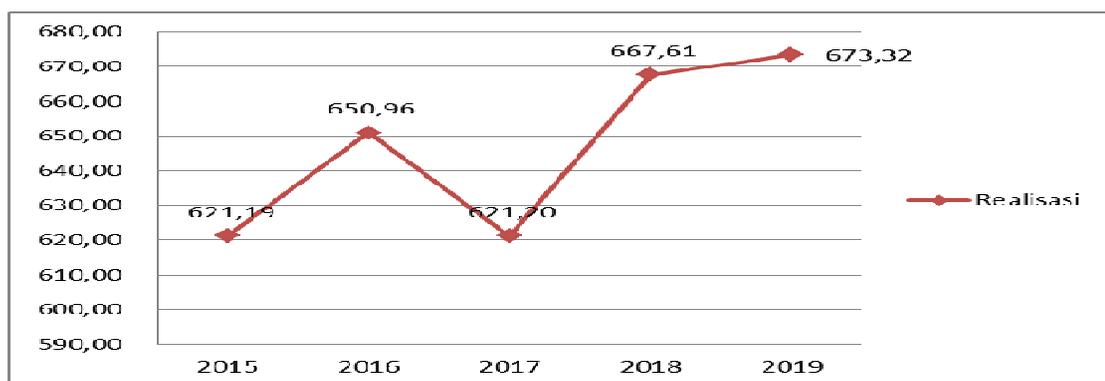
Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	718.674.521.400,00	621.186.430.933,00	86,44	2,70
2016	817.863.908.000,00	650.964.915.284,00	79,59	4,79
2017	639.312.573.000,00	621.196.403.776,00	97,17	(4,57)
2018	680.524.764.534,00	667.610.847.884,00	98,10	7,47
2019	698.470.150.000,00	673.321.655.285,00	96,40	0,86
Rata-Rata	710.969.183.386,80	646.856.050.632,40	90,98	2,14

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Berdasarkan Gambar 3.10 diketahui pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan tahun 2015-2019 Rata-rata sebesar 2,14%. Pada tahun 2018 terjadi pertumbuhan relatif besar sebesar 7,47% disebabkan adanya kenaikan realisasi komponen dana bagi hasil pajak dan DAK. Kemudian pada tahun 2019 pertumbuhan menjadi 0,86 disebabkan adanya penurunan realisasi dana bagi hasil pajak dan DAK. Secara keseluruhan pertumbuhan realisasi dana perimbangan Tahun 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.

Gambar 3.5
Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2015-2019



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

Menurut komponen Dana Perimbangan, realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2015-2019 tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Rata-rata realisasi hanya mencapai 90,98%, dari anggaran Rp.710.969.183.386,80 yang terealisasi hanya sebesar Rp.646.856.050.632,40. Bila ditinjau dari segi pertumbuhan realisasi, rata-rata tumbuh positif sebesar 2,14%.

**Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	49.715.289.769,00	16.682.282.900,00	33,56	(1,78)
2016	55.369.087.00,00	16.273.646.774,00	29,30	(2,45)
2017	17.881.551.000,00	13.780.044.888,00	77,06	(15,32)
2018	18.457.936.838,00	14.533.109.751,00	78,74	5,46
2019	16.704.890.000,00	11.852.238.112,00	70,95	(18,45)
Rata-rata	31.625.750.921,40	14.624.264.485,00	46,24	(7,69)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Anggaran DAU Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2015-2019 rata-rata berjumlah sebesar Rp.510.905.892.600,00 dengan realisasi rata-rata sebesar Rp.508.229.706.818,00 atau 99,48%. Secara keseluruhan realisasi DAU tahun 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung meningkat/bertambah. Lebih jelas mengenai anggaran dan realisasi DAU Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.12 di bawah ini.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	503.087.763.000,00	503.087.763.000,00	100,00	0,43
2016	515.602.317.000,00	515.602.317.000,00	100,00	2,49
2017	506.544.842.000,00	506.544.842.000,00	100,00	(1,76)
2018	507.106.599.000,00	501.612.944.200,00	98,92	(0,97)
2019	522.187.942.000,00	514.300.667.890,00	98,49	2,53
Rata-rata	510.905.892.600,00	508.229.706.818,00	99,48	0,57

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran DAK Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.142.126.610.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.118.550.274.585,00 atau 83,41%. Realisasi mencapai 100 persen terdapat pada tahun 2015, sementara tahun 2016-2019 realisasi berada dibawah 100 persen. Selama tahun 2015-2019 rata-rata DAK tumbuh sebesar 14,42%, dimana pada tahun 2017 tumbuh negatif minus 16,38%, kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 52,60%. Pada tahun 2019 DAK kembali mengalami penurunan mencapai (2,86%). Secara keseluruhan realisasi DAK selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	92.574.870.000,00	92.574.870.000,00	100,00	24,16
2016	204.720.261.000,00	116.001.498.649,00	56,66	25,31
2017	110.352.495.000,00	95.842.922.801,00	86,85	(17,38)
2018	149.203.278.000,00	146.257.947.462,00	98,03	52,60
2019	153.782.146.000,00	142.074.134.013,00	92,39	(2,86)
Rata-Rata	142.126.610.000,00	118.550.274.585,00	83,41	14,42

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran OTSUS Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.119.699.627.747,40 dengan realisasi sebesar Rp.119.699.627.747,40 atau 100,00%. Realisasi mencapai 100 persen untuk setiap tahun mulai dari tahun 2016-2019. Selama tahun 2015-2019 pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata Otsus tumbuh sebesar 6,75%. Secara keseluruhan realisasi OTSUS selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.14.

**Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi OTSUS Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	145.845.274.513,00	145.845.274.513,00	100,00	0,01
2016	140.100.960.736,00	140.100.960.736,00	100,00	(3,94)
2017	183.468.756.928,00	183.468.756.928,00	100,00	30,95
2018	0,00	0,00	-	(100,00)
2019	129.083.146.560,00	129.083.146.560,00	100,00	100,00
Rata-Rata	119.699.627.747,40	119.699.627.747,40	100,00	6,75

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan kepada daerah atas keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan (ketepatan waktu dalam penyusunan APBK, penyampaian Laporan Keuangan, Opini WTP atas Laporan Keuangan dan lainnya. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran DID Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.31.281.282,00 dengan realisasi sebesar Rp.31.281.282,00 atau 100,00%. Realisasi mencapai 100 persen untuk setiap tahun mulai dari tahun 2016-2019. Selama tahun 2015-2019 pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata DID tumbuh sebesar 1,71%, dimana pada tahun 2018 tumbuh negatif (34,48%) dan tahun 2019 juga tumbuh negatif (67,54%). Secara keseluruhan realisasi DID selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami penurunan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.15.

**Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	21.926.404.000,00	21.926.404.000,00	100,00	630,88
2016	39.686.025.000,00	39.686.025.000,00	100,00	81,00
2017	50.751.644.000,00	50.751.644.000,00	100,00	27,88
2018	33.250.000.000,00	33.250.000.000,00	100,00	(34,48)
2019	10.792.337.000,00	10.792.337.000,00	100,00	(67,54)
Rata-Rata	31.281.282.000,00	31.281.282.000,00	100,00	1,71

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dana Desa dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan di Desa-desanya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran Dana Desa Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.138.724.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.138.723.000.160,00 atau 100,00%. Realisasi mencapai 100 persen terdapat pada tahun 2015-2016, sementara tahun 2017 realisasi turun menjadi 99,99% kemudian meningkat lagi menjadi 100,00% pada tahun 2018 dan 2019. Selama tahun 2015-2019 rata-rata Dana Desa tumbuh sebesar 38,85%, dimana pada tahun 2018 tumbuh negatif minus 5,52%, kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 9,89%. Secara keseluruhan realisasi DAK selama tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	59.167.104.000,00	59.167.104.000,00	100,00	-
2016	132.710.017.000,00	132.710.017.000,00	100,00	124,30
2017	168.198.628.000,00	168.189.628.800,00	99,99	26,73
2018	158.913.821.000,00	158.913.821.000,00	100,00	(5,52)
2019	174.634.430.000,00	174.634.430.000,00	100,00	9,89
Rata-Rata	138.724.800.000,00	138.724.800.000,00	100,00	38,85

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

3.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Kontigensi, Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya. Rata-rata realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.349.321.658.377,60 atau sebesar 85,49% dari anggaran sebesar Rp.408.606.774.533,48. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	370.786.317.079,15	327.573.116.421,91	88,35	48,93
2016	420.671.469.024,00	394.030.804.357,39	93,67	20,29
2017	511.229.478.928,00	443.308.651.047,79	86,71	12,51
2018	298.823.183.652,23	217.426.821.550,21	72,76	(50,95)
2019	441.523.423.984,00	364.268.898.510,68	82,50	67,54
Rata-Rata	408.606.774.533,48	349.321.658.377,60	85,49	12,34

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

3.1.1.2 Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya

Rata-rata realisasi belanja daerah tahun 2015-2019 mencapai 86,05%, dimana rata-rata pertumbuhan dari BTL adalah sebesar 86,67% dan BL sebesar 85,49%. Untuk BTL, rata-rata realisasi tertinggi terdapat pada belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang mencapai 93,60% dan terendah pada belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 13,61%. Sementara untuk BL, realisasi tertinggi terdapat pada belanja pegawai sebesar 88,12% dan yang terendah adalah pada belanja modal sebesar 85,49%. Secara keseluruhan realisasi Belanja Daerah selama periode tahun 2015-2019 cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.18.

**Tabel 3.18
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
2	BELANJA DAERAH	86,75	81,04	89,16	88,09	85,99	86,05
2.1	Belanja Tidak Langsung	78,55	80,75	90,21	92,88	89,82	86,67
2.1.1	Belanja Pegawai	78,36	76,38	89,07	93,35	87,83	84,57
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	40,08	93,04	85,21	96,84	82,13	69,13
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	98,56	98,53	78,24	55,25	96,72	83,21
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	18,29	30,86	13,61
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	96,70	90,12	94,38	94,14	94,29	93,60
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	77,79	97,98	21,36	58,71	48,46	54,59
2.1.8	Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat	-	-	-	100,00	-	100,00
2.2	Belanja Langsung	92,28	81,30	88,18	82,66	82,47	85,49
2.2.1	Belanja Pegawai	77,83	89,76	92,74	91,88	89,81	88,12
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	94,02	83,63	89,82	83,31	81,85	86,41
2.2.3	Belanja Modal	94,24	78,36	86,59	79,04	80,93	84,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

3.1.1.2.1 Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Tabel 3.17 diketahui total anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) selama periode tahun 2015-2019 adalah berjumlah sebesar Rp.2.992.778.034.405,00 dengan realisasi sebesar 86,67% atau setara dengan Rp.2.593.820.568.548,10. Menurut jenis belanja BTL proporsi realisasi tertinggi berasal dari belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Lainnya yang menyumbang sebesar

93,60%, sebaliknya kontribusi terendah bersumber dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar 13,61%, Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
			Jumlah (Rp.)	%	(%) Proporsi
1	Belanja Pegawai	1.913.551.129.000,00	1.618.356.453.470,10	84,57	62,39
2	Belanja Hibah	73.784.003.000,00	51.006.817.361,00	69,13	1,97
3	Belanja Bantuan Sosial	17.555.000.000,00	14.607.644.382,00	83,21	0,56
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	12.681.531.220,00	1.725.754.595,00	13,61	0,07
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	962.762.138.685,00	901.142.551.940,00	93,60	34,74
6	Belanja Tidak Terduga	12.030.000.000,00	6.567.114.300,00	54,59	0,25
7	Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat	414.232.500,00	414.232.500,00	100,00	0,02
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	1.005.442.902.405,00	924.457.297.717,00	91,95	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Realisasi total Belanja Tidak Langsung (BTL) berdasarkan komponen belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya, uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPR serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Realisasi belanja pegawai tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp.1.618.356.453.470,10 atau 84,57% dari total anggaran sebesar Rp.1.913.551.129.000,00. Proporsi realisasi belanja pegawai terhadap total belanja tidak langsung adalah sebesar 62,39%.

b. Belanja Hibah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana yang telah telah diubah menjadi Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah. Realisasi belanja hibah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2019 mencapai Rp.51.006.817.361,00 atau sebesar 69,13% dari rencana anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.73.784.003.000,00. Belanja hibah diberikan kepada Badan/Lembaga, Yayasan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan Sementara Proporsi realisasi belanja hibah terhadap total belanja tidak langsung sebesar 1,97%.

c. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial selama periode tahun 2015-2019 mencapai Rp.14.607.644.382,00 atau sebesar 83,21% dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.17.555.000.000,00. Bantuan sosial kepada penanganan sosial dan kejadian luar biasa, anak yatim, pondok anak yatim,

penyanggah cacat dan lain-lain. Proporsi realisasi belanja hibah terhadap total belanja tidak langsung sebesar 0,56%.

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Periode Tahun 2015-2019 mencapai Rp.1.725.754.595,00 atau sebesar 13,61% dari total anggaran sebesar Rp.12.681.531.220,00. Proporsi realiasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terhadap total belanja tidak langsung mencapai 0,07%.

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Lainnya.

Total anggaran belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Lainnya periode tahun 2015-2019 berjumlah sebesar Rp.962.762.138.685,00 dengan realisasi sebesar 93,60% atau sebesar Rp. 901.142.551.940,00. Proporsi realiasi Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Lainnya terhadap total Belanja Tidak Langsung (BTL) adalah sebesar 34,74 persen.

f. Belanja Tidak Terduga

Realisasi belanja tidak terduga tahun 2015-2019 mencapai Rp.6.567.114.300,00 atau sebesar 54,59% dari total anggaran sebesar Rp.12.030.000.000,00. Sementara proporsi belanja tidak terduga terhadap total realisasi belanja tidak langsung hanya sebesar 0,25%.

g. Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat

Realisasi belanja transfer ke pemerintah pusat tahun 2015-2019 mencapai Rp.414.232.500,00 atau sebesar 100,00% dari total anggaran sebesar Rp.414.232.500,00. Pengembalian dana ini terjadi pada tahun 2018 karena terdapat sisa dana dari pusat yang tidak terealisasi. Sementara proporsi belanja tidak terduga terhadap total realisasi belanja tidak langsung hanya sebesar 100,00%.

3.1.1.2.2 Belanja langsung

Realisasi Belanja Langsung selama periode tahun 2015-2019 mencapai Rp.2.855.808.118.664,58 atau setara dengan 85,49% dari total anggaran sebesar Rp.3.340.625.310.418,00. Belanja Pegawai merupakan komponen penyumbang terbesar dalam realisasi total belanja langsung yaitu sebesar 88,12%, jika dibandingkan dengan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Lebih rinci disajikan dalam Tabel 3.20.

**Tabel 3.20
Anggaran dan Realisasi Total Belanja Langsung Tahun 2015-2019**

No	Uraian	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
			Jumlah (Rp.)	%	(%) Proporsi
1	Belanja Pegawai	394.653.784.551,00	347.751.554.855,00	88,12	12,18
2	Belanja Barang dan Jasa	1.110.245.461.302,00	959.363.585.711,64	86,41	33,59
3	Belanja Modal	1.835.726.064.565,00	1.548.692.978.097,94	84,36	54,23
	Jumlah Belanja Langsung	3.340.625.310.418,00	2.855.808.118.664,58	85,49	100,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun APBK 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Lebih rinci realisasi Belanja Langsung (BL) tahun 2015-2019 yang diklasifikasikan menurut sumbernya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dalam belanja langsung merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau tujuan organisasi. Realiasi belanja pegawai 2015-2019 mencapai Rp.347.751.554.855,00 atau sebesar 88,12% dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.394.653.784.551,00. Belanja pegawai memberikan kontribusi realisasi terhadap total belanja langsung sebesar 12,18%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk pengadaan barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2015-2019 mencapai Rp.959.363.585.711,64 atau setara dengan 86,41% dari total anggaran sebesar Rp.1.110.245.461.302,00. Realisasi belanja barang dan jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap total belanja langsung yakni sebesar 33,59%.

c. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang digunakan untuk perolehan aset tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Realisasi belanja modal periode tahun 2015-2019 mencapai 84,36% atau setara dengan Rp.1.548.692.978.097,94 dari total rencana anggaran sebesar Rp.1.835.726.064.565,00. Kontribusi realisasi belanja modal terhadap belanja langsung mencapai 54,23%.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dan penyesuaian saldo awal. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman dan pembayaran nilai nominal obligasi. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2015-2019 sangat berfluktuasi dengan rata-rata realisasi mencapai Rp.14.848.290.310,64 atau sebesar 78,84% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.18.832.575.848,67. Secara keseluruhan realisasi Pembiayaan Kabupaten Nagan Raya selama periode tahun 2015-2019 cenderung menurun. Lebih rinci mengenai realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.21.

**Tabel 3.21
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	29.929.882.559,85	30.930.882.559,85	103,34	(22,81)
2016	8.268.406.759,24	9.268.406.759,24	112,09	(70,04)
2017	14.177.209.984,51	15.242.479.093,09	107,51	64,46
2018	10787.379.939,77	11.789.852.612,51	109,29	(22,65)
2019	31.000.000.000,00	7.009.830.528,52	22,61	(40,54)
Rata-rata	18.832.575.848,67	14.848.290.310,64	78,84	(17,19)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Berdasarkan komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya, rata-rata realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari penerimaan pembiayaan selama tahun 2015-2019 mencapai Rp.14.848.290.310,64 atau sebesar 74,87% dari anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp.19.832.575.848,67. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pembiayaan selama tahun 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung menurun. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pembiayaan Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.22.

**Tabel 3.22
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015-2019**

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	30.929.882.559,85	30.930.882.559,85	100,00	(25,91)
2016	9.268.406.759,24	9.268.406.759,24	100,00	(70,04)
2017	15.177209.984,51	15.242.479.093,09	100,43	64,46
2018	11.787.379.939,77	11.789.852.612,51	100,02	(22,65)
2019	32.000.000.000,00	7.009.830.528,52	21,91	(40,54)
Rata-rata	19.832.575.848,67	14.848.290.310,64	74,87	(17,19)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Selanjutnya rata-rata realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nagan Raya yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan selama periode tahun

2015-2019 tidak terjadi realisasi pengeluaran pembiayaan. Tidak terealisasinya pengeluaran pembiayaan ini karena tidak adanya penyertaan modal ke PT. Bank Aceh Cabang Jeuram sebesar anggaran yang ditetapkan. Terakhir penyertaan modal ke PT. Bank Aceh Cabang Jeuram, pada tahun 2014 dengan realisasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 atau 100,00% sama dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun tersebut. Lebih rinci mengenai realisasi pengeluaran pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Anggaran Jumlah (Rp.)	Realisasi		
		Jumlah (Rp.)	%	Pertumbuhan (%)
2015	1.000.000.000,00	0,00	-	-
2016	1.000.000.000,00	0,00	-	-
2017	1.000.000.000,00	0,00	-	-
2018	1.000.000.000,00	0,00	-	-
2019	1.000.000.000,00	0,00	-	-
Rata-rata	1.000.000.000,00	0,00	-	-

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

3.1.2 Neraca Kabupaten Nagan Raya

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Berdasarkan penyajian data neraca, dapat diketahui tentang jumlah Aset, baik Aset Lancar maupun Aset Tidak Lancar serta kewajiban dan Ekuitas Dana dalam periode tertentu. Aset daerah dapat memberikan informasi tentang sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai

pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Sementara kewajiban menggambarkan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya pemerintah. Kewajiban pemerintah dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang pihak ketiga, utang belanja dan utang jangka pendek lainnya;
- 2) kewajiban jangka panjang yang mencakup utang dalam negeri-setor perbankan/obligasi dan utang jangka panjang lainnya. Seterusnya, dari ekuitas dana dapat pula diketahui kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Selama periode tahun 2015-2019 rata-rata pertumbuhan Aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 7,26%, dimana rata-rata pertumbuhan dari Aset Lancar negatif sebesar (3,29%) sedangkan rata-rata pertumbuhan dari Aset tetap mencapai 10,26%. Sementara untuk kewajiban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2012-2016 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 252,89%, dan ekuitas dana mencapai 5,89%. Untuk lebih rinci mengenai kondisi perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama tahun 2015-2019, dapat dilihat pada Tabel 3.24 di bawah ini.

Tabel 3.24
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2019

U R A I A N	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
ASSET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	3.734.337.760,24	11.926.274.097,60	9.602.334.734,14	4.268.387.291,81	1.385.879.358,56	19,20
Kas di Bendahara Pengeluaran	117.295.599,00	13.293.155,00	1.612.975,00	84.000,00	141.450,00	(50,73)
Kas di Bendahara Penerimaan	74.477,00	-	-	-	-	-
Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	2.533.856.977,00	967.782.681,00	275.412.426,00	898.752.684,00	1.060.474.749,00	27,74
Kas di Bendahara FKTP	2.882.841.946,00	2.263.233.824,91	1.778.022.890,13	1.624.071.726,00	1.431.468.375,00	(15,86)
Kas Lainnya	-	-	-	-	358.917,00	-
Setara Kas	538.875.000,00	6.626.226,00	14.266.689,00	38,00	-	(45,87)
Piutang Pajak	14.561.743.380,00	8.792.029.917,00	10.429.173.852,00	12.026.767.720,00	13.764.379.567,00	2,19
Piutang Retribusi	69.219.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	531,30
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.853.823.177,98	8.935.836.277,28	12.312.181.100,00	21.594.062.228,00	33.732.267.600,00	45,79
Piutang Pendapatan	4.389.827.593,00	9.270.322.913,00	-	-	-	-

Transfer Pemerintah Pusat						
Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	11.144.871.651,38	8.955.495.556,47	5.943.051.585,66	10.062.669.372,68	2.594.905.074,00	(14,54)
Piutang Lainnya	-	-	4.915.200,00	-	-	-
Penyisihan Piutang	(4.370.672.067,98)	(5.045.642.065,88)	(4.100.778.541,90)	(5.162.785.377,98)	(6.500.840.279,30)	12,13
Belanja Dibayar Dimuka	524.213.333,33	596.982.400,00	648.641.000,00	-	-	-
Persediaan	30.281.165.868,50	8.147.965.952,50	7.368.119.702,81	9.456.879.434,51	10.573.851.990,61	(10,63)
Jumlah Aktiva Lancar	74.261.473.695,45	54.835.810.934,88	44.398.293.838,34	55.005.540.620,34	59.482.165.718,72	(3,29)
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	-
Jumlah Investasi Permanen	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	11.750.000.000,00	-
ASET TETAP						
Tanah	165.282.371.422,00	152.527.406.172,00	152.905.806.172,00	135.225.313.788,00	162.067.945.528,00	0,20
Perlitan dan Mesin	224.612.033.307,00	264.598.394.933,92	293.039.451.631,00	305.981.489.428,00	328.510.166.573,00	10,08
Gedung dan Bangunan	681.709.610.072,75	803.696.694.948,48	878.368.854.865,00	843.045.888.300,00	904.689.088.582,00	7,62
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	621.038.610.272,00	774.443.139.164,02	917.376.041.565,00	1.027.868.401.115,00	1.185.885.007.107,00	17,64

Aset Tetap Lainnya	26.721.159.300,00	36.778.281.791,98	41.556.580.456,00	40.978.874.796,00	45.496.598.752,00	15,07
Konstruksi Dalam Pengerjaan	40.455.796.736,00	96.063.374.000,00	133.794.233.970,00	119.713.983.770,00	123.740.603.356,00	42,39
Akumulasi Penyusutan	(473.284.740.134,09)	(582.951.418.235,30)	(692.599.023.958,00)	(767.673.290.684,00)	(866.739.451.318,00)	16,43
JUMLAH ASET TETAP	1.286.534.840.975,66	1.545.155.872.775,10	1.724.441.944.701,00	1.705.140.660.513,00	1.883.649.958.580,00	10,26
ASET LAINNYA						
Tuntutan Ganti Rugi	184.845.786,00	184.845.786,00	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud	12.914.939.400,00	12.874.939.400,00	12.889.888.400,00	13.599.388.400,00	5.169.993.900,00	(14,17)
Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	(8.701.479.500,00)	(4.520.646.300,00)	-
Aset Lain-lain	123.569.379.230,00	74.623.683.958,65	75.358.783.958,65	77.123.033.958,65	34.499.051.699,65	(22,89)
Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	-	-	-	(1.764.250.000,00)	(1.654.250.000,00)	-
Jumlah Aset Lainnya	136.669.164.416,00	87.683.469.144,65	88.433.518.144,65	80.441.538.644,65	33.678.995.085,65	(25,54)
JUMLAH ASET						
	1.509.215.479.087,11	1.699.425.152.854,63	1.869.023.756.683,99	1.852.337.739.777,99	1.988.561.119.384,37	7,26
KEWAJIBAN						
Kewajiban Jangka Pendek						
Utang Pihak Ketiga	-	2.675.746,00	-	-	-	-
Utang Belanja	239.073.111,00	116.795.074.947,00	31.786.685.580,00	19.116.399.068,00	29.831.872.301,14	12.174,17
Utang Jangka Pendek	11.207.182.973,00	10.375.374.370,00	44.998.674.048,00	61.735.969.053,00	79.199.933.754,95	97,94

Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	11.446.256.084,00	127.173.125.063,00	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	109.031.806.056,09	252,89
Jumlah Kewajiban	11.446.256.084,00	127.173.125.063,00	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	109.031.806.056,09	252,89
EKUITAS						
Ekuitas Dana						
Ekuitas	1.497.769.223.003,11	1.572.252.027.791,63	1.792.238.397.055,99	1.771.485.371.656,99	1.879.529.313.328,28	5,98
Jumlah Ekuitas Dana	1.497.769.223.003,11	1.572.252.027.791,63	1.792.238.397.055,99	1.771.485.371.656,99	1.879.529.313.328,28	5,98
	-			-		
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.509.215.479.087,11	1.699.425.152.854,63	1.869.023.756.683,99	1.852.337.739.777,99	1.988.561.119.384,37	5,98

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya.

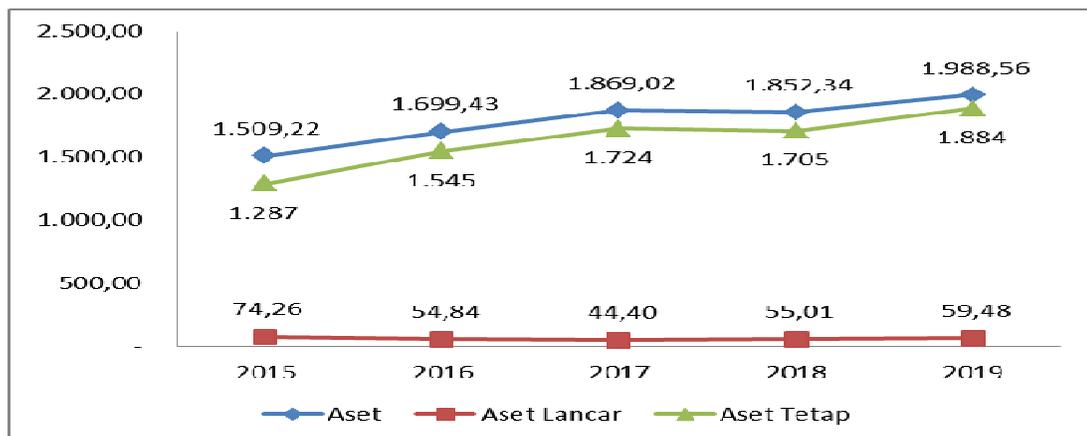
Table 3.25
Realisasi Aset Tahun 2015-2019

Tahun	ASET Jumlah (Rp.)	ASET LANCAR Jumlah (Rp.)	ASET TETAP Jumlah (Rp.)
2015	1.509.215.479.087,11	74.261.473.695,90	1.286.534.840.975,66
2016	1.699.425.152.854,63	54.835.810.934,88	1.545.155.872.775,10
2017	1.869.023.756.683,99	44.398.293.838,34	1.724.441.944.701,00
2018	1.852.337.739.777,99	55.005.540.620,34	1.705.140.660.513,00
2019	1.988.561.119.384,37	59.482.165.718,72	1.883.649.958.580,00
Rata-Rata	1.783.712.649.557,62	57.596.656.961,55	1.628.984.655.508,95

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Sesuai dengan yang disajikan dalam Tabel 3.25, secara keseluruhan realisasi aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015-2019 berfluktuasi cenderung meningkat/naik. Peningkatan realisasi aset terjadinya penambahan pada Aset Tetap karena adanya realisasi belanja modal sedangkan Aset Lancar mengalami penurunan karena terjadi pengeluaran belanja yang mengakibatkan menurunnya kas atau bank dan meningkatnya penyisihan piutang yang dapat mempengaruhi jumlah dari aset lancar. Realisasi aset yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap cenderung mengalami peningkatan (naik), realisasi aset selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada (Gambar 3.6).

Gambar 3.6
Realisasi Aset Tahun 2015-2019



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

**Tabel 3.26
Realisasi dan Pertumbuhan Aset Tahun 2015-2019**

Tahun	Realisasi Aset		Realisasi Aset Lancar		Realisasi Aset Tetap	
	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (%)	Jumlah (Rp.)	Pertumbuhan (%)
2015	1.509.215.479.087,11	(6,47)	74.261.473.695,45	40,93	1.286.534.840.975,66	(9,35)
2016	1.699.425.152.854,63	12,60	54.835.810.934,88	(26,16)	1.545.155.872.775,10	20,10
2017	1.869.023.756.683,99	9,98	44.398.293.838,34	(19,03)	1.724.441.944.701,00	11,60
2018	1.852.337.739.777,99	(0,89)	55.00.540.620,34	23,89	1.705.140.660.513,00	(1,12)
2019	1.988.561.119.384,37	7,35	59.482.165.718,72	8,14	1.883.649.958.580,00	10,47
Rata-Rata	1.783.712.649.557,62	7,26	57.596.656.961,55	(3,29)	1.628.984.655.508,95	10,26

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 3.26 diatas diketahui pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuasi. Pertumbuhan positif terhadap total aset terjadi pada tahun 2016, 2017 dan 2019 dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 12,60%. Sebaliknya Total Aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2015 sebesar (6,47%) dan tahun 2018 sebesar (0,89%).

Jika dilihat dari segi aset lancar, pertumbuhan positif terjadi pada Tahun 2015, 2018 dan 2019, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 40,93%. Sementara pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan aset lancar mengalami pertumbuhan yang negatif yang mencapai sebesar (26,16%) dan (19,03%). Bila ditinjau dari segi aset tetap pertumbuhan positif terjadi pada tahun 2016, 2017 dan 2019, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 20,10%. Pertumbuhan negatif aset tetap terjadi pada tahun 2015 sebesar (9,35%) dan tahun 2018 sebesar (1,12%).

Dalam rangka memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial daerah, perlu dilakukan analisa atau interpretasi terhadap data finansial yang tercermin dalam laporan keuangan daerah. Terdapat dua bentuk umum rasio keuangan yang sering digunakan dalam menganalisis kondisi keuangan dan kinerja yaitu rasio likuiditas (liquidity ratio) dan rasio solvabilitas (solvability ratio). Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kewajiban (hutang) jangka pendek. Pemerintah daerah yang mempunyai kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya disebut Pemerintah Daerah yang liquid. Tingkat likuiditas suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya dengan menunjukkan sejauh mana aktiva lancar dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek/hutang lancar (Current Ratio). Cara lainnya ialah dengan menunjukkan kemampuan Daerah membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan dibanding asset lain. Cara ini lebih dikenal dengan Quick Ratio analysis. Sementara rasio solvabilitas yang disebut juga dengan rasio leverage digunakan untuk mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh daerah dengan dana yang dipinjamkan dari pemerintah pusat/swasta/investor. Adapun rasio yang tergabung dalam rasio leverage adalah total debt to equity ratio (rasio hutang terhadap ekuitas) dan total debt to total asset ratio (rasio hutang terhadap total aktiva).

Tabel 3.27
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019

RASIO	RUMUS	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	74.261.473.695,45	54.835.810.934,88	44.398.293.838,34	55.005.540.620,34	59.482.165.718,72
	Kewajiban Jangka Pendek	11.446.256.084,00	127.173.125.063,00	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	109.031.806.056,09
	Current Ratio	6,49	0,43	0,58	0,68	0,55
	Aset Lancar – Persediaan	43.980.307.826,95	46.687.844.982,88	37.030.174.135,53	45.548.661.185,83	48.908.313.728,11
	Kewajiban Jangka Pendek	11.446.256.084,00	127.173.125.063,00	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	109.031.806.056,09
	Quick Ratio	3,84	0,37	0,48	0,56	0,45
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	11.446.256.084,00	127.173.125.063,00	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	109.031.806.056,09
	Total Aset	1.509.215.479.087,11	1.699.425.152.854,63	1.869.023.756.683,99	1.852.337.739.777,99	1.988.561.119.384,37
	Rasio Total Hutang / Aset	0,01	0,07	0,04	0,04	0,05

Total Hutang	11.446.256.084,00	127.173.125.063,00	76.785.359.628,00	80.852.368.121,00	109.031.806.056,09
Total Ekuitas	1.497.769.223.003,11	1.572.252.027.791,63	1.792.238.397.055,99	1.771.485.371.656,99	1.879.529.313.328,28
Rasio Hutang/ Modal	0,01	0,08	0,04	0,05	0,06

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2015-2019, data diolah.

Dari Tabel 3.27 diatas diketahui Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek yang segera harus dipenuhi dengan mencairkan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan dari 6,49 di tahun 2015 menjadi 0,55 di tahun 2019.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan membayar hutang jangka pendek Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tidak memadai.

1. Current ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Berdasarkan tabel diatas, current rasio selama periode tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan, dari sebesar 6,49 pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,55 pada tahun 2019. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek tidak memadai.
2. Quick ratio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick selama periode tahun 2015-2019 juga mengalami penurunan, dari sebesar 3,84 pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,45 pada tahun 2019. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membayar hutang jangka pendek juga tidak memadai.
3. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Selama periode tahun 2015-2019, rasio total hutang terhadap aset menunjukan tren peningkatan yaitu dari angka 0,01 pada tahun 2015 menjadi 0,05 pada tahun 2019 sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh hutang terhadap asset semakin meningkat. Meskipun demikian kemampuan

keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya relatif kuat dalam pelunasan seluruh kewajibannya.

4. Rasio Hutang terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Selama periode tahun 2015-2019, Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkisar antara 0,01 sampai 0,08. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya, sehingga dapat diartikan kemampuan keuangan juga masih relatif kuat bila akan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan terebih yang bersifat jangka panjang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBK yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah. Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan peningkatan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya diarahkan pada:

- a. Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan lebih menitikberatkan pada (1) potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak; (2) tidak memberatkan masyarakat; (3) tidak merusak lingkungan; (4) Mudah diterapkan dan dilaksanakan (5) Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kabupaten.

Kebijakan pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang memprioritaskan pada perdagangan dan jasa.

- b. Peningkatan koordinasi dan melibatkan berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berhubungan dengan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan regulasi perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah murni diarahkan pada dua hal yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan, namun merupakan belanja tetap pemerintah. Secara umum belanja tidak langsung adalah:

- a. Belanja pegawai diarahkan untuk:
 - Pemberian gaji
 - Penyediaan anggaran tambahan penghasilan PNS;

- Pemberian tunjangan untuk Ketua, Wakil ketua, Anggota DPRK;
 - Penyediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru.
- b. Pemberian hibah dalam rangka mendukung fungsi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semi pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan melalui upaya yang jelas, selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- c. Pemberian bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat kebutuhan dan urgensi tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan dalam rangka mendukung upaya-upaya penanggulangan dan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan dan peningkatan SDM yang dilakukan secara jelas, selektif/tidak mengikat, rasional dan jumlahnya dibatasi.

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Secara umum belanja langsung adalah:

- a. Belanja pegawai, adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya/kurang dari 12 bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan merupakan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mencukupi kebutuhan belanja daerah. Dalam perubahan APBD Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran terdapat kelebihan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari:

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun diarahkan untuk pengeluaran penyertaan modal pada PT. Bank Aceh.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah kabupaten nagan raya pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi APBD Nagan Raya tahun 2015-2019, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah berkisar antara 81,84 persen sampai dengan 89,87 persen atau rata-rata realisasi mencapai 86,15 persen dari total anggaran yang ditetapkan, kemudian rata-rata realisasi belanja pada kelompok belanja tidak langsung mencapai 83,31 persen dan pada kelompok belanja langsung mencapai 88,44 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.28
Analisis Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Rata-rata (%)
1	Belanja Daerah	86,75	81,04	89,16	88,09	85,99	86,05
2.1.	Belanja Tidak	78,55	80,75	90,21	92,88	89,82	86,67
	Belanja Pegawai	78,36	76,38	89,07	93,35	87,83	84,57
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	40,08	93,04	85,21	96,84	82,13	69,13
	Belanja Bantuan Sosial	98,56	98,53	78,24	55,25	96,72	83,21
	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi /Kab./ Kota & Pemerintahan	-	-	-	18,29	30,86	13,61
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kab./Kota dan Pemerintahan	96,70	90,12	94,38	94,14	94,29	93,60
	Belanja Tidak Terduga	77,79	97,98	21,36	58,71	48,46	54,59
	Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat	-	-	-	100,00	-	-
2.2.	Belanja Langsung	92,28	81,30	88,18	82,66	82,47	85,49
	Belanja Pegawai	77,83	89,76	92,74	91,88	89,81	88,12
	Belanja Barang dan	94,02	83,63	89,82	83,31	81,85	86,41
	Belanja Modal	94,24	78,36	86,59	79,04	80,93	84,36

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Berdasarkan Tabel 3.28 diketahui proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2015-2019 diketahui berkisar antara 33,10% sampai 49,95%, dengan rata-rata proporsi per tahun sebesar 36,08%. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2015-2019 masih ideal (dibawah 50 persen), dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik lebih besar. Lebih rinci mengenai persentase realisasi belanja aparatur terhadap total belanja disajikan pada Tabel 3.29.

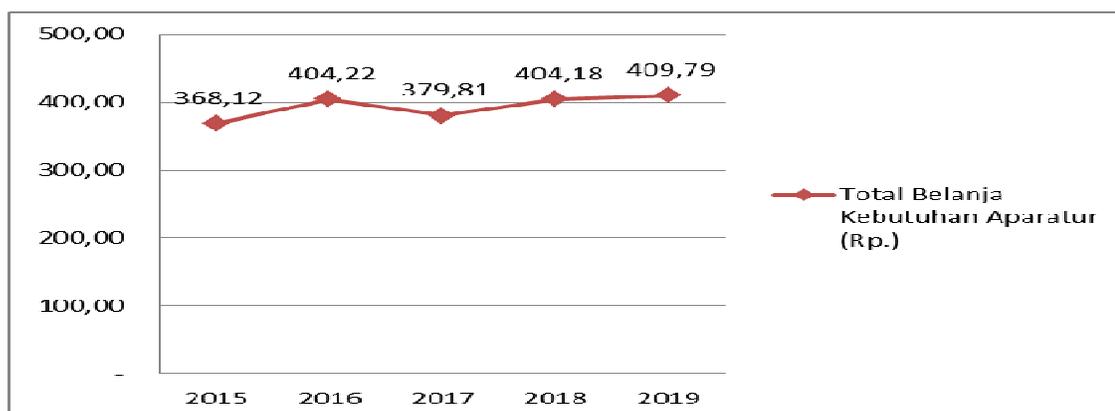
Tabel 3.29
Analisis Realisasi Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2015-2019

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp)	Total Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Persentase (%)
2015	1,050,360,419,082.00	368,118,865,181.00	35.05
2016	1,143,289,834,222.89	404,219,520,521.00	35.36
2017	1.142.011.208.104,00	379.805.531.400,00	33,26
2018	987.053.457.994,62	404.177.503.897,62	40,05
2019	1.126.913.767.809,17	409.786.587.325,48	36,36
Rata-rata			36,08

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (Audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Tren realisasi proporsi total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran selama periode tahun 2015-2019 cenderung meningkat. Persentase realisasi proporsi tertinggi terdapat pada tahun 2018 yang mencapai 40,05% dan mengalami penurunan pada Tahun 2019. Lebih jelas mengenai realisasi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 3.7

Gambar 3.7
Proporsi realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber : BPKD Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

Proporsi dana pendidikan daerah terhadap total pengeluaran tahun 2015-2019 berkisar antara 21,59% sampai 25,37%. Proporsi terbesar terdapat Tahun 2017 yakni sebesar 25,37% dan proporsi terkecil terdapat pada tahun 2019 sebesar 21,59%. Secara kumulatif rata-rata proporsi realisasi dana pendidikan dari tahun 2015-2019 mencapai 23,41%. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30
Analisis Realisasi Proporsi Dana Pendidikan Tahun 2015-2019

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Total Belanja Untuk Pendidikan (Rp.)	Persentase (%)
2015	1.050.360.419.082,00	260.491.075.154,00	24,80
2016	1.143.289.834.222,89	273.043.694.629,00	23,88
2017	1.142.011.208.104,00	289.744.021.606,00	25,37
2018	987.053.457.994,62	223.798.814.065,62	22,67
2019	1.126.913.767.212,68	243.314.717.925,68	21,59
Rata-rata			23,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Selanjutnya berdasarkan proporsi dana kesehatan terhadap total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) tahun 2015-2019 berkisar antara 10,58% sampai 15,52%. Proporsi terbesar terdapat Tahun 2018 yakni sebesar 15,52% dan proporsi terkecil terdapat pada tahun 2015 sebesar 10,58%. Secara keseluruhan total dana kesehatan cenderung mengalami peningkatan. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.31.

Tabel 3.31
Analisis Realisasi Proporsi Dana Kesehatan Tahun 2015-2019

Tahun	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp.)	Total Belanja untuk Kesehatan (Rp.)	Persentase (%)
2015	1.050.360.419.082,00	111.083.133.837,00	10,58
2016	1.143.289.834.222,89	125.236.446.572,00	10,95
2017	1.142.011.208.104,00	143.393.071.192,00	12,56
2018	987.053.457.994,62	153.162.216.404,00	15,52
2019	1.126.913.767.212,68	171.354.522.830,00	15,21
Rata-rata			13,48

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Program perlindungan sosial bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberi bantuan sosial, pelaksanaan syariat islam dan penanggulangan bencana daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan proporsi dana perlindungan sosial terhadap total pengeluaran tahun 2015-2019 adalah sebesar 2,87%. Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.32

Tabel 3.32
Proporsi Anggaran Perlindungan Sosial Tahun 2015-2019

Tahun	Total pengeluaran (belanja + pembiayaan pengeluaran) (Rp.)	Total Belanja Untuk Perlindungan Sosial (Rp.)	Persentase (%)
2015	1.050.360.419.082,00	43.109.566.226,00	4,10
2016	1.143.289.834.222,89	20.857.410.984,00	1,82
2017	1.142.011.208.104,00	48.494.230.937,00	4,25
2018	987.053.457.994,62	20.330.264.832,00	2,06
2019	1.126.913.767.212,68	36.709.952.051,00	3,26
Rata-rata			2,87

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

2. Ruang Fiskal

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu juga dapat dilihat dari ruang fiskal. Ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan sumberdaya untuk suatu tujuan tanpa membahayakan kesinambungan posisi keuangan atau stabilisasi ekonomi Negara (Daerah). Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBK untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah.

Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Perhitungan ruang fiskal daerah, yaitu total Pendapatan Daerah dikurangi dengan Pendapatan Hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*), dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, kemudian dibagi dengan total pendapatannya.

Indikator ini pada dasarnya menunjukkan seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari, seperti gaji PNS, dan selain itu terdapat berbagai jenis pendapatan yang bersifat *earmarked* (ditentukan penggunaannya).

Ruang fiskal diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) serta belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan anggaran untuk menutup Surplus/Defisit riil APBK Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu tahun 2015-2019 disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.33
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	REALISASI ANGGARAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.028.697.943.281,39	1.149.198.637.448,16	1.138.556.108.950,68	982.156.185.125,24	1.125.215.929.047,06
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.050.360.419.082,00	1.143.289.834.222,89	1.142.011.208.104,00	987.053.457.994,62	1.126.913.767.809,17
3	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
A	Defisit Riil	(21.662.475.800,61)	5.908.803.225,27	(3.455.099.153,32)	(4.897.272.869,38)	(1.697.838.762,11)
	Ditutup oleh Realisasi Penerimaan:					
4	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	30.929.882.559,85	9.268.406.759,24	15.177.209.984,51	11.787.379.939,77	6.892.579.743,13

5	Penyesuaian Saldo Awal	1.000.000,00	-	65.269.108,58	2.472.672,74	489.584,39
6	Penerimaan Kembali Piutang Daerah	-	-	-	-	116.761.201,00
7	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	30.929.882.559,85	9.268.406.759,24	15.242.479.093,09	11.789.852.612,51	7.009.830.528,52
A+B	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	9.267.406.759,24	15.177.209.984,51	11.787.379.939,77	6.892.579.743,13	5.311.991.766,41

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (good government), diperlukan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tentang defisit yang terjadi pada anggaran pemerintah daerah. Untuk pembiayaan defisit anggaran, diperlukan adanya sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber pembiayaan untuk menutup defisit mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah (Piutang Daerah) dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pembiayaan dimasadatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan selama periode tahun 2015-2109, diketahui defisit terjadi pada tahun anggaran 2015, 2017, 2018 dan 2019. Hal ini terjadi karena tidak seimbang antara jumlah Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Meskipun tren pendapatan dan belanja Nagan Raya menunjukkan adanya peningkatan, namun pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya dan pengeluaran pembiayaan daerah jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Adanya defisit anggaran pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2019 menunjukkan pengelolaan APBK belum berjalan optimal, sehingga kedepan diharapkan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, Zakat/Infaq/Sadaqah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah,

sehingga dengan meningkatnya pendapatan dapat menjadi penyeimbang terhadap pertumbuhan belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Dari Tabel 3.33 diketahui SiLPA tertinggi adalah pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.15.177.209.984,51 sebaliknya SiLPA terendah adalah pada tahun 2019 sebesar Rp.5.311.991.766,41. Secara keseluruhan bila dilihat dari tren SiLPA selama periode tahun 2015-2019 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Berkaitan dengan keberadaan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif jika SiLPA tersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Sedangkan SiLPA bermakna negatif merupakan sebaliknya yaitu tidak efektifnya penerimaan PAD dan tidak dibarengi oleh efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah. Dari hasil evaluasi terhadap SiLPA tersebut diharapkan untuk rencana kedepan jumlah SiLPA Kabupaten Nagan Raya dapat disesuaikan.

Realisasi komposisi sisa lebih perhitungan anggaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.31.

Tabel 3.34
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
1	Jumlah SiLPA	30.929.882.559,85	100,00	9.268.406.759,24	100,00	15.177.209.984,51	100,00	11.787.379.939,77	100,00	6.892.579.743,13	100,00
2	Penerimaan PAD	(5.707.108.198,52)	(8,05)	(11.454.321.110,52)	(12,53)	(59.745.257.701,99)	(36,44)	(42.070.839.315,60)	(36,23)	(33.292.502.332,97)	(25,53)
3	Penerimaan Dana Perimbangan	(64.127.576.011,00)	(9,61)	(97.488.090.467,00)	(13,56)	(166.898.992.716,00)	(20,41)	(8.765.670.724,00)	(1,49)	(12.913.916.650,00)	(1,90)
4	Penerimaan Transfer Pusat Lainnya	(6.575.115.000,00)	(11,05)	(765.000.000,00)	(0,54)	(17.248.133.900,00)	(7,45)	(10.360.467.700,00)	(3,58)	(26.809.000.000,00)	(12,24)
5	Penerimaan Transfer Provinsi	(4.082.745.133,81)	(10,06)	(40.395.988.782,24)	(17,84)	(7.292.530.766,61)	(22,05)	(64.810.858.680,21)	(23,91)	(54.587.362.102,02)	(68,36)
6	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	(2.052.211.875,00)	(100,00)	(2.100.000.000,00)	(13,04)	(2.100.000.000,00)	(100,00)	-	-
7	Penghematan Belanja Tidak Langsung (BTL)	(58.006.713.770,18)	(14,87)	(104.404.940.334,00)	(21,40)	(127.141.719.984,00)	(19,25)	(60.818.440.840,00)	(9,79)	(42.398.810.206,38)	(7,12)
8	Penghematan	(53.415.713.133,00)	(8,61)	(56.018.078.660,00)	(7,75)	(140.320.405.085,11)	(18,70)	(78.011.506.411,00)	(11,82)	(91.094.077.949,00)	(17,34)

	Belanja Langsung (BL)										
9	Penerimaan Pembiayaan	-	-	1.000.000,00	-	-	-	65.269.108,58	0,43	2.472.672,74	0,02
10	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	(1.000.000.000,00)	(100,00)	(1.000.000.000,00)	(100,00)	(1.000.000.000,00)	(100,00)	(1.000.000.000,00)	(100,00)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2019 (audited), Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya (diolah).

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan.

Sebelum melakukan analisis kerangka pendanaan terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan susunan/struktur masing-masing APBK. Disamping itu juga diperlukan data-data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah untuk lima tahun serta berbagai informasi pendukung dalam melakukan proyeksi APBK.

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu tahun 2015-2019, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mendatang. Namun sebelumnya perlu diketahui kondisi pengeluaran masing-masing komponen belanja sebagai pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam menghitung proyeksi terhadap pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya dilakukan dengan menggunakan analisis dan pertimbangan (*judgment*) antara lain dengan menganalisis tren realisasi, laju dan rata-rata pertumbuhan realisasi serta asumsi lainnya. Adapun cara atau pendekatan yang dilakukan dalam menghitung proyeksi pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

1. Berdasarkan laju pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja 5 (lima) tahun terakhir dari masing-masing kode rekening/ perkiraan dari pendapatan dan belanja.
2. Rata-rata pertumbuhan sejak terjadinya realisasi pendapatan dan belanja dari tahun 2015-2019.

3. Analisis terhadap kecenderungan jumlah realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari tahun 2015-2019 dengan menggunakan pertimbangan (*judgment*) terhadap ketersediaan dana dalam menentukan jumlah SiLPA Tahun sebelumnya.
4. Jika diperoleh penetapan angka pendapatan dan belanja daerah untuk tahun berikutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan peraturan terkait.

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Asumsi target penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli daerah (PAD).

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020-2022 diproyeksikan dengan laju pertumbuhan pendapatan sebesar 2,32% per tahun. Proyeksi tersebut mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,53%;
- b. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya akan melakukan upaya untuk meningkatkan PAD dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pendataan objek dan subjek pajak serta melaksanakan sosialisasi pajak daerah.
- c. Kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menurunnya SiLPA pada kurun waktu 5 tahun terakhir lebih dominan bersumber dari sisa penghematan belanja. Hal tersebut berimplikasi kepada menurunnya penerimaan lain-lain PAD.

Dalam penerimaan PAD, komponen penyumbang kontribusi paling besar adalah Lain-lain PAD Yang Sah sebesar 65,36%. Kontribusi berikutnya diberikan oleh Pajak Daerah sebesar 19,56%. Selanjutnya

Zakat/Infaq/sadaqah memberikan kontribusi sebesar 9,29% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 3,27% serta Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 2,52%.

2. Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer

Proyeksi penerimaan dari Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer pada tahun 2020-2022 diperkirakan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,91% dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,41%.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Dana Perimbangan yaitu sebesar 77,53%. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, DAU diberikan berdasarkan celah fiskal/keuangan dan alokasi dasar. Celah fiskal/keuangan merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal/keuangan daerah. Kebutuhan daerah merupakan variabel-variabel yang ditetapkan undang-undang antara lain penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan indeks harga, perhitungan kapasitas keuangan didasarkan atas PAD dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah, sedangkan alokasi dasar merupakan pemenuhan gaji PNS.
- c. Dana Otonomi Khusus (OTSUS)
Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran OTSUS Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.119.699.627.747,40 dengan realisasi sebesar Rp.119.699.627.747,40 atau 100,00%. Realisasi mencapai 100 persen untuk setiap tahun mulai dari tahun 2016-2019. Selama tahun 2015-2019 pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata Otsus tumbuh sebesar 6,75%.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah atas keberhasilan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan (ketepatan waktu dalam penyusunan APBK, penyampaian Laporan Keuangan, Opini WTP atas Laporan Keuangan dan lainnya. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran DID Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.31.281.282,00 dengan realisasi sebesar Rp.31.281.282,00 atau 100,00%. Realisasi mencapai 100 persen untuk setiap tahun mulai dari tahun 2016-2019. Selama tahun 2015-2019 pertumbuhannya berfluktuatif dengan rata-rata DID tumbuh sebesar 1,71%,

e. Dana Desa (DD)

Dana Desa dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan di Desa-desanya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata anggaran Dana Desa Kabupaten Nagan Raya berjumlah sebesar Rp.138.724.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.138.723.000.160,00 atau 100,00%. Realisasi mencapai 100 persen terdapat pada tahun 2015-2016, sementara tahun 2017 realisasi turun menjadi 99,99% kemudian meningkat lagi menjadi 100,00% pada tahun 2018 dan 2019. Selama tahun 2015-2019 rata-rata Dana Desa tumbuh sebesar 38,85%

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan dengan laju pertumbuhan sebesar 0,99% per tahun. Kontribusi terbesar akan diperoleh dari Dana Otonomi Khusus (Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya) sebesar 35,40%. Selanjutnya Dana Desa sebesar 39,70%. Dalam upaya optimalisasi penerimaan pendapatan, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus secara intensif melakukan koordinasi menggali potensi penerimaan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan Pendapatan Daerah pemerintah kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022 yang terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli daerah, Dana

Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan laju pertumbuhan sebesar 2,27% per tahun.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan penggunaan belanja tidak langsung dan belanja operasi kebijakan yang dilakukan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPK sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan daerah.
2. Melakukan sinkronisasi kegiatan lintas sektoral sehingga tidak tumpang tindih dan keterpaduan dalam pencapaian sasaran.

Untuk belanja langsung, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer untuk mendanai pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2020-2022 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pengalokasian anggaran bidang pendidikan minimal 20 persen dari total anggaran untuk jenjang SD dan SMP.
3. Melakukan efisiensi anggaran dengan cara memverifikasi seluruh belanja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) agar pelaksanaan dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan pencapaian hasil dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan cara meningkatkan pemahaman pejabat/aparatur pengelola keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adanya perubahan regulasi pengelolaan keuangan dari Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, disertai dengan berubahnya Struktur APBK. Perubahan struktur dimaksud antara lain berupa format dan nomenklatur, yang disesuaikan dengan kebutuhan agar lebih memudahkan baik dalam mempelajari maupun dalam penerapannya dan perubahan tersebut merupakan suatu proses menuju penyempurnaan. Perubahan struktur APBK baik berupa format, nomenklatur dan lainnya diatur dalam bentuk peraturan/regulasi pemerintah beserta turunannya.

Selanjutnya proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah tahun 2020-2022 yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan diuraikan dengan mengikuti pola struktur APBK sebagai berikut:

1. Struktur APBK sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.35 berikut:

Tabel 3.35
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

No.	URAIAN	Tahun 2020	Pertumbuhan %
1	PENDAPATAN		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.578.029.560,30	2,32
1.1.1	Pajak Daerah	18.249.055.122,55	5,50
1.1.2	Retribusi daerah	1.894.149.095,89	(10,39)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.985.240.381,37	2,03
1.1.4	Zakat/Infaq/Sadaqah	6.138.197.808,11	(13,74)
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	61.311.387.152,37	5,40
1.2	DANA PERIMBANGAN	665.372.372.168,03	2,91
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.881.445.455,07	(8,19)
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	4.438.718.147,42	(12,87)

1.2.2			
1.2.3	Dana Alokasi Umum	487.688.377.000,00	0,55
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	73.369.785.000,00	11,30
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	88.994.046.565,54	11,28
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	379.574.286.798,93	2,69
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	-
1.3.3	Bantuan Dana Kontigensi	0,00	-
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.074.789.965,93	6,81
1.3.5	Dana Insentif daerah (DID)	18.912.339.000,00	(16,24)
1.3.6	Dana Desa (DD)	175.871.395.000,00	31,07
1.3.7	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (OTSUS)	156.715.762.833,00	(6,07)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.135.524.688.527,25	2,27
2	BELANJA		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	598.566.927.386,87	10,16
2.1.1	Belanja Pegawai	330.170.473.635,77	1,72
2.1.2	Belanja Subsidi	0,00	-
2.1.3	Belanja Hibah	2.346.112.920,70	(28,17)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.000.000.000,00	22,59
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.693.609.002,00	0,05
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	255.356.731.828,40	37,39
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	0,44
2.2	Belanja Langsung	542.269.752.906,79	(4,17)
2.2.1	Belanja Pegawai	91.119.460.496,33	7,05

2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	179.430.996.709,68	(2,46)
2.2.3	Belanja Modal	271.719.295.700,79	(7,40)
	JUMLAH BELANJA	1.140.836.680.293,66	1,77
	SURPLUS (DEFISIT)	(5.311.991.766,41)	(47,09)
3	PEMBIAYAAN		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.311.991.766,41	(31,00)
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	5.311.991.766,41	(31,29)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

2. Struktur APBK sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2022 yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.37 berikut:

Tabel 3.37
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2021-2022

No.	URAIAN	Tahun		Pertumbuhan %
		2021	2022	
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93.910.961.190,97	97.615.366.579,67	2,32
1.1.1	Pajak Daerah	19.253.337.497,76	20.312.887.561,20	5,50
1.1.2	Retribusi daerah	1.697.271.697,31	1.520.857.687,89	(10,39)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.045.818.575,63	3.107.626.057,04	2,03
1.1.4	Zakat/Infaq/Sadaqah	5.294.508.059,03	4.566.782.704,53	(13,74)
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	64.620.025.361,24	68.107.212.569,01	5,40
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.033.295.753.621,40	1.043.961.926.557,89	18,50
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	978.309.925.550,89	986.934.976.893,59	11,67
1.2.1.1	Dana Perimbangan	682.046.487.031,89	700.628.551.649,51	2,91
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.990.168.445,21	9.171.894.117,91	(8,19)
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.867.263.325,71	3.369.379.432,00	(12,87)
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	490.383.375.667,59	493.093.267.078,50	0,55

1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	81.662.509.761,92	90.892.531.586,61	11,30
1.2.1.1.5	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	96.143.169.831,46	104.101.479.434,49	11,28
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	26.023.813.000,00	21.797.545.768,80	(16,24)
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	94.368.230.519,00	88.637.484.475,28	(6,07)
1.2.1.4	Dana Desa (DD)	175.871.395.000,00	175.871.395.000,00	31,07
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	54.985.828.070,51	57.026.949.664,30	6,83
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	29.985.828.070,51	32.026.949.664,30	6,81
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,02
1.3	PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	-
1.3.1	Lain-lain Pendapatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	-
1.3.2	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.127.206.714.812,37	1.141.577.293.137,56	2,27

2	BELANJA			
2.1	BELANJA OPERASI:	373.991.581.854,00	568.397.700.659,73	3,19
2.1.1	Belanja Pegawai	373.991.581.854,00	388.951.245.128,16	1,72
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.021.989.666,07	170.721.321.446,12	7,05
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	-
2.1.4	Belanja Hibah	1.685.317.157,58	1.210.638.199,29	(28,17)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.129.639.420,95	7.514.495.886,16	22,59
2.2	BELANJA MODAL	330.592.366.795,27	333.880.871.347,07	(7,40)
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	2.511.053.484,36	0,44
2.4	BELANJA TRANSFER:	242.785.819.918,50	242.787.667.646,40	(6,32)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.695.455.806,50	3.697.303.534,40	0,05
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	239.090.364.112,00	239.090.364.112,00	(6,37)
	JUMLAH BELANJA	1.132.706.714.812,37	1.147.577.293.137,56	1,77
	SURPLUS (DEFISIT)	(5.500.000.000,00)	(6.000.000.000,00)	(47,09)

3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	(31,29)
3.1.1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	(31,29)
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	-
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	-
	PEMBIAYAAN NETO	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	(31,29)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, (data diolah).

3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsung daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum melakukan penghitungan kerangka pendanaan daerah, berikut akan diuraikan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2020 sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.36 berikut:

Tabel 3.36
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2020

No.	URAIAN	Tahun 2020
	BELANJA	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	585.527.205.464,17
	Belanja Gaji dan Tunjangan	330.170.473.635,77
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	255.356.731.828,40
B	Belanja Langsung	34.225.100.408,81
	Belanja Langsung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	34.225.100.408,81
	PEMBIAYAAN	
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
	Total (A +B + C)	619.752.305.872,98

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, (data diolah).

Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2021-2022 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dipergunakan untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.38 berikut:

**Tabel 3.38
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat
serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2021-2022**

No	URAIAN	Tahun	
		2021	2022
	BELANJA		
A	BELANJA OPERASI:		
	Belanja Pegawai	373.991.581.854,00	388.951.245.128,12
	Belanja Barang dan Jasa:		
	- Belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	33.981.201.444,37	34.427.318.794,13
B	BELANJA TRANSFER:		
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	239.090.364.112,00	239.090.364.112,00
	PEMBIAYAAN		
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00
	Total (A + B + C)	647.063.147.410,37	662.468.928.034,24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, (data diolah).

4. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.

Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 3.39 berikut ini.

Tabel 3.39
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022

No.	URAIAN	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Pendapatan	1.135.524.688.527,25	1.127.206.714.812,37	1.141.577.293.137,56
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.311.991.766,41	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.140.836.680.293,66	1.132.706.714.812,37	1.147.577.293.137,56
	Dikurangi:			
4	Belanja dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	619.752.305.872,98	647.063.147.410,37	662.468.928.034,24
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	521.084.374.420,68	485.643.567.402,00	485.108.365.103,31

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, (data diolah).

Untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Nagan Raya Tahun 2020 sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.40.

**Tabel 3.40
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020**

No.	URAIAN	Tahun
		2020
I	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	521.084.374.420,68
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas – I	
2a	Belanja Langsung	542.269.752.906,79
2b	Pembentukan Dana Cadangan	0,00
	Dikurangi:	
2c	Belanja Langsung yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	34.225.100.408,81
2d	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	0,00
2	Jumlah Pengeluaran Prioritas – I (2a + 2b – 2c – 2d)	508.044.652.497,98
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan setelah menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas - I (1 - 2)	13.039.721.922,70
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas – II	
3a	Belanja Tidak Langsung	598.566.927.386,87
	Dikurangi:	
3b	Belanja Tidak Langsung yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	585.527.205.464,17
3	Jumlah Pengeluaran Prioritas – II (3a – 3b)	13.039.721.922,70
	Surplus Anggaran Riil atau Belanja Berimbang (1 – 2 – 3)	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya,(data diolah).

Secara lebih rinci mengenai perkembangan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan Nagan Raya Tahun 2021-2022 sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.41.

**Tabel 3.41
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022**

No.	URAIAN	Tahun	
		2021	2022
I	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	485.643.567.402,00	485.108.365.103,31
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas – I		
2a	Belanja Operasi:		
	- Belanja Barang dan Jasa	175.021.989.666,70	170.721.321.446,12
2b	Belanja Modal	330.592.366.795,77	333.880.871.347,07
2c	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
	Dikurangi:		
2d	Belanja Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	33.981.201.444,37	34.427.318.794,13
2e	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	0,00	0,00
2	Jumlah Pengeluaran Prioritas – I (2a + 2b + 2c – 2c – 2d)	471.633.155.016,97	470.174.873.999,06
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan setelah menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas - I (1 - 2)	14.010.412.385,65	14.933;491.104,25
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas – II		
3a	Belanja Operasi:		
	- Belanja Pegawai	373.991.581.854,00	388.951.245.128,16
	- Belanja Subsidi	0,00	0,00
	- Belanja Hibah	1.685.317.157,58	1.210.638.199,29
	- Belanja Bantuan Sosial	6.129.639.420,95	7.514.495.886,16
3b	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.511.053.484,36
3c	Belanja Transfer:		
	- Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintah Desa	3.695.455.806,50	3.697.303.534,40
	- Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintah Desa	239.090.364.112,00	239.090.364.112,00

	Dikurangi:		
3d	Belanja Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	613.081.945.966,00	628.041.609.240,12
3	Jumlah Pengeluaran Prioritas – II (3a + 3b + 3c - 3d)	14.010.412.385,03	14.933.491.104,25
	Surplus Anggaran Riil atau Belanja Berimbang (1 – 2 – 3)	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, (data diolah).

Selanjutnya kapasitas riil kemampuan keuangan yang tersedia pada Tabel 3.39 dipergunakan untuk membiayai Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas III. Pengalokasian dana pada prioritas III akan dipenuhi, setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan prioritas II terlebih dahulu. Adapun rencana pengeluaran terhadap masing-masing prioritas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk mendanai belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja barang dan jasa (belanja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur) dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan Desa.
- b. Prioritas II, yaitu berkaitan berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMK serta mengacu RPJMA dan amanat/kebijakan Nasional yang definitif, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20 (dua puluh) persen dan kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen serta program prioritas ditingkat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang merupakan penjabaran dari masing-masing urusan/bidang urusan yang berdampak luas pada masing-masing kelompok masyarakat yang dilayani. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang

dihadapi berkaitan dengan dengan layanan dasar serta tugas pokok dan fungsi SKPK, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan administrasi perkantoran serta program pendukung lainnya untuk peningkatan pelayanan pada SKPK.

Belanja yang dialokasikan untuk mendanai belanja prioritas II terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa (belanja program pendidikan, program kesehatan, program pelayanan administrasi perkantoran) dan belanja modal.

- c. Prioritas III, yaitu berkaitan dengan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga.

Alokasi rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan berdasarkan masing-masing prioritas dapat dilihat pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2022

PRIORITAS	Tahun					
	2020	%	2021	%	2022	%
Kapasitas Riil	1.140.836.680.293,66	100,00	1.132.706.714.812,37	100,00	1.147.577.293.137,56	100,00
Prioritas 1	619.752.305.872,98	54,32	647.063.147/410,37	56,72	622,468.928.03,24	58,07
Prioritas 2	508.044.652.497,98	44,53	471.633.155.016,97	41,43	470.17.873.999,06	41,21
Prioritas 3	13.039.721.922,70	1,14	14.010.412.385,03	1,23	14.933.491.104,25	1,31

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya, (data diolah).

Tabel 3.42 menunjukkan bahwa rencana penggunaan kapasitas riil keuangan secara agregat mengalami peningkatan, rencana prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan alokasi dana untuk belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta proiritas utama berupa

belanja gaji dan tunjangan ASN dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang harus dilaksanakan pada periode perencanaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2020, prioritas I dialokasi sebesar 54,32%, kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 58,07%.

Prioritas II yang merupakan program berkaitan berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan kesehatan. Alokasi pada prioritas II pada tahun 2020 sebesar 44,53% selanjutnya pada tahun 2022 menurun menjadi 41,21%. Penurunan ini diasumsikan bahwa beberapa program prioritas telah selesai dilaksanakan dalam periode perencanaan.

Sementara Prioritas III merupakan alokasi belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintahan desa dan belanja tidak terduga. Alokasi pada prioritas III pada tahun 2020 sebesar 1,14% dan pada akhir periode perencanaan dialokasikan sebesar 1,31%.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

IV.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini sudah berumur 18 Tahun, situasi dan kondisi semakin kondusif dan banyak perkembangan yang telah dicapai sejak pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Keberadaannya yang sangat strategis untuk lintasan jalur Barat Selatan yang memberikan kontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Meskipun Kabupaten Nagan Raya masih tergolong muda, namun secara perlahan Kabupaten Nagan Raya telah mampu berdiri sejajar dengan Kabupaten/kota lain di Aceh. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraih, diantaranya pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut turut dari BPK RI Perwakilan Aceh sejak tahun 2008-2019 atas pengelolaan keuangan daerah dengan baik, dan semua itu merupakan bukti nyata kerja keras dan keseriusan dalam membangun Kabupaten Nagan Raya yang lebih baik.

Meskipun laju pembangunan dan kehidupan masyarakat semakin dinamis, banyak tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Nagan Raya seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang menimbulkan dampak pada permasalahan-permasalahan pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, adanya permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Nagan Raya dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala daerah, Nasional dan Internasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan gambaran umum tentang perekonomian dan keuangan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, permasalahan Kabupaten Nagan Raya diidentifikasi sebagai berikut :

IV.1.1 Permasalahan Pembangunan

IV.1.1.1 Penerapan dan Pengamalan Syariat Islam;

Kabupaten Nagan Raya dalam sejarahnya merupakan kabupaten yang sangat komitmen dalam menjalankan syariat islam dan menerapkan nilai-nilai islam dalam semua tatanan masyarakat secara kaffah yang menjadi landasan pembangunan untuk melahirkan generasi dan masyarakat cerdas, beragama dan memiliki nilai budaya dengankarakter moral yang baik, maka penerapan syariat islam menjadi sangat penting dan isu strategis utama yang harus menjadi perhatian semua pihak.

Meskipun demikian, permasalahan-permasalahan masih banyak terjadi dan menjadi tantangan dalam melaksanakan penerapan nilai-nilai islam secara kaffah di Kabupaten Nagan Raya. Diantara permasalahan sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka pelanggaran terhadap Syariat Islam.
2. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga pendidikan (MUQ, TPA, Majelis Taklim) yang mampu membentuk karakter dan berkepribadian islam

3. Masih rendahnya mutu pendidikan dayah
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah
5. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) ke Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya.
6. Masih kurangnya masyarakat yang memahami tata cara Tajhiz Mayat (Pemandian Mayat)

IV.1.1.2 Reformasi Birokrasi, Pemerintahan, Partisipasi Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan dan kinerja aparatur yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Permasalahan dalam pembangunan sistem pemerintahan yang masih terjadi di Nagan Raya adalah sebagai berikut;

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bebas KKN, pemerintahan yang bersih (clean government) dan berwibawa
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur yang mendukung Sistem manajemen pemerintahan dan belum optimalkan kinerja birokrasi
3. Belum tersedianya sistem *data base* yang terpadu dan terintegrasi
4. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dan penerapan PPRG dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

IV.1.1.3 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal, Industri dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Permasalahan dalam perberdayaan ekonomi masyarakat sebagai berikut;

1. Masih tingginya angka kemiskinan
2. Masih rendahnya kemampuan/ keterampilan masyarakat dalam mata pencaharian.

3. Kurangnya dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis kearifan lokal.
4. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan potensi pendapatan asli daerah.
5. Belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah
6. Terbatasnya akses lapangan kerja
7. Masih rendahnya investasi sektor swasta.

IV.1.1.4 Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Nagan Raya dibidang pendidikan, budaya, pemuda sebagai berikut;

1. Masih kurangnya aksesibilitas Pendidikan.
2. Masih rendahnya mutu pendidikan.
3. Belum terwujudnya lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing
4. Rendahnya tingkat literasi masyarakat
5. Masih rendahnya peran dan fungsi lembaga adat
6. Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan
7. Masih rendahnya prestasi olah raga
8. Masih kurangnya sarana dan prasarana olah raga

IV.1.1.5 Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Tenaga Kerja, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Permasalahan di bidang sosial masyarakat dan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut;

1. Penerima subsidi listrik dan subsidi beras belum tepat sasaran
2. Belum adanya program asuransi kematian bagi masyarakat

3. Rendahnya ketrampilan dan terbatasnya modal usaha masyarakat miskin
4. Belum optimalnya penanggulangan masyarakat miskin dan rentan miskin
5. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan dan diversifikasi pangan
6. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok perempuan
7. Belum optimalnya pemberdayaan kombatan dan korban konflik
8. Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
9. Belum tersedianya Grand Desain Pembangunan Kependudukan;
10. Masih tingginya angka pengangguran;
11. Belum berfungsinya Balai Latihan Kerja (BLK)

IV.1.1.5 Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif. Tanpa kondisi kesehatan prima, masyarakat Kabupaten Nagan Raya tidak akan produktif dan tidak akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.

Saat ini angka kesakitan masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih berkisar 1-10 hari dalam sebulan. Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Nagan Raya menghadapi berbagai permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut;

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
2. Masih rendahnya kualitas SDM tenaga kesehatan dan para medis;
3. Masih minimnya tenaga kesehatan (dokter spesialis);
4. Masih terdapat kasus gangguan gizi (mal nutrisi);
5. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak;
6. Belum optimalnya pelayanan di RSUD Sultan Iskandar Muda;
7. Belum terakreditasinya Puskesmas dan RSUD Sultan Iskandar Muda;

IV.1.1.6 Pembangunan Infrastruktur, Pemukiman, Tata Ruang, Komunikasi dan Informasi, Perhubungan, Lingkungan Hidup dan Transmigrasi

Ketersediaan dan kemapaman infrastruktur wilayah menjadi potret kemajuan daerah. Infrastruktur wilayah mendukung distribusi barang, jasa dan manusia. Namun demikian, kondisi pembangunan infrastruktur wilayah menghadapi beberapa kendala, sebagai berikut;

1. Belum meratanya infrastruktur, sarana dan prasarana antar wilayah.
2. Belum maksimalnya pengembangan kawasan strategis
3. Belum mememadainya sarana dan prasarana irigasi
4. Masih minimnya penanganan infrastruktur kebencanaan
5. Masih rendahnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat
6. Masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni
7. Belum optimalnya pengelolaan Ruang terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik
8. Masih banyak rumah yang tidak layak huni
9. Akses jalan usahatani belum memadai
10. Saluran irigasi tersier belum memadai
11. Pembangunan destinasi wisata tidak merata
12. Belum berfungsi laboratorium daerah untuk analisis limbah industri dan limbah rumah tangga
13. Pencemaran lingkungan kawasan pelabuhan khusus batubara, juga mengganggu kesehatan masyarakat sekitar
14. Pencemaran Air dari kegiatan rumah tangga dan home industri
15. Limbah padat dan cair mengganggu lingkungan pasar
16. Pencemaran dan Polusi udara oleh kegiatan industri (PLTU) dan tambang
17. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran
18. Tingginya penggunaan pestisida
19. Pembuangan sampah tidak selektif menurut sifat sampah
20. Pengelolaan sampah belum optimal
21. Sumber makanan tercemar

22. Pencemaran lingkungan dan air oleh PKS
23. Antisipasi ancaman bahaya keberadaan PLTA
24. Pembinaan kelompok masyarakat perkebunan sedikit
25. Peningkatan suhu udara akibat pengelolaan rawa gambut
26. Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi penggunaan lahan lainnya terutama perkebunan kelapa sawit
27. Pemanfaatan area sempadan sungai untuk permukiman dan perkebunan
28. Kerusakan lahan akibat kegiatan Pertambangan dan Perkebunan
29. Perambahan kawasan lindung (kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut)
30. Konservasi lahan gambut (Rawa Tripa) yang terintegrasi.
31. Kebakaran hutan dan lahan

IV.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan permasalahan pembangunan secara internal sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta kondisi eksternal yang terjadi, maka beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Nagan Raya selama 5 tahun mendatang, yaitu:

Isu Strategis Nasional meliputi:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis Provinsi Aceh meliputi:

1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik.
2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan.
3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan.
5. Pengembangan pertanian dan perikanan.
6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM.
7. Pengembangan pariwisata.
8. Ketenagakerjaan.
9. Ketersediaan dan ketahanan energi.
10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi.
11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah.
12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni.
13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan.
14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga.
15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan.
16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup.

Isu – isu Strategis Kabupaten Nagan Raya

- 1) Penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam
Isu strategis penguatan dan implementasi nilai-nilai syariat Islam difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat Islam, meningkatkan kemakmuran mesjid, meningkatkan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam seperti; MUQ, TPA, Majelis Taklim yang mampu membentuk karakter dan kepribadian yang islami. Selanjutnya peningkatan mutu pendidikan dayah juga menjadi skala prioritas disamping peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariat Islam dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan.

- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur
Isu strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dan sumberdaya aparatur difokuskan untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang sederhana, berkualitas dan transparan. Disamping itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dibutuhkan sumberdaya aparatur yang handal, cerdas, tangkas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, oleh karenanya kemampuan sumber daya aparatur perlu terus ditingkatkan sesuai tupoksi serta mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 3) Pengembangan sistem data base terintegrasi
Isu strategis pengembangan sistem data base terintegrasi diharapkan dapat menyediakan data dan informasi satu pintu yang mudah di akses sesuai kebutuhan, hal ini menjadi penting karena data dan informasi yang terpusat pada satu sumber dapat dijadikan sebagai instrumen dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta untuk kebutuhan penelitian dan pengembangan.

- 4) **Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**
Isu strategis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ditujukan kepada upaya peningkatan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang berbasis gender, karena disadari bahwa saat ini masih terdapat ketimpangan penerima manfaat pembangunan dalam berbagai hal antara laki-laki dengan perempuan termasuk dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan akses pekerjaan dengan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 5) **Pemberdayaan Ekonomi, Pengembangan Industri dan UMKM**
Isu strategis pemberdayaan ekonomi Pengembangan Industri dan UMKM dititikberatkan pada upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri, penguatan UKM, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, kerjasama dunia usaha, perluasan lapangan kerja, dan pengembangan potensi pariwisata seperti wisata pantai, danau, sungai, juga pengembangan wisata edukasi dan religi serta wisata kuliner. Di sisi lain peningkatan PAD dan investasi juga perlu terus didorong kearah pengalihan dan optimalisasi sumber-sumber PAD yang potensial, selanjutnya menciptakan iklim investasi kondusif, kemudahan berbisnis dan promosi daerah juga menjadi langkah penting dalam mendokrak perekonomian daerah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- 6) **Penanggulangan Kemiskinan**
Isu strategis penanggulangan kemiskinan di fokuskan pada upaya menurunkan angka kemiskinan secara terukur. Selanjutnya upaya penanggulangan kemiskinan di arahkan kepada peningkatan keahlian dan pengembangan sarana pendukung usaha serta akses permodalan untuk mendukung mata pencaharian bagi masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga hal ini dapat mendorong masyarakat miskin keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang

dimilikinya dengan mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

7) Pelayanan pendidikan yang berkualitas

Isu pelayanan pendidikan yang berkualitas di tujukan untuk meningkatkan aksesibilitas sektor pendidikan dasar dan menengah keseluruhan lapisan masyarakat. Dengan meningkatnya aksesibilitas sektor pendidikan diharapkan dapat menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni, dan angka melek huruf. Disamping itu dalam rangka mencapai pelayanan pendidikan yang berkualitas juga dapat dilakukan dengan pemerataan guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan kualifikasi tenaga pendidikan. Isu ini juga diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasional yang unggul dan berdaya saing.

Berkaitan dengan upaya peningkatan literasi masyarakat, dapat dilakukan dengan optimalisasi fasilitas dan pelayanan pustaka daerah maupun gampong. Selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan minat baca masyarakat.

8) Pelestarian kebudayaan

Isu pelestarian kebudayaan merupakan bagian penting dari pengejawantahan dari slogan "*Agama Ta Peukoeng Budaya Ta Jaga*" di fokuskan pada upaya untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal yang mengakar dan tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat. Pelestarian kebudayaan juga diarahkan kepada penggalian situs-situs sejarah yang ada di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya peran dan fungsi lembaga adat perlu di perkuat untuk menjaga eksistensi budaya lokal dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan.

- 9) **Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga**
Isu peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga difokuskan pada upaya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan pemuda dalam berbagai kegiatan pembangunan yang kreatif, inovatif dan positif. Disamping itu juga perlu dilakukan pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga yang memadai sehingga dapat meningkatkan prestasi olah raga pada even-even daerah dan nasional serta mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 10) **Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat**
Isu Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial Masyarakat dititikberatkan pada pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan pelaksanaan penyaluran berbagai bantuan sosial yang lebih tepat sasaran seperti subsidi listrik dan subsidi beras. Selanjutnya mengenai prioritas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan jaminan sosial kematian bagi masyarakat, dapat dilaksanakan dengan adanya pemberian santunan kematian bagi masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah dan ketentuan yang berlaku serta tetap mendukung pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- 11) **Optimalisasi Potensi Lahan**
Isu Optimalisasi Potensi Lahan difokuskan untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan lahan yang ada termasuk lahan pekarangan. Hal ini bertujuan untuk mendukung diversifikasi pangan di Kabupaten Nagan Raya dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mempertahankan aspek kelestarian lingkungan.

- 12) Pemberdayaan Perempuan, Korban dan Korban Konflik serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Isu Pemberdayaan Perempuan, Korban dan Korban Konflik serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) difokuskan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembangunan, penanganan Korban dan Korban Konflik serta mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 13) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan upaya peningkatan fasilitas kesehatan, kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

- 14) Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas
Isu Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Konektivitas difokuskan pada Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan dan jembatan hingga ke wilayah terisolir sekaligus menghubungkan antar pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan transmigrasi. Selain itu, perlu ditingkatkan pembangunan infrastruktur dasar (Irigasi, Air Baku dan Infrastruktur Permukiman) dalam rangka peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan.

- 15) Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
Isu Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan difokuskan pada perwujudan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Selain itu, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan yang

ditimbulkan oleh berbagai aktivitas terutama industri perkebunan dan pertambangan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

16) Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Tingginya kasus *stunting* memberikan implikasi buruk terhadap pembangunan dan kemajuan di Kabupaten Nagan Raya. *Stunting* mengancam produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena rentan diserang oleh berbagai penyakit sehingga pada akhirnya dapat menurunkan perkembangan daya saing SDM. Isu Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi difokuskan pada upaya percepatan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi *Stunting* Terintegrasi dengan melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan dalam rangka percepatan pencapaian penurunan dan pencegahan *stunting* di Kabupaten Nagan Raya. Isu Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Kabupaten Nagan Raya juga merupakan bagian dari isu strategis nasional untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, kreatif dan produktif dalam rangka mewujudkan cita pembangunan mencapai kesejahteraan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

17) Kabupaten Layak Anak (KLA)

Isu Kabupaten Layak Anak difokuskan pada upaya untuk mewujudkan suatu kondisi pembangunan daerah pada terpenuhinya hak-hak anak yang diukur dengan indikator Kabupaten layak Anak (KLA). Isu ini mendorong Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mempunyai suatu sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan

perlindungan anak serta mempertimbangkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022, maka isu-isu strategis yang terkait dengan KLHS RPJMK adalah sebagai berikut :

1. Kesenjangan Sosial;
2. Belum meratanya Pelayanan Kesehatan;
3. Belum meratanya infrastruktur daerah;
4. Rendahnya Daya Saing Daerah;
5. Pencemaran Lingkungan;
6. Alih Fungsi Lahan;
7. Belum tertatanya sistem pengelolaan lingkungan hidup;
8. Degradasi lahan; dan
9. Bencana Alam

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

V.1 VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan suatu konsep perencanaan yang disertai tindakan sesuai dengan yang direncanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menguraikan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

V.1.1. VISI

Secara harfiah, visi merupakan pengkondisian masa depan daerah yang ingin di capai berdasarkan batasan tempat dan waktu. Visi harus dapat menjabarkan pokok-pokok permasalahan yang diselesaikan atas kondisi aktual dan sejalan dengan kebijakan yang ada.

Oleh karena itu, berdasarkan arah pembangunan tahun ketiga jangka panjang daerah, kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis daerah di tetapkan visi Kabupaten Nagan Raya selama 5 (lima) tahun ke depan (2017-2022) sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM"

Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagan Raya untuk Tahapan Pembangunan ke-3 tahun 2017-2022 yakni ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta pemanfaatan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Dalam visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 terdapat 4 (empat) kata kunci yakni **Sejahtera, Mandiri, Maju, dan Berlandaskan Syariat Islam**, dan serta 3 (tiga) kata pendukung yaitu **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Berdaya Saing**”

Setidaknya ada 4 (empat) kata yang patut digaris bawahi dan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multi tafsir terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud.

**Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM”	Berlandaskan Syariat Islam	Menjadikan Masyarakat bersama pemerintah daerah dapat mewujudkan masyarakat yang religius. Menerapkan nilai-nilai islam dalam setiap kegiatan dan tatanan kehidupan bermasyarakat, social dan budaya. Dan Agama harus menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan bersama
	Berdaya Saing	Menciptakan Masyarakat dan Pemerintah Daerah yang memiliki daya saing melalui peningkatan sumber daya manusia, mengingat tantangan global yang semakin tinggi dan cepat yang mengharuskan setiap generasi mampu berkompetisi dalam setiap bidang dengan segala tantangannya
	Sejahtera	Pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan secara periodik. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah. Memberi stimulus dan pemberdayaan untuk meningkatkan

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		produktifitas masyarakat yang memberi dampak positif bagi perkembangan etos kerja dan ekonomi masyarakat
	Mandiri	Kabupaten Nagan Raya dan Masyarakatnya harus lebih mandiri, mampu menciptakan PAD dalam kapasitas besar, sehingga mampu melakukan pembiayaan belanja daerah dengan jangkauan pembangunan yang luas. Selain itu, masyarakat diharapkan harus mampu menjadi lebih mandiri, meningkatkan produktifitas tanpa harus terus menerus diberikan stimulus oleh pemerintah, sehingga pemerataan pemberdayaan akan tercapai dengan jangka waktu yang relative lebih cepat

V.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 7 (tujuh) misi, yaitu :

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah

Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai Dinul dan Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan pemerintahan dan bermasyarakat dengan gerakan 'meramaikan mesjid'. Sehingga dapat berkurangnya kasus pelanggaran syariat islam, melalui Majelis Taklim yang aktif, serta meningkatkan dan mengembangkan peran dan fungsi Lembaga Pendidikan Dayah melalui standarisasi Pendidikan Dayah, dan mendukung fungsi-fungsi Lembaga Bazis dan sejenisnya.

2. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan

Hal ini dimaksudkan dalam rangka menciptakan Tata Kelola dan Tata Laksana pemerintahan daerah yang terbuka dan bersih (*open and clean governance*) dengan meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, APBK yang tepat waktu, Opini BPK yang baik dan meningkat setiap tahunnya, tingkat akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas dalam kinerja Pemerintah Daerah yang tinggi dengan didasari pada basis data yang terpadu dengan melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan di Nagran Raya.

3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah

Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sektor pertanian, perkebunan dan kelautan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada perdagangan dan industri, membangun pasar sentra di kecamatan agar hasil pertanian dan perkebunan dapat dipusatkan pada pasar kecamatan hingga membentuk harga pasar lokal. Selain itu bidang mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang Mitigasi Bencana di salah satu Organisasi Perangkat Daerah seperti BPBD atau Dinsos melalui kerja sama dengan kampus-kampus khususnya dengan Pusat Kajian Kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah, membangun kerja sama dengan Akademisi khususnya dengan Pusat Kajian Kebencanaan, membangun sistem koordinasi mengenai kebencanaan yang terintegrasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah.

Disamping itu, upaya mengentaskan kemiskinan masyarakat melalui pemberian ketrampilan dan permodalan masyarakat melalui perkreditan gampong dengan sistem simpan pinjam melalui BKG (Bank Kredit Gampong).

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Umum, Agama dengan memerankan guru sebagai sentra pendidikan melalui penyusunan kurikulum muatan lokal, pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan akhlak dan normal bangsa, mamacu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan untuk lebih siap bersaing dalam hal pengembangan mutu dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, peningkatan taraf kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Selain itu, dengan penyelenggaraan festival Seni dan Budaya dalam rangka menjaga nilai-nilai dan kearifan local yang menjadi salah satu identitas masyarakat Aceh pada umumnya dan masyarakat Nagan Raya pada khususnya. Dan juga melakukan pembinaan kepada induk-induk oranisasi olahraga dan kepemudaan dalam rangka meningkatkan daya saing SDM Pemuda di Kabupaten Nagan Raya.

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan jaminan social bagi seluruh masyarakat Nagan Raya dengan fokus pada menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Nagan Raya. Secara khusus dalam rangka menanamkan pemahaman mantan kombatan mengenai kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik, berpengetahuan tentang perdamaian, ekonomi, pembangunan, lingkungan, bahaya narkoba dan terorisme melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan baik lokal maupun nasional dengan tujuan meningkatnya kesejahteraan Mantan

Kombatan dan para korban konflik dengan partisipasi aktif dan positif dalam pembangunan Nagan Raya.

6. Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan melalui pembukaan akses akses maupun pembangunan infrastruktur, pengendalian penyebaran penyakit, gizi buruk dan krisis kesehatan akibat bencana, memperbaiki kualitas pelayanan dasar institusi kesehatan (standarisasi Rumah Sakit Daerah, Puskesmas, dan Pustu) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan ceria dan Menggalakkan masyarakat untuk perilaku hidup bersih dan sehat.

7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerateristik wilayah

Hal ini dimaksudkan untuk penyediaan infrastruktur dasar dan pendukung dalam rangka mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan dengan mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan yang berpotensi terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan PAD daerah dengan membuka akses ke desa-desa terpencil. Selain itu dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan sehingga integrasi dan keterhubungan antar wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang lestari.

V.2 Tujuan Dan Sasaran

Selanjutnya, dalam dataran operasional, jabaran visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan tersebut bisa saja dicapai dalam masa 5 (lima) tahun atau kurang dan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah selama memimpin Kabupaten Nagan Raya. Sehingga dalam menetapkan tujuan dan sasaran tersebut harus realistis dan terukur (kualitatif maupun kuantitatif) untuk dilihat perkembangan pembangunannya selama Tahun 2017-2022. Lebih rinci terhadap hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan Kinerja	Kondisi Awal	Rencana					Kondisi Akhir	
				2018	2019	2020	2021	2022		
Visi	Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam									
Misi 1	Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah									
Tujuan 1.1	Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai islami									
	Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	50	60	70	80	80	80
		Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	155	160	164	200	210	220	220
	Meningkatnya mutu pendidikan dayah	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	N/A	Ada	Ada	57	85	100	100
	Meningkatnya Kemakmuran Masjid	Jumlah Masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	47	48	49	50	55	60	60
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	7,545	8,98	6,15	6,916	6,92	6,92	6,92
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat	Jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong	Orang	444	444	444	444	444	444	444
	Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	23	23	30	50	60	80	80

Misi 2	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan									
Tujuan 2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment)									
Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	3	3	3	3
	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.32	2.89	belum ada	2,82	2,89	2,94	2,94	2,94
	Nilai LAKIP	Nilai	C	C	C	C	CC	B	B	B
Tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	20	60	70	75	80	80	80	80
Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana/ Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	55	60	70	80	80	85	85	85
Terwujudnya pelaksanaan Musrena	Terlaksananya Musrena	Terlaksana/ Tidak Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Tidak Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Misi 3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah									
Tujuan 3.1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan									
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Angka kemiskinan	19,17	14,83	18,97	17,97	17,7	17,00	16,5	16,5
		Kedalaman Kemiskinan (P1)	indeks	2,53	3,7	3,01	3,33	3,33	3,33	3,33
		Keparahan Kemiskinan (P2)	indeks	0,58	1,01	0,83	0,94	0,94	0,94	0,94
	Menurunnya angka pengangguran	Angka Pengangguran	3,79	2,93	3,55	4,11	4	4,1	4,2	4,2
Tujuan 3.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)									
	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	10.06	9.89	9.89	9,35	11,22	13,46	13,46
	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Produksi TBS	Ton	316,164	117.819	529.137,25	564.730	600.325	635.919	635.919
		Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170,151	180,278	130,582	155,000	160,000	165.000	165.000
		Jumlah Produksi Ikan	Ton	3.257,29	4.498,03	4.804,27	3769,16	4031,57	4233,15	4233,15
	Meningkatnya ketahanan pangan	Kecukupan pangan utama	%	100	100	100	100	100	100	100

Misi 4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga									
Tujuan 4.1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata									
	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata	Angka Melek Huruf	%	93.41	96.25	98.00	97,50	98,00	98,50	98,50
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8.24	8.21	8.01	8,50	8,80	9,00	9,00
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.72	14.44	14.56	15,00	15,25	15,50	15,50
	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	37.51	94.33	97.74	93,5	94,5	96	96
		Persentase Distribusi Guru	%	65,15	67,5	75,5	80	85	90	90
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53.16	67.44	79.88	81,5	83,5	86,5	86,5
		Persentase Distribusi Tenaga Kependidikan	%	55,25	60,5	65,5	70,5	75,5	85,5	85,5
	Meningkatnya Ketersediaan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	%	45,25	55,5	60,5	65,5	70,5	75,5	75,5
	Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing	Persentase lulusan Vokasional yang bersertifikat	%	72,15	80,5	85	87,25	90,5	92,5	92,5
		Jumlah pendidikan yang unggul	unit	6	8	9	10	11	12	12
	Meningkatnya Minat dan Kemampuan Masyarakat dalam literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,781	1,210	925	500	900	1100	1100
	Tujuan 4.2	Melestarikan adat istiadat dan budaya								
Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat		Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang Dibina	Lembaga	N/A	N/A	N/A	15	25	30	30
		Even piasan seni dan budaya yang terselenggara	Kegiatan	2	2	1	3	4	5	5
Tujuan 4.3	Meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga									
	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	10	16	28	30	40	50	50
	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional	Medali	5	17	19	25	30	35	35

Misi 5	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat									
Tujuan 5.1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat									
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	46.56	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan	Jumlah kelompok perempuan diberdayakan	kelompok	23.74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik	Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang mendapat pemberdayaan	orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat	%	N/A	80	80	85	85	85	85
Tujuan 5.2	Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat									
	Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Misi 6	Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat								
Tujuan 6.1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat								
Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup	Angka usia harapan hidup	Tahun	68.7	68.89	69,14	69,05	70,00	70,20	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit								
	- BOR	%	70	85	95	85	80	75	
	- TOI	Hari	3	1	1	1	1	1	
	- ALOS	Hari	3	3	3	3	3	3	
	- NDR	/1000 Pasien	0.001	6	8,2	5	4	3	
	- GDR	/1000 Pasien	0.002	6	12	6	5	4	
	Angka kematian ibu	/100000 KH	99.63	28,40	331,02	153,03	150,00	140,00	
	Angka kematian neonatus	/1000 KH	14.28	10,00	12,58	12,59	11,98	11,79	
	Angka kematian bayi	/1000 KH	5.65	11,00	7,20	7,50	7,30	7,00	
Angka kematian balita	/1000 KH	37.2	12,00	8,94	36,37	36,12	35,97		
Meningkatnya status RSUD Nagan Raya	Akreditasi RSUD Nagan Raya	Akreditasi	Belum Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	Akreditasi	

Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerakteristik wilayah									
Tujuan 7.1	Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat									
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	243.54	221.932	242.56	261,56	286,56	311,56	311,56	
Terwujudnya pengembangan kawasan strategis	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	3	9	9	9	9	9	9	
Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17,597	15.239	10.626	5700	5700	5700	5700	
Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana	Panjang Jalan evakuasi	Km	2	0	0	1	1	2	2	
	Jumlah pos pemadam kebakaran	Unit	3	0	0	1	1	2	2	
	Jumlah bangunan evakuasi	Unit	2	0	0	1	1	2	2	
Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat	Persentase akses sanitasi	%	42	52	67,64	67,64	73,44	80,04	80,04	
	Persentase akses air minum Perpipaan	%	0	52.00	67.64	72,24	76,74	81,04	81,04	
	Persentase akses air minum non Perpipaan	%	58.15	0	10	10	10	10	10	
Tersedianya rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	0	709	320	320	321	321	
	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	0	127	100	200	200	200	
Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.	Persentase ruang terbuka hijau	%	7.8	10.00	11.00	11,70	19,00	27,00	27,00	
Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	0	30	50	60	70	80	80	

Ket : data tahun 2018 dan 2019 merupakan data realisasi

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Nagan raya, 2017-2022 sebagaimana telah diuraikan pada Bab V, maka selanjutnya disusun tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana disajikan pada tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2022.

Arah kebijakan pembangunan tahunan Kabupaten Nagan Raya yang memuat tema pembangunan untuk setiap tahunnya yaitu untuk tahun 2018-2022 disajikan pada tabel 6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya 2018-2022.

Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya disajikan pada tabel 6.3.

Sedangkan keterkaitan antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas dapat dilihat pada tabel 6.4. Program Prioritas Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2020 dan Tabel 6.5. Program Prioritas Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2022.

Tabel 6.1
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PERUBAHAN RPJMK NAGAN RAYA TAHUN 2017-2022

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1	Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah		
	1.1 Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman	1.1.1 Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam	1.1.1.1 Penguatan peran dan fungsi Wilayatul Hisbah 1.1.1.2 Peningkatan peran ulama dan masyarakat dalam pengawasan
		1.1.2 Meningkatnya mutu pendidikan dayah	1.1.2.1 Pembangunan Dayah Terpadu 1.1.2.2 Peningkatan kualifikasi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan biaya operasional Dayah
		1.1.3 Meningkatnya Kemakmuran Masjid	1.1.3.1 Peningkatan peran Badan Kemakmuran Masjid dalam memakmurkan Masjid
		1.1.4 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS	1.1.4.1 Penguatan fungsi dan peran Baitul Mal
		1.1.5 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat	1.1.5.1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Petugas Tajhiz Mayit
		1.1.6 Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-quran dan hadist	1.1.6.1 Peningkatan pengamalan Alquran dan hadist dalam kehidupan masyarakat

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

Misi 2	Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan				
	2.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)	2.1.1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2.1.1.1	Peningkatan profesionalisme SDM ASN, dan penempatan pejabat melalui analisis dan lelang jabatan
		2.1.2	Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas	2.1.2.1	Pelaksanaan mekanisme pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal
		2.1.3	Tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi	2.1.3.1	Peningkatan ketersediaan dan pengintegrasian data secara terpadu
		2.1.4	Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	2.1.4.1	Pengembangan Aplikasi E-Planning terintegrasi E-Budgetting
		2.1.5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	2.1.5.1	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
		2.1.6	Terwujudnya pelaksanaan Musrena	2.1.6.1	Peningkatan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan
		2.1.7	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG	2.1.7.1	Peningkatan jumlah OPD yang melaksanakan PPRG
Misi 3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah				
	3.1 Menurunkan Tingkat Kemiskinan	3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	3.1.1.1	Penyediaan akses permodalan bagi masyarakat miskin
		3.1.2	Menurunnya angka pengangguran	3.1.2.1	Penciptaan akses lapangan kerja
	3.2 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.2.1	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal	3.2.1.1	Pemberian kemudahan akses permodalan, peningkatan daya saing dan SDM
		3.2.2	Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	3.2.2.1	Optimalisasi pungutan PAD dan penggalian sumber-sumber PAD yang baru
				3.2.2.1	Peningkatan jumlah investasi dalam dan luar negeri
		3.2.3	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah	3.2.3.1	Peningkatan produksi dan produktifitas komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan
		3.2.4	Meningkatnya ketahanan pangan	3.2.4.1	Optimalisasi pemanfaatan teknologi
				3.2.4.2	Peningkatan produksi

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

Misi 4	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga			
	4.1 Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata	4.1.1 Meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata	4.1.1.1	Peningkatan akses pendidikan menengah dan vokasional
		4.1.2 Meningkatkan kualitas tenaga pendidik	4.1.2.1	Peningkatan kompetensi tenaga
			4.1.2.2	Pemerataan penempatan tenaga
			4.1.2.3	Peningkatan peran dan fungsi MPD
		4.1.3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pendidikan anak usia dini	4.1.3.1	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
			4.1.3.2	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik anak usia dini
		4.1.4 Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing	4.1.4.1	Pengembangan pendidikan inklusif dan sekolah unggul
		4.1.5 Meningkatkan minat dan kemampuan masyarakat dalam literasi	4.1.5.1	Penguatan gerakan literasi dalam masyarakat
	4.2 Melestarikan adat istiadat dan budaya	4.2.1 Meningkatkan Peran dan fungsi lembaga adat	4.2.1.1	Penguatan peran dan fungsi lembaga adat
		4.2.2 Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan	4.2.1.2	Peningkatan pergelaran piasan seni dan budaya
	4.3 Meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga	4.3.1 Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	4.3.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
		4.3.2 Meningkatkan prestasi olahraga	4.3.1.2	Peningkatan kapasitas olahragawan
			4.3.1.3	Peningkatan pelaksanaan event olahraga
Misi 5	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat			
	5.1 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	5.1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin	5.1.1.1	Menyediakan subsidi dan bantuan modal kepada masyarakat miskin
		5.1.2 Meningkatkan kesejahteraan PMKS	5.1.1.2	Peningkatan kesejahteraan PMKS
		5.1.3 Meningkatkan pemberdayaan kelompok perempuan	5.1.1.3	Peningkatan kapasitas kelompok perempuan
		5.1.4 Meningkatkan pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik	5.1.1.4	Peningkatan kapasitas kmantan kombatan dan korban konflik
		5.1.5 Meningkatkan ketahanan keluarga	5.1.1.5	Perkuatan peran keluarga dalam upaya preventif terkait penanganan persoalan sosial, kasus kekerasan, narkoba, dll
	5.2 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	5.2.1 Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat	5.1.1.2	Menyediakan santunan kematian dan melahirkan bagi masyarakat kurang sejahtera

Misi 6	Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat				
	6.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6.1.1	Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup	6.1.1.1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
		6.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	6.1.2.1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
				6.1.3.1	Peningkatan fasilitas rawat inap di puskesmas
				6.1.4.1	Pemantapan pola hidup bersih dan sehat
		6.1.3	Meningkatnya status RSUD Nagan Raya	6.1.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan RSUD Sukthan Iskandar Muda
				6.1.2.2	Pemenuhan Persyaratan akreditasi RSUD
Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerakteristik wilayah				
	7.1 Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat	7.1.1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	7.1.1.1	Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur antar wilayah
		7.1.2	Terwujudnya pengembangan kawasan strategis	7.1.2.1	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan strategis
		7.1.3	Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	7.1.3.1	Peningkatan dan pembangunan kualitas infrastruktur pertanian
		7.1.4	Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana	7.1.4.1	Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi pengurangan resiko bencana
		7.1.5	Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat	7.1.5.1	Peningkatan akses sanitasi dan air minum
		7.1.6	Tersedianya rumah layak huni	7.1.6.1	Penyediaan rumah layak huni
		7.1.7	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.	7.1.7.1	Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
		7.1.8	Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif	7.1.8.1	Penyediaan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif

Tabel. 6.2
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2022

Tahun	Arah Kebijakan (Tahun)
2018	<p>Arah kebijakan pembangunan tahun 2018 difokuskan pada peningkatan SDM dan reformasi birokrasi untuk mendukung good and clean governance. kebijakan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar meliputi rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, sanitasi dan air bersih yang memadai dan infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar wilayah. percepatan dan pemerataan ekonomi lokal dilakukan melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan untuk peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan.. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan standarisasi institusi dan lembaga pelayanan kesehatan masyarakat. Arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dicapai dengan pemerataan akses pendidikan, re-distribusi dan pemerataan guru. Pelaksanaan bidang reformasi birokrasi dicapai melalui pembenahan regulasi, pelaksanaan dan pengembangan system e-planning, e-budgetting, e-procurement serta peningkatan kapasitas SDM dan pemangku kepentingan lainnya melalui pakta integritas dan janji layanan kinerja kinerja terkait dengan prinsip good governance dan clean governance. Pengarusutamaan Syariat Islam menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan aqidah, akhlak dan syariat agar</p>

	<p>menjadi masyarakat yang berkarakter Islami. Hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan Aceh 2018-2022.</p> <p>Tema pembangunan tahun 2018 adalah: "memantapkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan, lestari, mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan peningkatan SDM serta pelayanan masyarakat" Unggulan Nagan Raya yang terkait dengan tema pembangunan tahun 2018 adalah Nagan Seumeugot, Nagan Seujahtera, Nagan Meusaneut dan Nagan Meu Agama.</p>
2019	<p>Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 difokuskan memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Pengembangan dan pemantapan beberapa kawasan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Kawasan strategis meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan strategis pariwisata (a. pariwisata religi dan budaya di Kecamatan Suka Makmue, Seunagan Timur dan Kecamatan Seunagan; b. Pariwisata alam dan ilmu di Kecamatan Suka Makmue, Tripa Makmur, Beutong dan Kecamatan Kuala Pesisir) ; 2. kawasan indusri kecil dan menengah; 3. Kawasan pertanian dan perkebunan; 4. Kawasan hasil perikanan. <p>Dengan demikian penyediaan energi dan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan perikanan Langkak, peningkatan kapasitas bandara Cut Nyak Dhien dan sarana transportasi lainnya, sebagai pendukung untuk kebutuhan beberapa kawasan strategis tersebut. Peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dilakukan dengan mencetak SDM yang handal dan berdaya saing</p>

	<p>dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan, sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan dayah/pesantren, sekolah kejuruan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, untuk mencapai kualitas SDM yang handal keterlibatan pemuda juga sangat diharapkan. Oleh karena itu, penguatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan juga sangat penting. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dicapai melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan sesuai standar. Peningkatan jumlah dan standarisasi sarana dan prasarana rumah sakit umum daerah (terakreditasi), puskesmas /pustu. Untuk tercapainya masyarakat Nagan Raya yang sehat juga dengan optimalisasi layanan kesehatan bagi ibu hamil dan anak. Kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi penting untuk mempersiapkan SDM yang handal. Syariat Islam perlu dilanjutkan sebagai fokus pembangunan masyarakat Nagan Raya yang berkarakter islami.</p> <p>Tema pembangunan pada tahun 2019 adalah "memacu pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, strategis, berkelanjutan, dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi lokal". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2019 adalah Nagan Carong, Nagan Seujahtera, Nagan Seumeugot, Nagan Sihat dan Nagan Meu Agama.</p>
2020	Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 difokuskan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan, menuju masyarakat yang produktif dan mandiri. Peningkatan produksi hasil pertanian

	<p>dan perikanan didukung oleh sarana dan prasarana, SDM yang handal untuk tercapainya kedaulatan pangan dan akselerasi pertumbuhan agriindustri dan ekonomi kreatif/produktif. Penurunan angka kemiskinan dapat dicapai dengan peningkatan keterampilan SDM dan lembaga. Hal ini dapat dicapai seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan. Mutu kesehatan menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Mutu kesehatan semakin meningkat dengan menurunnya angka kematian ibu, bayi dan balita dan meningkatnya angka harapan hidup. Revitalisasi lembaga adat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan kreatif. Masyarakat yang berkarakter islami dan nilai-nilai budaya keacehan terus dipertahankan menjadi penting untuk keberlanjutan pembangunan.</p> <p>Tema pembangunan pada tahun 2020 adalah "memacu peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, penurunan angka kemiskinan yang terintegrasi, berkelanjutan menuju masyarakat yang produktif dan mandiri". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2020 adalah Nagan carong, Nagan Meu Agama, Nagan Sihat dan Nagan Seujahtera dan Nagan Seumeugot.</p>
2021	<p>Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan dan memperkuat ekonomi produktif dan kreatif menuju penurunan angka pengangguran. Untuk mencapai ketahanan pangan dapat dicapai dengan peningkatan keterampilan SDM dan lembaga, pendampingan masyarakat petani dan nelayan, kemudahan dalam akses modal untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru, sehingga tercapainya penurunan</p>

	<p>angka pengangguran. Mutu kesehatan menjadi penting untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan mandiri. Akses dan kualitas pelayanan kesehatan semakin meningkat dengan meningkatnya akreditasi rumah. Dengan angka harapan hidup semakin meningkat dan angka kematian ibu, bayi dan balita sudah mencapai target <i>SDG's</i>. Masyarakat yang berkarakter islami dan nilai-nilai budaya keacehan terus dipertahankan menjadi penting untuk keberlanjutan pembangunan.</p> <p>Tema pembangunan pada tahun 2021 adalah "memacu ketahanan pangan yang berkelanjutan, dan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan dengan memperkuat ekonomi produktif dan kreatif menuju penurunan angka pengangguran". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2020 adalah Nagan Carong, Nagan Meu Agama, Nagan Sihat, Nagan Seujahtera dan Nagan Seumeugot.</p>
2022	<p>Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya, arah kebijakan pembangunan pada tahun ini difokuskan pada membangun SDM dan kemandirian ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan menjadi prioritas utama. Peningkatan daya saing pendidikan dengan indikator APM, APK dan Angka Harapan Lama Sekolah sudah memenuhi target <i>SDG's</i>. Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda dan puskesmas untuk mengantisipasi berobat ke luar daerah sebagai rujukan. Kemandirian ekonomi yang produktif, kreatif dan strategis dapat diwujudkan sejalan dengan berkembangnya kawasan-kawasan strategis.</p>

	<p>Berkembangnya industri kecil dan menengah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan menurunnya angka kemiskinan. Masyarakat yang berkualitas dan bermatabat yang memiliki karakter budaya dan agama semakin kuat.</p> <p>Tema pembangunan pada tahun 2022 adalah "membangun SDM dan kemandirian ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat". Unggulan Nagan Raya yang sesuai dengan tema pembangunan Tahun 2022 adalah Nagan Carong, Nagan Sihat, Nagan Beu Jroh dan Nagan Seujahtera.</p>
--	---

Tabel 6.3
Prioritas Pembangunan Perubahan RPJM Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2017-2022

No	Prioritas Pembangunan
1	Budaya Keislaman dan Kualitas Sumber Daya Manusia
2	Pelayanan Dasar bidang pendidikan dan kesehatan
3	Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi
4	Pengembangan Infrastruktur sesuai karakteristik wilayah
5	Pemanfaatan peluang investasi dan potensi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah
6	pelestarian lingkungan dan kebencanaan
7	Reformasi birokrasi dan pelayanan sosial

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

Tabel 6.4
Program Prioritas Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2020
Nomenklatur Program Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 13 Tahun 2006

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Capaian Kinerja dan Keuangan Program						SKPD Penanggung Jawab			
				2018		2019		2020					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	19	20	21	22	23	24	31			
	Misi 1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah				12,917,806,150		13,843,899,393		4,380,565,000				
	Tujuan : Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman				12,917,806,150		13,843,899,393		4,380,565,000				
	Sasaran 1.1 Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	2,706,131,900	60	4,167,412,454	70	2,943,565,000				
1	20	14	Program Pelayanan Keagamaan		2,040,923,400		3,905,986,794		2,201,220,000	Satpol PP dan WH, Syariat Islam, MPU, Baitul Mal, Kecamatan dan Setdakab			
				Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	31		32	35				
				Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	48		49	50				
1	20	15	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariat Islam	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	%	100	319,208,500	100	186,807,200	70	356,055,000	Dinas Syariat Islam	
1	20	24	Program Pengembangan Penguatan Syariat Islam	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	%	100	346,000,000	100	74,618,460	70	386,290,000	Kecamatan	
				Sasaran 1.2 Berkembangnya lembaga pendidikan islami	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	160	232,340,000	164	221,734,500	200	84,900,000	
1	20	17	Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan Yang di Bina	Kelompok	222	78,160,000	222	117,049,500	222	84,900,000	Dinas Syariat Islam	
1	20	20	Program Peningkatan Pengkaderan Ulama	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	160	154,180,000	164	104,685,000	200	-	MPU/Baitul Mall	
1	20	21	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan									MPU/DSI	
				Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%	83		85		100			
				Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%	80		82		100			
				Pembinaan Dinul Islam	Orang	271		270		280			
1	20	22	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	Meningkatnya kualitas tenaga tajhid mayat dan kader islam lainnya	Orang	23	-	30		50	-	Kecamatan	

				Sasaran 1.3 Meningkatnya mutu pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	Ada	-	Ada	-	57	-		
1	20	26		Program Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Ada	-	Ada		Ada	-	Dinas Syariat Islam, MPU dan MPD	
1	20	27		Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santri-Dayah Terpadu)	Persentase dayah yang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	10	-	11		57	-	Dinas Syariat Islam	
				Sasaran 1.4 Meningkatnya Kemakmuran Masjid	Jumlah Masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	48	-	49		-	50	-	
1	04	4		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan				-			-		Perkim	
					Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	454	-	454		-	454	-	
					Jumlah Masjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	48	-	49		-	50	-	
				Sasaran 1.5 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran ZIS	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	8,980	8,980,000,000	6,150	6,150,000,000	6,916	-		
1	20	4		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				8,980,000,000		6,150,000,000		-	Baitul Mall	
					Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	8,980		6,150		6,916			
					Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	8,980		6,150		6,916			
				Sasaran 1.6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas Petugas Tajhiz Mayat	Jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong	Orang	444	-	444		-	444	-	
1	20	22		Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	Meningkatnya kualitas tenaga tajhid mayat dan kader islam lainnya	Orang	444	-	444		-	444	-	Kecamatan
				Sasaran 1.7 Meningkatkan kualitas masyarakat berbasis Al-Quran dan Hadist	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	23	999,334,250	30	3,304,752,439	50	1,352,100,000		
1	20	16		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Mutu sumber Daya manusia dan Peningkat Kualitas pelayanan Dalam Kehidupan Beragama	Orang	23	999,334,250	30	3,304,752,439	70	1,352,100,000	Dinas Syariat Islam	

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

				Misi 2. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan				181,264,528,658		196,860,912,546		201,579,867,267	
				Tujuan 2.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government)				181,264,528,658		196,860,912,546		201,579,867,267	
				Sasaran 2.1.1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	13,758,457,677	WTP	12,270,552,098	WTP	11,984,212,314	
1	01	3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran pegawai	%	91	723,358,000	91	999,158,700	0,65	680,018,600	Seluruh SKPK	
1	01	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				2,489,917,150		3,143,636,949		2,702,733,955	Seluruh SKPK	
				Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan	18		33		40			
				Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan	421		433		195			
				Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan	2,091		2,081	g	2,037			
1	01	5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	515,167,500	WTP	951,644,000	WTP	457,339,000	Seluruh SKPK	
1	21	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				1,843,575,500		0		2,700,848,000	BKPSDM & Setdakab	
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0.00		0.004		0.01			
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.040		0.038		0.05			
				Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120 jam		120 jam		120 jam			
1	20	5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	%	WTP	1,351,376,122	WTP	902,430,528	WTP	628,805,000	BPKD	
1	20	6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kab. NaganRaya	Level	2	2,233,040,000	2	1,913,525,000	2	-	Inspektorat	
1	20	7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur	Level	2	980,879,140	2	788,425,591	2	453,820,000	Inspektorat	
1	20	8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan prosedur pengawasan	Level	2	21,690,000	2	-	2	160,438,059	Inspektorat	
1	20	9	Program Pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	60	-	80		60	-	Setdakab	

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

1	20	11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		%		465,989,500		761,801,000		665,050,000	Setdakab/Bappeda
				Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	tidak		Ada		ada		Bappeda
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada		tidak		ada		Bappeda
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada		Ada		ada		Bappeda
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada		Ada		ada		Bappeda
1	20	13	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	%	WTP	669,338,000	WTP	777,687,330	WTP	547,250,000	BPKD
1	22	3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	47,840,000	100	44,800,000	100	227,274,000	MAA
1	25	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	85	564,825,000	85	316,341,000	85	1,001,099,700	Diskominfo & Setdakab
1	25	2	Program Layanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	85	741,138,000	85	510,833,000	85	-	Diskominfo
1	25	3	Program Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	60	50,300,000	80	0	60	-	Setdakab
1	25	4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	50	1,018,098,765	50	1,160,269,000	50	1,759,536,000	Setdakab/DPMTSP
1	25	5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	60	41,925,000	80	0	60	-	Arsip dan Pustaka
			Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kinerja birokrasi yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	139,787,208,148	2	160,247,213,680	2	175,502,255,793	
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Scor	2,89	belum ada		2,82				
		Nilai LAKIP		Nilai	C	C		C				
1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				79,376,088,115		69,661,904,008		78,278,409,875	Seluruh SKPK
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,891		belum ada		2,82		
				Nilai LAKIP	Nilai	C		C		C		
1	01	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				59,938,784,033		89,513,117,872		96,030,223,418	Seluruh SKPK
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,891		belum ada		2,82		
				Nilai LAKIP	Nilai	C		C		C		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

1	19	5	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	ada	-	tidak ada	427,289,000	ada	12,000,000	Satpol PP dan WH
1	20	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah				379,486,000		637,857,000		991,912,500	Setdakab
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,891		belum ada		2,82		
				Nilai LAKIP	Nilai	C		C		C		
1	20	3	Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,891	79,350,000	belum ada		2,82	176,810,000	Setdakab
1	20	10	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah				13,500,000		7,045,800		12,900,000	Setdakab
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,891		belum ada		2,82		
				Nilai LAKIP	Nilai	C		C		C		
1	20	19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				-					SEKWAN
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		
				Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		
			Sasaran 2.1.3 Tersedianya sistem data base yang terpadu dan terintegrasi	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	60	2,232,896,001	70	2,700,946,165	75	2,944,108,360	
1	23	1	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektoral	Persentase tersedianya data yang akurat	%	60	27,750,000	80	56,425,800	60	155,870,000	Diskominfo
1	06	1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	%	60	1,259,243,150	80	1,376,663,800	60	1,114,874,000	Bappeda & Satpol PP dan WH
1	10	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	89.31	578,926,380	89.91	770,698,583	90.67	1,347,211,860	Disdukcapil/Kec.
1	10	2	Program Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan				366,976,471		464,157,982		259,932,500	Discapil
				Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	89.31		89.91		90.67		
				Rasio bayi berakte kelahiran	%	81.13		81.13		91.95		
				Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah		Sudah		Sudah		
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	89.31		89.91		90.95		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

2	05	6	Program pengembangan data statistik perikanan	Tersedianya data/informasi statistik perikanan daerah (dokumen)	Ada/tidak	Ada	-	Ada	33,000,000	Ada	16,220,000	Kelautan dan Perikanan
1	03	8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi dan data base untuk mendukung perencanaan yang baik	%	60	Program Pengembangan Data/Informasi	80		60	50,000,000	PUPR
1	04	11	Program Pengembangan Pusat Komando Penanggulangan Bencana,	Tersedianya sistem informasi dalam penanggulangan bencana	%	60	-	80		60		BPBD
			Sasaran 2.1.4 Terwujudnya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana/ Belum Terlaksana	Terlaksana	19,550,227,014	Terlaksana	14,431,261,886	Terlaksana	5,358,537,300	
1	05	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	Ada/tidak	Ada	2,128,551,000	Ada	607,550,800	Ada		Forkim, PUPR, Bappeda
1	06	2	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah Kawasan Strategis	%	9	-	9		9		Bappeda
1	06	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kawasan Strategis	%	9	2,553,142,166	9	2,214,544,000	9		Bappeda/ Setdakab & Kecamatan
2	08	3	Program Pengembangan Transmigrasi dan perencanaan RTSP				-					Disnakertrans
				Jumlah transmigran lokal	UPT	5		5		4		
				Jumlah transmigrasi	KK	208		226		235		
1	16	3	Program Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA									DPMPSTP
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	4		2		6		
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	215		207		218		
				Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	-52.08		-14.16		141646922100		
1	20	4	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				14,603,994,598		11,176,310,586		4,915,245,000	Setdakab/BPKD/Baitul Mall dan Sekwan
				Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP		WTP		WTP		
				Persentase SILPA	%	0.702		0.472		0.55		
				Persentase SILPA terhadap APBD	%	0.698		0.471		0.50		
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	14.99		9.84		7.00		
				Persentase belanja pendidikan (20%)	%	22,05		21,34		21.69		
				Persentase belanja kesehatan (10%)	%	15,69		15,69		19.08		
				Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	0.79		1,00		0.87		
				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,04		0,12		15.00		
				Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		
1	20	12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah kawasan Strategis	%	9	264,539,250	9	432,856,500	9	443,292,300	Setdakab/Kecamatan

				Sasaran 2.1.5 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	60	2,613,826,261	70	3,569,081,700	80	3,276,708,500	
1	06	5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	60	131,925,000	70	453,024,000	80	925,658,000	Bappeda	
1	06	6	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	60	1,415,291,261	70	1,995,588,700	80	1,270,523,500	Bappeda	
1	06	7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam				241,000,000		173,050,000			Bappeda/PUPR	
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada		Ada		Ada			
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/ tidak	Ada		Ada		Ada			
				Panjang Jalan evakuasi	Km	0		0		1			
				Jumlah bangunan evakuasi	Unit	0		0		1			
1	06	8	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana				825,610,000		947,419,000		1,042,627,000	Bappeda	
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada		Ada		Ada			
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/ tidak	Ada		Ada		Ada			
1	20	23	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat				-				-	Kecamatan	
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222		222		222			
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100		100		100			
				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100		100		100			
1	20	25	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Gampong	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	-	WTP		WTP	37,900,000	Kecamatan	
				Sasaran 2.1.6 Terwujudnya pelaksanaan Musrena	Terlaksananya Musrena	Terlaksana/ Tidak Terlaksana	Terlak sana	91,423,800	Terlaks ana	422,445,313	Tidak Terlak sana	205,510,000	
1	11	1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				91,423,800		422,445,313		205,510,000	DPMGP4	
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52.30		52.35		52.00			
				Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16.00		16.50		16.00			

				Sasaran 2.1.7 Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang melaksanakan PPRG				3,230,489,757		3,219,411,704		2,308,535,000	
1	06	3		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				475,149,993		484,230,000		234,005,000	Bappeda
					Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	tidak		Ada		ada		
					Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada		tidak		ada		
					Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada		Ada		ada		
					Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada		Ada		ada		
					Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKK	%	Ada		Ada		ada		
					Penjabaran Konsistensi Program RPKK kedalam APBK	%	Ada		Ada		ada		
					Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	Ada		Ada		ada		
					Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	25		25		25		
					Penerapan SIDA:	Sudah/Belum	Belum		Belum		Sudah		
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A		N/A		N/A		
					Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	30		30		30		
1	20	1		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah				2,755,339,764		2,735,181,704		2,074,530,000	Sekwan
					Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		
					Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		
					Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Misi 3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yg berbasis kearifan lokal menuju masyarakat yang produktif sebagai upaya pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah;				11,942,151,388		27,927,402,529		23,574,790,832	
			Tujuan 3.1 Menurunkan Tingkat Kemiskinan				6,668,099,742		8,031,533,403		9,188,844,265	
			Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Angka kemiskinan	19,17	18,97	6,571,699,742	17,97	7,925,098,403	17,7	7,975,824,265	
1	12	1	Program Keluarga Berencana				19,260,000		135,545,000		68,123,000	DPMGP4
				Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.15			2.17		2.15	
				Total Fertility Rate (TFR)	%	2			2.5		2.5	
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3			2		2	
				Rasio Akseptor KB	%	86			83		83	
				Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	86.0			83.0		83.0	
				Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	/1.000 perempuan	0.87			0.8		0.83	
1	12	2	Program Keluarga Sejahtera				2,715,611,254		4046032871		5,278,316,000	DPMGP4/DINAS SOSIAL
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3			2		2	
				Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	36.48			24.46		24.46	
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	0	1,760,779,000	127	1,370,581,500	231	873,689,500	DINAS SOSIAL & SETDAKAB
1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				828,500,000		903,953,000		344,678,000	DPMGP4
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222			222		222	
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100			100		100	
				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100			100		100	
1	22	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa				1,247,549,488		1,468,986,032		1,411,017,765	DPMGP4 & Kec.
				Persentase LSM aktif	%	100			100		100	
				Persentase LPM Berprestasi	%	N/A			N/A		100	
				Persentase PKK aktif	%	100.00			100.00		100	
				Persentase Posyandu aktif	%	100			100		100	
				Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	N/A			N/A		100	
				Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	N/A			N/A		100	

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Sasaran 3.1.2 Menurunnya angka pengangguran	Angka Pengangguran	3,79	3,55	96,400,000	4,11	106,435,000	4	1,213,020,000	
1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Pengangguran	%	3,55	41,800,000	4,11	39695000	4	1,110,050,000	Disnakertrans
1	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	20.18	-	17.24		19.19		Disnakertrans
1	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan				41,600,000		44,500,000		102,970,000	Disnakertrans
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	10.00		13.00		4.00		
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	7,674		7,876		3818		
1	14	4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Angka Pengangguran	%	3,55	13,000,000	4,11		4		Disnakertrans
1	18	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapan Hidup Pemuda	Angka Pengangguran	%	3,55	-	4,11	22,240,000	4		Disbudparpora
			Tujuan 3.2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)				5,274,051,646		19,895,869,126		14,385,946,567	
			b	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	####	1,685,475,500	####	4,338,074,440	####	4,039,709,256	
1	17	1	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Terjalinnnya Kerja Sama pengelolaan kekayaan Budaya	%	3	-	4	96,350,000	0	122,990,000	Disbudparpora
2	01	8	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				23,394,500		400,721,200		328,129,000	Distanak
				Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	21,210		19,198		22,489		
				Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	13,646		13,635		13,609		
2	01	9	Program peningkatan produksi hasil peternakan				276,390,000		236,836,000		1,727,833,400	Distanak
				Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	21,210		19,198		22,489		
				Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	13,646		13,635		13,609		
2	07	1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Persentase koperasi aktif	%	50.30	586,440,200	73.88	731,970,200	75.00	383,030,696	Disperindagkop dan UKM
2	07	2	Pogram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	-	75.35	1,496,573,500	82		Disperindagkop dan UKM
2	07	3	Pogram Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	262,050,000	75.35	758,745,300	82	228,680,000	Disperindagkop dan UKM

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

1	16	2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat					-	71,130,000		27,550,000	DPMPSTP
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	4		2	6			
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	215		207	218			
				Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	-52.08		-14.16		1416462023.00		
2	05	1	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100,00		- 100,00	96.00			Kelautan dan Perikanan
2	05	4	Program pengembangan Penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	%	100,00		- 100,00	96.00			Kelautan dan Perikanan
2	03	2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan				537,200,800		545,748,240		1,221,496,160	Setdakab
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	95,78		96,99	98.57			
				Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks	98,00		98,50	100			
			Sasaran 3.2.2 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penopang kemandirian daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	9.89	1,541,971,680	9.89	2,384,056,304	9,35	2,573,236,300	
1	09	1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah				17,198,000		-		-	Setdakab/Kec. Seunagan Timur/Dinas Pertanahan
				Persentase luas lahan bersertifikat	%	N/A		N/A	N/A			
				Penyelesaian kasus tanah negara	%	N/A		N/A	N/A			
1	09	2	Program Pendataan Tanah-Tanah Asset Milik Pemerintah Daerah	Penyelesaian kasus tanah negara	%	N/A	21,774,000	N/A	868,507,000	N/A	165,806,300	Setdakab/Dinas Pertanahan
1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	215		- 207	97,621,000	218	45,744,000	DPMPSTP
2	05	5	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan				43,149,000		113,000,000		42,686,000	Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27	3,769.16			
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77	3,029.60			
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50	739.56			
2	04	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				1,405,057,000		1,296,082,504		2,292,800,000	Disbudparpora
				Kunjungan wisata	%	90,70		93,10	0.00			
				Lama kunjungan Wisata	Hari	16,06		16,21	0.00			
2	03	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	70,59	54,793,680	70,00	8,845,800	87.56	26,200,000	Setdakab

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Sasaran 3.2.3 Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Produksi TBS	Ton	117.8	1,287,408,350	529.137,25	4,843,433,066	564.7	6,638,385,511	
1	08	4	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	tidak ada	-	tidak ada		tidak ada		DLH
1	15	1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	150	-	200		152		Disperindagkop dan UKM
1	15	2	Pogram Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	304,736,000	75.35	213,385,000	82	104,425,000	Disperindagkop dan UKM
1	15	3	Pogram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi				182,450,000		363,414,000		102,100,000	Disperindagkop dan UKM
				Persentase koperasi aktif	%	50.30		73.88		75.00		
				Persentase koperasi tidak aktif	%	49.70		26.12		25.00		
2	05	2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Perikanan Budidaya	%	1245.49	504,700,350	1056.50		739.56	2,273,890,511	Kelautan dan Perikanan
2	05	3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	%	3252.5	227,122,000	3747.77	4,109,632,066	####	4,157,970,000	Kelautan dan Perikanan
2	04	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata				68,400,000		157,002,000			Disbudparpora
				Kunjungan wisata	%	90,70		93,10		0.00		
				Lama kunjungan Wisata	Hari	16,06		16,21		0.00		
2	01	3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				-					Distanak
				Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	180.278		130.582		155,000		
				Produksi sektor pertanian padi dan palawija	ton	210,000		190,300		190,000		
			Sasaran 3.2.4 Meningkatnya ketahanan pangan	Kecukupan pangan utama	%	100	759,196,116	100	8,330,305,316	100	1,134,615,500	
2	01	2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan				14,000,000		2,064,785,200		517,365,500	Distanak/ Disbun & DKP
				Ketersediaan pangan utama	%	100		100		100		
				Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	180.278		130.582		155,000		
				Produksi sektor pertanian padi dan palawija	ton	210,000		190,300		190,000		
				Produksi pertanian padi	ton	180,278		130,582		155,000		
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

2	01	5	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250	628,835,000	7,300	3,839,859,765	9,500	4.654.815.800	Distanak & Disbun
2	01	4	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250	8,500,000	7,300	1,989,695,404	9,500	120,100,000	Distanak
2	01	11	Program Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	-	94.25	66,260,000	97.00	212,300,000	Disbun/Distanak
2	01	10	Program Peningkatan Kelembagaan RDK/RDKK Pupuk Bersubsidi	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250	3,000,000	7,300	34375000	9,500	18,000,000	Distanak & Disbun
2	01	7	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	99,361,116	94.25	335329947	97.00	266,850,000	Distanak
2	01	12	Program Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	5,500,000	94.25	-	97.00	-	Distanak
2	01	15	Program Penguatan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	-	94.25	-	97.00	-	Disbun/Distanak
2	01	16	Program Rehabilitasi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250	-	7,300	-	9,500	-	Distannak/Disbun
			Misi 4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga;				30,314,701,858		15,567,580,954		18,555,681,586	
			Tujuan 4.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata				23,258,355,208		6,315,113,500		7,611,166,362	
			Sasaran 4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang terjangkau dan merata	Angka Melek Huruf	%	96.25	173,784,250	98.00	180,392,000	97.50	80,850,000	
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah		Tahun	8.21	8.01		8.50				
		Angka Harapan Lama Sekolah		Tahun	14.44	14.56		15.00				
1	01	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal				-					Disdik
				APK SD/MI/Paket A	%	79.71		78.30		95.00		
				APK SMP/MTs/Paket B	%	98.27		91.81		83.00		
				APK SMA/SMK/	%	88.35		73.75		90.00		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	99.71		81.88		95		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	91.82		53.67		83		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	0.27		0.24		95		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	1.55		1.45		83		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	98.03		97.50		85.50		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	96.54		90.10		84.50		
				Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.21		8.01		8.50		
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.44		14.56		15.00		
				Diploma I/II/III	%	3.50		4.00		4.50		
				Diploma IV/S1	%	45		50		50		
				S2/S3	%	1.50		2.00		2.50		

1	01	6	Program Peningkatan Mutu Ruang Sekolah				-					Disdik
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95.55		97.15		97.5		
				Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	94.31		98.2		98.3		
1	01	8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun				84,634,250		73,722,000		19,500,000	UPTD Seunagan
				Tamat SD Sederajat	%	99		99		100		
				Tamat SLTP sederajat	%	90		90.56		100		
1	01	9	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	%	96.25	89,150,000	98.00	106,670,000	97.50	61,350,000	UPTD SKB Disdik
			Sasaran 4.1.2 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	94.339	18,550,341,758	97.74	2,815,200,000	93,5	4,325,610,000	
				Persentase Distribusi Guru	%	67,5		75,5		80		
					Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	67.44		79.88		81,5	
					Persentase Distribusi Tenaga Kependidikan	%	60,5		65,5		70,5	
1	01	3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				18,550,341,758		2,815,200,000		4,325,610,000	Disdik
				Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	94.33		97.74		93.50		
				Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	67,44		79,88		81,5		
				Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	66.18		67.18		74.50		
				Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	54.31		55.39		81.00		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	51.15		49.00		70.50		
				Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	43.57		41.32		71.00		
			Sasaran 4.1.3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pendidikan anak usia dini	Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini	%	55,5	25,200,000	60,5	1,041,965,000	65,5	90,698,000	
1	01	1		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	25.61	25,200,000	25.86	1,041,965,000	40.5	90,698,000
1	01	2	Program Peningkatan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	25.61	-	25.86		40.5		Disdik

			Sasaran 4.1.4 Terwujudnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing	Persentase lulusan Vokasional yang bersertifikat	%	80,5	4,389,459,200	85	1,933,101,000	87,25	2,653,283,362	
				Jumlah pendidikan yang unggul	Unit	8		9		10		
1	01	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan				4,389,459,200		1,933,101,000		2,653,283,362	Disdik
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	95.55		97.15		97.50		
				Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	94.31		98.20		98.30		
				Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	71.05		73.02		75.50		
				Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	35.10		35.71		55.50		
				Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	66.18		67.18		74.50		
				Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	54.31		55.39		81.00		
				Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	51.15		49.00		70.50		
				Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	43.57		41.32		71.00		
			Sasaran 4.1.5 Meningkatnya minat dan kemampuan masyarakat dalam literasi	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1,210	119,570,000	925	344,455,500	500	460,725,000	
1	01	7	Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Angka Melek Huruf	%	96.25	-	98.00		97.50		UPTD SKB Disdik
1	24	1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan				-					Perpustakaan & Arsip
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	1,55		2,62		2.70		
				Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1		2		2		
				Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2		2		2		
1	24	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah						214,776,500		46,890,000	Perpustakaan & Arsip
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	1,55		2,62		2.70		
				Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1		2		2		
1	24	3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	2	41,925,000	2		2	144,525,000	Perpustakaan & Arsip

1	24	3	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				77,645,000		129,679,000		269,310,000	Perpustakaan & Arsip
				Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	31,456		32,469		32,598		
				Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	0,42		0,42		0,42		
				Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	1.023		1.023		700		
				Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1210		925		500		
				Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	7,095		7,595		7,724		
				Tujuan 4.2 Melestarikan adat istiadat dan budaya				-		-		
				Sasaran 4.2.1 Meningkatnya Peran dan fungsi lembaga adat	Jumlah Lembaga Adat dan Budaya yang Dibina	Lembaga	N/A		N/A		15	-
1	18		Program penguatan lembaga adat dan budaya					-				MPU, MAA, Disbudparpora
				Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	0		0		15		
				Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	0		0		25		
1	18		Program Pembinaan dan Pengembangan Nilai adat dan Budaya					-				MPU, MAA, Disbudparpora
				Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	0		0		17		
				Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peradilan adat yang telah diverifikasi	gampong	0		0		30		
1	18		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya					-				MPU, MAA, Disbudparpora
				Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3		4		0		
				Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	0		0		0		
				Sasaran 4.2.2 Terwujudnya simbol adat dan budaya Nagan	Even piasan seni dan budaya yang terselenggara	Kegiatan	2		- 1		- 3	
1	18		Program Pagelaran Seni dan Budaya Daerah (Nagan Festival)	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	2		- 1		- 0		MPU, MAA, Disbudparpora

			Tujuan 4.3 Meningkatkan peran kepemudaan dan olahraga				7,056,346,650		9,252,467,454		10,944,515,224	
			Sasaran 4.3.1 Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Jumlah Organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	16	1,554,625,000	28	1,239,391,228	30	1,829,997,486	
1	18	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	16	949,860,000	28	753705000	32	1,033,974,000	Disbudparpora
1	18	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	16	541,805,000	28	485686228	32	735,113,486	Disbudparpora
1	18	4	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba				62,960,000				60,910,000	Disbudparpora
				Jumlah atlet berprestasi	Atlet	17		19		22		
				Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	17		22		8		
			Sasaran 4.3.2 Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah medali pada event olahraga tingkat daerah dan regional	Medali	17	5,501,721,650	19	8,013,076,226	25	9,114,517,738	
1	18	5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga				-		22870000			Disbudparpora
				Cakupan pembinaan olahraga		100		100		100		
				Cakupan pembinaan atlet muda		100		100		100		
1	18	6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	2,017,676,000	100	1047592000	100	3,038,412,940	Disbudparpora
1	18	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				3,484,045,650		6942614226		6,076,104,798	Disbudparpora
				Cakupan pembinaan olahraga	%	100		100		100		
				Cakupan pembinaan atlet muda	%	100		100		100		
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	88.30		89.98		90.48		
			Misi 5. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;				18,826,570,126		21,267,365,949		13,123,823,847	
			Tujuan 5.1 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				18,826,570,126		21,267,365,949		13,123,823,847	
			Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	N/A	5,730,856,464	N/A	455,034,300	N/A	418,020,000	
2	06	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	122,900,000	75.35	97256800	82	111,820,000	Disperindagkop dan UKM
2	06	2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	5,607,956,464	75.35	357777500	82	306,200,000	Disperindagkop dan UKM

			Sasaran 5.1.2 Meningkatnya kesejahteraan PMKS	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	Ada	1,337,502,332	Ada	7,019,815,126	Ada	2,516,674,380	
1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				327,033,332		729932900		320,909,000	DINAS SOSIAL
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	N/A		N/A		N/A		
				Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang	N/A		N/A		N/A		
				Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit	N/A		N/A		N/A		
				Persentase PMKS yang tertangani	%	N/A		N/A		N/A		
				Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	ada		ada		ada		
1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	N/A	150,381,000	N/A	3163307200	N/A	2.854.520.000	Dinsos/Setdakab
1	13	3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	Anak	N/A	860,088,000	N/A	3126575026	N/A	2,195,765,380	DINAS SOSIAL
1	13	4	Program Pembinaan Anak Terlantar	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	Ada	-	Ada		Ada		
1	13	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	Orang	N/A	-	N/A		N/A		
1	13	6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapina, PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	Ada	-	Ada		Ada		
			Sasaran 5.1.3 Meningkatnya pemberdayaan kelompok perempuan	Jumlah kelompok perempuan diberdayakan	Kelompok	N/A	-	N/A	138,550,000	N/A	77,700,000	
1	11	2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	%	0.30	-	0.20	138,550,000	0.36	77,700,000	DPMGP4
			Sasaran 5.1.4 Meningkatnya pemberdayaan mantan kombatan dan korban konflik	Jumlah mantan kombatan dan korban konflik yang mendapat pemberdayaan	Orang	N/A	1,911,160,000	N/A	4,533,888,700	N/A	2,854,520,000	
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	N/A	1,760,779,000	N/A	1,370,581,500	N/A	-	DINAS SOSIAL & SETDAKAB
1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				150,381,000		3,163,307,200		2,854,520,000	Dinsos/Setdakab
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	N/A		N/A		N/A		
				Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang	N/A		N/A		N/A		
				Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	Orang	N/A		N/A		N/A		
				Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	Anak	N/A		N/A		N/A		
				Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit	N/A		N/A		N/A		

			Sasaran 5.1.5 Meningkatnya ketahanan keluarga	Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat	%	80	9,847,051,330	80	9,120,077,823	85	7,256,909,467	
2	01	1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	8,703,181,750	94.25	7,203,100,623	97.00	5,998,078,467	Distanak & Disbun
1	19	1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				218,490,000		153,520,000		108,922,500	Kesbangpol
				Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	Ada		Tidak Ada		Ada		
				Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	N/A		N/A		N/A		
				Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	N/A		N/A		N/A		
				Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	N/A		N/A		N/A		
1	19	2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan				18,000,000		80,484,000		75,068,500	Kesbangpol
				Kegiatan pembinaan politik daerah	Ada/Tidak	Ada		Ada		Ada		
				Jumlah LSM	LSM	5		4		4		
1	19	3	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Persentase Pemahaman Politik Bagi Masyarakat	Kegiatan	0	95,520,000	0	886,673,000	0	61,190,000	Kesbangpol
1	19	4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				433,395,000		796,300,200		550,050,000	Satpol PP dan WH
				Terlaksananya Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	%	98.85		98.85		99.10		
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	98.85		98.85		99.10		
				Persentase Penegakan PERDA	%	100		100		90		
1	19	6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	98.85	20,964,580	98.85		99.10		MPD
1	20	18	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	Kegiatan pembinaan politik daerah	Ada/Tidak	Ada	357,500,000	Tidak Ada		Ada	463,600,000	Setdakab/Sekwan
			Tujuan 5.2 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat				-		-		-	
			Sasaran 5.2.1 Terwujudnya penyelenggaraan santunan kematian bagi masyarakat	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/Tidak Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
			Program Jaminan Sosial Santunan Kematian	Menurunnya angka Kemiskinan	%	18,97	-	17,97		17,7		
			Program Keluarga Harapan Plus	Menurunnya angka Kemiskinan	%	18,97	-	17,97		17,7		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Misi 6. Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat yang Sehat ;				75,417,659,630		96,343,405,763		133,807,256,056	
			Tujuan 6.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				75,417,659,630		96,343,405,763		133,807,256,056	
			Sasaran 6.1.1 Meningkatnya angka Usia Harapan Hidup	Angka usia harapan hidup	Tahun	68.89	11,952,730,532	69,14	27,475,943,088	69,05	24,208,058,295	
1	02	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	80.30	2,399,288,220	74.42	2,618,361,276	92.95	1,648,445,900	Dinkes
1	02	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Stunting dan Balita Gizi Buruk	%	0.10	-	0.10	235,566,320	0.06	1,644,190,000	Dinkes
1	02	6	Program Penyehatan Lingkungan	Angka usia harapan hidup	%	68.89	-	69.14		69.05		Dinkes
1	02	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular				607,446,000		1,440,418,000		3,986,429,000	Dinkes
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	89.84		100.00		64.3		
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85.65		92.82		69.32		
1	02	11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pembantu puskesmas	%	21.17	49,982,000	21.17	11,534,198,568	21.17	16,024,436,800	Dinkes
1	02	12	Program Pengembangan Kesehatan	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	53.72	8,620,343,865	95.2	11,594,184,087	95.23	129,210,000	Dinkes
1	02	21	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak				213,340,000		53,214,000		775,346,000	Dinkes
				Persentase penurunan angka kematian ibu dan bayi	/100000 Kelahiran		28.40		331.02		153.0333333	
				Cakupan kunjungan bayi	%		84.1		117.61		86.82	
				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%		81.18		82.05		95.81	
				Cakupan pelayanan nifas	%		82.03		99.8		94.39	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%		79.74		100.00		76.71	
				Cakupan pelayanan anak balita	%		91.44		107.00		87.91	
1	02	22	Program Kesehatan Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (PDTK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	59.90	62,330,000	40.99		78.46		Dinkes

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Sasaran 6.1.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit			52,527,060,505	50,117,859,290	63,739,604,600			
				BOR	%	85					95	85
				TOI	Hari	1					1	1
				ALOS	Hari	3					3	3
				NDR	/1000 Pasien	6					8,2	5
				GDR	/1000 Pasien	6					12	6
				Angka kematian ibu	/100000 KH	28,40					331,02	153,03
				Angka kematian neonatus	/1000 KH	10,00					12,58	12,59
				Angka kematian bayi	/1000 KH	11,00					7,20	7,50
				Angka kematian balita	/1000 KH	12,00					8,94	36,37
1	02	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%	68.89	1,809,817,535	69.14	1,766,474,950	69.05	3,108,027,600	Dinkes & BLUD
1	02	3	Program Pengawasan Obat dan Makanan			-					159,328,000	Dinkes
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	89.84		100.00		64.3		
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85.65		92.82		69.32		
1	02	4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat				30,000,000		189,670,000			Dinkes
				Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	18.60		17.31		18.56		
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	59.90		40.99		78.46		
1	02	9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya				11,592,982,722		4,923,095,759		17,535,867,000	Dinkes
				Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.08		0.08		0.09		
				Rasio poliklinik per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.05		0.05		0.05		
				Rasio pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.28		0.28		0.31		
				Cakupan pembantu puskesmas	%	21.17		21.17		21.17		
1	02	13	Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas				1,631,000,000				936,382,000	Dinkes
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	11.00		7.20		7.5		
				Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	7.30		6.28		6.14		
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	12.00		8.94		36.37		
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	10.00		12.58		12.59		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	28.40		331.02		153.03		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

1	02	17	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Puskesmas				-					Dinkes
				Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.08		0.08		0.09		
				Rasio poliklinik per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.05		0.05		0.05		
				Rasio pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.28		0.28		0.31		
1	02	18	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan				-					Dinkes
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3.87		4.13		4.39		
				Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.03		0.03		0.03		
				Dokter Umum	/1000 Penduduk	0.35		0.29		0.24		
				Dokter Spesialis	/1000 Penduduk	0.06		0.05		0.28		
				Dokter Gigi	/1000 Penduduk	0.36		0.08		0.18		
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	45.63		80.00		53.01		
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	82.79		85.00		87.00		
1	02	19	Program Pelaksanaan Operasional BLUD				37,454,860,248		43,238,618,581		42,000,000,000	BLUD
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.01		0.01		0.01		
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	36.42		47.38		19.03		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100		100		100		
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100		100		100		
1	02	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat				8,400,000					Dinkes
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	11.00		7.20		7.5		
				Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	7.30		6.28		6.14		
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	12.00		8.94		36.37		
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	10.00		12.58		12.59		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	28.40		331.02		153.03		
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100		100		100		
				Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk	1.82		0.60		1.98		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Sasaran 6.1.3 Meningkatnya status RSU Nagan Raya	Akreditasi RSU Nagan Raya	Akreditasi	Akreditasi	10,937,868,593	Akreditasi	18,749,603,385	Akreditasi	45,859,593,161	
1	02	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				437,701,673				160,207,800	BLUD
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3.87		4.13		4.39		
				Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.03		0.03		0.03		
				Dokter Umum	/1000 Penduduk	0.35		0.29		0.24		
				Dokter Spesialis	/1000 Penduduk	0.06		0.05		0.28		
				Dokter Gigi	/1000 Penduduk	0.36		0.08		0.18		
1	02	10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				9,906,781,647		18,574,603,385		45,599,385,361	BLUD
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	140.00		160.20		91.08		
				Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	3.04		2.99		2.25		
1	02	15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan				-					RSUD
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.01		0.01		0.01		
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3.87		4.13		4.39		
				Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.03		0.03		0.03		
				Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.08		0.08		0.09		
				Rasio poliklinik per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.05		0.05		0.05		
				Rasio pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.28		0.28		0.31		
				Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	18.60		17.31		18.56		
1	02	23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase layanan kepada masyarakat yang terlayani dengan baik	%	100	13,350,000	100	175,000,000	100	100,000,000	Dinkes
1	02	24	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata				580,035,273					BLUD
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.01		0.01		0.01		
				Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.03		0.03		0.03		

				Misi 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan potensi dan kerakteristik wilayah;				109,134,341,255		146,422,316,490		165,558,426,223	
				Tujuan 7.1 Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana sesuai potensi wilayah bagi peningkatan ekonomi masyarakat				109,134,341,255		146,422,316,490		165,558,426,223	
				Sasaran 7.1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	####	56,639,784,645	242.56	109,619,861,037	####	132,910,474,309	
1	03	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Akses jalan dan jembatan berfungsi dengan baik dan lancar	%	####	52,691,308,145	242.56	105,768,721,263	261.56	118,348,525,270	PUPR	
1	03	2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	221.93	-	242.556	1,279,500,465	261.56	5,149,988,135	Perkim	
1	03	3	Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	221.93	-	242.556	878,765,872	261.56	733,002,972	PUPR	
1	03	4	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	221.93	3,948,476,500	242.556	1,592,873,437	261.56	8,479,192,932	PUPR	
1	03	5	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Talud/Bronjong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	221.93	-	242.556		261.56		PUPR	
1	03	6	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Rasio Index	0.072		0.163	100,000,000	0.173	199,765,000	PUPR	
1	03	14	program pembangunan/rehabilitasi gedung/tempat									Perkim/Dinsos	
				terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana umum	%	10		10		20			
				Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	0		709		709			
				Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	0		127		231			
				Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit	N/A		N/A		N/A			
				Jumlah Rumah Korban Konflik Yang di Bangun	Unit	N/A		N/A		N/A			
1	03	15	program peningkatan/ pemeliharaan jalan lingkungan	tercapainya jalan dan lingkungan dalam kondisi baik	%	221.93		242.556		261.56		Perkim	
				Sasaran 7.1.2 Terwujudnya pengembangan kawasan strategis	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9	1,279,401,000	9	1,082,659,000	9	2,344,858,000	
1	03	9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah kawasan Strategis	%	9	399,573,000	9	251,984,000	9	446,438,000	PUPR	
1	03	12	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	Terpenuhinya Sarana prasarana Infratraktur Perdesaaan	Ha	9.051	-	9.051		5,700		PUPR	
1	03	13	Program Perencanaan Kota Menengah dan Besar	Jumlah kawasan Strategis	%	9	-	9		9		Perkim	

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

1	07	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			671,410,000		798,805,000		1,007,270,000	Dishub	
				Angkutan Darat	Trayek	3		3		6		
				Angkutan Udara	Frek	1271		962		1463		
				Persentase layanan angkutan darat	%	7.13		7.93		9.77		
				Angkutan Udara	Orang	37,894		37,225		26,747		
				Jumlah Bandar Udara	Unit	1		1		1		
				Jumlah Terminal Tipe B	Unit	1		4		1		
				Jumlah Terminal Tipe C	Unit	1		4		0		
				Bandara	Kg	217.965		134.338		###		
1	07	2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas			179,421,000				515,950,000	Dishub	
				Rasio ijin trayek	Indeks	1.8		2		3.5		
				Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	420		518		669		
				Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	6.77		7.95		11.01		
				Pemasangan Rambu-rambu	%	33		37		44		
				Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	83.00		87.67		82.98		
2	08	1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	KK	208	7,000,000	226		235	323,600,000	Disnakertrans
2	08	2	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigran lokal	UPT	5	21,997,000	5	31,870,000	4	51,600,000	Disnakertrans
			Sasaran 7.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana pertanian	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	15.239	43,660,785,850	10.626	27,127,903,481	5,700	17,696,355,381	
1	03	10	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Adanya pembangunan, peningkatan saluran irigasi dan galian saluran pembuang	Ha	9,051	42,870,716,550	9,051	27,127,903,481	5.700	17,696,355,381	PUPR
2	01	6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				790,069,300					Disbun
				Produksi sektor perkebunan	Ton	124,551		5,931.97		71,643		
				Produksi perkebunan sawit	Ton	117,819		#####		#####		
2	01	13	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	9,051	-	9,051		5.700		Distanak
2	01	14	Program Peningkatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	%	100	-	100		100		Distanak & Disbun
			Sasaran 7.1.4 Meningkatnya pembangunan Infrastruktur untuk pengurangan resiko bencana	Panjang Jalan evakuasi	Km	0	1,902,990,900	0	4,440,379,604	1	10,404,516,629	
				Jumlah pos pemadam kebakaran	Unit	0		0		1		
				Jumlah bangunan evakuasi	Unit	0		0		1		
1	03	7	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan evakuasi	Km	0	-	0		1		PUPR
1	03	11	Program pengendalian banjir				1,637,743,400		3,537,510,104		6,283,966,629	PUPR
				Panjang Jalan evakuasi	Km	0		0		1		
				Jumlah bangunan evakuasi	Unit	0		0		1		
1	04	5	Program Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan	Panjang Jalan evakuasi	Km	0	265,247,500	0	902,869,500	1	4,120,550,000	BPBD /Kecamatan
1	04	6	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Jumlah bangunan evakuasi	Unit	0	-	0		1		BPBD

			Sasaran 7.1.5 Meningkatnya akses sanitasi dan air minum bagi masyarakat	Persentase akses sanitasi	%	52	3,183,012,000	67,64	-	67,64	-	
				Persentase akses air minum Perpipaan	%	52.00		67,64		72,24		
				Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0		10		10		
1	04	2	Program pembangunan saluran Limbah Rumah Tangga	Persentase akses sanitasi	%	52	-	67,64		67,64		Perkim
1	04	3	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman				3,183,012,000					Perkim
				Persentase akses air minum Perpipaan	%	52.00		67.64		72.24		
				Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0		10		10		
1	04	8	program penyusunan RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)				-					Perkim
				Persentase akses air minum Perpipaan	%	52.00		67.64		72.24		
				Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0		10		10		
1	04	9	program penyusunan Raqan BUMD PDAM	Tersusnya Qanun BUMD PDAM	Dokumen	0	-	0		1		Perkim
1	04	10	program Pembangunan Infrastruktur Air Bersih (PDAM)				-					Perkim
				Persentase akses air minum Perpipaan	%	52.00		67.64		72.24		
				Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0		10		10		
			Sasaran 7.1.6 Tersedianya rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	0	0	709	0	320	0	
				Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	0		127		100		
1	04	1	Program Pengembangan Perumahan	persentase rumah layak huni	Unit	0	-	709		709		Perkim
1	04	7	program pembangunan saluran Limbah Rumah Tangga	Persentase akses sanitasi	%	52	-	67,64		67,64		Perkim
			Sasaran 7.1.7 Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka publik.	Persentase ruang terbuka hijau	%	10.00	2,296,731,360	11.00	4,151,513,368	11,70	2,052,221,904	
1	08	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				356,612,500		2,947,097,000			DLH
				Jumlah kawasan Strategis	%	9		9		9		
				Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		
				Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

1	08	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				93,091,250		290,138,200		561,785,000	DLH
				Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		
				Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		
				Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	tidak ada		tidak ada		tidak ada		
1	08	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah kawasan Strategis	%	9	6,990,000	9	23,658,000	9	112,230,000	DLH
1	08	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	10	1,840,037,610	11	890,620,168	12	1,378,206,904	DLH
			Sasaran 7.1.8 Tersedianya infrastruktur yang mendukung ekonomi kreatif	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	30	171,635,500	50	-	60	150,000,000	
2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				-				150,000,000	Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50		739.56		
2	05	8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar				171,635,500					Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50		739.56		
2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kawasan Wisata Rawa Tripa				-					Kelautan dan Perikanan, KLH, Disbutparpora
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50		739.56		
			TOTAL (MISI 1 s/d MISI 7)				434,099,974,763		562,577,360,543		542,269,752,907	

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

Tabel 6.5
Program Prioritas Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif
Tahun 2017-2022

KODE (Urusan/ Bidang Urusan/ Program)	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMK (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						SKPD Penanggung Jawab
					2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMK		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan Syariat Islam secara kaffah					19,499,094,406		19,885,776,877		39,384,871,283	
1.1	Mewujudkan penegakan dan pengamalan syariat Islam secara kaffah yang berbasis pemahaman untuk membentuk karakter dan kepribadian berdasarkan nilai keislaman										
1.1.1	Menurunnya jumlah pelanggaran Syariat Islam										
1.1.1.1	Penguatan peran dan fungsi Wilayahul Hisbah										
9.01.02	Program Syariat Islam Aceh	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam	%	80.00	80.00	250,000,000	80.00	254,425,000	80.00	504,425,000	DINAS SYARIAT ISLAM
1.1.1.2	Peningkatan Peran Ulama Dan Masyarakat Dalam Pengawasan									-	
9.01.02	Program Syariat Islam Aceh	Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	220.00	220.00	450,000,000	223.00	457,965,000	223.00	907,965,000	DINAS SYARIAT ISLAM
9.01.03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	%	100.00	100.00	100,000,000	100.00	150,000,000	100.00	250,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1.1.2	Meningkatnya Mutu Pendidikan Dayah										
1.1.2.1	Pembangunan Dayah Terpadu										
9.01.02	Program Syariat Islam Aceh	Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi dayah	%	85.00	85.00	200,000,000	100.00	203,540,000	100.00	403,540,000	DINAS SYARIAT ISLAM
1.1.2.2	Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia dan Penyediaan Biaya Operasional Dayah										
1.01.07	Program Pendidikan Dayah	Pengelolaan Pendidikan Dayah	%	90.00	90.00	100,000,000	90.00	100,000,000	90.00	200,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1.1.3	Meningkatnya Kemakmuran Masjid										
1.1.3.1	Peningkatan Peran Badan Kemakmuran Masjid Dalam Memakmurkan Masjid										
9.01.02	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Masjid yang melaksanakan Shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	55.00	55.00	7,000,000,000	60.00	-	60.00	7,000,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Jumlah Masjid yang melaksanakan Shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	55.00	55.00	-	60.00	7,123,900,000	60.00	7,123,900,000	DINAS SYARIAT ISLAM
		Jumlah Masjid yang melaksanakan shalat berjamaah 5 waktu	Masjid	55.00	55.00	180,000,000	60.00	183,186,000	60.00	363,186,000	DINAS SYARIAT ISLAM
1.1.4	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran Zis										
1.1.4.1	Penguatan Fungsi Dan Peran Baitul Mal										
9.01.04	Program Baitul Mal	Jumlah ZIS yang terhimpun	Milyar	6,92	6.92	6,674,500,000	6.92	6,792,638,650	6.92	13,467,138,650	SEKRETARIAT BAITUL MAL
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Petugas Tajhiz Mayat										
1.1.5.1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Petugas Tajhiz Maya										
9.01.02	Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong	Orang	444.00	444.00	180,000,000	444.00	183,186,000	444.00	363,186,000	DINAS SYARIAT ISLAM

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

	1.1.6	Meningkatkan Kualitas Masyarakat Berbasis Al-Quran Dan Hadist										
	1.1.6.1	Peningkatan Pengamalan Alquran Dan Hadist Dalam Kehidupan Masyarakat										
9.01.02		Program Syariat Islam Aceh	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	450,000,000	80.00	457,965,000	80.00	907,965,000	DINAS SYARIAT ISLAM
			Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	15,000,000	80.00	15,177,000	80.00	30,177,000	KECAMATAN BEUTONG
			Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	10,000,000	80.00	15,000,000	80.00	25,000,000	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
			Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	37,500,000	80.00	38,163,750	80.00	75,663,750	KECAMATAN DARUL MAKMUR
			Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	10,000,000	80.00	15,000,000	80.00	25,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
			Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	10,000,000	80.00	15,000,000	80.00	25,000,000	KECAMATAN SUKA MAKMUE
			Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60.00	60.00	10,000,000	80.00	15,000,000	80.00	25,000,000	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
			Jumlah Lembaga Pendidikan Islam	Lembaga	N/A	N/A	3,822,094,406	N/A	3,865,630,477	N/A	7,687,724,883	DINAS SYARIAT ISLAM
	2	Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Baik Dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan					537,627,122,602		547,023,804,231		1,084,650,926,833	
	2.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)										
	2.1.1	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel										
	2.1.1.1	Peningkatan Profesionalisme Sdm Asn, Dan Penempatan Pejabat Melalui Analisis Dan Lelang Jabatan										
4.02.02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	5,008,050,000	WTP	5,096,692,485	WTP	10,104,742,485	SEKRETARIAT DPRK
5.02.02		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2.00		273,159,496,000		277,994,419,079		551,153,915,079	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10,00	10.00	2,325,500,000		2,366,661,350		4,692,161,350	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.02.03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,398,000,000	WTP	1,422,744,600	WTP	2,820,744,600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.03.02		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A		766,500,000		780,067,050		1,546,567,050	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Tingkat Kapabilitas Akuntalitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2.00		37,000,000		37,654,900		74,654,900	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
6.01.02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,401,998,559	WTP	1,407,167,933	WTP	2,809,166,492	INSPEKTORAT
6.01.03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	20,000,000	WTP	40,000,000	WTP	60,000,000	INSPEKTORAT
7.01.06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	3,000,000	WTP	3,053,100	WTP	6,053,100	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	WTP	50,000,000	KECAMATAN DARUL MAKMUR
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	16,000,000	WTP	16,283,200	WTP	32,283,200	KECAMATAN KUALA
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	WTP	50,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	WTP	50,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	WTP	50,000,000	KECAMATAN SUKA MAKMUE

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A		3,217,096,397		3,274,039,003		6,491,135,400	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	-	2,932,903,976	-	2,984,816,376	-	5,917,720,352	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,973,430,861	2.94	2,008,360,587	2.94	3,981,791,448	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.11.08		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase ruang terbuka hijau	%	19.00	19.00	90,000,000	27.00	91,593,000	27.00	181,593,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	4,262,326,451	B	4,337,769,629	B	8,600,096,080	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	3,469,016,565	2.94	3,530,418,158	2.94	6,999,434,723	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	4,160,873,482	2.94	4,234,520,943	2.94	8,395,394,425	DINAS PERKEBUNAN
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	12,649,941,052	2.94	12,873,845,009	2.94	25,523,786,061	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	1,023,076,434	2.94	1,014,255,946	2.94	2,037,332,380	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	4,001,361,055	2.94	3,975,725,146	2.94	7,977,086,201	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	9,704,042,962	2.94	9,875,804,522	2.94	19,579,847,484	DPRK
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,89	2.89	590,231,360	2.94	600,678,455	2.94	1,190,909,815	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	23,011,553,130	WTP	23,418,857,620	WTP	46,430,410,750	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	23,561,720,304	WTP	23,978,762,753	WTP	47,540,483,057	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,016,446,000	WTP	2,052,137,094	WTP	4,068,583,094	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,949,951,740	WTP	3,002,165,886	WTP	5,952,117,626	KECAMATAN BEUTONG
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,228,046,830	WTP	1,249,783,259	WTP	2,477,830,089	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,850,678,615	WTP	2,891,489,626	WTP	5,742,168,241	KECAMATAN DARUL MAKMUR
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,391,166,916	WTP	2,428,720,670	WTP	4,819,887,586	KECAMATAN KUALA
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,076,119,519	WTP	2,112,866,834	WTP	4,188,986,353	KECAMATAN KUALA PESISIR
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	3,825,591,267	WTP	3,857,101,632	WTP	7,682,692,899	KECAMATAN SEUNAGAN
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,592,742,092	WTP	2,628,987,627	WTP	5,221,729,719	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,893,863,237	WTP	1,917,738,616	WTP	3,811,601,853	KECAMATAN SUKA MAKMUE

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,020,000,000	WTP	1,050,000,000	WTP	2,070,000,000	KECAMATAN TADU RAYA
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,653,534,114	WTP	1,672,978,668	WTP	3,326,512,782	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	21,397,820,247	WTP	21,776,561,665	WTP	43,174,381,912	SEKRETARIAT DAERAH
			Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2.00		2,255,164,916		2,295,081,335		4,550,246,251	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2.00	-	917,700,000	-	933,943,290	-	1,851,643,290	DINAS PERTANAHAN
			Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2.00	-	1,318,129,202	-	1,341,460,089	-	2,659,589,291	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
	2.1.2	Meningkatnya Kinerja Birokrasi Yang Berkualitas										
	2.1.2.1	Pelaksanaan Mekanisme Pelayanan Publik Sesuai Standar Pelayanan Minimal										
1.04.03		Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	80.00	85.00	300,000,000	90.00	350,000,000	90.00	650,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.13.02		Program Penataan Desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	100.00	100.00	60,000,000	100.00	61,062,000	100.00	121,062,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.13.04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100.00	100.00	510,000,000	100.00	519,027,000	100.00	1,029,027,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.18.04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0,07		122,000,000		124,159,400		246,159,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.27.06		Program Perizinan Usaha Pertanian	Produksi sektor perkebunan	Ton	128,064.00	137,353.00	505,000,000		513,938,500		1,018,938,500	DINAS PERKEBUNAN
5.03.02		Program Kepegawaian Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	766,500,000	N/A	780,067,050	N/A	1,546,567,050	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	461,140,700	N/A	469,302,890	N/A	930,443,590	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.01.02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	50,072,500	B	50,958,783	B	101,031,283	KECAMATAN BEUTONG
			Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	4,000,000	B	4,070,800	B	8,070,800	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
			Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	16,000,000	B	16,283,200	B	32,283,200	KECAMATAN DARUL MAKMUR
			Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	45,300,000	B	46,101,810	B	91,401,810	KECAMATAN KUALA PESISIR
			Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	25,000,000	B	25,442,500	B	50,442,500	KECAMATAN SUKA MAKMUE
			Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	30,500,000	B	31,039,850	B	61,539,850	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
7.01.03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	20,000,000	B	23,911,959	B	43,911,959	KECAMATAN BEUTONG
			Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	25,000,000	B	25,442,500	B	50,442,500	KECAMATAN DARUL MAKMUR
			Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	10,000,000	B	20,000,000	B	30,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN
			Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	42,500,000	B	43,252,250	B	85,752,250	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
			Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	20,000,000	B	20,354,000	B	40,354,000	KECAMATAN TADU RAYA
			Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	10,000,000	B	20,000,000	B	30,000,000	KECAMATAN TRIPA MAKMUR

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	12,000,000	B	13,565,941	B	25,565,941	KECAMATAN BEUTONG
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	18,000,000	B	18,318,600	B	36,318,600	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	15,000,000	B	15,265,500	B	30,265,500	KECAMATAN DARUL MAKMUR
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	13,000,000	B	18,000,000	B	31,000,000	KECAMATAN KUALA
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	36,160,000	B	36,800,032	B	72,960,032	KECAMATAN KUALA PESISIR
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	12,000,000	B	17,000,000	B	29,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	8,400,000	B	8,548,680	B	16,948,680	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	222.00	222.00	80,000,000	222.00	81,416,000	222.00	161,416,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	3,500,230,207	N/A	3,562,184,282	N/A	7,062,414,489	INSPEKTORAT
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	1,392,200,628	N/A	1,416,842,579	N/A	2,809,043,207	SEKRETARIAT BAITUL MAL
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	2,000,000	B	2,035,400	B	4,035,400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	6,217,094,275	B	6,327,136,844	B	12,544,231,119	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	10,000,000	B	10,177,000	B	20,177,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	3,000,000	B	3,053,100	B	6,053,100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	3,000,000	B	3,053,100	B	6,053,100	DINAS PERHUBUNGAN
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	14,400,000	B	14,654,880	B	29,054,880	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	602,554,795	B	613,220,015	B	1,215,774,810	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,254,960,200	2.94	1,277,172,996	2.94	2,532,133,196	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,594,720,000	2.94	2,640,646,544	2.94	5,235,366,544	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,392,823,808	2.94	1,417,476,789	2.94	2,810,300,597	DINAS PERHUBUNGAN
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,057,180,000	2.94	1,075,892,086	2.94	2,133,072,086	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,456,290,482	2.94	2,499,766,824	2.94	4,956,057,306	DINAS SOSIAL
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,951,043,504	2.94	3,003,276,974	2.94	5,954,320,478	DINAS SYARIAT ISLAM
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,215,677,509	2.94	1,237,195,001	2.94	2,452,872,510	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,081,463,218	2.94	2,118,305,117	2.94	4,199,768,335	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,310,700,200	2.94	2,351,599,594	2.94	4,662,299,794	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	7,951,274,335	2.94	8,092,011,891	2.94	16,043,286,226	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	3,158,982,722	2.94	3,214,896,716	2.94	6,373,879,438	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,566,236,004	WTP	1,593,958,381	WTP	3,160,194,385	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,250,344,476	WTP	1,272,475,573	WTP	2,522,820,049	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	21,734,901,366	WTP	22,119,609,120	WTP	43,854,510,486	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	1,484,618,616	WTP	1,510,896,366	WTP	2,995,514,982	DINAS PERHUBUNGAN
			Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	2,205,866,931	WTP	2,244,910,776	WTP	4,450,777,707	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2.1.3	Tersedianya Sistem Data Base Yang Terpadu Dan Terintegrasi										
	2.1.3.1	Peningkatan Ketersediaan Dan Pengintegrasian Data Secara Terpadu										
2.08.05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	25,000,000		25,442,500		50,442,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.12.02		Program Pendaftaran Penduduk	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	747,035,000	Ada	760,257,520	Ada	1,507,292,520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03		Program Pencatatan Sipil	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	35,000,000	Ada	35,619,500	Ada	70,619,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	340,000,000	Ada	346,018,000	Ada	686,018,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	5,000,000		5,088,500		10,088,500	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
2.12.05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	60,000,000	Ada	61,062,000	Ada	121,062,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.16.02		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80.00	80.00	140,000,000		142,478,000		282,478,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.16.03		Program Aplikasi Informatika	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80.00	80.00	100,000,000	80.00	101,770,000	80.00	201,770,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
2.18.06		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	20.00	80.00	171,000,000		174,026,700		345,026,700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.20.02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80.00	80.00	180,000,000	80.00	183,186,000	80.00	363,186,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	40,000,000	Ada	40,708,000	Ada	80,708,000	DINAS PERKEBUNAN
2.24.02		Program Pengelolaan Arsip	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	65,000,000		66,150,500		131,150,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

2.24.03		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,22	3.00	15,000,000	5.00	15,265,500	5.00	30,265,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5.01.02		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	16,000,000		16,283,200		32,283,200	KECAMATAN KUALA
			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	13,000,000	-	13,230,100	-	26,230,100	KECAMATAN SUKA MAKMUE
5.05.02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	Ada	Ada	450,000,000		457,965,000		907,965,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2.1.4	Terwujudnya Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Yang Terintegrasi									-	
	2.1.4.1	Pengembangan Aplikasi E-Planning Terintegrasi E-Butgeting									-	
5.01.02		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana a/ Belum Terlaksana a	terlaksana	Terlaksana	1,977,500,000	terlaksana	2,012,501,750	terlaksana	3,990,001,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPKK kedalam APBK	%	Ada	Ada	1,778,710,000	Ada	1,810,193,167	Ada	3,588,903,167	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana a/ Belum Terlaksana a	terlaksana	Terlaksana	6,000,000	terlaksana	6,106,200	terlaksana	12,106,200	KECAMATAN KUALA
X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana a/ Belum Terlaksana a	Belum Terlaksana	Terlaksana	2,486,514,329	terlaksana	2,509,994,633	terlaksana	4,996,508,962	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2.1.5	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Dan Penyusunan Kebijakan Publik										
	2.1.5.1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan.										
4.02.02		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	(blank)	WTP/WD P	WTP	WTP	6,975,153,514	WTP	7,098,613,731	WTP	14,073,767,245	SEKRETARIAT DPRK
8.01.03		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	ada/tidak	Ada	Ada	20,850,000,000	Ada	21,194,045,000	Ada	42,044,045,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	2.1.7	Meningkatnya Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Dan Desa Yang Melaksanakan Pprg										
	2.1.7.1	Peningkatan Jumlah Opd Yang Melaksanakan Pprg										
2.08.02		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,27	52,35	263,000,000	52.36	267,655,100	52.36	530,655,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,27	52,35	9,000,000	52.36	9,159,300	52.36	18,159,300	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

	3	Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yg Berbasis Kearifan Lokal Menuju Masyarakat Yang Produktif Sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan Dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					30,857,991,265		31,404,177,710		62,262,168,975	
	3.1	Menurunkan Tingkat Kemiskinan										
	3.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin										
	3.1.1.1	Penyediaan Akses Permodalan Bagi Masyarakat Miskin										
2.17.03		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	3.00	3.00	19,500,000	3.00	19,845,150	3.00	39,345,150	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.05		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif	%	44.00	80.00	152,500,000		155,199,250		307,699,250	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.06		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi tidak aktif	%	56.00	20.00	150,000,000		152,655,000		302,655,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.32.03		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigran lokal	Lokasi	4.00	4.00	53,100,000	-	54,039,870	-	107,139,870	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah transmigrasi	UPT	16.00	16.00	58,600,000		59,637,220		118,237,220	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.1.2	Menurunnya Angka Pengangguran										
	3.1.2.1	Penciptaan Akses Lapangan Kerja										
2.07.03		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Pengangguran	3,79	2.93	4.10	1,000,000,000		1,017,700,000		2,017,700,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	7,885.00	7,885.00	108,152,000	7,995.00	110,066,290	7,995.00	218,218,290	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05		Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	5.00		210,100,000		213,818,770		423,918,770	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)										
	3.2.1	Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal										
	3.2.1.1	Pemberian Kemudahan Akses Permodalan, Peningkatan Daya Saing Dan Sdm										
2.17.07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah usaha ekonomi berbasis kearifan lokal yang dibina	Usaha	N/A	N/A	1,981,850,000	N/A	2,016,928,745	N/A	3,998,778,745	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
2.17.08		Program Pengembangan UMKM	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	85.00	85.00	1,235,210,000	90.00	1,257,073,217	90.00	2,492,283,217	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
4.01.03		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah usaha ekonomi berbasis kearifan lokal yang dibina	Usaha	N/A	N/A	1,865,220,000	N/A	1,898,234,394	N/A	3,763,454,394	SEKRETARIAT DAERAH
	3.2.2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sebagai Penopang Kemandirian Daerah										
	3.2.2.1	Optimalisasi Pungutan Pad Dan Penggalan Sumber-Sumber Pad Yang Baru										
3.26.02		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kunjungan wisata	%	90.05	90.06	770,000,000		783,629,000		1,553,629,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.03		Program Pemasaran Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	Hari	15.00	14.63	220,000,000		223,894,000		443,894,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

	3.2.2.2	Peningkatan Jumlah Investasi Dalam Dan Luar Negeri										
2.18.02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5,33	6.00	47,100,000		47,933,670		95,033,670	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	500.00	219.00	50,000,000		50,885,000		100,885,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	148,52	52	81,550,000		82,993,435		164,543,435	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.31.02		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	65,25	85.00	686,710,000		698,864,767		1,385,574,767	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	3.2.3	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah										
	3.2.3.1	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Komoditi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan Dan Kelautan										
3.27.02		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70.00	70.00	476,000,000	80.00	484,425,200	80.00	960,425,200	DINAS PERKEBUNAN
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	6.86	9,700.00	614,285,714		625,158,571		1,239,444,285	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.27.03		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan			4,463,571,428		4,542,576,642		9,006,148,070	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
			Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70.00	70.00	5,164,170,000	80.00	5,255,575,809	80.00	10,419,745,809	DINAS PERKEBUNAN
3.27.04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	20.82	23,036.00	2,055,000,000	23,589.00	2,091,373,500	23,589.00	4,146,373,500	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
3.27.05		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan		9.00	100,000,000	9.00	101,770,000	9.00	201,770,000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
			Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70.00	70.00	85,000,000	80.00	86,504,500	80.00	171,504,500	DINAS PERKEBUNAN
3.27.07		Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan			2,376,142,857		2,418,200,586		4,794,343,443	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
			Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70.00	70.00	1,326,477,000	80.00	1,349,955,643	80.00	2,676,432,643	DINAS PERKEBUNAN
	3.2.4	Meningkatnya Ketahanan Pangan										
	3.2.4.1	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi										
2.09.05		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan bina kelompok petani	%	93,63	100.00	100,000,000	100.00	101,770,000	100.00	201,770,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	3.2.4.2	Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ketahanan Pangan										
2.09.02		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Kecukupan pangan utama	%	100.00	100.00	187,500,000	100.00	190,818,750	100.00	378,318,750	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
2.09.03		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton	6,858.00	9,700.00	420,000,000	9,800.00	427,434,000	9,800.00	847,434,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
2.09.04		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170,151.00	160,000.00	150,000,000	165,000.00	152,655,000	165,000.00	302,655,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

3.25.03		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	Ton	2617,08	3,181.08	760,842,266	3,340.13	774,309,174	3,340.13	1,535,151,440	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
3.25.04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Perikanan Budidaya	Ton	640,21	850.49	3,859,410,000	893.02	3,908,075,557	893.02	7,767,485,557	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
3.25.05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Perikanan Budidaya	Ton	640,21	850.49	20,000,000	893.02	40,000,000	893.02	60,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
3.25.06		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi perikanan ikan	Ton	3257,29	4,031.57	10,000,000	4,233.15	10,177,000	4,233.15	20,177,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	4	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dengan Memberi Dukungan Maksimal Terhadap Pendidikan, Budaya, Pemuda Dan Olah Raga					249,973,163,963		254,399,458,965		504,372,622,928	
	4.1	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Yang Unggul, Terjangkau Dan Merata										
	4.1.1	Meningkatnya Aksesibilitas Pendidikan Yang Terjangkau Dan Merata										
	4.1.1.1	Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Dan Vokasional										
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Distribusi Guru	Indek	N/A	N/A	20,794,387,644	N/A	21,162,448,305	N/A	41,956,835,949	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
	4.1.2	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik										
	4.1.2.1	Peningkatan Kompetensi Tenaga										
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	95.00	94.50	2,000,000,000	96.00	2,035,400,000	96.00	4,035,400,000	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf	%	97,50	98.00	185,488,857,010	98.50	188,772,009,779	98.50	374,260,866,789	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
	4.1.2.2	Pemerataan Penempatan Tenaga										
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Distribusi Guru	Indek	N/A	N/A	27,536,769,500	N/A	28,024,170,320	N/A	55,560,939,820	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
	4.1.2.3	Peningkatan Peran Dan Fungsi MPD										
X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	LAKIP	Level	CC	C	699,237,401	B	713,383,903	B	1,412,621,304	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
	4.1.3	Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini										
	4.1.3.1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini										
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,5	50.50	4,122,600,000	65.00	4,195,570,020	65.00	8,318,170,020	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN

	4.1.3.2	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini										
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	50,5	50.50	1,591,500,000	65.00	1,619,669,550	65.00	3,211,169,550	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
	4.1.4	Terwujudnya Lembaga Pendidikan Yang Unggul Dan Berdaya Saing										
	4.1.4.1	Pengembangan Pendidikan Inklusif Dan Sekolah Unggul										
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah pendidikan yang unggul	N/A	N/A	N/A	159,000,000	N/A	161,814,300	N/A	320,814,300	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
1.01.03		Program Pengembangan Kurikulum	Jumlah pendidikan yang unggul	N/A	N/A	N/A	30,000,000	N/A	30,531,000	N/A	60,531,000	DINAS PENDIDIKAN / UPTD PENDIDIKAN SEUNAGAN / UPTD PENDIDIKAN KUALA / UPTD PENDIDIKAN DARUL MAKMUR /SPNF-SKB DINAS PENDIDIKAN
	4.1.5	Meningkatnya Minat Dan Kemampuan Masyarakat Dalam Literasi										
	4.1.5.1	Penguatan Gerakan Literasi Dalam Masyarakat										
2.23.02		Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2.00	900.00	276,974,500	1,100.00	281,876,949	1,100.00	558,851,449	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	4.2	Melestarikan Adat Istiadat Dan Budaya										
	4.2.1	Meningkatnya Peran Dan Fungsi Lembaga Adat										
	4.2.1.1	Penguatan Peran Dan Fungsi Lembaga Adat										
2.13.05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Kelompok	222.00	222.00	270,000,000	222.00	274,779,000	222.00	544,779,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.22.04		Program Pembinaan Sejarah	(blank)	(blank)			30,000,000		30,531,000		60,531,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.22.06		Program Pengelolaan Permuseuman	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3.00	1.00	50,000,000		50,885,000		100,885,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	4.2.2	Terwujudnya Simbol Adat Dan Budaya Nagan										
	4.2.2.1	Peningkatan pergelaran piasan seni dan budaya										
1.06.07		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Tempat	-	2.00	110,000,000	1.00	111,947,000	1.00	221,947,000	DINAS SOSIAL
2.22.02		Program Pengembangan Kebudayaan	(blank)	(blank)			50,000,000		50,885,000		100,885,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.22.03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	2.00	3.00	50,000,000		50,885,000		100,885,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.22.05		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	(blank)	-	2.00	150,000,000		152,665,000		302,665,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

	4.3	Meningkatkan Peran Kepemudaan Dan Olahraga										
	4.3.1	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan										
	4.3.1.1	Penguatan Peran Organisasi Pemuda Dalam Pembangunan										
2.19.02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	organisasi	10.00	36.00	520,000,000	529,204,000		1,049,204,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.19.04		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	(blank)	(blank)			240,000,000	244,248,000		484,248,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	4.3.2	Meningkatnya Prestasi Olahraga										
	4.3.2.1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga										
2.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional	Medali	30.00	30.00	5,073,837,908	5,163,644,839		10,237,482,747	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	4.3.2.2	Peningkatan Kapasitas Olah Ragawan										
2.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional	Medali	30.00	30.00	530,000,000	539,371,000		1,069,371,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	4.3.2.3	Peningkatan Pelaksanaan Event Olah Raga										
2.19.03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah medali pada event olah raga tingkat daerah dan regional	Medali	30.00	30.00	200,000,000	203,540,000		403,540,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	5	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat					17,221,737,986	17,848,022,749		35,069,760,735		
	5.1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat										
	5.1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin										
	5.1.1.1	Menyediakan Subsidi Dan Bantuan Modal Kepada Masyarakat Miskin										
1.06.02		Program Pemberdayaan Sosial	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang	97.22	97.72	750,000,000	763,275,000		1,513,275,000	DINAS SOSIAL	
3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	104.00	104.00	200,000,000	56.00	500,000,000	56.00	700,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Ekspor Bersih Perdagangan	%	Na	-	352,700,000		358,942,790		711,642,790	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
3.30.06		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Belum Ada data	Belum Ada data	65,320,000	Belum Ada data	66,476,164	Belum Ada data	131,796,164	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
	5.1.2	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS										
	5.1.2.1	Peningkatan Kesejahteraan Pmks										
1.06.03		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat	%	N/A	N/A	30,000,000	N/A	30,531,000	N/A	60,531,000	DINAS SOSIAL
1.06.04		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	25.07	27.00	1,326,000,000		1,349,470,200		2,675,470,200	DINAS SOSIAL
1.06.05		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	55.88	60.00	435,000,000	60.00	442,699,500	60.00	877,699,500	DINAS SOSIAL
1.06.06		Program Penanganan Bencana	Jumlah bangunan evakuasi	Unit	1.00	2.00	280,000,000	2.00	284,956,000	2.00	564,956,000	DINAS SOSIAL

	5.1.3	Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Perempuan										
	5.1.3.1	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan										
2.08.03		Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	%		0.36	25,000,000	0.36	25,442,500	0.36	50,442,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	5.1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Mantan Korbant Dan Korban Konflik										
	5.1.4.1	Peningkatan Kapasitas Kelompok Mantan Korbant Dan Korban Konflik										
1.05.02		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah orang yang mendapat Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang			-	50.00	25,000,000	50.00	25,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	5.1.5	Meningkatnya Ketahanan Keluarga										
	5.1.5.1	Perkuatan Peran Keluarga Dalam Upaya Preventif Terkait Penanganan Persoalan Sosial, Kasus Kekerasan, Narkoba Dll										
1.05.02		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	%	100.00	100.00	104,000,000	100.00	105,840,800	100.00	209,840,800	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Persentase Penegakan PERDA	%	100.00	100.00	1,409,052,936	100.00	1,433,993,173	100.00	2,843,046,109	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
2.08.04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.50	2.00	100,387,050		102,163,901		202,550,951	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.06		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.00	2.00	95,000,000		96,681,500		191,681,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.14.02		Program Pengendalian Penduduk	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	85.00	85.00	95,000,000	90.00	96,681,500	90.00	191,681,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.14.03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Aseptor KB	%	83.00	85.00	2,678,478,000	85.00	2,725,887,061	85.00	5,404,365,061	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.14.04		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2.00	2.00	1,615,600,000	2.00	1,644,196,120	2.00	3,259,796,120	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
	5.2	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat										
	5.2.1	Terwujudnya Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat										
	5.2.1.1	Menyediakan Santunan Kematian Dan Melahirkan Bagi Masyarakat Kurang Sejahtera										
4.01.02		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Adanya regulasi santunan kematian	ada/tidak	Ada	Ada	7,660,200,000	Ada	7,795,785,540	Ada	15,455,985,540	SEKRETARIAT DAERAH

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

	6	Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat					163,611,607,856		166,505,763,315		330,117,371,171	
	6.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat										
	6.1.1	Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup										
	6.1.1.1	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Yang Terjangkau Dan Berkualitas										
1.02.02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	70.00	70.00	22,651,259,852	70.20	23,052,187,151	70.20	45,703,447,003	DINAS KESEHATAN
X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.03	0.03	77,286,042,874	0.03	78,654,005,833	0.03	155,940,048,707	DINAS KESEHATAN
	6.1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat										
	6.1.2.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat										
1.02.03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3.40	3.40	50,000,000	3.41	50,885,000	3.41	100,885,000	DINAS KESEHATAN
	6.1.2.2	Peningkatan Fasilitas Rawat Inap Di Puskesmas										
1.02.04		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100.00	100.00	75,000,000	100.00	76,327,500	100.00	151,327,500	DINAS KESEHATAN
	6.1.2.3	Pemantapan Pola Hidup Bersih Dan Sehat										
1.02.05		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase balita gizi buruk	%	0.70	0.70	1,045,000,000	0.60	1,063,496,500	0.60	2,108,496,500	DINAS KESEHATAN
	6.1.3	Meningkatnya Status Rsu Nagan Raya										
	6.1.3.1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Serta Pelayanan Rsu Sulthan Iskandar Muda										
1.02.02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kinerja pelayanan Rumah Sakit	N/A	N/A	N/A	39,392,752,000	N/A	40,090,003,710	N/A	79,482,755,710	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA
	6.1.3.2	Pemenuhan Persyaratan Akreditasi RSU										
X.XX.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Akreditasi RSU Nagan Raya	AKREDITASI	AKREDITASI	AKREDITASI	23,111,553,130	AKREDITASI	23,518,857,620	AKREDITASI	46,630,410,750	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA
	7	Meningkatkan Pembangunan Infrastrukturberdasarkan Kebutuhan Potensi Dan Kerateristik Wilayah					113,915,996,734		110,510,289,290		224,426,286,024	
	7.1	Menyediakan Infrastruktur, Sarana & Prasarana Sesuai Potensi Wilayah Bagi Peningkatan Ekonomi Masyarakat										
	7.1.1	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Wilayah.										
	7.1.1.1	Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Antar Wilayah										
1.03.10		Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	261.56	286.56	66,996,038,330	311.56	62,803,537,682	311.56	129,799,576,012	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.15.03		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	60.00	70.00	50,000,000	80.00	50,885,000	80.00	100,885,000	DINAS PERHUBUNGAN
	7.1.2	Terwujudnya Pengembangan Kawasan Strategis										
	7.1.2.1	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kawasan Strategis										
1.03.07		Program Pengembangan Permukiman	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9.00	10.00	1,000,000,000	11.00	1,017,700,000	11.00	2,017,700,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.08		Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9.00	10.00	552,000,000	11.00	561,770,400	11.00	1,113,770,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	-	1.00	15,000,000		15,265,500		30,265,500	DINAS PERTANAHAN
2.10.03	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9.00	10.00	25,000,000	11.00	25,442,500	11.00	50,442,500	DINAS PERTANAHAN
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9.00	10.00	10,000,000	11.00	10,177,000	11.00	20,177,000	DINAS PERTANAHAN
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	belum Ada	belum Ada	41,000,000	belum Ada	41,725,700	belum Ada	82,725,700	DINAS PERTANAHAN
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Belum Ada data	Belum Ada data	19,000,000	Belum Ada data	19,336,300	Belum Ada data	38,336,300	DINAS PERTANAHAN
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Belum Ada data	Belum Ada data	14,500,000	Belum Ada data	14,756,650	Belum Ada data	29,256,650	DINAS PERTANAHAN
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9.00	10.00	6,500,000	11.00	6,615,050	11.00	13,115,050	DINAS PERTANAHAN
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Belum Ada data	Belum Ada data	17,000,000	Belum Ada data	17,300,900	Belum Ada data	34,300,900	DINAS PERTANAHAN
2.10.12	Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	belum Ada	belum Ada	30,000,000	belum Ada	30,531,000	belum Ada	60,531,000	DINAS PERTANAHAN
2.10.13	Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	belum Ada	belum Ada	35,000,000	belum Ada	35,619,500	belum Ada	70,619,500	DINAS PERTANAHAN
2.10.14	Program Pengembangan Dan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pertanian	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,046	belum Ada	3,000,000	belum Ada	3,053,100	belum Ada	6,053,100	DINAS PERTANAHAN
		Persentase luas lahan yang bersertifikat	%	belum Ada	belum Ada	6,000,000	belum Ada	6,106,200	belum Ada	12,106,200	DINAS PERTANAHAN
2.10.15	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Belum Ada data	Belum Ada data	11,000,000	Belum Ada data	11,194,700	Belum Ada data	22,194,700	DINAS PERTANAHAN
2.10.16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	Belum Ada data	Belum Ada data	11,000,000	Belum Ada data	11,194,700	Belum Ada data	22,194,700	DINAS PERTANAHAN
2.10.17	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	Belum Ada data	Belum Ada data	35,000,000	Belum Ada data	35,619,500	Belum Ada data	70,619,500	DINAS PERTANAHAN
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	(blank)	(blank)			13,300,000		13,535,410		26,835,410	DINAS PERTANAHAN
	7.1.3 Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Pertanian										
	7.1.3.1 Peningkatan Dan Pembangunan Kualitas Infrastruktur Pertanian										
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	5.70	5,700.00	2,600,000,000	5,700.00	2,646,020,000	5,700.00	5,246,020,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	60.00	70.00	158,873,769	80.00	161,685,835	80.00	320,559,604	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	7.1.4 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Untuk Pengurangan Resiko Bencana										
	7.1.4.1 Peningkatan Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Pengurangan Resiko Bencana										
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	%	99.10	99.94	650,000,000	99.49	661,505,000	99.49	1,311,505,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah pos pemadam kebakaran	Unit	3.00	1.00	3,400,000,000	1.00	3,460,180,000	1.00	6,860,180,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | BAB VI

	7.1.5	Meningkatnya Akses Sanitasi Dan Air Minum Bagi Masyarakat										
	7.1.5.1	Peningkatan Akses Sanitasi Dan Air Minum										
1.03.03		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase akses air minum Perpipaan	%	72.24	76.74	443,673,109	81.04	451,526,123	81.04	895,199,232	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.04		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	367,800,000	80.04	375,310,000	80.04	743,110,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.03.05		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	10,000,000	80.04	10,177,000	80.04	20,177,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	4,500,000,000	80.04	4,579,650,000	80.04	9,079,650,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.06		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9.00	10.00	220,000,000	11.00	223,894,000	11.00	443,894,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.11.11		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	1,330,000,000	80.04	1,353,541,000	80.04	2,683,541,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	7.1.6	Tersedianya Rumah Layak Huni										
	7.1.6.1	Penyediaan Rumah Layak Huni										
1.04.02		Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	100.00	200.00	1,700,000,000	200.00	2,247,170,400	200.00	3,947,170,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	7.1.7	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik.										
	7.1.7.1	Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau										
1.03.12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	Ada	Ada	200,000,000	Ada	203,540,000	Ada	403,540,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada	Ada	500,000,000	Ada	508,850,000	Ada	1,008,850,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11.02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	19.00	19.00	100,000,000	27.00	101,770,000	27.00	201,770,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase ruang terbuka hijau	%	19.00	19.00	242,000,000	27.00	246,283,400	27.00	488,283,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau	%	19.00	19.00	210,000,000	27.00	213,717,000	27.00	423,717,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ruang terbuka hijau	%	19.00	19.00	30,000,000	27.00	30,531,000	27.00	60,531,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase ruang terbuka hijau	%	19.00	19.00	25,000,000	27.00	25,442,500	27.00	50,442,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.15.02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	669.00	724.00	140,000,000	779.00	142,478,000	779.00	282,478,000	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase layanan angkutan darat	%			630,000,000		641,151,000		1,271,151,000	DINAS PERHUBUNGAN
	7.1.7.2	Peningkatan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau										
1.03.09		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase ruang terbuka non hijau	%	N/A	N/A	2,000,000	-	2,035,400	-	4,035,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	7.1.8	Tersedianya Infrastruktur Yang Mendukung Ekonomi Kreatif										
	7.1.8.1	Penyediaan Infrastruktur Yang Mendukung Ekonomi Kreatif										
1.04.05		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	60.00	70.00	27,566,311,526	80.00	27,492,464,840	80.00	55,058,776,366	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
							1,132,706,714,812		1,147,577,293,137		2,280,284,007,949	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran.

Dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program-program prioritas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah kabupaten Nagan Raya menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPK di lingkungan Pemerintah kabupaten Nagan Raya. Untuk lebih jelasnya di uraikan pada table 7.1 dibawah ini. Dan Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan pemerintah kabupaten Nagan Raya tahun 2018-2020 diuraikan dalam tabel 7.2 dibawah ini. Serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan pemerintah kabupaten Nagan Raya tahun 2021-2022 diuraikan dalam tabel 7.3 dibawah ini.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020

No.	URAIAN	TARGET		
		2018	2019	2020
1	KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	982,156,185,125,24	1,125,215,929,047,06	1,140,836,680,293.66
2	BELANJA	987,053,457,994.62	1,126,913,767,809.17	1,140,836,680,293.66
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	552,953,483,231.62	564,336,407,266.48	598,566,927,386.87
2.1.1	Belanja Pegawai	332,897,992,235.62	324,602,861,947.48	330,170,473,635.77
2.1.2	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.3	Belanja Hibah	2,502,800,000.00	3,266,000,000.00	2,346,112,920.70
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2,584,750,000.00	4,869,770,000.00	5,000,000,000.00
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	413,645,496.00	1,312,109,099.00	3,693,609,002.00
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya	212,085,164,500.00	229,074,230,220.00	255,356,731,828.40
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	2,054,898,500.00	1,211,436,000.00	2,000,000,000.00
2.1.8	Belanja Transfer ke Pemerintah Pusat	414,232,500.00	-	-
2.2	Belanja Langsung	434,099,974,763.00	562,577,360,542.69	542,269,752,906.79
2.2.1	Belanja Pegawai	71,279,511,662.00	85,183,725,378.00	91,119,460,496.33
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176,198,493,112.00	183,951,071,757.64	179,430,996,709.68
2.2.3	Belanja Modal	186,621,969,989.00	293,442,563,407.05	271,719,295,700.78

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2022

NAMA REKENING	2021	2022
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	1,132,706,714,812.37	1,147,577,293,137.56
BELANJA DAERAH		
Belanja Operasi:	556,828,528,098.60	568,397,700,659.73
Belanja Pegawai	373,991,581,854.00	388,951,245,128.16
Belanja Barang dan Jasa	175,021,989,666.07	170,721,321,446.12
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	1,685,317,157.58	1,210,638,199.29
Belanja Bantuan Sosial	6,129,639,420.95	7,514,495,886.16
Belanja Modal	330,592,366,795.27	333,880,871,347.07
Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000.00	2,511,053,484.36
Belanja Transfer:	242,785,819,918.50	242,787,667,646.40
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3,695,455,806.50	3,697,303,534.40
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Daerah Desa Lainnya	239,090,364,112.00	239,090,364,112.00
JUMLAH BELANJA DAERAH	1,132,706,714,812.37	1,147,577,293,137.56

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

Tabel 7.3
Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2018-2020
Nomenklatur Program Berdasarkan PERMENDAGRI NO. 13 Tahun 2006

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMK	Target						SKPD Penanggung Jawab	
					2018		2019		2020			
					Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD											
1 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			80,047,665,900		79,376,088,115		69,661,904,008		78,278,409,875		Seluruh SKPK
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor		2,891		belum ada		2,82			
		Nilai LAKIP	Nilai		C		C		C			
1 01 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			230,471,336,875		59,710,147,333		89,361,371,622		96,030,223,418		Seluruh SKPK
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor		2,891		belum ada		2,82			
		Nilai LAKIP	Nilai		C		C		C			
1 01 4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			316,847,000		2,398,947,150		2,648,203,049		2,702,733,955		Seluruh SKPK
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan		18		33		40			
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan		421		433		195			
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan		2,091		2,081		2,037			
	URUSAN WAJIB					264,761,179,492		292,089,137,615		#REF!		
1 01	Pendidikan					23,138,785,208		5,970,658,000		7,150,441,362		
1 01 1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	-	25.61	25,200,000	25.86	1,041,965,000	40.5	90,698,000		Disdik
1 01 2	Program Peningkatan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	-	25.61	-	25.86	-	40.5			Disdik
1 01 3	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			21,191,600,000		18,550,341,758		2,815,200,000		4,325,610,000		Disdik
		Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%		94.33		97.74		93.50			
		Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%		67,44		79,88		81,5			
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index		66.18		67.18		74.50			
		Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index		54.31		55.39		81.00			
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index		51.15		49.00		70.50			
		Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index		43.57		41.32		71.00			

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	01	4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		%	3,603,400,000		4,389,459,200		1,933,101,000		2,653,283,362	Disdik
				APK SD/MI/Paket A	%		79.71		78.30		95.00		
				APK SMP/MTs/Paket B	%		98.27		91.81		83.00		
				APK SMA/SMK/	%		88.35		73.75		90.00		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%		99.71		81.88		95		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%		91.82		53.67		83		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%		0.27		0.24		95		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%		1.55		1.45		83		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%		98.03		97.50		85.50		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%		96.54		90.10		84.50		
				Angka rata-rata lama sekolah	Tahun		8.21		8.01		8.50		
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun		14.44		14.56		15.00		
				Diploma I/II/III	%		3.50		4.00		4.50		
				Diploma IV/S1	%		45		50		50		
				S2/S3	%		1.50		2.00		2.50		
1	01	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Non Formal dan Informal			-		-		-			Disdik
				APK SD/MI/Paket A	%		79.71		78.30		95.00		
				APK SMP/MTs/Paket B	%		98.27		91.81		83.00		
				APK SMA/SMK/	%		88.35		73.75		90.00		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%		99.71		81.88		95		
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%		91.82		53.67		83		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%		0.27		0.24		95		
				Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%		1.55		1.45		83		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%		98.03		97.50		85.50		
				Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%		96.54		90.10		84.50		
				Angka rata-rata lama sekolah	Tahun		8.21		8.01		8.50		
				Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun		14.44		14.56		15.00		
				Diploma I/II/III	%		3.50		4.00		4.50		
				Diploma IV/S1	%		45		50		50		
				S2/S3	%		1.50		2.00		2.50		
1	01	6	Program Peningkatan Mutu Ruang Sekolah			-		-		-			Disdik
				Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%		95.55		97.15		97.5		
				Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%		94.31		98.2		98.3		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	01	7	Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan	Angka Melek Huruf	%	-	96.25	-	98.00	-	97.50		UPTD SKB Disdik
1	01	8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			106,630,000		84,634,250		73,722,000		19,500,000	UPTD Seunagan
				Tamat SD Sederajat	%		99		99		100		
				Tamat SLTP sederajat	%		90		90.56		100		
1	01	9	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	%	-	96.25	89,150,000	98.00	106,670,000	97.50	61,350,000	UPTD SKB Disdik
1	02		Kesehatan			64,481,581,154		75,417,659,183		96,343,404,926		143,589,414,461	
1	02	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	%	4,074,877,768	80.30	2,399,288,220	74.42	2,618,361,276	92.95	1,648,445,900	Dinkes
1	02	2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	%		68.89	1,809,817,535	69.14	1,766,474,950	69.05	3,108,027,600	Dinkes & BLUD
1	02	3	Program Pengawasan Obat dan Makanan			5,000,000		-		-		159,328,000	Dinkes
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%		89.84		100.00		64.3		
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%		85.65		92.82		69.32		
1	02	4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			84,500,000		30,000,000		189,670,000			Dinkes
				Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita		18.60		17.31		18.56		
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%		59.90		40.99		78.46		
1	02	5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Stunting dan Balita Gizi Buruk	%	100,000,000	0.10	-	0.10	235,566,320	0.06	1,644,190,000	Dinkes
1	02	6	Program Penyehatan Lingkungan	Angka usia harapan hidup	%	89,535,000	68.89	-	69.14	-	69.05		Dinkes
1	02	7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			418,866,000		607,446,000		1,440,418,000		3,986,429,000	Dinkes
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%		89.84		100.00		64.3		
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%		85.65		92.82		69.32		
1	02	8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			574,000,000		437,701,673		-		9,942,366,800	BLUD / Dinkes
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk		3.87		4.13		4.39		
				Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.03		0.03		0.03		
				Dokter Umum	/1000 Penduduk		0.35		0.29		0.24		
				Dokter Spesialis	/1000 Penduduk		0.06		0.05		0.28		
				Dokter Gigi	/1000 Penduduk		0.36		0.08		0.18		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	02	9	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		22,657,044,386		11,592,982,722		4,923,095,759		17,535,867,000	Dinkes	
			Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.08		0.08		0.09			
			Rasio poliklinik per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.05		0.05		0.05			
			Rasio pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.28		0.28		0.31			
			Cakupan pembantu puskesmas	%		21.17		21.17		21.17			
1	02	10	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		4,300,000,000		9,906,781,647		18,574,603,385		45,599,385,361	BLUD	
			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk		140.00		160.20		91.08			
			Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk		3.04		2.99		2.25			
1	02	11	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan pembantu puskesmas	%	267,570,000	21.17	49,982,000	21.17	11,534,198,568	21.17	16,024,436,800	Dinkes
1	02	12	Program Pengembangan Kesehatan	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	7,276,038,000	53.72	8,620,343,865	95.2	11,594,184,087	95.23	129,210,000	Dinkes
1	02	13	Program Pendampingan Akreditasi Puskesmas		1,225,640,000		1,631,000,000		-		936,382,000	Dinkes	
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		11.00		7.20		7.5			
			Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran		7.30		6.28		6.14			
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		12.00		8.94		36.37			
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		10.00		12.58		12.59			
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		28.40		331.02		153.0333			
1	02	15	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan		-		-		-			RSUD	
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.01		0.01		0.01			
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk		3.87		4.13		4.39			
			Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.03		0.03		0.03			
			Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.08		0.08		0.09			
			Rasio poliklinik per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.05		0.05		0.05			
			Rasio pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.28		0.28		0.31			
			Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita		18.60		17.31		18.56			

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	02	17	Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Puskesmas			-		-		-		Dinkes	
			Rasio puskesmas per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.08		0.08		0.09			
			Rasio poliklinik per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.05		0.05		0.05			
			Rasio pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.28		0.28		0.31			
1	02	18	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan			-		-		-		Dinkes	
			Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk		3.87		4.13		4.39			
			Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.03		0.03		0.03			
			Dokter Umum	/1000 Penduduk		0.35		0.29		0.24			
			Dokter Spesialis	/1000 Penduduk		0.06		0.05		0.28			
			Dokter Gigi	/1000 Penduduk		0.36		0.08		0.18			
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%		45.63		80.00		53.01			
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%		82.79		85.00		87.00			
1	02	19	Program Pelaksanaan Operasional BLUD			23,000,000,000		37,454,860,248		43,238,618,581		42,000,000,000	BLUD
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk		0.01		0.01		0.01			
			Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%		36.42		47.38		19.03			
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%		100		100		100			
			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%		100		100		100			
1	02	20	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			-		8,400,000				Dinkes	
			Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		11.00		7.20		7.5			
			Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran		7.30		6.28		6.14			
			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		12.00		8.94		36.37			
			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		10.00		12.58		12.59			
			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran		28.40		331.02		153.0333			
			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%		100		100		100			

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

			Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk		1.82		0.60		1.98			
1	02	21	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			-	213,340,000		53,214,000		775,346,000	Dinkes	
			Persentase penurunan angka kematian ibu dan bayi	/100000 Kelahiran		28.40		331.02		153.0333			
			Cakupan kunjungan bayi	%		84.1		117.61		86.82			
			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%		81.18		82.05		95.81			
			Cakupan pelayanan nifas	%		82.03		99.8		94.39			
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%		79.74		100.00		76.71			
			Cakupan pelayanan anak balita	%		91.44		107.00		87.91			
1	02	22	Program Kesehatan Daerah terampil, Perbatasan dan Kepulauan (PDTK) termasuk Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan (PDBK)	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	148,510,000	59.90	62,330,000	40.99		78.46	Dinkes	
1	02	23	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase layanan kepada masyarakat yang terlayani dengan baik	%	-	100	13,350,000	100	175,000,000	100	100,000,000	Dinkes
1	02	24	Program Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			260,000,000		580,035,273		-		BLUD	
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk			0.01		0.01		0.01		
			Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk			0.03		0.03		0.03		
1	03		Pekerjaan Umum			93,709,206,354		101,547,817,595		113,409,355,141		157,387,234,319	
1	03	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Akses jalan dan jembatan berfungsi dengan baik dan lancar	%	72,609,723,504	221.932	52,691,308,145	242.56	105,768,721,263	261.56	118,348,525,270	PUPR
1	03	2	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	-	221.932	-	242.56	1,279,500,465	261.56	5,149,988,135	Perkim
1	03	3	Program Pembangunan Turap/Takud/Brojong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	-	221.932	-	242.56	878,765,872	261.56	733,002,972	PUPR
1	03	4	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	1,000,000,000	221.932	3,948,476,500	242.56	1,592,873,437	261.56	8,479,192,932	PUPR
1	03	5	Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Takud/Brojong	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%		221.932	-	242.56		261.56		PUPR
1	03	6	Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Rasio Index	100,000,000	0.072	-	0.163	100,000,000	0.173	199,765,000	PUPR
1	03	7	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan evakuasi	Km	-	0	-	0		1		PUPR
1	03	8	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya sistem informasi dan data base untuk mendukung perencanaan yang baik	%	-	60	-	80	-	60	50,000,000	PUPR
1	03	9	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah kawasan Strategis	%	1,192,088,000	9	399,573,000	9	251,984,000	9	446,438,000	PUPR
1	03	10	Program pengembangan dan pengelabuan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Adanya pembangunan, peningkatan saluran irigasi dan galan saluran pembuang	Ha	17,036,243,850	9,051	42,870,716,550	9,051	-	5.700	17,696,355,381	PUPR
1	03	11	Program pengendalian banjir			1,571,151,000		1,637,743,400		3,537,510,104		6,283,966,629	PUPR
			Panjang Jalan evakuasi	Km			0		0		1		
			Jumlah bangunan evakuasi	Unit			0		0		1		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1 06		Perencanaan Pembangunan				5,572,318,420		7,644,519,500		5,687,357,500			
1	06	1	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	%	60	-	80	1,376,663,800	60	Bappeda & Satpol PP dan WH		
1	06	2	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Jumlah Kawasan Strategis	%	-	9	-	9	9	Bappeda		
1	06	3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah						475,149,993	484,230,000	234,005,000	Bappeda	
				Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	tidak		Ada		ada			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada		tidak		ada			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/tidak	Ada		Ada		ada			
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada		Ada		ada			
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPK	%	Ada		Ada		ada			
				Penjabaran Konsistensi Program RPK kedalam APBK	%	Ada		Ada		ada			
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	Ada		Ada		ada			
				Persentase implementasi rencana kelmbangan.	%	25		25		25			
				Penerapan SIDA:	Sudah/ Belum	Belum		Belum		Sudah			
				Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A		N/A		N/A			
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	30		30		30			
1	06	4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kawasan Strategis	%	-	9	2,553,142,166	9	2,214,544,000	9	2,214,544,000	Bappeda/ Setdakab & Kecamatan
1	06	5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	-	60	62,125,000	70	453,024,000	80	925,658,000	Bappeda
1	06	6	Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat Partisipasi Keterwakilan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	%	-	60	1,415,291,261	70	1,995,588,700	80	1,270,523,500	Bappeda
1	06	7	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam						241,000,000	173,050,000		Bappeda	
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada		Ada		Ada			
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/tidak	Ada		Ada		Ada			
				Panjang Jalan evakuasi	Km	0		0		1			
				Jumlah bangunan evakuasi	Unit	0		0		1			

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	06	8	Program Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana			-		825,610,000		947,419,000		1,042,627,000	Bappeda
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/tidak	Ada			Ada		Ada		
				Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Ada/tidak	Ada			Ada		Ada		
								850,831,000		798,805,000		1,523,220,000	
1	07	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			-		671,410,000		798,805,000		1,007,270,000	Dishub
				Angkutan Darat	Trayek		3			3		6	
				Angkutan Udara	Frek		1271			962		1463	
				Persentase layanan angkutan darat	%		7.13			7.93		9.77	
				Angkutan Udara	Orang		37,894			37,225		26,747	
				Jumlah Bandar Udara	Unit		1			1		1	
				Jumlah Terminal Tipe B	Unit		1			4		1	
				Jumlah Terminal Tipe C	Unit		1			4		0	
				Bandara	Kg		217.965			134.338		160.480	
1	07	2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas			-		179,421,000		-		515,950,000	Dishub
				Rasio jin trayek	Indeks		1.8			2		3.5	
				Jumlah uji kir angkutan umum	Unit		420			518		669	
				Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		6.77			7.95		11.01	
				Pemasangan Rambu-rambu	%		33			37		44	
				Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index		83.00			87.67		82.98	
								2,296,731,360		4,151,513,368		2,052,221,904	
1	08	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			-		356,612,500		2,947,097,000			DLH
				Jumlah kawasan Strategis	%		9			9		9	
				Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	tidak ada			tidak ada		tidak ada		
				Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/tidak ada	tidak ada			tidak ada		tidak ada		
1	08	2	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			-		93,091,250		290,138,200		561,785,000	DLH
				Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/tidak ada	tidak ada			tidak ada		tidak ada		
				Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/tidak ada	tidak ada			tidak ada		tidak ada		
				Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/tidak ada	tidak ada			tidak ada		tidak ada		
1	08	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			-	9	6,990,000	9	23,658,000	9	112,230,000	DLH
1	08	4	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan			-	tidak ada		tidak ada		tidak ada		DLH
1	08	5	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			-	10	1,840,037,610	11	890,620,168	12	1,378,206,904	DLH

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1 09	Pertanahan					38,972,000		868,507,000		165,806,300			
1 09 1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah			-		17,198,000		-			Setdakab/Kec. Seunagan Timur		
		Persentase luas lahan bersertifikat	%		N/A		N/A		N/A				
		Penyelesaian kasus tanah negara	%		N/A		N/A		N/A				
1 09 2	Program Pendataan Tanah-Tanah Asset Milik Pemerintah Daerah	Penyelesaian kasus tanah negara	%	-	N/A	21,774,000	N/A	868,507,000	N/A	165,806,300	Setdakab		
1 10	Kependudukan dan Catatan Sipil					945,902,851		1,234,856,565		#REF!			
1 10 1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	89.31		578,926,380	89.91	770,698,583	90.67	#REF!	Disdukcapil/Kec.		
1 10 2	Program Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan					366,976,471		464,157,982		259,932,500	Discapil		
		Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	89.31			89.91		90.67				
		Rasio bayi berakte kelahiran	%	81.13			81.13		91.95				
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah			Sudah		Sudah				
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	89.31			89.91		90.95				
1 11	Pemberdayaan Perempuan					91,423,800		560,995,313		283,210,000			
1 11 1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			-		91,423,800		422,445,313		205,510,000	DPMGP4		
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52.30			52.35		52.00				
		Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16.00			16.50		16.00				
1 11 2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	%	-	0.30		-	0.20		138,550,000	0.36	77,700,000	DPMGP4
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera					2,734,871,254		4,181,577,871		5,346,439,000			
1 12 1	Program Keluarga Berencana			-		19,260,000		135,545,000		68,123,000	DPMGP4		
		Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2.15			2.17		2.15				
		Total Fertility Rate (TFR)	%	2			2.5		2.5				
		Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3			2		2				
		Rasio Akseptor KB	%	86			83		83				
		Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	86.0			83.0		83.0				
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	/1.000 perempuan	0.87			0.8		0.83				

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	12	2	Program Keluarga Sejahtera			-		2,715,611,254		4,046,032,871		5,278,316,000	DPMGP4
				Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak		3		2		2		
				Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%		36.48		24.46		24.46		
1	13		Sosial					3,098,281,332		8,390,396,626		#REF!	
1	13	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	-	0	1,760,779,000	127	1,370,581,500	231	#REF!	DINAS SOSIAL & SETDAKAB
1	13	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			-		327,033,332		729,932,900		320,909,000	DINAS SOSIAL
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		N/A		N/A		N/A		
				Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang		N/A		N/A		N/A		
				Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit		N/A		N/A		N/A		
				Persentase PMKS yang tertangani	%		N/A		N/A		N/A		
				Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada		ada		ada		ada		
1	13	3	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	Anak	-	N/A	860,088,000	N/A	3,126,575,026	N/A	2,195,765,380	DINAS SOSIAL
1	13	4	Program Pembinaan Anak Terlantar	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	-	Ada		Ada		Ada		
1	13	5	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	Orang	-	N/A		N/A		N/A		
1	13	6	Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (eks. Narapina, PSK , Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	PMKS yang tertangani	Ada/ Tidak ada	-	Ada		Ada		Ada		
1	13	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			-		150,381,000		3,163,307,200		2,854,520,000	Dinsos/Setdakab
				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		N/A		N/A		N/A		
				Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang		N/A		N/A		N/A		
				Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	Orang		N/A		N/A		N/A		
				Jumlah Panti Asuhan (Permakanan Panti)	Anak		N/A		N/A		N/A		
				Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit		N/A		N/A		N/A		
1	14		Tenaga Kerja					83,400,000		84,195,000		1,213,020,000	
1	14	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Angka Pengangguran	%	-	3,55	41,800,000	4,11	39,695,000	4	1,110,050,000	Disnakertrans
1	14	2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	-	20.18		17.24		19.19		Disnakertrans
1	14	3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			-		41,600,000		44,500,000		102,970,000	Disnakertrans
				Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus		10.00		13.00		4.00		
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%		7,674		7,876		3818		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	14	4	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Angka Pengangguran	%	-	3,55	13,000,000	4,11		4		Disnakertrans
1	15		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					487,186,000		576,799,000		206,525,000	
1	15	1	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	-	150	-	200		152		Disperindagkop dan UKM
1	15	2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	-	70.25	304,736,000	75.35	213,385,000	82	104,425,000	Disperindagkop dan UKM
1	15	3	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			-		182,450,000		363,414,000		102,100,000	Disperindagkop dan UKM
				Persentase koperasi aktif	%		50.30		73.88		75.00		
				Persentase koperasi tidak aktif	%		49.70		26.12		25.00		
1	16		Penanaman Modal Daerah					124,985,000		168,751,000		73,294,000	
1	16	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	-	215	124,985,000	207	97,621,000	218	45,744,000	DPMPTSP
1	16	2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat			-				71,130,000		27,550,000	DPMPTSP
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor		4		2		6		
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)		215		207		218		
				Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)		-52.08147		-14.16		14164829223.00		
1	16	3	Program Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN / PMA			-							DPMPTSP
				Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor		4		2		6		
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)		215		207		218		
				Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)		-52.08		-14.16		14164829223.00		
1	17		Kebudayaan					2,297,606,000		96,350,000		122,990,000	
1	17	1	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Terjalannya Kerja Sama pengelolaan kekayaan Budaya	%	-	3	2,297,606,000	4	96,350,000	0	122,990,000	Disbudparpora

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	18	Pemuda dan Olah Raga				5,038,670,650		9,274,707,454		10,944,515,224			
1	18	1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	-	16	949,860,000	28	753,705,000	32	1,033,974,000	Disbudparpora
1	18	2	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	-	16	541,805,000	28	485,686,228	32	735,113,486	Disbudparpora
1	18	3	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecapan Hidup Pemuda	Angka Pengangguran	%	-	3,55	-	4,11	22,240,000	4		Disbudparpora
1	18	4	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			-		62,960,000				60,910,000	Disbudparpora
				Jumlah atlet berprestasi	Atlet		17		19		22		
				Jumlah prestasi olahraga	Prestasi		17		22		8		
1	18	5	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga			-		-		22,870,000			Disbudparpora
				Cakupan pembinaan olahraga			100		100		100		
				Cakupan pembinaan atlet muda			100		100		100		
1	18	6	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	%	-	100	-	100	1,047,592,000	100	3,038,412,940	Disbudparpora
1	18	7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga			-		3,484,045,650		6,942,614,226		6,076,104,798	Disbudparpora
				Cakupan pembinaan olahraga	%		100		100		100		
				Cakupan pembinaan atlet muda	%		100		100		100		
				Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%		88.30		89.98		90.48		
1	19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						786,369,584		2,344,266,204		807,231,000	
1	19	1	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan			-		218,490,000		153,520,000		108,922,500	Kesbangpol
				Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan		Ada		Tidak Ada		Ada		
				Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang		N/A		N/A		N/A		
				Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang		N/A		N/A		N/A		
				Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang		N/A		N/A		N/A		
1	19	2	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan			-		18,000,000		80,484,000		75,068,500	Kesbangpol
				Kegiatan pembinaan politik daerah	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
				Jumlah LSM	LSM		5		4		4		
1	19	3	Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Persentase Pemahaman Politik Bagi Masyarakat	Kegiatan	-	0	95,520,000	0	886,673,000	0	61,190,000	Kesbangpol
1	19	4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			-		433,395,000		796,300,200		550,050,000	Satpol PP dan WH
				Terlaksananya Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	%		98.85		98.85		99.10		
				Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%		98.85		98.85		99.10		
				Persentase Penegakan PERDA	%		100		100		90		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	19	5	Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	-	Ada	-	Tidak ada	427,289,000	Ada	12,000,000	Satpol PP dan WH
1	19	6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	-	98.85	20,964,580	98.85		99.10		MPD
1	20		Pemerintahan Umum					28,149,325,924		27,829,420,432		#REF!	
1	20	1	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			-		2,755,339,764		2,735,181,704		2,074,530,000	Sekwan
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
				Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
1	20	2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			-		379,486,000		637,857,000		991,912,500	Setdakab
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor		2,891		belum ada		2,82		
				Nilai LAKIP	Nilai		C		C		C		
1	20	3	Program Peningkatan Kesehatan KDH/WKDH	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	-	2,891	79,350,000	belum ada	-	2,82	176,810,000	Setdakab
1	20	4	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah			-		14,614,491,998		11,176,310,586		#REF!	Setdakab/BPKD/Baitul Mall dan Sekwan
				Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP		WTP		WTP		WTP		
				Persentase SILPA	%		0.702		0.472		0.55		
				Persentase SILPA terhadap APBD	%		0.698		0.471		0.50		
				Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%		14.99		9.84		7.00		
				Persentase belanja pendidikan (20%)	%		22,05		21,34		21.69		
				Persentase belanja kesehatan (10%)	%		15,69		15,69		19.08		
				Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%		0.79		1,00		0.87		
				Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%		0,04		0,12		15.00		
				Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	20	5	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengeluaran Keuangan Kabupaten/Kota	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	%	-	WTP	1,351,376,122	WTP	902,430,528	WTP	628,805,000	BPKD
1	20	6	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Kab. NaganRaya	Level	-	2	2,233,040,000	2	1,913,525,000	2	1,913,525,000	Inspektorat
1	20	7	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur	Level	-	2	980,879,140	2	788,425,591	2	453,820,000	Inspektorat
1	20	8	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan prosedur pengawasan	Level	-	2	21,690,000	2		2	160,438,059	Inspektorat
1	20	9	Program Pengelolaan pengaduan masyarakat	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	-	60		80		60		Setdakab
1	20	10	Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah			-		13,500,000		7,045,800		12,900,000	Setdakab
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,891		belum ada		2,82			
				Nilai LAKIP	Nilai	C		C		C			
1	20	11	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			-		465,989,500		761,801,000		665,050,000	Setdakab
				Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak		tidak		Ada		ada		Bappeda
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak		Ada		tidak		ada		Bappeda
				Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPKP yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak		Ada		Ada		ada		Bappeda
				Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak		Ada		Ada		ada		Bappeda
1	20	12	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah kawasan Strategis	%	-	9	264,539,250	9	432,856,500	9	443,292,300	Setdakab/Kecamatan
1	20	13	Program Peningkatan Kapasitas Pengeluaran Keuangan dan Aset Daerah	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	%	-	WTP	669,338,000	WTP	777,687,330	WTP	547,250,000	BPKD
1	20	14	Program Pelayanan Keagamaan	Menurunnya pelanggaran syariat islam	%	-		2,040,923,400		3,905,986,794		2,201,220,000	Satpol PP dan WH, Syariat Islam, MPU, Baitul Mal, Kecamatan dan Setdakab
				Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang		31		32		35		
				Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid		48		49		50		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	20	15	Program Peningkatan dan Pengawasan Syariah Islam	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariah Islam	%	-	100	319,208,500	100	186,807,200	70	356,055,000	Dinas Syariah Islam
1	20	16	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Kehidupan Beragama	Meningkatnya Mutu sumber Daya manusia dan Peningkat Kualitas pelayanan Dalam Kehidupan Beragama	Orang	-	23	999,334,250	30	3,304,752,439	70	1,352,100,000	Dinas Syariah Islam
1	20	17	Program Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Sosial kemasyarakatan Yang di Bina	Kelompok	-	222	78,160,000	222	117,049,500	222	84,900,000	Dinas Syariah Islam
1	20	18	Program Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum	Kegiatan pembinaan politik daerah	Ada/Tidak	-	Ada	357,500,000	Tidak Ada		Ada	463,600,000	Setdakab/Sekwan
1	20	19	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			-							SEKWAN
				Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
				Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
				Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak		Ada		Ada		Ada		
1	20	20	Program Peningkatan pengkaderan Ulama	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	-	160	154,180,000	164	104,685,000	200		MPU
1	20	21	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan			-							MPU
				Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama islam	%		83		85		100		
				Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama islam	%		80		82		100		
				Pembinaan Dinul Islam	Orang		271		270		280		
1	20	22	Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan Agama Islam	Meningkatnya kualitas tenaga tajhid mayat dan kader islam lainnya	Orang	-	23		30		50		Kecamatan
1	20	23	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat			-							Kecamatan
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok		222		222		222		
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%		100		100		100		
				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%		100		100		100		

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	20	24	Program Pengembangan Penguatan Syariat Islam	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam	%	-	100	371,000,000	100	77,018,460	70	386,290,000	Kecamatan
1	20	25	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Gampong	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	WTP		WTP	-	WTP		WTP	37,900,000	Kecamatan
1	20	26	Program Pembinaan Mutu Pendidikan Dayah	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak		Ada	-	Ada		Ada		Dinas Syariat Islam, MPU dan MPD
1	20	27	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Bidang Pemberdayaan santri-Dayah Terpadu)	Persentase dayah yang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%		10	0	11		57		Dinas Syariat Islam
1	21		Kepegawaian					1,843,575,500		1,843,575,500		1,843,575,500	
1	21	1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Kualitas Aparatur	%			1,843,575,500		1,843,575,500		1,843,575,500	BKPSDM & Setdakab
				Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	0.00			0.004		0.01		
				Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.040			0.038		0.05		
				Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120 jam			120 jam		120 jam		
1	22		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					2,076,049,488		2,417,739,032		1,982,969,765	
1	22	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan					828,500,000		903,953,000		344,678,000	DPMGP4
				Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222			222		222		
				Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100			100		100		
				Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100			100		100		
1	22	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa					1,247,549,488		1,468,986,032		1,411,017,765	DPMGP4 & Kec.
				Persentase LSM aktif	%	100			100		100		
				Persentase LPM Berprestasi	%	N/A			N/A		100		
				Persentase PKK aktif	%	100.00			100.00		100		
				Persentase Posyandu aktif	%	100			100		100		
				Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	N/A			N/A		100		
				Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	N/A			N/A		100		
1	22	3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100		-	100	44,800,000	100	227,274,000	MAA
1	23		Statistik					27,750,000		56,425,800		155,870,000	
1	23	1	Program Pengembangan Data / Informasi Statistik Sektor	Persentase tersedianya data yang akurat	%	60		27,750,000	80	56,425,800	60	155,870,000	Diskominfo

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

1	24	Kearsipan					119,570,000		344,455,500		460,725,000	
1	24	1	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan				-					Perpustakaan & Arsip
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%		1,55		2,62		2.70		
			Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang		1		2		2		
			Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang		2		2		2		
1	24	2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah				-		214,776,500		46,890,000	Perpustakaan & Arsip
			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%		1,55		2,62		2.70		
			Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang		1		2		2		
1	24	3	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi				41,925,000	2	-	2	144,525,000	Perpustakaan & Arsip
			Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang		2						
1	24	3	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan				77,645,000		129,679,000		269,310,000	Perpustakaan & Arsip
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi		31,456		32,469		32,598		
			Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk		0,42		0,42		0.42		
			Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang		1.023		1.023		700		
			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang		1210		925		500		
			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul		7,095		7,595		7,724		
1	25	Komunikasi dan Informatika					2,416,286,765		1,987,443,000		2,760,635,700	
1	25	1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	85	564,825,000	85	316,341,000	85	1,001,099,700	Diskominfo & Setdakab
1	25	2	Program Layanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	85	741,138,000	85	510,833,000	85		Diskominfo
1	25	3	Program Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	60	50,300,000	80	-	60		Setdakab
1	25	4	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	50	1,018,098,765	50	1,160,269,000	50	1,759,536,000	Setdakab/DPMTSP
1	25	5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Keterbukaan Informasi Layanan Publik	%	60	41,925,000	80	-	60		Arsip dan Pustaka

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2		Urusan Pilihan				20,170,134,660		25,897,514,049		30,523,565,134	
2	01	Pertanian				10,592,881,666		16,306,010,139		18,823,061,767	
2	01	1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	8,703,181,750	94.25	7,203,100,623	97.00	5,998,078,467	Distanak & Disbun
2	01	2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan		%		14,000,000		2,064,785,200		517,365,500	Distanak/ Disbun & DKP
			Ketersediaan pangan utama	%	100		100		100		
			Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	180.278		130.582		155,000		
			Produksi sektor pertanian padi dan palawija	ton	210,000		190,300		190,000		
			Produksi pertanian padi	ton	180,278		130,582		155,000		
			Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
2	01	3 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan									Distanak
			Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	180.278		130.582		155,000		
			Produksi sektor pertanian padi dan palawija	ton	210,000		190,300		190,000		
2	01	4 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250	8,500,000	7,300	1,989,695,404	9,500	120,100,000	Distanak
2	01	5 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250		7,300		9,500		Distanak & Disbun
2	01	6 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				790,069,300					Disbun
			Produksi sektor perkebunan	Ton	124,551		5,931.97		71,643		
			Produksi perkebunan sawit	Ton	117,819		#####		564,730		
2	01	7 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	99,361,116	94.25	335,329,947	97.00	266,850,000	Distanak
2	01	8 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak				23,394,500		400,721,200		328,129,000	Distanak
			Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	21,210		19,198		22,489		
			Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	13,646		13,635		13,609		
2	01	9 Program peningkatan produksi hasil peternakan				276,390,000		236,836,000		1,727,833,400	Distanak
			Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	21,210		19,198		22,489		
			Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	13,646		13,635		13,609		
2	01	10 Program Peningkatan Kelembagaan RDK/RDKK Pupuk Bersubsidi	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	7,250	3,000,000	7,300	34,375,000	9,500	18,000,000	Distanak & Disbun
2	01	11 Program Pemberdayaan SDM Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50		94.25	66,260,000	97.00	212,300,000	Disbun
2	01	12 Program Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh Pertanian	Cakupan bina kelompok petani	%	95.50	5,500,000	94.25		97.00		Distanak

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	01	13	Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha		9,051	-	9,051	-	5.700	Distanak	
2	01	14	Program Peningkatan Sistem Sarana dan Prasarana Pertanian	Meningkatnya Produktifitas Pertanian	%		100	-	100	-	100	Distanak & Disbun	
2	01	15	Program Penguatan Kelembagaan Pertanian/Perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	%		95.50	-	94.25	-	97.00	Disbun	
2	01	16	Program Rehabilitasi Tanaman Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton		7,250	-	7,300	-	9,500	Distannak/Disbun	
			2 03 Energi dan Sumberdaya Mineral										
2	03	1	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase pertambangan tanpa ijin	%		70,59	54,793,680	70,00	8,845,800	87.56	26,200,000	Setdakab
2	03	2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan					537,200,800		545,748,240		1,221,496,160	Setdakab
				Persentase rumah tangga pengguna listrik	%		95,78		96,99		98.57		
				Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks		98,00		98,50		100		
			2 04 Pariwisata										
2	04	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					68,400,000		157,002,000		114,310,000	Disbudparpora
				Kunjungan wisata	%		90,70		93,10		0.00		
				Lama kunjungan Wisata	Hari		16,06		16,21		0.00		
2	04	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Wisata	%			1,405,057,000		1,296,082,504		2,292,800,000	Disbudparpora
				Kunjungan wisata	%		90,70		93,10		0.00		
				Lama kunjungan Wisata	Hari		16,06		16,21		0.00		
			2 05 Kelautan dan Perikanan										
2	05	1	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Cakupan bina kelompok nelayan	%		100,00	-	100,00	-	96.00	Kelautan dan Perikanan	
2	05	2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Perikanan Budidaya	%		1245.49	504,700,350	1056.50		739.56	2,273,890,511	Kelautan dan Perikanan
2	05	3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap	%		3252.54	227,122,000	3747.769	4,109,632,066	3029.60	4,157,970,000	Kelautan dan Perikanan
2	05	4	Program pengembangan Penyuluhan perikanan	Cakupan bina kelompok nelayan	%		100,00	-	100,00	-	96.00	Kelautan dan Perikanan	
2	05	5	Program optimalisasi pengolahan dan pemasaran produksi perikanan									42,686,000	Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton		4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton		3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton		1245.49		1,056.50		739.56		
2	05	6	Program pengembangan data statistik perikanan	Tersedianya data/informasi statistik perikanan daerah (dokumen)	Ada/tidak		Ada	-	Ada	-	Ada	16,220,000	Kelautan dan Perikanan

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								150,000,000	Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50		739.56		
2	05	8	Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar				171,635,500					Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50		739.56		
2	05	7	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kawasan Wisata Rawa Tripa									Kelautan dan Perikanan
				Produksi perikanan ikan	Ton	4,498.03		4,804.27		3,769.16		
				Perikanan Tangkap	Ton	3,252.54		3,747.77		3,029.60		
				Perikanan Budidaya	Ton	1245.49		1,056.50		739.56		
2	06		Perdagangan				5,730,856,464		455,034,300		418,020,000	
2	06	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	122,900,000	75.35	97,256,800	82	111,820,000	Disperindagkop dan UKM
2	06	2	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asonian	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	5,607,956,464	75.35	357,777,500	82	306,200,000	Disperindagkop dan UKM
2	07		Perindustrian				848,490,200		2,987,289,000		611,710,696	
2	07	1	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Persentase koperasi aktif	%	50.30	586,440,200	73.88	731,970,200	75.00	383,030,696	Disperindagkop dan UKM
2	07	2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	-	75.35	1,496,573,500	82		Disperindagkop dan UKM
2	07	3	Program Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	70.25	262,050,000	75.35	758,745,300	82	228,680,000	Disperindagkop dan UKM
2	08		Transmigrasi				28,997,000		31,870,000		375,200,000	
2	08	1	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Peningkatan kerja sama antar wilayah dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	KK	208	7,000,000	226		235	323,600,000	Disnakertrans
2	08	2	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah transmigran lokal	UPT	5	21,997,000	5	31,870,000	4	51,600,000	Disnakertrans
2	08	3	Program Pengembangan Transmigrasi dan perencanaan RTSP									Disnakertrans
				Jumlah transmigran lokal	UPT	5		5		4		
				Jumlah transmigrasi	KK	208		226		235		
TOTAL							987,053,457,994.62		1,126,913,767,809.17		1,108,331,793,586.88	

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VII

TABEL 7.4
Program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2022
Nomenklatur Program Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019

Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMK (Tahun 2021)	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan					OPD
			Tolok Ukur			Target	Target	2021	Target	2022	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	185,488,857,010	2.94	188,772,009,779	DINAS PENDIDIKAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8.80	8.80	56,204,257,144	9.00	57,199,072,495	DINAS PENDIDIKAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah pendidikan yang unggul	Unit	11	11	30,000,000	12	30,531,000	DINAS PENDIDIKAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	LAKIP	Level	CC	C	699,237,401	B	713,383,903	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Pengelolaan Pendidikan Dayah	%	90	90	100,000,000	90	100,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0	0.03	77,286,042,874	0.03	78,654,005,833	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka usia harapan hidup	Tahun	70	70	22,651,259,852	70.2	23,052,187,151	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3.4	3.4	50,000,000	3.41	50,885,000	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	75,000,000	100	76,327,500	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase balita gizi buruk	%	0.7	0.7	1,045,000,000	0.6	1,063,496,500	DINAS KESEHATAN	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	46,123,106,260	WTP	46,937,715,241	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA	

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0.01	0.01	39,392,752,000	0.01	40,090,003,710	BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH SULTAN ISKANDAR MUDA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	24,332,621,366	WTP	24,763,308,764	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	5,700	5700	2,758,873,769	5,700	2,807,705,835	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	261.56	286.56	66,996,038,330	311.56	62,803,537,682	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	700,000,000	ada	712,390,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase akses air minum Perpipaan	%	72.24	76.74	443,673,109	81.04	451,526,123	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	4,500,000,000	80.04	4,579,650,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9	10	220,000,000	11	223,894,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9	10	1,000,000,000	11	1,017,700,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9	10	552,000,000	11	561,770,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	19	19	552,000,000	27	561,770,400	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDF	WTP	WTP	3,277,446,931	WTP	3,335,457,742	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	100	200	1,700,000,000	200	1,685,400,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	%	80	85	300,000,000	90	350,000,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	60	70	27,014,311,526	80	27,492,464,840	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,215,677,509	3	1,237,195,001	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	104,000,000	100	105,840,800	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,081,463,218	3	2,118,305,117	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	1,409,052,936	100	1,433,993,173	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDF	WTP	WTP	3,878,936,204	WTP	3,947,593,375	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	99.1	99.94	650,000,000	99.94	661,505,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah pos pemadam kebakaran	Unit	3	1	3,400,000,000	1	3,460,180,000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,951,043,504	3	3,003,276,974	DINAS SYARIAH ISLAM

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,456,290,482	3	2,499,766,824	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	orang	97.22	97.72	750,000,000		763,275,000	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase peran keluarga dalam pembinaan masyarakat	%	N/A	N/A	30,000,000	N/A	30,531,000	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	25.07	27	1,326,000,000		1,349,470,200	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	55.88	60	435,000,000	60	442,699,500	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Jumlah bangunan evakuasi	Unit	1	2	280,000,000	2	284,956,000	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	Tempat	0	2	110,000,000	1	111,947,000	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	1,392,200,628	N/A	1,416,842,579	SEKRETARIAT BAITUL MAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	3	1,023,076,434	2.94	1,014,255,946	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	3	1,318,129,202	2.94	1,341,460,089	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	367,800,000	80.04	375,310,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	10,000,000	80.04	10,177,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	19	19	2,000,000	27	2,035,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,35	52,35	9,000,000	52.36	9,159,300	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam	%	80	80	250,000,000	80	254,425,000	DINAS SYARIAT ISLAM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana/ Belum Terlaksana	Belum Terlaksana	Terlaksana	2,486,514,329	terlaksana	2,509,994,633	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Angka Pengangguran		3.79	3	1,000,000,000	4.2	1,017,700,000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	7,885	7,885	108,152,000	7995	110,066,290	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	3	3	210,100,000	3	213,818,770	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2,255,164,916	3	2,295,081,335	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52.27	52,35	263,000,000	52.36	267,655,100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	%	0.36	0.36	25,000,000	0.36	25,442,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Total Fertility Rate (TFR)	%	2	2	100,387,050	2	102,163,901	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	25,000,000	ada	25,442,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kabupaten Layak Anak	level	Pratama	Pratama	95,000,000	Pratama	96,681,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	2,016,446,000	WTP	2,052,137,094	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	100	100	60,000,000	100	61,062,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	100	100	80,000,000	100	81,416,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	LAKIP	Nilai	CC	B	510,000,000	B	519,027,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222	222	270,000,000	222	274,779,000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	85	85	95,000,000	90	96,681,500	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	%	83	85	2,678,478,000	85	2,725,887,061	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2	2	1,615,600,000	2	1,644,196,120	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, GAMPONG, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	917,700,000	3	933,943,290	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	0	1	15,000,000	240	15,265,500	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					25,000,000		25,442,500	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	belum ada data	belum ada data	13,300,000	belum ada data	13,535,410	DINAS PERTANAHAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9	10	10,000,000	11	10,177,000	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penyelesaian kasus tanah negara	%	belum ada data	belum ada data	41,000,000	belum ada data	41,725,700	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase luas lahan bersertifikat	%	belum ada data	belum ada data	19,000,000	belum ada data	19,336,300	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase luas lahan bersertifikat	%	belum ada data	belum ada data	14,500,000	belum ada data	14,756,650	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	9	10	6,500,000	11	6,615,050	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	belum ada data	belum ada data	17,000,000	belum ada data	17,300,900	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat	%	belum ada data	belum ada data	30,000,000	belum ada data	30,531,000	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase luas lahan bersertifikat	%	belum ada data	belum ada data	35,000,000	belum ada data	35,619,500	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0.046	0.046	9,000,000	belum ada data	9,159,300	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase luas lahan bersertifikat	%	belum ada data	belum ada data	11,000,000	belum ada data	11,194,700	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	belum ada data	belum ada data	11,000,000	belum ada data	11,194,700	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Penyelesaian kasus tanah negara	%	belum ada data	belum ada data	35,000,000	belum ada data	35,619,500	DINAS PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2.89	2.89	7,951,274,335	2.94	8,092,011,891	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	19	19	100,000,000	27	101,770,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ruang terbuka hijau	%	19	19	242,000,000	27	246,283,400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau	%	19	19	210,000,000	27	213,717,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ruang terbuka hijau	%	19	19	30,000,000	27	30,531,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase ruang terbuka hijau	%	19	19	90,000,000	27	91,593,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ruang terbuka hijau	%	19	19	25,000,000	27	25,442,500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase akses sanitasi	%	67.64	73.44	1,330,000,000	80.04	1,353,541,000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2.89	2.89	3,158,982,722	-	3,214,896,716	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	747,035,000	-	760,257,520	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	35,000,000	-	35,619,500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	340,000,000	-	346,018,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	60,000,000	-	61,062,000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Skor	2.82	2.89	2,880,442,424	2.94	2,931,426,255	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kontribusi sektor Transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	3.95	3.95	770,000,000	4.04	783,629,000	DINAS PERHUBUNGAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	60	70	50,000,000	80	50,885,000	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,515,304,676	2.94	2,559,825,569	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80	80	140,000,000	80	142,478,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80	80	100,000,000	80	101,770,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80	80	180,000,000	80	183,186,000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	3	3	19,500,000	3	19,845,150	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	%	44	80.00	152,500,000		155,199,250	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi tidak aktif	%	56	20.00	150,000,000		152,655,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	85	85	1,981,850,000	90	2,016,928,745	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	85	85	1,235,210,000	90	1,257,073,217	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	2,932,903,976	2.94	2,984,816,376	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5.33	6	47,100,000	6	47,933,670	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	500	219	50,000,000	240	50,885,000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5.33	6	122,000,000	6	124,159,400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	148.52	52081473639.00	81,550,000	57289621002.00	82,993,435	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	80	80	171,000,000	90	174,026,700	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	3,217,096,397	-	3,274,039,003	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	organisasi	10	36	520,000,000	-	529,204,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	10	10	5,803,837,908	-	5,906,565,839	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	36	36	240,000,000	-	244,248,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	1	50,000,000	-	50,885,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	festival	2	3	50,000,000	-	50,885,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	17	23	30,000,000	-	30,531,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola		0	2	150,000,000	-	152,655,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	1	50,000,000	-	50,885,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	1,854,430,861	2.94	1,887,254,287	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	2	900	276,974,500	1100	281,876,949	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.82	2.89	119,000,000	2.94	121,106,300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	65,000,000	ada	66,150,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2.22	3	15,000,000	5	15,265,500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Kecukupan pangan utama	%	100	100	187,500,000	100	190,818,750	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	6858	9,700	420,000,000	9,800	427,434,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170.151	160,000	150,000,000	165,000	152,655,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Cakupan bina kelompok petani	%	93.63	100	100,000,000	100	101,770,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	40,000,000	Ada	40,708,000	DINAS PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	5,000,000	ada	5,088,500	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran lokal	UPT	4	4	53,100,000	4	54,039,870	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah transmigran lokal	UPT	4	4	58,600,000	4	59,637,220	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	104	104	200,000,000	56	500,000,000	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	104	104	352,700,000	56	358,942,790	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Belum ada data	Belum ada data	65,320,000	Belum ada data	66,476,164	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	2.89	4,001,361,055	2.94	3,975,725,146	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	65.25	85	686,710,000	85	698,864,767	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kunjungan wisata	%	90	90.06	770,000,000	-	783,629,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Lama kunjungan Wisata	Hari	15	14.63	220,000,000	-	223,894,000	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	4,262,326,451	B	4,337,769,629	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Perikanan Tangkap	Ton	2617.08	3,181.1	760,842,266	3,340.13	774,309,174	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Perikanan Budidaya	Ton	640.21	850.5	3,859,410,000	893.02	3,908,075,557	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perikanan Budidaya	Ton	640.21	850.5	20,000,000	893.02	40,000,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi perikanan ikan	Ton	3257.29	4,031.6	10,000,000	4233.15	10,177,000	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	3	12,649,941,052	2.94	12,873,845,009	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	6,858	9700	614,285,714	9,800	625,158,571	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	10	10	4,463,571,428	11	4,542,576,642	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pupulasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	20,824	23036	2,055,000,000		2,091,373,500	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	10	10	100,000,000	11	101,770,000	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	10	10	2,376,142,857	11	2,418,200,586	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	2.89	4,160,873,482	2.94	4,234,520,943	DINAS PERKEBUNAN

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VII

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70	70	476,000,000	80	484,425,200	DINAS PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70	70	5,164,170,000	80	5,255,575,809	DINAS PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70	70	85,000,000	80	86,504,500	DINAS PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Produksi sektor perkebunan	Ton	128064	137,353	505,000,000		513,938,500	DINAS PERKEBUNAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase infrastruktur pendukung ekonomi kreatif	%	70	70	1,326,477,000	80	1,349,955,643	DINAS PERKEBUNAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	21,397,820,247	WTP	21,776,561,665	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Adanya regulasi santunan kematian	ada/tidak	ada	ada	7,660,200,000	ada	7,795,785,540	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah usaha ekonomi berbasis kearifan lokal yang dibina	Usaha	N/A	N/A	1,865,220,000	N/A	1,898,234,394	SEKRETARIAT DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	2.89	590,231,360	2.94	600,678,455	KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		WTP/WD P	WTP	WTP	6,975,153,514	WTP	7,098,613,731	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	5,008,050,000	WTP	5,096,692,485	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2.89	2.89	9,704,042,962	2.94	9,875,804,522	DPRK
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai LAKIP	Nilai	C	CC	6,217,094,275	B	6,327,136,844	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-butgeting	Terlaksana/ Belum Terlaksana	terlaksana	terlaksana	1,977,500,000	terlaksana	2,012,501,750	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK	%	ada	ada	1,778,710,000	ada	1,810,193,167	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | **BAB VII**

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	450,000,000	ada	457,965,000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	23,561,720,304	-	23,978,762,753	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	273,159,496,000	-	277,994,419,079	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	1,398,000,000	-	1,422,744,600	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEUANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10,00	10	2,325,500,000	-	2,366,661,350	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LAKIP	Nilai	cc	CC	602,554,795	B	613,220,015	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	37,000,000	3	37,654,900	SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,82	2,89	3,469,016,565	2,94	3,530,418,158	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	KEPEGAWAIAN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	1,533,000,000	N/A	1,560,134,100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	461,140,700	N/A	469,302,890	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	13,000,000	ada	13,230,100	KECAMATAN SUKA MAKMUE
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak ada	ada	ada	16,000,000	ada	16,283,200	KECAMATAN KUALA

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VII

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terlaksananya aplikasi e-planning dan e-budgeting	Terlaksana/ Belum Terlaksana	terlaksana	terlaksana	6,000,000	terlaksana	6,106,200	KECAMATAN KUALA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	PERENCANAAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	45,300,000	B	46,101,810	KECAMATAN KUALA PESISIR
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	3,500,230,207	N/A	3,562,184,282	INSPEKTORAT
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	1,401,998,559	WTP	1,407,167,933	INSPEKTORAT
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	20,000,000	WTP	40,000,000	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	2,850,678,615	WTP	2,891,489,626	KECAMATAN DARUL MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	16,000,000	B	16,283,200	KECAMATAN DARUL MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	25,000,000	B	25,442,500	KECAMATAN DARUL MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	15,000,000	B	15,265,500	KECAMATAN DARUL MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	KECAMATAN DARUL MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	1,893,863,237	WTP	1,917,738,616	KECAMATAN SUKA MAKMUE
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	25,000,000	B	25,442,500	KECAMATAN SUKA MAKMUE
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	KECAMATAN SUKA MAKMUE
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	2,391,166,916	WTP	2,428,720,670	KECAMATAN KUALA
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	16,000,000	WTP	16,283,200	KECAMATAN KUALA
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	13,000,000	B	18,000,000	KECAMATAN KUALA
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	2,076,119,519	WTP	2,112,866,834	KECAMATAN KUALA PESISIR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	36,160,000	B	36,800,032	KECAMATAN KUALA PESISIR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	1,653,534,114	WTP	1,672,978,668	KECAMATAN TRIPA MAKMUR

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	30,500,000	B	31,039,850	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	8,400,000	B	8,548,680	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	10,000,000	B	20,000,000	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	2,949,951,740	WTP	3,002,165,886	KECAMATAN BEUTONG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	50,072,500	B	50,958,783	KECAMATAN BEUTONG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	10,000,000	80	10,177,000	KECAMATAN BEUTONG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	15,000,000	B	15,265,500	KECAMATAN BEUTONG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	12,000,000	B	12,212,400	KECAMATAN BEUTONG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	2,592,742,092	WTP	2,628,987,627	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	42,500,000	B	43,252,250	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,825,591,267		3,857,101,632	KECAMATAN SEUNAGAN
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	10,000,000	B	20,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	12,000,000	B	17,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	20,000,000	WTP	30,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	1,020,000,000	WTP	1,050,000,000	KECAMATAN TADU RAYA
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	20,000,000	B	20,354,000	KECAMATAN TADU RAYA
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	1,228,046,830	WTP	1,249,783,259	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	4,000,000	B	4,070,800	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai LAKIP	Nilai	CC	CC	18,000,000	B	18,318,600	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | BAB VII

UNSUR KEWILAYAHAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WD P	WTP	WTP	3,000,000	WTP	3,053,100	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	ada/tidak	ada	ada	20,850,000,000	ada	21,219,045,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Mesjid yang melaksanakan Shalat berjamaah 5 waktu	Mesjid	55	55	7,000,000,000	60	7,123,900,000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN / DINAS SYARIAT ISLAM
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Petugas Tajhiz Mayat di Gampong	Orang	444	444	5,282,094,406	444	5,351,472,477	DINAS SYARIAT ISLAM
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM BAITUL MAL	Jumlah ZIS yang terhimpun	Milyar	6.92	6.92	6,674,500,000	6.92	6,792,638,650	SEKRETARIAT BAITUL MAL
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	37,500,000	80	38,163,750	KECAMATAN DARUL MAKMUR
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	10,000,000	80	15,000,000	KECAMATAN TRIPA MAKMUR
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	10,000,000	80	15,000,000	KECAMATAN BEUTONG
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	10,000,000	80	15,000,000	KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	10,000,000	80	15,000,000	KECAMATAN BEUTONG ATEUH BANGGALANG
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Jumlah Hafizh Alquran	Orang	60	60	10,000,000	80	15,000,000	KECAMATAN SUKA MAKMUE
UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN	KEKHUSUSAN ACEH	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama	%	100	100	100,000,000	100	150,000,000	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
							1,132,706,714,812		1,147,577,293,137	

**BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk Tahun 2017-2022. Secara rinci dijelaskan pada tabel dibawah ini.

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

**Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022**

No	Indikator	Kinerja Standar (satuan)	Kondisi Awal (2017)	Target				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	8	9	13	14	15
1	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	2	3	3
3	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Scor	2,32	2,891	blm ada	2,82	2,89	2,94
4	Nilai LAKIP	Nilai	C	C	C	C	CC	B
5	Jumlah ZIS yang terhimpun	Rp. Milyar	7545	8980	6150	6916	6920	6920
6	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam	%	50	100	100	70	80	80
7	Angka Kemiskinan	%	19,34	18,97	17,97	17,70	17,00	16,50
8	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	0	127	231	231	331
9	Persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan	%	46,65	NA	NA	3,87	4,89	5,8
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,11	5,91	5,35	5,11	5,0	4,2
11	Jumlah kawasan Strategis	Kawasan	3	9	9	9	9	9
12	Persentase akses sanitasi	%	42	52,00	67,64	67,64	73,44	80,04
13	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu	%	20	60	80	60	80	80
14	Prevalansi Stunting	%	26,2	37,7	26,48	17,3	16,5	15,5
15	Kabupaten Layak Anak	level	-	-	-	-	pratama	pratama
16	Pertumbuhan PDRB	%	3,95	4,29	6,77	3,54	4,06	4,58
17	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	67,78	68,15	69,11	69,18	69,80	70,00
18	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	6,50	9,89	7,79	7,79	7,80	7,80

Ket : data tahun 2018 dan 2019 merupakan realisasi

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target					SKPK
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	8	9	13	14	15	16
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	PDRB per kapita ADHB	Rp (Juta)	39.07	42.14	44.62	45.01	46.08	47.10	BPS
2	Indek Gini Ratio	%	0.231	0.284	0.252	0.275	0.233	0.212	BPS
3	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	31,060	31,060	29,930	29,611	28,440	27,604	BPS
4	Angka Melek Huruf	%	93.41	96.25	98.00	97.50	98.00	98.50	Dinas Pendidikan
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.24	8.21	8.50	8.68	8.80	9.00	Dinas Pendidikan
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.09	14.44	14.56	15.00	15.25	15.50	Dinas Pendidikan
7	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68.70	68.89	69.14	69.05	70.00	70.20	Dinas Kesehatan
8	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	37.34	36.48	24.46	24.46	24.46	24.46	Dinas Soisal
9	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalan terhadap PDRB	%	10.14	8.19	7.92	7.98	8.01	8.05	BPS
10	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	3.53	3.87	3.73	3.85	3.90	4.00	BPS
11	Kontribusi sektor pengadaan listrik dan gas terhadap PDRB	%	0.07	0.09	0.08	0.90	0.10	0.12	BPS
12	Kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB	%	8.86	9.86	10.60	11.00	12.00	13.00	BPS
13	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDRB	%	11.69	11.75	11.49	11.67	12.05	12.57	BPS

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

14	Kontribusi sektor Transportasi dan perdagangan terhadap PDRB	%	3.79	3.69	3.61	3.75	3.95	4.04	BPS
15	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	%	0.359	0.420	0.430	0.55	0.65	0.77	BPS
16	Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB	%	2.26	2.15	2.13	3.50	2.75	3.05	BPS
17	Kontribusi sektor jasa keuangan dan informasi terhadap PDRB	%	1.34	1.52	1.52	1.68	1.75	2.05	BPS
18	Kontribusi sektor Real Estat terhadap PDRB	%	2.41	2.54	2.53	2.75	2.89	3.07	BPS
19	Kontribusi sektor jasa perusahaan terhadap PDRB	%	0.25	0.26	0.27	0.38	0.58	0.75	BPS
20	Kontribusi sektor adminitrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial terhadap PDRB	%	5.22	5.61	5.62	5.20	5.30	5.50	BPS
21	Kontribusi sektor pendidikan terhadap PDRB	%	1.70	1.86	2.04	2.20	2.30	2.40	BPS
22	Kontribusi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial terhadap PDRB	%	1.77	1.84	1.92	2.10	2.20	2.50	BPS
23	Kontribusi sektor jasa lainnya terhadap PDRB	%	0.51	0.53	0.93	1.50	1.75	1.85	BPS
24	Produksi sektor pertanian padi dan palawija	Ton	190,543	210000	190,300	190,000	195,000	197,000	DISTANNAK
25	Produksi pertanian padi	Ton	170,151	180,278	130,582	155,000	160,000	165,000	DISTANNAK
26	Produksi sektor perkebunan	Ton	128,064	124,551	5,931.97	71,643	137,353	203,064	DISBUN
26	Produksi perkebunan sawit	Ton	316,164	117,819	529,137.25	564,730	600,325	635,919	DISBUN
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio ketergantungan	Indeks	50.96	50.50	50.31	50.59	50.86	51.14	BPS
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	23.83	25.61	25.86	40.50	50.50	65.00	Dinas Pendidikan
1.2.	Angka partisipasi kasar	%							
	APK SD/MI/Paket A	%	109.47	79.71	78.30	95.00	96.00	97.00	Dinas Pendidikan
	APK SMP/MTs/Paket B	%	106.90	98.27	91.81	83.00	84.00	85,00	Dinas Pendidikan

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

	APK SMA/SMK/	%	86,02	88,35	73,75	90,00	91,00	92,00	Dinas Pendidikan
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%							Dinas Pendidikan
	Tamat SD Sederajat	%	26,70	99	99	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Tamat SLTP sederajat	%	16,87	90	90,56	100	100	100	Dinas Pendidikan
	Diploma I/II/III	%	3,33	3,50	4,00	4,50	5,50	6,00	Dinas Pendidikan
	Diploma IV/S1	%	3,72	45	50	50	60	65	Dinas Pendidikan
	S2/S3	%	0,59	1,50	2,00	2,50	3,50	4,00	Dinas Pendidikan
1.4.	Angka Partisipasi Murni								Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,73	99,71	81,88	95	96	97	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,83	91,82	53,67	83	84	85	Dinas Pendidikan
1.5.	Angka partisipasi sekolah								Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,36	0,27	0,24	95	96	97	Dinas Pendidikan
	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99,11	1,55	1,45	83	84	85	Dinas Pendidikan
1.6	Angka Melanjutkan (AM):								Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	98,03	97,50	85,50	88,50	90,50	Dinas Pendidikan
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91,15	96,54	90,10	84,50	85,50	90	Dinas Pendidikan
1.7	Fasilitas Pendidikan:								Dinas Pendidikan
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	85,70	95,55	97,15	97,50	98	98,79	Dinas Pendidikan
	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	87,60	94,31	98,20	98,30	98,50	98,77	Dinas Pendidikan
1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	69,82	71,05	73,02	75,50	78,50	80,73	Dinas Pendidikan
1.9	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio Index	33,71	35,10	35,71	55,50	65,50	70,22	Dinas Pendidikan
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio Index	75,66	66,18	67,18	74,50	73,50	80	Dinas Pendidikan

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

1.11	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	Rasio Index	81,63	54,31	55,39	81,00	85,00	87	Dinas Pendidikan
1.12	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	Rasio Index	71,18	51,15	49,00	70,50	75,50	80	Dinas Pendidikan
1.13	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio Index	69,96	43,57	41,32	71	75	80	Dinas Pendidikan
1.14	Persentase Kualifikasi Guru D IV/S1	%	37,51	94,33	97,74	93,50	94,50	96	Dinas Pendidikan
1.15	Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53,16	67,44	79,88	81,5	83,5	86,5	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan								
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	5,18	11,00	7,20	7,50	7,30	7,00	DINKES
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran	4,85	7,30	6,28	6,14	6,12	6,00	DINKES
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	36,90	12,00	8,94	36,37	36,12	35,97	DINKES
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran	13,86	10,00	12,58	12,59	11,98	11,79	DINKES
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100000 Kelahiran	99,68	28,40	331,02	153,03	150,00	140,00	DINKES
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	/1000 Balita	19,76	18,60	17,31	18,56	19,00	19,50	DINKES
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk								
	Puskesmas	/1000 Penduduk	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	DINKES
	Poliklinik	/1000 Penduduk	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	DINKES
	Pustu	/1000 Penduduk	0,30	0,28	0,28	0,31	0,31	0,31	DINKES
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	DINKES
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	DINKES
	Dokter Umum	/100.000 Penduduk	0,24	0,35	0,29	0,24	0,29	0,29	DINKES
	Dokter Spesialis	/100.000 Penduduk	0,03	0,06	0,05	0,28	0,83	0,84	DINKES
	Dokter Gigi	/100.000 Penduduk	0,02	0,36	0,08	0,18	0,53	0,54	DINKES

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000 Penduduk	3,84	3,87	4,13	4,39	4,89	5,39	DINKES
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	52,25	45,63	80,00	53,01	53,68	53,76	DINKES
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	93,11	82,79	85,00	87,00	88,00	90,00	DINKES
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	77,33	59,90	40,99	78,46	79,44	79,56	DINKES
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.15.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	91,62	80,30	74,42	92,95	94,12	94,26	DINKES
2.16.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	18,76	36,42	47,38	19,03	19,27	19,3	DINKES
2.17.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,03	89,94	51,15	49,74	50,36	50,44	DINKES
2.18.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	102,19	140,00	160,20	91,08	86,65	85,96	DINKES
2.19.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	/100.000 penduduk	2,56	3,04	2,99	2,25	2,2	2,04	DINKES
2.20.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	63,38	89,84	100,00	64,3	65,1	65,2	DINKES
2.21.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	68,33	85,65	92,82	69,32	70,19	70,29	DINKES
2.22.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100,00	100	100	100	100	DINKES
2.23.	Angka kejadian Malaria	/100.000 penduduk	2,39	1,82	0,60	1,98	1,81	1,33	DINKES
2.24.	Cakupan kunjungan bayi	%	84,73	84,10	117,61	86,82	87,91	88,04	DINKES
2.25.	Cakupan pembantu puskesmas	%	21,17	21,17	21,17	21,17	21,18	21,19	DINKES
2.26.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,50	81,18	82,05	95,81	97,01	97,15	DINKES
2.27.	Cakupan pelayanan nifas	%	92,12	82,03	99,80	94,39	95,57	95,71	DINKES
2.28.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	71,27	79,74	100,00	76,71	78,43	78,55	DINKES
2.29.	Cakupan pelayanan anak balita	%	81,68	91,44	107,00	87,91	89,89	90,02	DINKES
2.30.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	91,13	53,72	95,2	95,23	96,42	96,56	DINKES
2.31.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	DINKES
2.32.	Persentase balita gizi buruk	%	0,07	0,10	0,10	0,06	0,07	0,06	DINKES

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum:								PU PR
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	243,54	221,932	242,56	261,56	286,56	311,56	PU PR
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Rasio Index	0,057	0,072	0,163	0,173	0,131	0,142	PU PR
3.1.3	Jumlah sawah yang terlayani irigasi	Ha	17.597	9,051	9,051	5.700	5.700	5.700	PUPR/ Dintannak
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								PERKIM
4.1	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	607	0	709	709	809	909	PERKIM
4.2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab	Unit	29	0	127	231	231	331	PERKIM
4.3	Persentase akses air minum Perpipaan	%	42	52,00	67,64	72,24	76,74	81,04	PERKIM
4.4	Persentase akses air minum non Perpipaan	%	0	0	10	10	10	10	PERKIM
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat								
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	%	98,75	98,85	98,85	99,10	99,94	99,49	SATPOL PP & WH
5.2	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	90	90	90	SATPOL PP & WH
6	Sosial								DINSOS
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	24,83	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	Orang	97,12	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
	Penyandang Disabilitas (Alat Bantu)	Orang	11,20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
	Jumlah Panti Asuhan (Perumahan Panti)	Anak	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Unit	15,57	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	23,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	23,74	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DINSOS
6.4.	Adanya regulasi santunan kematian	Ada/ Tidak ada	Tidak Ada	ada	ada	ada	ada	ada	BagianKeissos
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1	Tenaga Kerja								
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	5,00	10,00	13,00	4,00	3,00	3,00	Disnakertran
1.2	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	7.864	7.674	7.876	3818	8582	8.660	Disnakertran
1.3	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang	20,18	20,18	17,24	19,19	19,44	19,69	Disnakertran

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	52,27	52,30	52,35	52,00	52,35	52,36	Bagian Pemerintahan
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	16,00	16,00	16,50	16,00	16,00	16,00	DPMGP4
2.3	Rasio KDRT	%	N/A	0,30	0,20	0,36	0,36	0,36	DPMGP4
3	Pangan								
3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	100	100	100	100	100	100	DKPP
4	Lingkungan Hidup								
4.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Ada/ tidak ada	Ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	DLH
4.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	DLH				
4.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	DLH				
04.04	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	7,80	10	11	12	19	27	DLH
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	73,80	89,31	89,91	90,67	91,70	92,60	CAPIL
5.2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	88,51	81,13	81,13	91,95	93,87	95.20	CAPIL
5.3	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/ belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	CAPIL
5.4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	85,28	89,31	89,91	90.95	92.45	94.16	CAPIL
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
6.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	70	100	100	100	100	100	DPMGP4
6.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	222	222	222	222	222	222	DPMGP4
6.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	222	222	222	222	222	222	DPMGP4
6.4	Persentase LSM aktif	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4
6.5	Persentase LPM Berprestasi	%	NA	NA	NA	100	100	100	DPMGP4
6.6	Persentase PKK aktif	%	100,00	100,00	100,00	100	100	100	DPMGP4
6.7	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4
6.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	NA	NA	NA	100	100	100	DPMGP4
6.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	%	NA	NA	NA	100	100	100	DPMGP4

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
7.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	2,05	2,15	2,17	2,15	2,10	2,00	DPMGP4
7.2	Total Fertility Rate (TFR)	%	0,47	2	2,5	2,5	2	2	DPMGP4
7.3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	3	3	2	2	2	2	DPMGP4
7.4	Rasio Akseptor KB	%	90	86	83	83	85	40	DPMGP4
7.5	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	81,91	86,0	83,0	83,0	85,0	90,0	DPMGP4
7.6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	/1.000 perempuan	0,89	0,87	0,8	0,83	0,82	0,8	DPMGP4
7.7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	DPMGP4
8	Perhubungan								
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum								DISHUB
	Angkutan Darat	Trayek	3	3	3	6	7	8	DISHUB
	Angkutan Udara	Frek	1.298	1271	962	1463	1518	1573	DISHUB
8.1	Rasio ijin trayek	Indeks	1,8	1,8	2	3,5	4	4,5	DISHUB
8.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	1,265	420	518	669	724	779	DISHUB
8.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis								DISHUB
	Jumlah Bandar Udara	Unit	1	1	1	1	1	1	DISHUB
	Jumlah Terminal Tipe B	Unit	1	1	4	1	1	1	DISHUB
	Jumlah Terminal Tipe C	Unit	4	1	4	0	0	0	DISHUB
8.4	Persentase layanan angkutan darat	%	7,08	7,13	7,93	9,77	10,61	11,41	DISHUB
8.5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	8,61	6,77	7,95	11,01	11,81	12,61	DISHUB
8.6	Pemasangan Rambu-rambu	%	29	33	37	44	49	54	DISHUB
8.7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio Index	76,98	83,00	87,67	82,98	84,98	86,98	DISHUB
8.8	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum								DISHUB
	Angkutan Udara	Orang	26.640	37.894	37.225	26.747	26.792	26.846	DISHUB
8.9	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun								DISHUB
	Bandara	Kg	159.840	217,965	134,338	160,480	160,753	161,074	DISHUB
9	Komunikasi dan Informatika								
9.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0,40	N/A	N/A	0,44	0,44	0,51	DISKOMINFOTIK
9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	80	85	85	85	85	95	DISKOMINFOTIK
9.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	74	85	85	85	85	85	DISKOMINFOTIK

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

10	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah								
10.1	Persentase koperasi aktif	%	43,68	50,30	73,88	75,00	80,00	90,00	DISPERINDAGKOP
10.2	Persentase koperasi tidak aktif	%	56,32	49,70	26,12	25,00	20,00	10,00	DISPERINDAGKOP
11	Penanaman Modal								
11.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	5,33	4	2	6	6	6	DPMPSTP
11.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)	500,00	215	207	218	219	240	DPMPSTP
11.3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Rp (Milyar)	148,52	-52,08	-14,16	14164829223,00	52081473639,00	57289621002,00	DPMPSTP
12	Kepemudaan dan Olah Raga								
12.1.	Jumlah Organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	10	16	28	32	36	40	DISBUDPARPORA
12.2.	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	DISBUDPARPORA
12.3.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	84,00	88,30	89,98	90,48	92,28	94,08	DISBUDPARPORA
12.4.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	30,45	32,90	45,80	50,38	55,42	60,96	DISBUDPARPORA
12.5	Jumlah atlet berprestasi	Atlet	2	17	19	22	25	28	DISBUDPARPORA
12.6	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	5	17	22	8	10	11	DISBUDPARPORA
13	Statistik								
13.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	BPS
13.2	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada/tidak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	BPS
13.3	Buku "PDRB"	Ada/tidak	Ada	ada	ada	Ada	ada	ada	BPS
14	Persandian								
14.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	50	50	50	50	50	DISKOMINFOTIK
15	Kebudayaan								
15.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival	2	2	1	0	3	2	DISBUDPARPORA
15.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	3	3	4	0	1	2	DISBUDPARPORA
15.3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	0	0	0	0	2	1	DISBUDPARPORA

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

16	Perpustakaan								
16.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	1781	1210	925	500	900	1100	PERPUSTAKAAN & ARSIP
16.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	koleksi	N/A	31.456	32.469	32.598	34.430	34.630	PERPUSTAKAAN & ARSIP
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk	%	0,42	0,42	0,42	1	1	PERPUSTAKAAN & ARSIP
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang	1.597	1,023	1,023	700	600	700	PERPUSTAKAAN & ARSIP
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	2.877	7.095	7.595	7.724	8.670	8.870	PERPUSTAKAAN & ARSIP
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	2	2	2	2	2	PERPUSTAKAAN & ARSIP
17	Kearsipan								
17.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	2,22	1,55	2,62	2,70	3,00	5,00	PERPUSTAKAAN & ARSIP
17.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	1	1	2	2	2	2	PERPUSTAKAAN & ARSIP
Layanan Urusan Pilihan									
1	Pariwisata								
1.1.	Kunjungan wisata	%	90,05	90,70	93,10	0,00	90,06	87,06	DISBUDPARPORA
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	15,00	16,06	16,21	0,00	14,63	15,21	DISBUDPARPORA
2,	Pertanian								
2.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ton	6.858	7.250	7.300	9.500	9.700	9.800	DISTANNAK
2.2.	Cakupan bina kelompok petani	%	93,63	95,50	94,25	97,00	100,00	100,00	DISTANNAK
2.3.	Jumlah Produksi Gabah/Padi	Ton	170.151	180,278	130,582	155,000	160,000	165,000	DISTANNAK
3	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	93,00	95,78	96,99	98,57	99,02	100	BAG. EKONOMI
3.2.	Rasio ketersediaan daya listrik	Rasio Indeks	97,00	98,00	98,50	100	100	100	BAG. EKONOMI
3.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin	%	63,08	70,59	70,00	87,56	92,01	100	BAG. EKONOMI
4	Perdagangan								
4.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	Milyar	150	150	200	152	104	56	DISPERINDAGKOP
5	Perindustrian								
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	65,25	70,25	75,35	82	85	90	DISPERINDAGKOP
6	Tansmigrasi								
6.1.	Jumlah transmigran lokal	UPT	4	5	5	4	4	4	Disnakertrans
6.2	Jumlah transmigrasi	KK	208	208	226	235	228	221	Disnakertrans

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

7	Kelautan dan Perikanan								
7.1.	Produksi perikanan (Ton Produksi Persentase Terhadap Target Produksi Aceh)	%							DKPP
	Produksi perikanan ikan	Ton	3.257,29	4.498,03	4.804,27	3.769,16	4.031,57	4.233,15	DKPP
	- Perikanan Tangkap	Ton	2.617,08	3.252,54	3.747,77	3.029,60	3.181,08	3.340,13	DKPP
	- Perikanan Budidaya	Ton	640,21	1.245,49	1.056,50	739,56	850,49	893,02	DKPP
7.2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	90	100,00	100	96,00	98,00	100,00	DKPP
8	Peternakan								
8.1.	Populasi ternak besar (sapi dan kerbau)	ekor	20.824	21.210	19.198	22.489	23.036	23.589	DISTANNAK
8.2.	Populasi ternak kecil (kambing dan domba)	ekor	12.169	13.646	13.635	13.609	14.089	14.569	DISTANNAK
9	Pertanahan								
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanahan
9.2.	Penyelesaian kasus tanah negara	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pertanahan
Penunjang Urusan									
1	Perencanaan Pembangunan								
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Tidak	tidak	Ada	ada	ada	ada	BAPPEDA
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMK yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	tidak	ada	ada	ada	BAPPEDA
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPK yang telah ditetapkan dengan PERBUB	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	BAPPEDA
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan QANUN	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	BAPPEDA
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RPKK	%	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	BAPPEDA
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RPKK kedalam APBK	%	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	BAPPEDA
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	Ada	Ada	Ada	ada	ada	ada	BAPPEDA

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

2	Keuangan								
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
2.2.	Persentase SILPA	%	1,04	0,702	0,472	0,55	0,55	0,55	BPKD
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	1,03	0,698	0,471	0,50	0,50	0,50	BPKD
2.4.	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	22,46	14,99	9,84	7,00	4,00	1,00	BPKD
2.5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20,00	22,05	21,34	21,69	20,00	20,00	BPKD
2.6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10,00	15,69	15,69	19,08	10,00	10,00	BPKD
2.7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	1,04	0,79	1,00	0,87	0,75	0,66	BPKD
2.8.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	10,00	0,04	0,12	15,00	10,00	10,00	BPKD
2.9.	Penetapan APBD	Tepat/Tidak Tepat Waktu	BPKD						
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	120 jam	BKP SDM
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	16,79	0,040	0,038	0,05	0,05	0,05	BKP SDM
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	40,20	0,00	0,004	0,01	0,02	0,02	BKP SDM
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		22	18	33	40	40	40	BKP SDM
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		426	421	433	195	147	147	BKP SDM
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		2.220	2.091	2.081	2.037	2.500	3.494	BKP SDM
4	Penelitian dan pengembangan								
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	25	25	25	25	30	30	BAPPEDA
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.								BAPPEDA
	Penerapan SIDA:	Sudah/Belum	Sudah	Belum	Belum	Sudah	Sudah	Sudah	BAPPEDA
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A	N/A	N/A	N/A	20	30	BAPPEDA
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	N/A	30	30	30	40	50	BAPPEDA
5	Pengawasan								
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	80	83	88	90	90	90	INSPEKTORAT
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	%	0,5	91	91	0,65	0,51	0,5	INSPEKTORAT
5.3.	Jumlah temuan BPK	Temuan	24	63	91	28	25	24	INSPEKTORAT

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

6	Sekretariat Dewan								
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPRK
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPRK
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DPRK
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1	Pendidikan								
1.1.	Jumlah Penghafal Al-Qur'an (Hafiz) 30 Juz	Orang	23	23	30	70	80	100	DSI
1.2.	Angka melek Al-Quran penduduk usia 06 - 21 tahun, yang beragama Islam	%	82	83	85	100	120	130	DSI
1.3.	Angka melek Al-Quran penduduk umur > 21 tahun, yang beragama Islam	%	79	80	82	100	110	120	DSI
1.4.	Standarisasi Pendidikan Dayah	Ada/Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	DSI
1.5.	Persentase dayang Memenuhi Standarisasi Pendidikan Dayah (Dayah Tipe)	%	10	10	11	57	85	100	DSI
2	Kebudayaan								
2.1.	Jumlah gampong/mukim yang melaksanakan peraditan adat yang telah diverifikasi	gampong	6	0	0	30	35	25	DISBUDPARPORA
2.2.	Persentase penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim	%	73	0	0	25	30	20	DISBUDPARPORA
2.3.	Persentase keputusan, seruan, imbauan, naskah, hasil kajian adat dan istiadat yang diadopsi pemerintah daerah	%	82	0	0	15	25	30	DISBUDPARPORA
2.4.	Meningkatnya pemahaman terhadap Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah, Seni, Adat, Istiadat Aceh yang Bernilai Luhur	wilayah	34	0	0	17	23	30	DISBUDPARPORA
3	Keagamaan								
3.1.	Pemberdayaan sarana dan prasarana keagamaan (%)	Unit	454	454	454	458	463	470	DSI
3.2.	Pembinaan dakwah agama bagi masyarakat	Orang	204	207	212	217	220	223	DSI
3.3.	Rata-Rata Jamaah mesjid (Agung dan Jamik) Per Waktu Sholat	Orang	32	31	32	35	38	40	DSI
3.4.	Jumlah Mesjid yang melaksanakan shalat 5 waktu secara rutin	Mesjid	48	48	49	50	55	60	DSI
3.5.	Pembinaan Dinul Islam	Orang	267	271	270	280	290	300	SATPOL PP & WH
3.6.	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Syari'at Islam	%	50	100	100	70	80	80	DSI

KINERJA PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH | BAB VIII

3.7.	Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan kompetensi	Orang	158	160	164	200	210	220	BAITUL MAL
3.8.	Jumlah Penghimpunan ZISWAF	Rp (000)	7.545	8.980	6.150	6.916	6.920	6.920	BAITUL MAL
3.9.	Jumlah ZISWAF yang disalurkan	Rp (000)	7.545	8.980	6.150	6.916	6.920	6.920	BAITUL MAL
4	Kesatuan dan Perdamaian								
4.1.	Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KESBANGPOL
4.2.	Jumlah Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Konflik	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KESBANGPOL
4.4.	Jumlah Anak Korban Konflik Yang Mendapat Perhatian Pemerintah	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KESBANGPOL
4.5.	Jumlah Rumah Korban Konflik Yang di Bangun	Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KESBANGPOL
Keistimewaan dan Kekhususan Aceh									
1	Kesatuan Bangsa dan Politik								
1.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan		ada	tidak ada	ada	ada	ada	KESBANGPOL
1.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan		-	-	-	ada	ada	KESBANGPOL
1.3.	Jumlah LSM	LSM	2	5	4	4	5	5	KESBANGPOL

Ket : data tahun 2018 dan 2019 merupakan realisasi

BAB IX PENUTUP

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dilakukan dengan dasar hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK, sinkronisasi terkait kinerja daerah serta karena penyesuaian Perangkat Daerah. Dokumen Perubahan RPJMK ini adalah penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan politis serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 dengan memperhatikan RPJM Aceh 2017-2022 dan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 serta mempedomani RPJMN 2020-2024.

Dokumen Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten. RKPK merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Oleh karenanya Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 dapat dikatakan sebagai muara seluruh pelaksanaan pembangunan lima tahun diwilayah Kabupaten Nagan Raya yang perlu diacu oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Nagan Raya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, terdapat 5 alasan utama Perubahan RPJMD Kabupaten Nagan Raya yang meliputi :

1. Perubahan secara umum yaitu pandemi covid-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran tahun 2020;

2. Penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional;
3. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang juga mengharuskan daerah untuk melakukan penyesuaian program dan kegiatan ke dalam dokumen perencanaan.
4. Penambahan Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yaitu Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
5. Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPK setelah RPJMK berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Nagan Raya, maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut :

1. RPJMK ini menjadi pedoman penyusunan RKPK dan RAPBK masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pada periode berikutnya.
2. RPJMK sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMK dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPK masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMK dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih hasil Pemilu pada periode berikutnya, yang kemudian akan disesuaikan dengan RPJMK yang baru.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Kaidah pelaksanaan Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun Perubahan Renstra Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan prioritas, dan unggulan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 untuk menjamin konsistensi dan kelanjutan program, kegiatan beserta pendanaan yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan disahkan oleh Bupati.
2. Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kabupaten, Perangkat Daerah sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah.

4. Dalam hal program prioritas pemerintah daerah yang mempunyai hubungan dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional dimana dimungkinkan pemerintah daerah tidak mampu membiayai, dapat dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha maupun melalui pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dari pelaku usaha daerah yang tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Nagan Raya atau di Provinsi Aceh, serta kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah di susun, maka pelaksanaan Perubahan RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 ini menjadi tanggung jawab bersama di antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 yaitu : **“MEWUJUDKAN KABUPATEN NAGAN RAYA YANG SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERLANDASKAN SYARIAT ISLAM”**.

BUPATI NAGAN RAYA,

DTO

H. M. JAMIN IDHAM, SE